
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

GoogleTM books

<https://books.google.com>



UC-NRLF



\$B 779 217

Memperingati

Center for South and Southeast Asian Studies
University of California
Berkeley, California 94720

LIMA TAHUN

DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN

1949 - 1954

RECEIVED
FEB 18 1957
RECEIVED



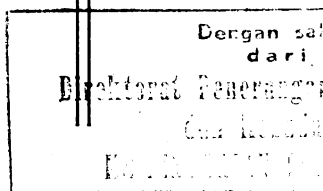
INDONESIA

1. PROPINSI SUMATERA UTARA.
2. PROPINSI SUMATERA TENGAH.
3. PROPINSI SUMATERA SELATAN.
4. PROPINSI DJAWA BARAT.
5. PROPINSI DJAWA TENGAH.
6. DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.
7. PROPINSI DJAWA TIMUR.
8. PROPINSI KALIMANTAN.
9. PROPINSI SULAWESI.
10. PROPINSI NUSA TENGGARA.
11. PROPINSI MALUKU.
12. DAERAH KOTA PRADJA DJAKARTA RAJA.

**DJAWATAN PENDIDIKAN MASJAJ
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENG
DAN KEBUDAJAAN**

1949 - 1954

LC94
I5A5
1954



Edisi istimewa madjalah SUARA PENDIDIKAN

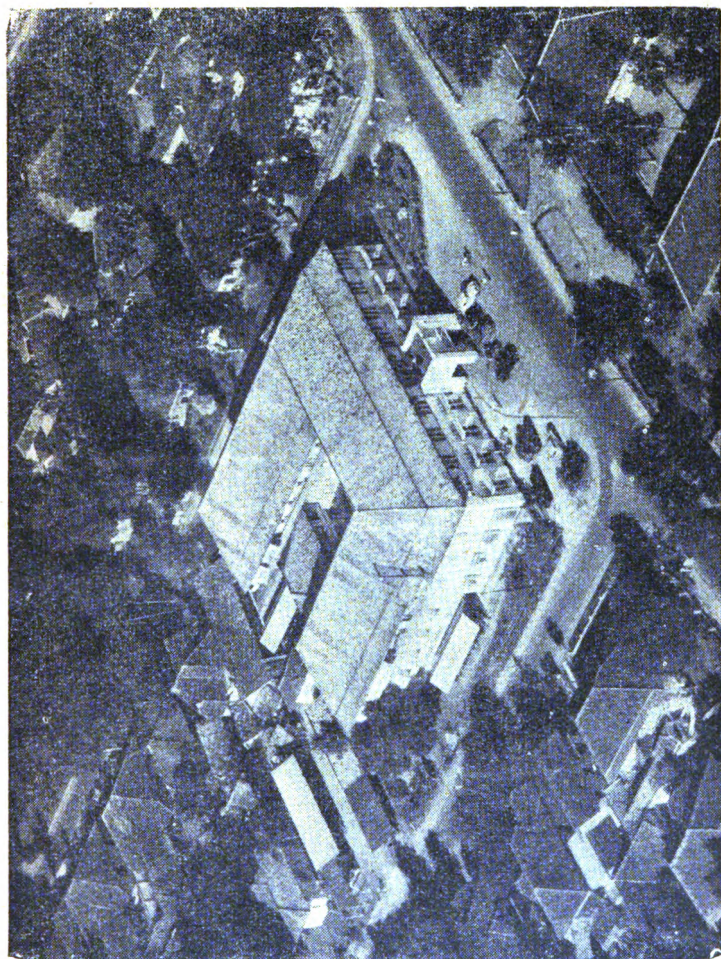
Tjikini Raya 75

**Diterbitkan oleh: Bahagian Penerangan Djawatan Pendidikan Masjarakat
Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.**

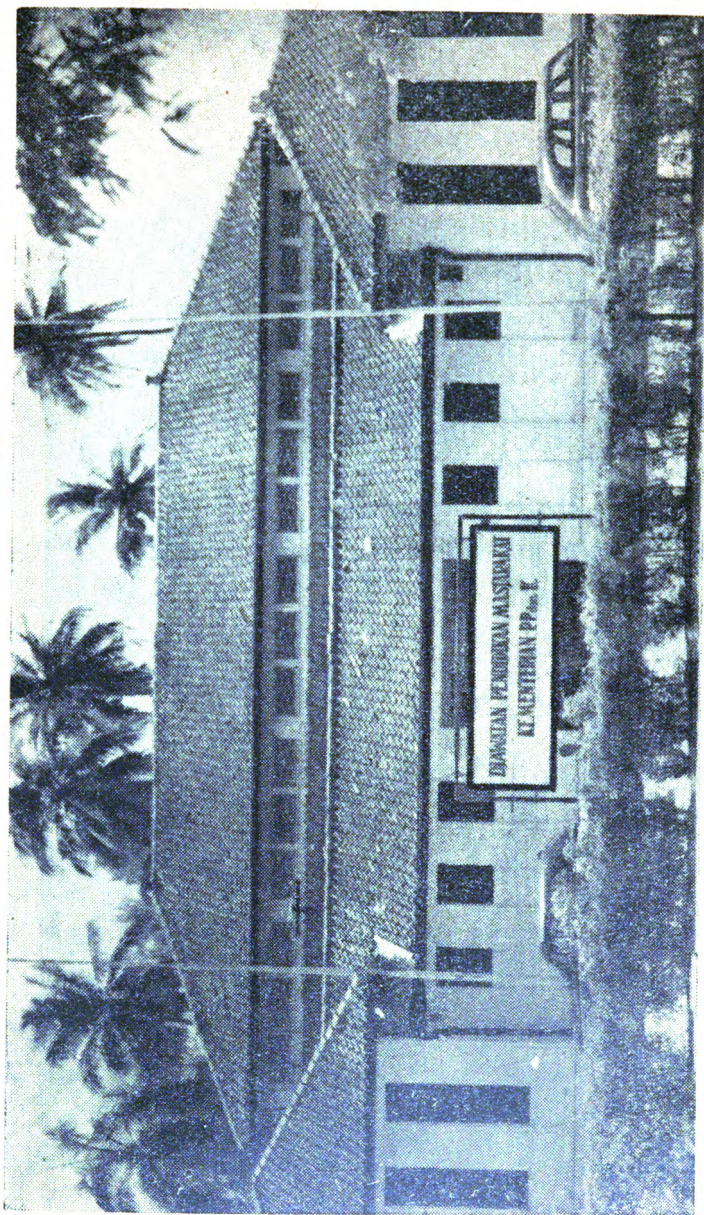
R e d a k s i : Wisbar Aldar.

Pengantar redaksi
Mengenang untuk meladju
Memberi bekal rohani dan djasmani masjarakat
S.p. Menteri P.-P. dan K. No. 423/A, tg. 24 Nop. 1949
SUMATERA UTARA
SUMATERA TENGAH
SUMATERA SELATAN
DJAWA BARAT
DJAWA TENGAH
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
KALIMANTAN
SULAWESI
NUSATENGGA
MALUKU
DJAKARTA RAYA
Peristiwa bergambar
Penerbitan jang merumuskan dan mendjelaskan usaha Pendid	
Masjarakat di Indonesia

K. No. 427/A, tg. 24-11-'49	194
K. No. 428/A, tg. 24-11-'49	196
K. No. 211/A, tg. 12- 1-'50	200
K. No. 8525/A, tg. 14-8-'50	203
Masj. No. 6, tg. 7-1-'50	207
K. No. 26000/Kab. 30-12-'50	209
Masj. No. 461/1771/G/13, 30-12-'50	214
K. No. 1924/Kab, tg. 25-1-'51	219
Masj. No. 10307/Sek/19/52' tg. 13-12-'52	221
Masj. No. 10435/Sek/18/52, tg. 16-12-'52	223
K. No. 7870/Kab., tg. 5-3-'53	225
K. No. 17907/Kab., tg. 29-3-'54	229
K. No. 120/A, tg. 3-9-'49	235
K. No. 424/A, tg. 24-11-'49	239
Masj. tgl. 7-1-'50	241



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN
Djl. Tjilatjap 4 — Djakarta.



DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT
Tjikini Raya 75 — Djakarta.

Risalah ini diterbitkan dengan maksud mengisi peringatan sengadja tidak berupa artikel-artikel jang dikarang oleh orang-s merupakan suatu „hasil” pengalaman pedjabat² Daerah selama l. Dalam hal ini — untuk mendjaga keasliannja-kami pun sengadja t komentar atau tafsiran.

Pihak pimpinan Djawatan hanja bertindak mengantarkan sa sekalian apa jang telah disusun oleh rekan³ didaerah dan dita hiasan beberapa potret⁴ dokumentasi usaha dan reproduksi dari b buku², risalah, madjalah, dsbnja jang dipergunakan Djawatan s penggerak dan pembimbing usahanja.

Sambutan dari bapak Sekretaris Djenderal jang kami muat ini adalah sebuah ichtisar dari pidato beliau seketika peringatan Djawatan di Djakarta.

Walaupun tidak khusus diberikan sebagai sambutan pada pener beranggapan bahwa isinja adalah sangat berharga untuk kita ke bagi pedjabat² Pendidikan Masjarakat dan pedjabat² lain dal Kementerian P.P. dan K.

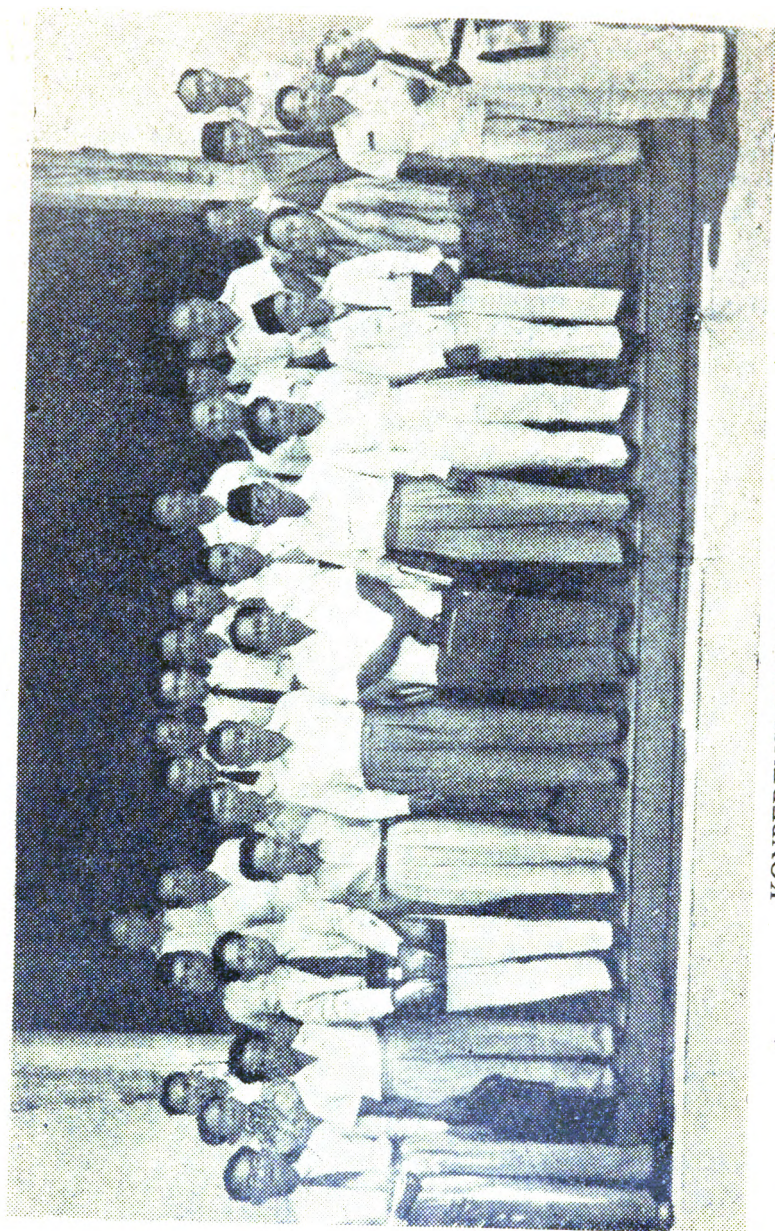
Untuk dapat memberikan bahan² lebih luas pada pembatja, pula beberapa salinan surat⁴ putusan dan peraturan⁴ jang dikel pendasar dan pemberi bentuk bagi segenap usaha pendidikan di Indonesia.

Bahwa dalam sesuatu pekerdjaan djarang sekali terdapat walaupun kesempurnaan jang terbatas, mendjadi kenjataan pula penerbitan ini. Disamping pengharapan kami jang kurang dipenu jang kami inginkan ialah ichtisar dari seluruh usaha, adalah dis tak dapat memuat „ichtisar” dari Daerah VII (Propinsi Djawa Tim sampai risalah ini selesai dizet, kami tak menerima apa jang di-na

Moga-moga sadja pada kesempatan lain penerbitan ini akan kesempurnaan berkat bantuan bersama.

Achirnja kami harapkan, „bermanfaatlah hendaknja risalah in dokumentasi Pendidikan Masjarakat dihari kemudian.”.

Achir 1954.



KONPERENSI DINAS TAHUN 1951
di Pegangsaan Timur 56.

MENGENANG UNTUK MELADJU.

Rangkaian peringatan „Ulang Lima Tahun” Djawatan Pendidikan Masyarakat telah selesai. Ada yang melakukan dalam lingkungan keluarga Djawatan, ada yang dengan resepsi dihadiri oleh instansi¹ dan Organisasi, ada pula yang inisiatif peringatan dioper sepenuhnya oleh masyarakat, sampai² setiap desa mengadakan peringatan sendiri². Dibeberapa tempat tak dilupakan pula adanya udjian serentak perlombaan membatja atau penjelenggaraan P.B.H. massaal dsb. Kesemuanya menggambarkan kekuatan lahir dan bathin dari pada Djawatan yang telah menjalur melalui keluarga Djawatan seluruhnja.

Disamping mengenang, meninjau-kembali, menelaah dan meneliti, sudah barang tentu maksud setiap peringatan itu adalah untuk mengambil kesimpulan guna tumpuan untuk melangkah terus. Yang diharapkan lebih pesat dari pada yang sudah, berkat pengalaman² baik yang enak maupun yang pahit.

Untuk keperluan ini tidak ada bahan yang lebih baik dari pada mempelajari apa yang telah diusahakan dan ditjapai oleh setiap inspeksi pendidikan masyarakat dalam daerahnja masing². Sengadja sumbangan² dari daerah seluruh Indonesia itu dikumpulkan dalam bentuk aselinja. Bentuk, isi dan irama susunannja adalah aseli dan dengan sendirinja memuat djiwa para pelopor usaha pendidikan masyarakat dalam daerahnja masing².

Pimpinan Djawatan tidak hendak menambahkan sesuatu Pengalaman² kedua-belas propinsi itulah merupakan „guru-besar” kita semua. Dengan menjalani kesulitan setiap daerah dan menilai hasil² yang sudah dapat ditjapai hendaknja timbul koreksi terhadap diri kita sendiri, agar dapat mengabdikan diri kepada kemandjauan masyarakat disekitar kita.

Tidak ada kebanggaan dan tidak pula ada penjesalan, djika kita bermaksud madju terus. Seorang musafir selalu akan mengatakan : „Kami sedang berada disuatu tempat” dan berdjalan terus. Pengalaman yang terkumpul, daja menghitung dan menimbang yang makin tadjam akan terdengar dalam langkah sepatu yang dihempaskan. Makin kuat - makin tegas - makin teratur !

a/n Pimpinan Djawatan Pendidikan Masyarakat.

TARTIB PRAWIRODIHARDJO

Tugas Djawatan ;

„MEMBERI BEKAL ROCHANI DAN DJASMANI MASJARAKAT”

Sambutan M. Hutasoit, Sekdjen P.P. dan K.

DALAM lima tahun usia daripada Djawatan Pendidikan Masjarakat ini boleh dikatakan kita mengalami hal-hal yang pahit dan hal-hal yang mengembirakan. Saja ingat djuga pada pertemuan ini, pada teman² kita yang didaerah, yang di-kabupaten³, yang sering mengalami kesulitan¹ lebih daripada kita. Tetapi dalam lima tahun perdjalan Djawatan Pendidikan Masjarakat, saja pikir dan saja harap bahwa didalam tiap hati sanubari anggota Djawatan Pendidikan Masjarakat ini tetap menjala, supaja kita bekerdja terus, mengangkat deradjat dari bangsa kita pada tingkatan yang lebih tinggi.

Pekerdjaan DJAWATAN Pendidikan Masjarakat yang pada garis besarnya dilakukan diluar dinding sekolah, bergerak dilapangan masjarakat yang dewasa dan kita mengetahui bagaimana sulitnja menggerakkan masjarakat ini supaja pertama-tama mengingini, berhasrat mentjapai tingkatan hidup yang lebih tinggi. Tentu tingkatan hidup yang lebih tinggi ini bersifat materil dan moril, atau lebih tegas lagi, djasmani dan rohani. Dan saja rasa saudara⁴ sependapat dengan saja, bahwa bekal rohani lebih utama daripada bekal djasmani. Djadi kalau kita selalu menitikberatkan usaha kita pada Djawatan Pendidikan Masjarakat ini, kepada memberi perbekalan rohani kepada masjarakat yang ramai agar dapat mentjapai perbekalan djasmani, saja rasa djalan yang kita ikuti ini adalah tepat.

Setelah kita lima tahun berdjalan, biasanja kita mengodakan suatu penutupan buku, menutup balans kita. Dalam limatahun seperti saja katakan tadi, saudara² mengalami banjak kegembiraan, tetapi djuga saja rasa dan saja yakin boleh saja katakan banjak kepahitan. Apa sebab saja katakan banjak kepahitan? Usaha Djawatan Pendidikan Masjarakat dibumi Indonesia ini adalah sangat baru, tidak dikenal oleh masjarakat umumnja. Sehingga terpaksa Djawatan ini yang didjaman kolonial, yang didjaman Djepang tidak ada, dan yang didjaman R.I. mulai terbentuk sebagai tunas yang sangat muda, harus didjalankan dengan segala ichtiar agar diterima oleh masjarakat. Tidak kurang banjaknja tjemoohan, tidak kurang banjaknja kritik kepada Djawatan ini, kadang³ dianggap tidak perlu, kadang² dianggap meluaskan sajapnja terlalu luas, tetapi walaupun kritik itu datang, saja rasa dengan dikenalnja Djawatan ini sampai ke-pelosok¹, dengan dikenalnja panitia P.B.H. sampai ke-desa², saja pikir ini satu bukti bagi kita bahwa Djawatan Pendidikan Masjarakat ini lambat laun sudah mendapat tempat dalam masjarakat ramai. Tentu belum tertjapai keinginan saudara², djauh daripada itu. Pernah saja mengatakan kepada beberapa teman dari Djawatan Pendidikan Masjarakat sebenurnja yang kita mulai sekarang, dititikberatkan pada Pembanterasan Buta Huruf. Belum lagi dia mentjapai usaha seperti lajaknja dalam masjarakat yang sudah lama merdeka, yang sudah dewasa. Tentu titikberat pekerdjaan kita lambat laun akan beralih kepada usaha yang biasanja dikerdjakan, misalnja seperti sekarang dikerdjakan di Ingeris, di Perantjis, dalam negara yang sudah ber-abad² mengenal pengetahuan diseluruh lapisan masjarakat. Saja katakan inilah yang pahitnja didalam lima tahun ini, yang terlebih-lebih dialami oleh pimpinannja. Meletakkan nilai dan dasar dari Djawatan Pendidikan Masjarakat ini yang dianggap baru sama sekali dikalangan masjarakat; tidak sadja dikalangan masjarakat.

dikalangan pemerintah, dikalangan parlemen, malahan dikalangan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan sendiri. Saja katakan usaha ini telah berhasil, tetapi belum lagi seperti saudara¹ ingini.

Terlebih-lebih soal ini disebabkan karena keuangan. karena kepegawaian kurang lengkap, tidak ada yang sudah dididik dalam hal ini, sehingga sebenarnya dalam segala hal, Djawatan ini memulai dengan satu pokok yang boleh dikatakan nol.

Saudara² mengalami kegembiraan dalam pekerjaan, saja pikir ini tepat. sebab dalam hal ini tertuju pikiran saja kepada usaha¹ saudara¹ yang sudah terlaksana dalam lima tahun, yaitu sejumlah orang yang sudah pandai membuat. Sela'u saja gambarkan soal ini dimana-mana, terlebih-lebih didjaman permulaan revolusi.

Membuat dan menulis adalah buat tiap-tiap warga negara sebenarnya satu jembatan. Kalau dikatakan sering dipakai „djembatan emas“, djustru disinilah saja berani memakai: warga negara yang buta huruf dikalau menjadi melék huruf, saja pikir pada beliau ini dikasi satu „djembatan emas“ kepada dunia yang lain. Ini kurang dirasakan oleh kita, karena kita djustru tidak memerlukan. Tetapi kalau mereka ini di-interview artinja warga negara yang selama ini buta huruf sekarang bisa membuat dan dapat memasuki satu dunia yang selama ini gelap bagi dia, maka saja pikir, bahwa kita memberikan kepada dia satu kebahagiaan hidup yang saudara¹ tidak bisa merasainja. Kebahagiaan hidup yang membuka seribu-satu kemungkinan bagi yang berkepentingan, yang tidak dapat saudara² artikan besarnja, yang hanya dapat diartikan oleh mereka.

Usaha kita dalam lapangan pembanterasan buta huruf belum berhasil sebagai kita ingini, sebabnja tidak usah kita uraikan disini. Tetapi Taman Perpustakaan Rakyat kita, kursus¹ kita yang rendah, yang djustru diundjukan kepada chatajak ramai, saja pikir buat Djawatan Pendidikan Masyarakat, ini harus dirasakan sebagai hasil daripada pekerjaan kita yang di Pusat dan yang di Daerah itu maka dari permulaan saja katakan tadi waktu kita berkumpul disini, harus kita kenangkan teman¹ kita yang sampai tersebar di-ketjamatan², kewedanaan², dan kabupaten². Sebab hanya dengan team-work antara Djawatan Pusat dengan tjabang² kita di-daerah-daerah, maka hasil yang kita peroleh walaupun sedikit, tertjapai.

Iniilah balans yang kita bikin mengenai usaha Djawatan Pendidikan Masyarakat dalam lima tahun, dan tentu kita memasuki lustrum ke-II pada hari ini. Pengharapan saja kepada kita semua lepas dari soal P.G.P. dan semua, untuk tahun ke-5 yang ke-II ini, pengharapan saja kepada kita semua dan disini hampir tidak bisa mengatakan sebagai Sekdjen, tetapi saja bitjara sebagai salah seorang dari saudara², mudah¹an dalam tahun yang akan datang lustrum ke-II nanti, yang meliputi juga lima tahun, masing² kita dari pesuruh sampai pegawai tinggi dalam Djawatan ini mendapat kepuasan bekerja yang lebih besar dari yang sudah-sudah. Itu pengharapan saja.

Dimana-mana saja mengadakan rapat¹, dipropinsi-propinsi dan selalu saja katakan : P.G.P. tidak bisa saja perbaiki, kendaraan tidak bisa saja kasih dengan tjukup, ruangan kantor tidak bisa saja kasih dengan tjukup, tetapi ada satu hal yang bisa saja berikan kepada saudara². Buat saja, bekerja dalam kursi yang diberikan kepada saja sekarang ini adalah kehormatan bagi saja, yang tidak akan dapat saja terima waktu negara ini didjadjah. Ada satu kehormatan bagi saja, ada satu kesempatan bagi saja untuk menolong bangsa saja, inilah tugas saja andjurkan kepada saudara. Anggapilah kedudukan saudara¹ dalam Djawatan ini — dari pesuruh sampai pegawai tinggi — satu kehormatan yang tidak akan saudara terima seandainja negara ini tetap didjadjah. Dan pakailah kehormatan

jang ke-II dari Pendidikan Masjarakat ini kita masuki
jang lebih-lebih dari jang sudah-sudah. Djustru ketabahan
erlu, sebab keuangan makin sempit. Segala-galanja makin
strum jang ke-II ini nanti. kita akan mengalami pertjobaan
h karena itulah. maka saja rasa perlu satu persendjataan
ada persendjataan benda untuk mengatasi semua itu. Inilah
tuk lustrum jang kita masuki; lustrum ke-II daripada
Masjarakat.

Menimbang :

- I. bahwa tugas dan kewadajiban Djawatan Pendidikan Masyarakat² dan tjabang-tjabangnja perlu ditegaskan dan ditet
 - II. bahwa susunannja perlu ditinjau kembali agar dapat bergerak rasional dan efficient,
 - III. bahwa untuk dapat bergerak lebih bebas dan leluasa perlu d
- haknja sebagai Djawatan dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.;

Mengingat ;

- I. Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan No. 57/S, tentang pembatalan putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 26-11-1947 No. 6736/A.
- II. Perundingan² dalam rapat antara Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan Sekretaris Djenderal; Kepala² Badan Organisasi² dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 20-8-1949.

M e m u t u s k a n .

Atas dasar putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan 4-8-1949; No. 57/S, Bab. II/A/I/b, Bab II/A/4, Bab. II/B, tentang Djawatan Bab. II/C/2/b, menetapkan ;

DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

A. Arti, isi dan tugas dasar Pendidikan Masyarakat ;

1. Membangunkan, menjadarkan, menginsjapkan dan mengisi masyarakat dunia-sekolah, agar tiap warga-negara mendjadi anggota masyarakat hidup berguna dan berharga bagi Negara, Nusa, Bangsa dan
 2. Usaha jang terpenting, ialah diantaranya memberantas buta-huru liharahan seterusnya; membuka kursus² Landjutan; membuka ku
- menjiapkan dan membantu berdirinja Perpustakaan Rakjat dan dan tuntunan bagi CPU-PBH., dan landjutan mempertinggi pen dalam lapangan ekonomi dan kenegaraan; mengeluarkan kitab² watan dan Madjallah Rakjat dan lain-lainnja.

B. Batas² hak Djawatan Pendidikan Masyarakat ;

1. Djawatan mempunyai kebebasan penuh memilih, mengangkat, me memindahkan pegawai²nja untuk kepentingan Djawatan, dalam l ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Ke pegawai² golongan IVc kebawah (PGP 1948).
2. Djawatan mempunyai keleluasaan mempergunakan keuangan da tiap tahun telah ditentukan/dan disahkan oleh Kementerian P adjaran dan Kebudayaan.
3. Djawatan membuat peraturan²nja sendiri tentang usaha dan p didjalankan dalam batas² jang dalam garis besarnya telah Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
4. Djawatan dapat berhubungan langsung dengan instansi² l lain²nja atas nama Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan K menunaikan kewadjabannja.

5. Djawatan mempunyai bagian perlengkapan sendiri.

C. *Susunan Djawatan Pendidikan Masyarakat :*

1. Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat mempunyai bagian, yang kalau perlu di-petjah² mëndjadi sectie², ialah :

a) *Bagian Umum*, yang berkewajiban melajani gerak Djawatan dengan tjabang² seluruhnja, baik tentang soal tehnik maupun administratif. Untuk itu, bagian Umum mempunyai sectie Sekretariat, seksi Keuangan, seksi Urusan Pegawai dan seksi Perlengkapan dan Alat-alat.

b) *Bagian Inspeksi*, yang merentjana, membimbing, mengawasi, memberi penerangan, tentang usaha Djawatan yang tehnik. Untuk itu, bagian pengawas (Inspeksi) mempunyai seksi C.P.U. seksi P.B.H. dan seksi Kepanduan.

c) *Bagian Penjelenggara*, yang membuat peraturan² umum dan khusus menjapi-kan tuntunan² bagi guru dan murid, membuat rentjana dan hand²leiding, menjusun organisasi segala usaha Djawatan yang merupakan keperluan tehnik. Untuk itu, bagian penjelenggara mempunyai seksi C.P.U., seksi P.B.H. dan seksi Perpustakaan dan Madjallah.

d) *Bagian Pemuda* (yang diterima dimasukan) dalam Pendidikan Masyarakat sebagai akibat dari Penetapan Pemerintah No. 2, tgl. 17 Djuli 1949 dengan seksi²nja; Luar Negeri, Masyarakat (Kesedjahteraan Pemuda) Penghubung antara Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Organisasi Pemuda dengan dasar paedagogisch-psychologisch dan sosial-constructief.

2. Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat mempunyai Tjabang²nja di-daerah² yang meliputi Daerah² Propinsi, dan Kabupaten.

3. Kantor² tjabang dipimpin oleh Kepala² Djawatan dibantu oleh beberapa orang pegawai tehnik dan administratif, menurut kebutuhan dan didalam batas² formasi yang telah ditentukan oleh Djawatan Pusat.

4. Tjabang² Djawatan Pendidikan Masyarakat berhubungan erat dengan kantor Inspeksi daerah dari Djawatan Inspeksi Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan di Daerah dan Kabupaten.

5. Tentang susunan dan tugas kewadajiban daripada Bagian², seksi² dan Tjabang² di-daerah diatur dalam peraturan² tersendiri.

D. *Pimpinan Djawatan Pendidikan Masyarakat.*

1. Kepala Djawatan memimpin Djawatan seluruhnja dan mewakilinja kedalam dan keluar, dibantu dalam usahanya oleh Kepala² bagian.

2. Dalam waktu Kepala Djawatan tidak ada, maka mereka diwakili oleh seorang diantara 4 Kepala bagian yang tertua atau yang ditundjuknja.

3. Tiap² Kepala Bagian (seksi) Kantor Tjabang, mempunyai tanggung-djawab dan inisiatief sendiri dalam lingkungan kewadibannja masing-masing.

E. *Putusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1949.*

Salinan dari surat putusan ini disampaikan kepada :

1. P.J.M. Presiden.

2. P.J.M. Perdana Menteri.

3. Secretariat Negara.

4. Secretariat Perdana Menteri.

5. Semua Kementerian.

6. Ketua B.P. K.N.I.P.

7. Semua Gubernur.

8. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

9. Inspektur² Sek. (Pusat dan Daerah).

10. Semua Bagian Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

11. Pengurus Besar P.G.R.I.

12. Kantor Urusan Pegawai Negeri.

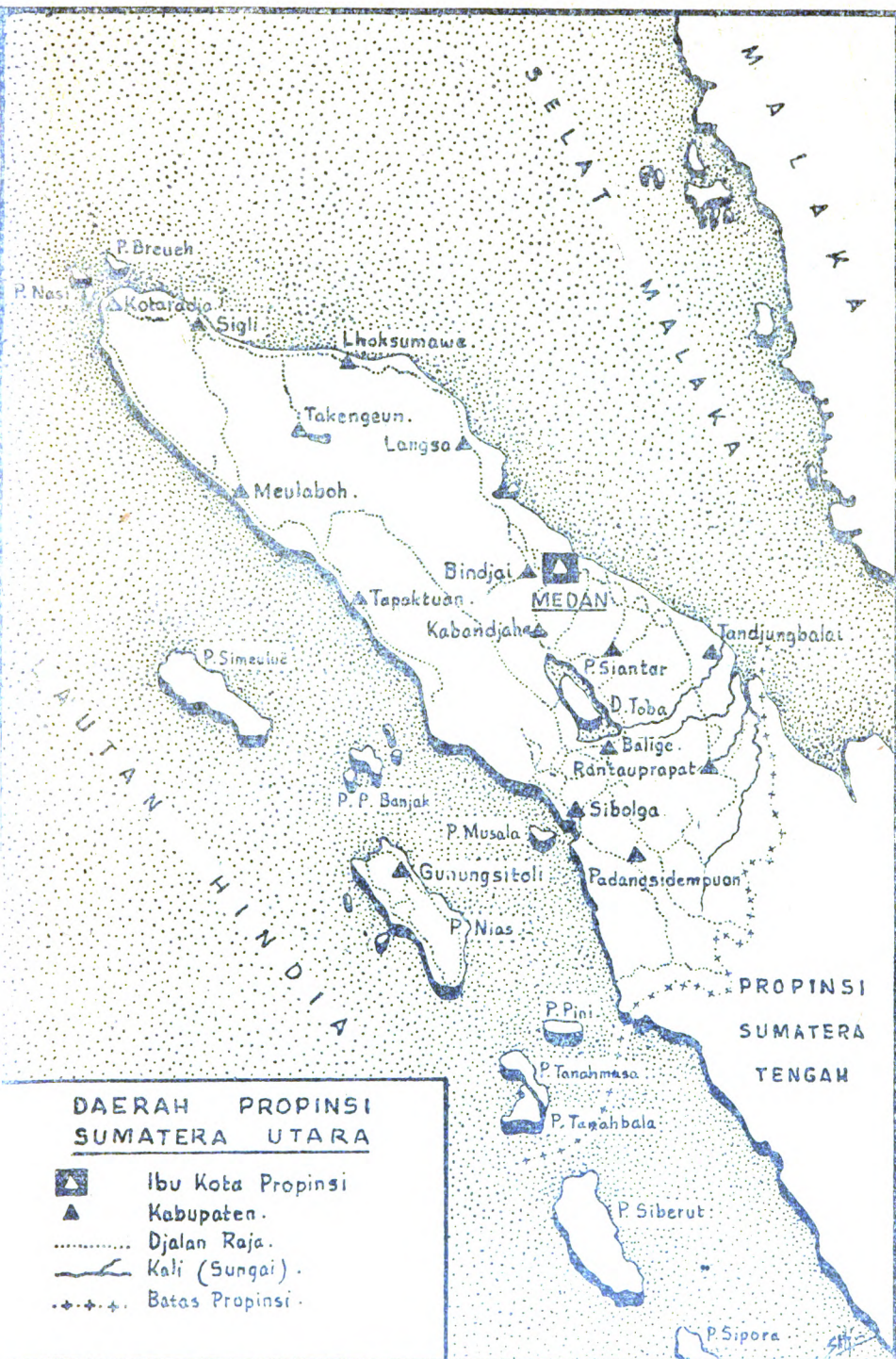
13. Seksi IV B.P. K.N.I.P.

14. Kantor Berita „Antara“.

15. Semua Residen.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
ttd;

(S. MANGUNSARKORO).



SUMATERA UTARA

PEMBANTERASAN BUTA HURUF.



G. SIANIPAR
Kepala
Inspeksi Prop.
Sumatera Utara.

Pada saat Djawatan Pendidikan Masyarakat menempuh usia 5 tahun ini, sudah memang selajaknja kita mengadakan tindjauan kebelakang mengenai usaha sekitar P.B.H. salah satu usaha dari sekian banyak jang dilantjarkan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat khususnja oleh Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah I (Sumatera Utara). Tindjauan ini berarti koreksi, agar dengan demikian langkah dimasa depan lebih tepat dan tegas menuju kepada kesempurnaan.

Pembanterasan buta-huruf ini meskipun telah dimulai djuga menggerakkannja pada permulaan Kemerdekaan, tetapi baru mendapat bentuk jang nyata dan ladanari jang agak memadai, semendjak tahun

1950 sesudah berhentinja penjerbuan Belanda kekampung-kampung, dengan pulihnja kembali Keamanan, serta terbentuknja Djawatan Pendidikan Masyarakat dalam Kementerian P.P. & K.

Gerak P.B.H. ini didasarkan atas otoaktiviteit dan kesatuan Masyarakat menudju lahirnja suatu Masyarakat baru ditanah air kita ini, jang berpendidikan tulis-batja. Pada taraf permulaan aktiviteit ini tidak akan serentak timbul didaerah jang begini luas dengan bentuk Masyarakat jang serba ragam. Dengan demikian maka otoaktiviteit itu harus disodorkan oleh Inspeksi sendiri ke-tengah² Masyarakat itu. Maka fungsi dari Kursus P.B.H. pada permulaannja selain dari pada menanamkan benih pengetahuan berupa tulis-batja, djuga menumbuhkan otoaktiviteit Rakjat itu. Djuga rasa kesatuan jang tidak kurang penting dari otoaktiviteit itu, harus ditempa dibulatkan serta diberi saluran dalam bentuk suatu panitia, lebih² lagi dimana rakjat jang baru sadja bersatu bulat memadu tenaga mengusir pendjadjahan sudah mulai berpetjah oleh karena pengaruh aliran² politik jang sedang subur mendjalar sampai kepelosok-pelosok. Luas ketjilnja daerah panitia ini, jang sekarang meliputi suatu ketjamatan berpengaruh djuga kepada kemadjuan P.B.H. ini.

Kemadjuan suatu usaha dimana sadja sebagian besar bergantung pula kepada ketjakapan tenaga jang menggerakkan dan memimpinja. Tenaga² jang mentjempungkan dirinja kedalam Djawatan Pendidikan Masjarakat ini sebagian besar adalah mereka jang telah lama bergelimang dengan Masjarakat itu, djadi sudah banjak berpengalaman, meskipun harus diakui tidak mendapat pendidikan chususnja mengenai ilmu pendidikan Masjarakat, dengan tidak melupakan, bahwa sebagian besar adalah tenaga, guru, baik dari Sekolah pemerintah kolonial maupun partikulir atau madrasah. Tetapi bagaimanapun ahlinja tenaga, itu ibarat orang bertani jang telah tjukup mengetahui keadaan bibit jang akan disebarkan serta kesuburan tanah jang tjotjok dengan bibit tersebut, seandainya musim kemarau sedang mengamuk maka benih jang ditanam itu tidak akan tumbuh dengan sewadjaranja. Begitu pula pembantasan buta-huruf ini tidak dapat diberatkan sadja hasilnja semata-mata kepada petugas² didaerah atau Kabupaten baikpun Kewedanaan tetapi haruslah pula dihubungkan dengan serba keadaan Masjarakat sekitarnja.

Grafiek P.B.H. selama hampir 5 tahun ini menundjukkan garis jang naik turun ada masa madjunja ada pula masa mundurnja. Pada permulaan pembukaan Kursus² ini, dimana usaha² ini tumbuh laksana tjendawan dimusim hudjan. Tahun 1951 dan 1952 tampak usaha terus meningkat dan mulai tahun 1953 berangsur menurun sampai achir ini. Kemadjuan jang ditjapai tahun 1951 dan 1952 itu kalau kita selidiki agak mendalam banjak hubungannja dengan :

- a. Semangat Kemerdekaan jang masih bergelora mendorong para pengadjar menjumbangkan tenaga untuk membangunkan dan memelihara kursus P.B.H.
- b. Keinginan dari rakjat untuk memiliki pengetahuan dengan kesadaran, bahwa perbaikan hidup hanja dapat ditjapai dengan mempertinggi ketjerdasan dan ilmu pengetahuan, jang berpangkal pada pengetahuan tulis dan batja.
- c. Kegiatan para pemimpin partai² ataupun organisasi jang berusaha meninggikan taraf ketjerdasan para anggotanja, agar dengan demikian organisasinja semakin kuat, karena didukung oleh anggota² jang telah tjerdas.
- d. Kegiatan kepala² desa mengerahkan penduduk kampungnja mengikuti peladjaran pada kursus P.B.H.
- e. Suburnja lapangan jang dihadapi, berhubungan dengan banjknja djumlah buta-huruf jang diwariskan oleh pemerintah pendjadjah-an, hingga ditiaptiap desa ada sadja pengikut.
- f. Honorarium Rp. 50 sebulan jang masih lumajan dirasakan pada waktu itu lebih² didesa-desa.

Dalam tahun 1953 telah dimulai dengan persiapan melantjarkan P.B.H. masaal dengan bantuan jang tjukup dari Pamongpradja semen-djak dari Bupati sampai kepada Kepala Desa. Kepala Desa diundjuk

sebagai kepala rayon Pelaksanaannya baru dimulai tahun 1954 ini, jadi baru berjalan 2 triwulan. Hasilnya tidak begitu memuaskan, dengan kenyataan jumlah kursus² P.B.H. tingkat I, yang ditumbuhkan dalam tahun ini sebagai penampungan dari para pengikut P.B.H. masa, tidak sebanjak P.B.H. tahun 1953, P.B.H. masa yang tidak berklas pendahuluan dari suatu Kursus, yang dapat disalurkan ke kursus bentuk klas itu sulit untuk dikontrol, hanya yang berbentuk sebagai P.B.H. tingkat I. Meskipun buku² peladjaan untuk P.B.H. masa Mari Serentak Membatja telah disebarkan di Kampung² tetapi ditempat-tempat dimana beladjar hanya setjara bebas, hasilnya tidak njata. Beladjar setjara bebas ini tidak begitu mendapat perhatian dari para buta-huruf.

Tahun 1953 dan tahun 1954 yang sedang berjalan ini merupakan tahun kemunduran dalam P.B.H. terutama di daerah Atjeh dengan terganggunja keamanan sampai sekarang, usaha terhenti sama sekali, sedangkan djusteru daerah itu pulalah yang masih hebat buta-hurufnja. Umumnja yang membawa akibat kemunduran pada ahir ini adalah :

- a. timbul perasaan djemu dikalangan Umum, yang tidak mendapat perobahan nasib semendjak lahirnja kemerdekaan ini.
- b. lapisan yang sadar sebagian besar sudah bebas dari buta-huruf hingga yang tinggal lagi adalah lapisan yang „keras” yang djauh terpentjil di-gunung² ataupun yang sulit perhubungannja.
- c. pemeliharaan usaha yang telah meluas itu memerlukan tidak hanya sadja hubungan yang baik dengan berbagai instansi tetapi djuga membutuhkan pandangan yang luas dan agak mendalam dari para pegawai technis mengenai djiwa dan isi² usaha itu.
- d. Mutu guru² P.B.H. yang kurang terpelihara tidak sedikit mengakibatkan lambatnja kursus² itu dapat diachiri. Pimpinan kursus P.B.H. yang pada tahun 1951 dan 1952 masih banjak dalam tangan kuru² S.R. pada ahir ini terpaksa diserahkan, kepada mereka yang lulusan klas 5 S.R. ataupun lulusan kursus² P.B.H. lan-djutan, ang sudah tentu keahliannya kurang.
- e. Latihan guru² P.B.H. yang hanya dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat pendek, berhubung tidak mentjukupinja perongkosannya.
- f. Sjarat kursus yang menentukan minimum djumlah murid dengan honorarium yang sudah sangat djauh rendah nilainya dari tahun² permulaan. Pada permulaan honorarium Rp. 50, dengan nilai uang yang tjukup tinggi dan sekarang dengan honorarium Rp. 25, dengan nilai rupiah yang sudah djauh merosot.
- g. Penghargaan yang masih kurang dirasakan oleh pamong desa dari pihak pemerintah, sedangkan kemadjuan usaha P.B.H. didesa-desa tergantung sebagian besar atas keaktipan mereka.
- h. Kurangnya tuntutan berupa buku² bagi guru² P.B.H. sehingga peladjaran tidak „hidup” diterima oleh para muridnja.

MARI SERENTAK MEMBATJA!



DASAR MEMBATJA

OLEH

DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT
KEMENTERIAN P. P. dan K.

2



a - jam

a



é - kor

é



i - kan

i



o - tak

o



u - lar

u



e - lang

e

se - pa - tu

sa pa ta

se pé té

si pi ti

so po to

su pu tu

se pe te

sa - pi

si - ti

so - to

su - su

a	é	i	o	u	e
é	i	o	u	e	a
i	o	u	e	a	é
o	u	e	a	é	i
u	e	a	é	i	o

a é i o u e
é i o u e a
i o u e a é
o u e a é i
u e a e i o

Rentjana 10 tahun jang djadi pegangan buat kita telah berdjalan hampir 4 tahun menegok procentase buta-huruf serta membandingkannya dengan hasil jang ditjapai, tidak dapat kita merasa puas, lebih² lagi kalau kita bertanja kebahagiaan apakah baru jang telah dimiliki oleh mereka jang telah terberantas buta-hurufnja apakah ekonominja dengan itu sudah bertambah kuat. Setelah kita mengetahui sebab² jang mengakibatkan kemunduran jang kita alami achir² ini, maka seharusnya pulalah kita memusatkan perhatian kedjurusan perbaikan untuk masa depan.

- a. Mendjadikan kursus P.B.H. tempat pertemuan jang hidup bagi pengikutnja tidak sadja memberikan peladjaran tulis-batja, djuga memperhatikan keradjinan atau kesenain daerah.
- b. memusatkan gerak pada tempat, jang masih rapat buta-hurufnja, dimana animo ada banjak.
- c. membawa ikut serta para pamong desa bertanggung djawab dalam pembanterasan buta-huruf dikampungnja masing-masing.
- d. Mengadakan latihan guru P.B.H. dalam setiap ressort sekali 6 bulan lamanja paling kurang 10 hari dengan perongkosan jang selajaknja.
- f. Mentjukupkan buku tuntunan bagi guru² P.B.H. jang djadi pedoman untuknja dalam mengadjar.
- e. Mengadakan tes dikalangan lepasan P.B.H. itu, apakah pengetahuan tulis batja itu masih ada dimiliki mereka sekian lama meninggalkan kursus.

P e m e l i h a r a a n n j a .

Kepandaian tulis-batja jang telah dimiliki, membutuhkan pula pemeliharaan. Kalau ini diabaikan, maka usaha P.B.H. ini akan merupakan menghastai kain sarung, jang tak akan berkesudahan, maka kursus P.B.H. landjutan selain merupakan sambungan dari kursus tingkat I, djuga mempunjai arti sebagai pemeliharaan. Karena itu amat disayangkan P.B.H. landjutan ini tidak mendapat pembiajaan sedikit djuga. Djumlah T.P.P. belum lagi sebanding dengan banjaknja kursus. Ini menunjukkan keinginan membatja dari bekas buta-huruf itu belum lagi njata. Apalagi kalau kita perhatikan bahwa sebagian besar jang membatja buku² T.P.P. itu terdidi dari anak² Sekolah. Banjak daerah² jang mmepergunakan bahasa sehari² bukan bahasa Indonesia sehingga para lulusan buta-huruf pun masih belum dapat diharapkan mengerti sesungguhnya akan bahasa Indonesia, sedangkan buku² jang baru dapat kita sediakan dalam T.P.P. itu semata-mata berbahasa Indonesia. Buku² bahasa Daerah akan sangat berfaedah disediakan dalam T.P.P. itu. Pama-Pami jang di Djawa mungkin ada hasilnja, di Sumatera Utara ini tidak merupakan harapan. Sebaiknja Masyarakat sekampung mem-

- d. Menjampaikan sesuatu maksud ataupun pengaduan kampung dengan surat.

K.K.O.D. kursus tertinggi dalam rangkaian usaha buta-huruf belum lagi merupakan usaha yang nyata. Masih tingkat pertjobaan. Sambutan dari Masyarakat dengan kesungguhan dapat juga beberapa kursus P.B.H. djelmakan menjadi K.K.O.D. Usaha-usaha yang diprakarsai K.K.O.D. itu ada yang berupa :

- a. Pertukangan kayu, membikin kursi medja.
- b. Pemeliharaan ikan, kebanjakan ikan mudjahir.
- c. Pertanian, seperti sajian dan nilam.
- d. Kerajinan tangan seperti menganjam tikar dan suam, membikin periuk dari tanah.

Kekurangan tenaga ahli yang diperlukan untuk K.K.O.D. ini sangat dirasakan. Selain dari itu factor yang menghambat K.K.O.D. ini merupakan kerdja sama jalinan instansi lain dan organisasi yang bergerak dalam lapangan ini.

Sebagai melengkapi laporan ini disertakan statistik pertumbuhan serta perkembangan rangkaian usaha ini sejak 1951 hingga sekarang.

Demikianlah laporan ini diperbuat berdasarkan bahan yang dikumpulkan dari Kabupaten sekadar tinjauan, guna sebagai pegangan dalam menentukan langkah ke depan.

KURSUS PENGETAHUAN UMUM.

Pembukaan K. P. U. tahun 1950.

Setelah pembukaan Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara di Sibolga, segera mulai dijalankan usaha untuk menjarkan dan memperkenalkan tugas² Inspeksi Pendidikan kepada masyarakat. Pada tanggal 1 Agustus 1950 dibuka untuk pertama di Sibolga dengan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat ; ber-angsur² menurut pembukaan di-kabupaten² lain di Sumatera Timur.

Pada achir tahun 1951 djumlah ini untuk Sumatera Utara telah mentjapai angka 25 KPU/A dan 1 KPU/B. Djumlah ini meningkat lagi pada tahun 1952 mendjadi 49 KPU/B dan 1 KPU/B.

Dalam tahun 1953 Inspeksi Pendidikan Masjarakat Sumatera Utara dapat membentuk 60 KPU/A, 3 KPU/B dan 1 KPU/C untuk daerahnya, sesuai dengan quotum yang telah ditentukan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat Pusat ; begitu djuga untuk tahun 1954 quotum 75 KPU/A + 8 KPU/B + 1 KPU/C seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Inspeksi Pendidikan Masjarakat Sumatera Utara.

Perhatian Masjarakat.

Semendjak dibukanya KPU/A pertama, masjarakat menundjukkan perhatiannya terhadap usaha ini. Perhatian ini pada mulanya mungkin berdasarkan daya penarik yang ada pada tiap barang yang baru belum dikenal dan kedua mungkin djuga untuk memenuhi kehausan masjarakat akan ilmu pengetahuan yang telah ter-tahan² selama beberapa tahun.

Oleh karena pada tahun 1950 s/d 1951 segala sesuatunya diper-timbangkan kepada manfaatnya yang dapat membawa keuntungan materi, KPU/A ini pada mulanya tidak memberi kepuasan kepada pelajar-poladjar, yang mengharapkan dengan tammatnya dari KPU/A akan menerima suatu perbaikan nasib, yang diukur dengan materi.

Soal „civiel effect” mendjadi soal yang hangat sehingga dalam tahun 1951 tidak sedikit permintaan dimajukan kepada Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah I, agar idjazah KPU itu mendapat penghargaan dan pengakuan persamaannya dengan salah satu idjazah yang mempunjai „civiel-effect”.

Sehubungan dengan ini djuga maka beberapa KPU harus ditutup pada pertengahan kursus, karena tidak mendapat perhatian lagi yang memuaskan.

Intensivering KPU.

Tahun 1950 dan 1951 ditudjukan kepada pengluasan usaha dan memperkenalkan tudjuan dan maksud KPU/A ini kepada masjarakat Sumatera Utara.

Dengan banjak mengadakan perkundjungan² kepada KPU dan memberikan penerangan² tentang maksud dan tudjuannya, achirnya timbul pengertian yang baik sehingga suara² menuntut „civiel effect” bertambah kurang. Sesuai dengan itu djuga, pada penerimaan murid² dalam tahun 1952 mulai dilakukan penjaringan dengan mengambil dasar, bahwa yang diutamakan adalah tjalon-tjalon kader masjarakat, seperti pamong² desa dan pemimpin² desa dan menekankan kepada masjarakat, bahwa KPU bukanlah tempat penampungan murid² yang tidak mendapat tempat pada sekolah landjutan.

Begitu juga pelaksanaan pengadjaran menjadi perhatian. Selangkah demi selangkah, sistem mengajar ini berubah berkat „modelles” yang diberikan dan berkat rapat² dengan Dewan Guru.

Peladjaran yang dahulu diberikan sangat passief sekarang diarahkan kepada membangun aktiviteit murid sehingga ia tidak menjadi object saja tetapi juga subject yang harus mempunyai daya berpikir dan berbuat. Andjuran kepada guru² untuk membangkitkan rasa ke-masyarakatan dan mengadakan „research” yang sederhana dalam lingkungan kampung, mendekatkan siswa kepada tudjuan KPU, dan menambah kesadaran dan keinsjafannya bahwa apa yang ditudju KPU bukanlah „civil effect”, tetapi pembentukan kader². Siswa² diajar dan diajak mengenal masyarakat lingkungannya, dibawah pimpinan guru².

Sebagai hasil dari usaha² ini, dibeberapa tempat tampak usaha² kreatif dari siswa² seperti membangun koperasi² ketjil, pertukangan serikat gotong-rojong d.l.l. Walaupun usaha² itu masih sangat sederhana tetapi bagi kita suatu hal yang menggembirakan. Karena dengan tjontoh ini nyata bahwa masyarakat mulai memahami arti KPU ini, dan mulai dapat meletakkan nilai yang tepat pada KPU.

Nyata juga ini pada permulaan tahun 1953. Permintaan akan pembukaan KPU membandjir, sehingga melebihi quatum yang telah ditetapkan dan tidak dapat dipenuhi segala permintaan itu.

Alat-alat peladjaran.

Buku² peladjaran dari tahun ketahun juga bertambah lengkap, suatu hal yang juga menudju kepada kesempurnaan KPU. Buku² kontrapost diterima dengan gembira oleh murid², dan merupakan suatu pegangan bagi mereka. Tetapi sayang, bagi para guru tidak tersedia handleidingen yang agak lengkap sehingga melengkapi sesuatu mata-peladjaran sangat tergantung kepada kegiatan dan minat guru. Hal ini terasa benar oleh guru² yang diam djauh dari kota dan tidak mempunyai buku² yang tjukup yang dapat dijadikan bahan² untuk menjempurnakan peladjarannya.

Disamping buku pegangan bagi murid dan handleidingen bagi para pengadjar, harus juga diadakan suatu perpustakaan bagi para murid. Selain dari pada sifat perpustakaan sebagai sumber untuk menambah pengetahuan murid, perpustakaan juga akan mendidik murid, beladjar dengan aktiviteit sendiri.

Kekurangan² akan alat peladjaran inilah merupakan suatu handicap utama untuk memperoleh hasil yang baik.

Tenaga pengadjar.

Kalau pada mulanja (1950-1951) tenaga² pengadjar banjak diambil dari dunia sekolah, pada tahun berikutnya pengadjar² ini kebanyakan terdiri dari mereka yang oleh karena kedudukannya dalam djawatannya mempunyai keahlian dan pengalaman dalam vaknja masing². Dengan



Rapat Dewan Guru K.P.U./C di Djakarta.

begini dapat kita lebih mendekatkan lagi KPU kepada tudjuannja. Tetapi masih djuga banjak terasa kekurangan² dari pada pengadjar, jang tidak mempunyai pengalaman methodiek mengadjar. Dan para pengadjar belum semuanya mempunyai pengertian jang tepat tentang tudjuan KPU, sehingga tidak dapat menuang pengadjarannja dalam bentuk jang diinginkan. Walaupun demikian, tenaga² para pengadjar ini haruslah kita hargakan sebaik²nja mengingat kepada honorarium jang mereka terima, dan jang hampir umum tidak dibayar pada waktunja.

Vak praktis.

Pada tahun 1953 sebagai pertjobaan diadakan matapelajaran vakpraktis pada beberapa KPU jang pada tahun 1954 dijadikan vak wadajib pada seluruh KPU. Dalam idee vakpraktis ini terkandung maksud supaja vakpraktis dijadikan center untuk keseluruhan matapelajaran KPU dan dengan begini tertjipta kesatuan seluruh mata pelajaran jang harmonis. Tetapi kenjataan atjapkali menundjukkan bahwa pelaksanaan tidak sebagaimana jang dimaksud karena hubungan antara pengadjar terlalu renggang. Sehubungan dengan ini dari fihak Inspeksi Pendidikan Masyarakat selalu diberi andjuran agar Dewan Guru setiap bulan hendaknja mengadakan sidang untuk dapat mentjiptakan hubungan jang harmonis itu. Kekurangan waktu dan kesempatan pihak guru menjebakkan andjuran ini tidak terlaksana, sehingga vak praktis pada masa ini belum merupakan vak center.

Vakpraktis sebagai pembangun usaha creatief sesuai dengan keadaan ekonomi dan geografi sesuatu tempat pada umumnya telah dilaksanakan. Dalam hal memilih usaha apa jang akan dibangun oleh vakpraktis terkadang terdapat pertentangan pendapat antara keinginan para siswa dan kepentingan sesetempat, ditindjau dari segi manfaatnja untuk pembangunan masyarakat pada tempat itu.

Stootkapitaal Rp. 325.— ternjata untuk beberapa usaha kekurangan. Pada pendapat kami, stootkapitaal untuk berbagai djenis vakpraktis ini tidak dapat disamakan. Penetapan djumlah stootkapitaal ini haruslah bergantung kepada usaha jang hendak dibangun.

Nilai KPU dalam masyarakat.

Bagaimanakah nilai tammatan KPU/A ini di-tengah² masyarakat Indonesia, belum dapat kita tentukan karena waktu masih terlalu singkat untuk dapat meletakkan penghargaan jang tepat. Hal ini menghendaki suatu penjelidikan jang teliti mengenai siswa² jang telah tammat. Walaupun beberapa hasil jang njata telah dapat dikemukakan seperti pembangunan usaha² koperasi, serikat² dan lain² hal ini belumlah begitu umum, hingga dapat menjadi pegangan untuk menentukan nilai KPU.

Dimana sebagian peladjar² KPU ini terdiri dari ketua² desa, dapat kita melihat suatu perbaikan kearah tjara berpikir pamong desa yang dalam KPU ini telah membiasakan diri beserta dengan siswa² lain memersoalkan masaalah desa.

Mengenai KPU/B belum dapat kita melihat usaha konstruktif jang timbul dari kalangan bekas siswa KPU/B sehingga sampai pada dewasa ini masih disangsikan apakah KPU/B dalam bentuk jang sekarang dapat memberi isi kepada siswa² sebagai tjalon kader masjarakat. Pengundjung² KPU/B kebanyakan terdiri dari pegawai² negeri ; mungkin hal ini djuga menyebabkan tidak begitu terlihatnja daja pendorong jang harus ditimbulkan oleh KPU/B.

Berlainan dengan KPU/B, KPU/C di Medan semendjak dibukanya mendapat perhatian jang sangat memuaskan sehingga dapat diachiri dengan baik. Perbedaan ini disebabkan oleh mutu siswa² KPU/B dan C berlainan. Banjak diantara siswa² KPU/B apalagi jang diibu kota Kabupaten, mengikuti KPU/B semata-mata hanya karena dorongan menambah pengetahuannja supaja djangan ketinggalan dari teman-teman jang lain. Tetapi pada KPU/C sebagian besar siswa-siswanja terdiri dari mereka jang sudah merasa akan manfaatnja pengetahuan dan sudah merasa nikmat dan lezatnja beladjar. Hal ini dapat mereka buktikan dengan pembukaan Volksuniversiteit di Medan, jang dapat dibanggakan sebagai suatu usaha jang tumbuhnja dari bekas² siswa KPU/C. Djiwa konstruktif dan kreatif jang ditumbuhkan selama setahun oleh KPU/C mendapat salurannja dalam pembentukan Volksuniversiteit.

K e s i m p u l a n .

KPU/A : Dari tahun ke tahun menudju kepada perbaikannja dengan memperdalam pengertian tentang maksud dan tudjuannja, mempertinggi mutu peladjaran sehingga dapat disesuaikan benar dengan fungsi KPU/A ditengah-tengah masjarakat.

KPU/B : Masih disangsikan apakah KPU/B ini dapat memenuhi fungsinja karena pengertian dan mutu siswa² jang kurang.

KPU/C : Telah membuktikan kepentingannja ditengah-tengah masjarakat Kotabesar Medan.

Untuk kemadjuan KPU lebih baik pembukaan kursus² KPU disesuaikan dengan pembukaan sekolah².

PERPUSTAKAAN RAKJAT.

P e n d a h u l u a n :

Pada tanggal 14 Agustus 1950, dengan s.p. No. : 8525/A, Menteri P. P. dan K. Republik Indonesia jang berkedudukan di Djogjakarta, telah ditetapkan buat membentuk Perpustakaan jang bertingkat-tingkat bagi Rakjat, dengan berdasarkan pertimbangan, bahwa : untuk meninggikan pengetahuan umum dan memelihara serta me-

ngadjudkan budi-pekerti dan ketjerdasan warga-negara, perlu diadakan Perpustakaan Rakjat bagi umum, jang disusun paedagogis-didactis. Dan tugas untuk menjelenggarakan dan mengurus Perpustakaan Rakjat ini, diserahkan kepada Djawatan Pendidikan Masyarakat.

Akan tetapi usaha Perpustakaan Rakjat dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, baru dapat dilantjarkan, setelah perpindahan Kantor Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah I dari Sibolga ke-Medan, ja'ni dalam bulan Djuni 1951. Inipun baru dalam lingkungan Sumatera Timur dan Tapanuli sadja, sementara penggabungan urusan usaha I.P.M. di Atjeh baru berlaku dalam bulan Nopember 1951.

Oleh karena perhatian masyarakat kepada Perpustakaan dalam tahun 1951 belum lagi begitu besar, maka usaha kedjurusan itu masih dalam taraf memberikan penerangan² via radio dan pers serta mengadakan persiapan². Jang tampak baru usaha partikulir sadja.

Dalam tahun 1952, keadaan sudah mulai agak baik dengan kian besarnja minat masyarakat terhadap perpustakaan. Betapa besarnja perhatian rakjat, terbukti dari terus mengalirnja permohonan² untuk mendirikan T.P.R.² dan kesanggupan penduduk dibeberapa tempat untuk mendirikan sendiri gedung atau perumahan untuk Taman Pustaka Rakjat walaupun setjara darurat. Dan setjara statistisch, tampak kegiatan dalam usaha memperbanjak djumlah T.P.R./A, seperti di Kabupaten² Karo, Asahan, Tapanuli Selatan, Nias, Atjeh Piedie, Atjeh Timur dan Atjeh barat.

Kesimpulannja : usaha Perpustakaan Rakjat sudah mulai tampak kelantjarannja, meski productiviteit-nja belum lagi seperti jang diharapkan. Pun perdjalan an organisasi dan administrasinja belum begitu teratur, menurut peraturan² dan instruksi² jang diterima dari Pusat.

Dalam tahun 1953, dengan keluarganja s.p. jang baru dari Menteri P. P. dan K. mengenai Perpustakaan Rakjat, ja'ni No. : 7870/Kab., tanggal 5 Maret 1953, jang mulai berlaku pada awal tahun 1953, sebagai pengganti s.p. No. :8525/A. jang lama, maka usaha Perpustakaan Rakjat tidak lagi dititik-beratkan kepada penambahan djumlahnja, melainkan kepada pekerdjaan memperlantjar perdjalan an organisasi T.P.R.² berdasarkan ketentuan² dan peraturan² jang berlaku, a.l. mengenai :

1. diwadajibkannja setiap anggota T.P.R. membajar uang pangkal dan ijanan.
2. diwadajibkannja uang penghasilan T.P.R. disetor kekas negeri.
3. diharuskannja setiap T.P.R. Ketjamatan mengirimkan daftar keterangan ke-Bahagian Perpustakaan Rakjat Pusat untuk diakui sah berdirinja, ja'ni berdasarkan surat-edaran tanggal 12 Mei 1952, No. : 446/I/15.

Ketiga sjarat² ini, setjara berangsur-angsur telah dapat dilaksanakan, meski ternjata disedjuml ah Kabupaten², umumnja didaerah Atjeh, soal pembajaran uang pangkal dan ijanan itu, masih tetap merupakan penghalang untuk mendjadi anggota T.P.R. dikalangan penduduk Ke-



genai kesehatan dipergunakan untuk pemeliharaan
lusan kursus P.B.H.

tjamatan, berhubung dengan belum tjukup meresapnja kesedaran tentang faedah membatja. Akan tetapi hal ini ada djuga disebabkan 2 factor lain,

1. lantaran lajanan tak dapat dilakukan dengan sempurna, karena ketiadaan tenaga ahli,
2. ketiadaan (kekurangan) buku² jang digemari penduduk sesetempat, sesuai dengan alamnja dan tjara hidup.

Dan sebagai akibat dari terdjadinja „peristiwa Atjeh”, dibulan September 1953, maka semendjak itu usaha dilapangan Perpustakaan daerah tersebut, pada umumnja mendjadi tertegun.

Dalam tahun 1954, rentjana usaha seperti jang dilantjarkan selama tahun 1953, didjalankan dengan lebih intensief dan correctief.

Hanja dengan tidak adanja lagi dikeluarkan biaja T.P.R./A untuk upah pelajan, dengan sendirinja kelantjaran perdjalan T.P.R. mendjadi kendur.

Usaha² jang didjalankan :

Usaha jang didjalankan dalam tahun 1951, barulah berupa kegiatan memberikan penerangan/pendjelasan via radio dan pers tentang tugas Perpustakaan sebagai satu Volksuniversiteit, dimana setiap orang jang sudah pandai membatja, mendapat kesempatan menambah ilmu dan pengetahuan tanpa guru.

Usaha ini kemudian disusul dengan pembentukan sedjumlah T.P.R.² tingkat B diibu kota beberapa Kabupaten dan kota² ketjil jang lain, dimana ketjerdasan penduduknja sudah kira² setaraf dengan pengetahuan tammatan S.M.P.

Pada awal Oktober 1951, T.P.R./B didirikan di Kabandjahe dan Brastagi (Karo), pada achir bulan itu di Bindjei, P. Berandan (Langkat) dan Tebing Tinggi (Deli/Serdang), kemudian dalam bulan Nopember 1951 di Tandjung Balei dan Rantau Prapat, sementara dalam bulan Desember di Balige, Porsea, Siborong-borong dan Dolok Sanggul.

Djuga pertumbuhan T.P.R.² tingkat A dan Pengantar nampaknja pesat. Hanja lantaran dalam penjelenggaraannya belum ada kenjataan, maka surat pengesahannya belum dapat diberikan. Perpustakaan² Rakjat tingkat A., jang tampak djelas usahanja atas autoactiviteit rakjat, ialah di Kabupaten² Langkat, Karo, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara sadja. Jang paling sangat ketinggalan, ialah daerah Atjeh.

Perpustakaan bekas C.B.I. jang di Medan dan Pematang Siantar, jang technis mulai bulan Maret 1951 sudah mulai dipegang oleh Kantor Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah I dan administratif mulai bulan Nopember 1951, usahanja berdjalan dengan lantjar, berkat beberapa factor :

1. jang menjelenggarakannja ialah tenaga² jang sudah berstatus pegawai dan berpengalaman.
2. persediaan buku²nja (meski kebanyakan berbahasa asing) sanggup menampung perhatian dan minat membatja dari golongan menengah dan atas.
3. masjarakat kota ditempatnja sudah tjukup sedar tentang kebesaran faedah membatja.
4. ruangan dan alat²nja boleh dikatakan sudah memadai.

Sementara itu, Perpustakaan „Iskandar Muda” Kutaradja, jang djuga telah dipungut oleh I.P.M. semendjak tahun 1951, ternjata masih belum berdjalan, lantaran ketiadaan gedung.

Untuk melajani Perpustakaan² jang sudah berdiri, maka buku² jang dibeli sendiri oleh pihak I.P.M. Daerah I, telah dikirim kepada T.P.R.² jang sudah dikeluarkan surat-penetapanja, disamping buku² bahasa asing (ilmu pengetahuan), jang diambil dari perpustakaan bekas C.B.I. di Medan. Pun pembahagian alat² jang diterima dari Djawatan Pendidikan Masjarakat Pusat, sudah mulai dilantjarkan, demikian djuga tundjangan² berdasarkan s.p. kepada T.P.R.² jang sudah sah berdiri-nja.

Sampai achir tahun 1952, buku² jang dibeli sendiri oleh Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah I dan sudah dibagi-bagikan kepada tiap² I.P.M. Kabupaten untuk T.P.R.² A/B, ada sedjumlah 12982 buah, ilmu pengetahuan dan sedikit roman.

Dari Bahagian Perpustakaan Rakjat Pusat sendiri, selama tahun 1952, ada 6 kali diterima langsung oleh I.P.M. Kabupaten² buku² untuk T.P.R. A/B. Rata² setiap Kabupaten dikirim 982 ex., jang terdiri dari 309 djenis. Usaha pembentukan T.P.R./B didaerah Atjeh, baru merupakan kenjataan dalam tahun 1953, meski rentjana untuk itu sudah lama selesai.

Seterusnja dalam tahun 1953 dilandjutkan usaha pemberian alat² meubilair kepada T.P.R.² A dan B, jang ditempatkan dikilang N.V. Siandjur di Medan. Akan tetapi berhubung dengan ketiadaan biaja transport, barulah T.P.R.² jang di Sumatera Timur dan Tapanuli sadja jang dapat dikirimi, sementara buat daerah Atjeh hanja beberapa T.P.R. di Atjeh Timur sadja.

Untuk lebih memperlantjar pertumbuhan T.P.R.², maka dalam tahun 1953 oleh pihak Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah I ada dua kali dilakukan penindjauan ke-Tapanuli dan 1 kali kesebahagian dari daerah Atjeh (sebelum „peristiwa Atjeh”), sementara disekitar daerah Sumatera Timur penindjauan dilakukan terus sampai tahun 1954. Dan berhubung dengan penghematan dari pihak Pemerintah, diandjurkan supaja T.P.R.² jang masih belum tampak productiviteitnja maupun jang tak begitu mendapat perhatian dari masjarakat, ditutup sadja atau dibatalkan pengeluaran s.p.-nja.

Perlu djuga ditambahkan disini usaha „kotak batjaan” (leestrommel) jang diselenggarakan oleh T.P.R./B di beberapa ibu kota Kabupaten, jaitu di Langkat, Asahan dan Tapanuli Utara. Akan tetapi ketika terhentinja pengiriman Madjalah² dari Pusat, maka dengan sendirinja usaha tersebut tak dapat dilandjutkan.

Dalam tahun 1954, usaha dilandjutkan untuk lebih mengintensivier teraturnja perdjalananan organisasi tiap² T.P.R.

Perpustakaan induk :

Dalam „rentjana pekerdjaan tahun 1952”, jang a.l. tudjuannja untuk memperbaiki perdjalananan organisasi T.P.R.², termasuk usaha membentuk sebuah Perpustakaan Induk ditiap-tiap ibu kota Kabupaten, jang bertugas sebagai pemimpin dan pengawas T.P.R.² Ketjamatan.

Berdasarkan ketentuan, bahwa „djika diibu kota Kabupaten sudah ada berdiri sebuah T.P.R./B, sudah tjukup T.P.R./B ini sadja didjadian Perpustakaan Induk”, maka kepada Kantor Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten², jang sudah mempunjai T.P.R./B, diandjurkan, agar menjadikannja Perpustakaan Induk, dengan mengadjukan tjalon² untuk djadi pegawainja dibelakang hari. Dalam rentjana tahun 1952, djumlahnja ditetapkan 3 orang (1 pemimpin, 2 pembantu) dengan berstatus (sementara) „tenaga lepas” dengan sjarat :

1. pemimpin harus berpengetahuan S.M.P. (gol. III)
2. pembantu harus berpengetahuan S.R. VI (gol. II).

Akan tetapi disebabkan kesulitan² untuk memperoleh tjalon² jang memenuhi sjarat, sementara diantara tjalon² jang sudah disetudjui oleh pihak Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah I buat Perpustakaan² Induk di Asahan, Simelungun, Karo, Tapanuli Utara, Atjeh Utara dan Atjeh Pidie, umumnja tidak beroleh tingkat (golongan) jang diusulkan, dengan sendirinja sampai achir tahun 1952 belum ada sebuahpun Perpustakaan Induk Kabupaten jang berdjalan. Tambahan pula pedoman jang tegas dan serba-lengkap tentang organisasi sebuah Perpustakaan Induk masih belum diterima diwaktu itu, disamping kesulitan² dalam soal perumahan, alat² dan biaja, maka sampai achir tahun 1952 usaha Perpustakaan Induk Kabupaten baru dalam taraf persiapan.

Pun dalam tahun² 1953 dan 1954, pemimpin dan pengawasan atas T.P.R.² Ketjamatan belum dapat diselenggarakan langsung oleh Perpustakaan Induk Kabupaten. Satu²nja jang dapat diselenggarakan, hanjalah mendedarkan madjallah² jang diterima langsung dari Pusat, kepada T.P.R.² tingkat A, disamping sifatnja sebagai T.P.R./B biasa. Djuga untuk membentuk sebuah model-bibliotheek dan perpustakaan-naslag, masih tersangkut pada ketiadaan pegawai² ahli, kekurangan buku², kesulitan urangan (perumahan) dan ketentuan technis dan administratif.

Kesulitan :

Kesulitan² yang tetap dirasakan dalam usaha memperkembang Perpustakaan Rakjat di Sumatera Utara, sedjak dari tahun 1951 hingga kini, ialah :

1. ketiadaan perumahan, atau kalau pun ada, sewanja djauh mengatasi biaya yang dapat dikeluarkan buat itu.
2. kekurangan (ketiadaan) tenaga² penjelenggara yang tjakap dan ahli.
3. kekurangan persediaan buku² untuk dapat menampung keinginan dan perhatian masjarakat.

Pengoperan T.P.R.² B/C. :

Sebagai mematuhi P.P. No. : 65, maka semendjak awal tahun 1953 sudah diadakan persiapan² untuk menimbang-terimakan T.P.R.²/B yang ada diluar ibu kota Kabupaten dan T.P.R./C. (bekas C.B.I.) kepada Pemerintah Otonoom Daerah, ialah : T.P.R.²/B di Tarutung, Siborong-borong, Porsea, Dolok Sanggul, Sidikalang, Kota Nopan, Pajabungan, Sipirok dan Gunung Tua dan bekas C.B.I. Medan dan Pematang Siantar.

Akan tetapi berhubung dengan kesulitan² technis, hingga kini baru bekas C.B.I. yang di Medan dan Pematang Siantar sadja yang ditimbang-terimakan.

KEPANDUAN :

Usaha dalam tahun 1950 Inspeksi Pendidikan Masjarakat memulai tugasnja dengan memberi penerangan kepada masjarakat tentang kemanfaatan Kepanduan itu dalam pendidikan. Mulai menghubungkan Djawatan dengan organisasi² yang ada.

Hasil daripada usaha ini, maka hubungan ini makin nampak sedjak tahun 1951. Untuk mempererat hubungan ini serta membantu mereka dalam kesulitan²nja, maka tahun 1952 selain bantuan teknik pemberian alat² pun dimulai, seperti : buku², dan tongkat² sedang di tiap² Kabupaten disediakan tambur untuk dipinjamkan. Dengan pemberian diatas maka nampaklah berkurangnya kesulitan² itu sedang kesulitan ketiadaan pelatih, yang selalu diminta organisasi², belum dapat diatasi. Dengan datangnya 3 orang tenaga dari Kursus K.P.K. Bandung, maka usaha Djawatan dalam lapangan Kepanduan dapat dijalankan dengan lebih baik. Dalam tahun ini djuga Inspeksi Pendidikan Masjarakat dapat menjediakan sebuah tenda-kemah dikantor Propinsi yang dapat dipinjamkan kepada organisasi². Dengan adanya tenda ini banjak sudah organisasi² yang telah mengadakan perkemahan yang selama belum adanya tenda tadi djarang dilakukan karena ketiadaan tenda-kemah.

Pada tahun 1953 kesulitan² makin berangsur berhubung adanya pelatih² di-tiap² Kabupaten Propinsi Sumatera Utara yang mendapat latihan di Padang pada bulan Mei 1953. Dengan adanya tenaga² ini sedjak tahun 1953 dan tahun 1954 latihan² dapat diadakan di beberapa Kabupaten.

Mulai tahun 1952 telah dimulai mengusahakan terbentuknja tjang Ipindo di beberapa tempat, seperti : di Langsa, Meulaboh, Medan dan Kisaran.

Menurut perkembangan organisasi² Kepanduan, maka Propinsi Sumatera Utara dapat dibagi dalam 3 daerah, jaitu : Sumatera Timur, Atjeh dan Tapanuli.

Sumatera Timur : Di Sumatera Timur pertumbuhan organisasi Kepanduan adalah sebagai tjendawan dimusim hujdan. Banjak sudah organisasi² yang dapat mengatur diri sendiri dan memperlengkapi alat² sendiri. Kepanduan sudah mendapat sambutan dari Masyarakat.

Atjeh : Pertumbuhan Kepanduan di Atjeh tidak kurang daripada di Sumatera Timur. Hanya kemampuan organisasi² yang telah ada kurang besar untuk memperlengkapi diri sendiri. Pada umumnya organisasi² disini makin nampak usahanya walaupun masih djauh daripada yang diharapkan.

Tapanuli : Boleh dikatakan bahwa daerah inilah yang sangat ketinggalan dalam hal kepanduan. Usaha² dari organisasi² kepanduan yang sangat sedikit djumlahnja hampir tidak ada. Perhatian masyarakat disini boleh dikatakan hampir tidak ada.

Perlu kami tambahkan bahwa memperhatikan pertumbuhan organisasi² kepanduan di Sumatera Utara masih diperlukan lagi bimbingan dan bantuan alat². Kader² harus diperbanjak dan pengetahuan pelatih² sekarang masih harus ditambah.

P E M U D A :

Perkembangan : Memperhatikan banjaknja organisasi² pemuda di Sumatera Utara sangat memuaskan. Hampir di-tiap² Ketjamatan ada organisasi Pemuda.

Usaha : Salah satu saluran untuk memudahkan organisasi² pemuda didalam usahanya ialah mendirikan Panti² Pemuda diibu kota Kabupaten.

Sebelum Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli bergabung, maka pada tahun 1950 telah berdiri sebuah Panti Pemuda di Bindjei (Kabupaten Langkat) yang diusahakan oleh saudara Sujono Atmo Kepala Bagian Pemuda Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat. Inspeksi Pendidikan Masyarakat memulai usahanya sedjak tahun 1951 dalam pembentukan Panti Pemuda. Dalam tahun ini dapat berhasil membentuk beberapa Panti Pemuda sebagaimana yang dimaksud, tetapi usaha yang merupakan rentjana minimum belum ada yang nampak.

Pada tahun 1952 djumlah Panti Pemuda bertambah hingga 13 buah. Pada umumnya belum ada P2 menunjukkan usaha yang nyata hanya beberapa P2 sudah dapat mendirikan T.P.R. dan mengadakan pertandingan Olah Raga.

Pada tahun 1953 djumlah P2 bertambah lagi hingga 20 buah. Usaha² mereka makin bertambah, misalnja : dalam lapangan kesenian, perpustakaan, Olah Raga dan mengadakan causeri². Hingga tahun ini masih banyak P2 yang belum mendapat perumahan. Dalam tahun ini dapat diadakan aktivering P2 hanya di P. mantang Siantar dan Sigli. Ditempat dimana aktivering telah diadakan keaktifan anggota²nja bertambah giat.

Dalam tahun 1954 djumlah P2 berkurang menjadi 16 buah, demikian juga usaha² hampir tidak ada. Malah perhatian organisasi² pemuda makin berkurang. Hal ini mungkin karena dari organisasi² pemuda merasa tak begitu bekepentingan dengan Panti Pemuda itu. Selanjutnja hal ini menghendaki penjielikan dan analise yang mendalam.

Daftar Panti Pemuda di Propinsi Sumatera Utara dari tahun 1952 sampai 1954.

No.	Kabupaten	Tempat Panti Pemuda	1952	1953	1954
1.	Kota Besar Medan	Medan	1	1	—
2.	Deli/Serdang	Tebing Tinggi	1	1	—
3.	Langkat	Bindjei	1	1	—
4.	Karo	Kabandjahe	1	1	1
5.	Simelungun	P. Siantar	1	1	1
6.	Asahan	T. Balai	1	1	1
		S. Pakam	—	—	1
7.	Labuhanbatu	R. Prapat	—	1	1
8.	Tapanuli Utara	Balige	1	1	1
		Tarutung	1	1	1

9.	Tapanuli Tengah	Sibolga	1	1	1
		Barus	—	1	1
10.	Tapanuli Selatan	P. Sidempuan	1	1	1
11.	Nias	G. Sitoli	1	1	—
12.	Atjeh Timur	Langsa	—	1	1
13.	Atjeh Utara	Loksemawe	—	1	—
14.	Atjeh Tengah	Takengon	—	1	1
15.	Atjeh Pidie	Sigli	1	1	1
16.	Atjeh Besar	Kotaradja	—	1	1
17.	Atjeh Barat	Meulaboh	1	1	1
18.	Atjeh Selatan	Tapaktuan	—	1	—
D j u m l a h			13	20	16

OLAH-RAGA :

Perkembangan : Lain daripada usaha Kepanduan dan Pemuda, maka keolahragaan ini istimewa pertumbuhannya. Sampai di-desa² telah ramai dilakukan walaupun pada umumnya hanya mengenai sepak bola.

U s a h a : Pada tahun 1950 usaha Inspeksi Pendidikan Masyarakat dalam hal keolahragaan hanya bersifat memberi penerangan mengenai tugas²nja. Mulai tahun 1951 Inspeksi Pendidikan Masyarakat telah mulai aktif dalam hal perkembangannya. Alat² sepak bola mulai mengalir sampai di-desa² dimana telah ada terbentuk organisasinya. Pertumbuhan organisasi adalah sebagai tjendawan dimusim hudjan. Permintaan alat² olah-raga lainpun telah masuk tetapi tidak dapat diladeni karena ketiadaan stok. Dalam tahun 1952 makin terasa oleh masyarakat akan perlunya berolahraga itu. Kepada organisasi² yang baru tumbuh selalu diberikan alat² penggerak seperti : bola kaki. Dalam tahun ini mulai diandjurkan² permainan volley. Beberapa organisasi dapat terbentuk dan kepada mereka alatnjapun dapat diberikan, jaitu : net dan bolanya. Tinggalnya permainan ini belum digemari oleh masyarakat sedang yang melakukan sendiri belum dapat menikmati kegembiraan yang ada dalam permainan tersebut, karena belum ada pelatihnya untuk memberikan teknik memukul begitu juga peraturan² permainan.

Pada tahun 1953 perkembangan olah-raga makin meningkat dan perhatian masyarakat bertambah besar. Memang dalam tahun ini banjak bantuan materieel dan moreel diterima oleh masyarakat. Pendirian Stadion dan adanya PON III adalah salah satu peristiwa yang banjak mempengaruhi perkembangan olah-raga.

Dalam tahun ini djuga pemerintah bertambah giat meladeni kebutuhan masjarakat. Bantuan uang untuk membuat/memperbaiki tanah lapang telah dikeluarkan untuk 24 dan 4 tanah lapang masing² tingkat Desa dan Ketjamatan.

Dengan datangnja tenaga 3 orang dari K.P.K. Bandung, maka kursus Kader Keolahragaanpun sudah dimulai dan terlaksana dalam 10 Kabupaten jang djumlah seluruh pengikutnja adalah 219 orang. Dengan pemberian bola kaki dan volley bal kepada mereka, maka permainan bola kaki dan volley makin bertambah giat. Pemberian bantuan uang untuk pembuatan tanah lapang dan kursus Kader Keolahragaan diteruskan dalam tahun 1954. Dan dalam tahun ini telah di-rentjanakan memberikan bantuan uang untuk pembuatan 1, 6, 60 tanah lapang masing² tingkat Kabupaten, Ketjamatan dan Desa ; dan mengadakan 6 buah kursus Kader Keolahragaan.

Inspeksi Pendidikan Masjarakat Propinsi telah mengandjurkan agar di-tiap² Kabupaten diadakan pertandingan² perebutan piala bergilir. Kabupaten Atjeh Timur, Tapanuli Utara dan Asahan telah berhasil dengan pelaksanaannja sedang Kabupaten² lainnja sedang sibuk mengusahakannja. Bahwa pada saat jang achir ini, oleh karena kekurangan pengiriman dari Pusat maka pemberian alat² djauh lebih berkurang, tetapi permintaan alat² dengan pembayaran contrapos makin banjak.

Sebagai penutup perlu kami tjatatkan, bahwa pada hemat kami Djawatan Pendidikan Masjarakat masih perlu menjediakan alat² dengan pembayaran contrapos. Hal ini kami dasarkan kepada pertimbangan antara keinginan dan kesanggupan berolah raga itu dalam masjarakat.

Daftar Latihan Kader Keolahragaan jang diadakan di Propinsi Sumatera Utara dalam tahun 1953 dan 1954.

Tahun 1953

No.	Kabupaten	Tempat latihan	Tanggal diadakan	Banjaknja
1.	Atjeh Barat	Meulaboh	20-4 s/d 4-5-1953	24 orang
2.	Atjeh Tengah	Takengon	26-6 „ 11-7-1953	24 „
3.	Labuhanbatu	R. Prapat	24-6 „ 7-7-1953	24 „
4.	Asahan	T. Balai	10-7 „ 23-7-1953	15 „
5.	Tap. Tengah	Sibuluan	10-7 „ 19-7-1953	20 „

1.	Atjeh Timur	Langsa	16-6	s/d	29-6-1
2.	Deli Serdang	akan ditentukan	akan dimulai		20-10-
3.	Kota Besar				
	Medan	"	"	"	10-11-
4.	Nias	"	"	"	6-12-
5.	Atjeh Selatan	"	"	"	15-12-
6.	Tap. Tengah	"	"	"	1-11-

Daftar pembuatan Tanah Lapang di Propinsi Sumatera tahun 1953 dan 1954.

Tahun 1953

No.	Kabupaten	Tingkat tanah lapang	Banjakan
1.	Tapanuli Tengah	Ketjamatan Lumut	1
2.	Nias	" H. Baru	1
3.	Labuhan batu	" Bandar durian	1
4.	Atjeh Barat	" Samatiga	1
5.	Tapanuli Selatan	Desa 1. Sihepang)	
		2. Sosopan)	
		3. Barumun)	6
		4. Siabu)	
		5. B. Angkola)	
		6. Padangbolak)	
6.	Asahan	Desa 1. Simpang Empat)	
		2. Pulau Mandi*)	
		3. Pulau Radja)	6
		4. Inderapura)	
		5. Lab. Ruku)	
		6. Sei Kepajang)	
7.	Karo	Desa 1. Tiga Binanga)	
		2. Tiga Panah)	
		3. Barusdjahe)	6
		4. Djuhar)	
		5. Susuh)	
		6. Kuta Galuh)	
8.	Langkat	Desa 1. Kwala)	
		2. Tg. Langkat)	
		3. Selesei)	6
		4. Sitjanggang)	
		5. Setabat)	
		6. Babalan)	
XX	4 tingkat ketjamatan.	D j u m l a h	28 X
24	" desa.		

Medan	Desa	—	4	bel.	dibajar.
	"	—	5	bel.	dibajar.
	"	—	5	bel.	dibajar.
ra	"	—	6	bel.	dibajar.
	"	—	6	Rp.	1500.—
gah	"	1. Sipakpahi)			
		2. Aek Raisan)			
		3. Sorkam kiri)	6	Rp.	1500.—
		4. Badiri)			
		5. Siambaton Napa)			
		6. Tukka Holbung)			
	Desa	1. Sinaksak)			
		2. Raja)			
		3. Panei Tonga)	6	Rp.	1500.—
		4. Sindar Raja)			
		5. Haranggaoll)			
		6. Balata)			
	Desa	—	6	bel.	dibajar.
	Desa	—	6	bel.	dibajar.
	Desa	1. Kawai)			
		2. Samatiga)			
		3. Seunagan)	5	Rp.	1250.—
		4. Kr. Sabee)			
		5. Djaja)			
	Desa	1. Tapaktuan	5	barudibajar	250.—
D j u m l a h			67	Rp.	9000.—
ah	.	bel. dibajar			
,		dibajar 4 buah			
,		" 24 "			

21 s/d 24 Djanuari 1952.

orang.

Setengah tahun Inspeksi Pendidikan Masyarakat laksanakan tugasnja, terasa benar oleh Pimpinan Inspeksi Masyarakat keharusan untuk mengadakan kursus Aplikasi teknis dan Kepala² Tatausaha Kantor Inspeksi Pendidikan Kabupaten. Kursus ini sangat perlu bagi pegawai² Masyarakat, karena hampir seluruh pegawai² ini dijabatannja, sehingga belum mempunjai pengertian tugas² jang akan mereka djalankan. Tambahan lagi miteit dalam urusan administrasi jang dianggap djuga

penting untuk kelanjutan usaha Kepala² Tatausaha dari tiap² kantor kabupaten harus mendapat pengertian yang tjukup. Selama latihan ini pengikut² diberi pengertian tentang :

- a. Azas dan tudjuan Pendidikan Masyarakat ;
- b. Tehnik pelaksanaan dari Tugas² Pendidikan Masyarakat ;
- c. Tjara pelaksanaan administrasi.

Lain dari pada itu oleh beberapa djawatan lain diberikan tjeramah² mengenai kesehatan dan koperasi.

28 April s/d 2 Mei 1952.

Pengikut 31 orang (wanita).

Untuk dapat meladeni masjarakat wanita Sumatera Utara, Pimpinan Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah I merasa perlu mengadakan latihan khusus untuk petugas² wanita dalam lingkungan Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah I. Latihan ini diadakan selama 5 hari dan diikuti djuga oleh para wanita yang duduk dalam pimpinan organisasi² wanita. Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi berpendapat bahwa dalam membangun masjarakat wanita, tidak dapat disisihkan peranan penting yang diambil oleh organisasi² wanita. Njata djuga betapa besar minat dari fihak organisasi². Dari 31 orang pengikut latihan, termasuk 17 orang dari organisasi² wanita.

Matapeladjaran yang diberikan rapat sekali hubungannja dengan masaalah kehidupan wanita. Pengadjar² selainnja dari staf Pimpinan Inspeksi Pendidikan Masyarakat, terdiri dari ahli² pertanian, peternakan, rumahtangga, kesehatan.

1 s/d 12 September 1953 — 14 s/d 21 September 1953.

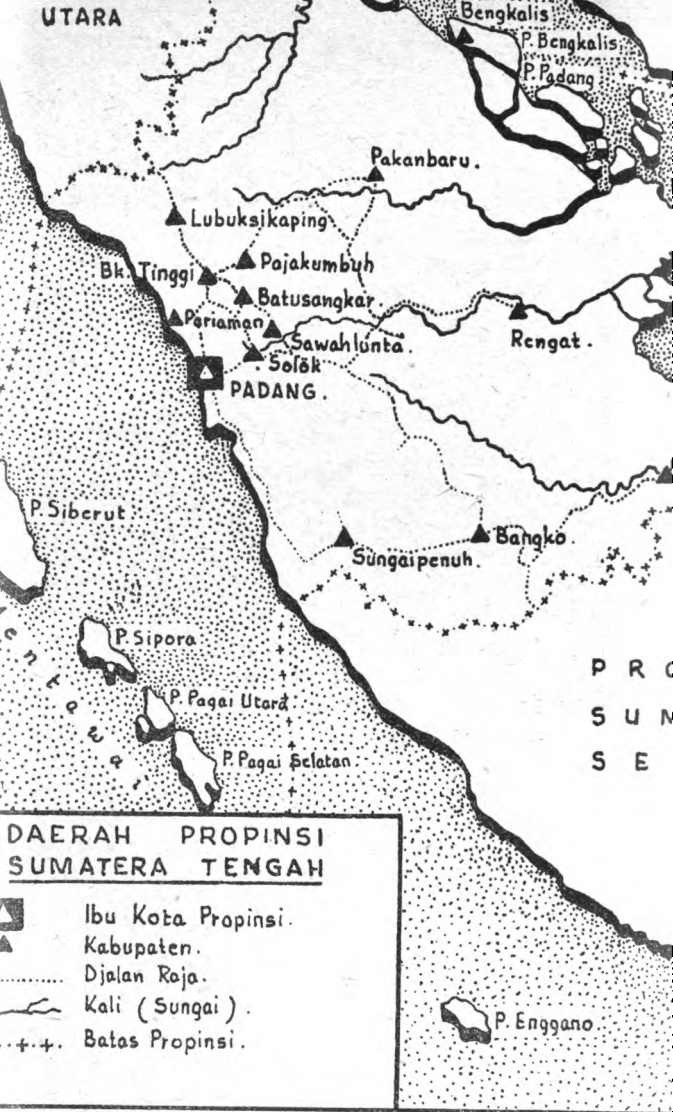
Pengikut 16 orang.

Pengikut 12 orang.

Aplikasikursus ini ditudjukan kepada seluruh pegawai² tehnis dalam lingkungan Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah I, terketjual mereka yang memegang pimpinan kabupaten. Angkatan pertama terdiri dari pegawai² yang bergolongan dibawah IV, tetapi mendjadi pegawai tehnis dalam ressort ; angkatan kedua terdiri dari pegawai golongan IV. Oleh karena tingkatan ketjerdasan dan pengalaman dari kedua angkatan ini tidak sama, dipergunakan bagi angkatan pertama waktu yang lebih pandjang.

Sesuai dengan rentjana Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah I yang dalam tahun 1953 dan berikutnja, dari pengluasan kearah keintensivering, maka dari tiap pegawai tehnis dikehendaki suatu kesanggupan

tehnis untuk menghadapi tugasnja dimasa jang akan datang. Soal dan kesulitan jang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing², menghendaki suatu pemetjahan setjara ilmu pengetahuan. Oleh karena itu peladjaran² sangat dititik beratkan kepada Ilmu pengetahuan, Sociale paedagogiek dan Sociale psychologie, sociologie, serta organisasi djawatan, tehnik penerangan. Lain daripada ini diberikan djuga peladjaran jang dianggap rapat hubungannja dengan tugas jang mereka hadapi, seperti ekonomi desa, ilmu ekonomi, koperasi dan administrasi.



SUMATERA-TENGAH

Motto : „The mistake most often made concerning education is that it is an end to be achieved. Education should not be a destination, but a road we travel all the days of our lives”.

PENGANTAR KATA



Noer Abdoellah
Pd. Kepala Inspeksi
Prop. Sum. Tengah.

Sering orang menggambarkan usaha Pendidikan itu sebagai satu garis yang berakhir pada suatu titik tertentu. Pandangan ini sungguh keliru. Usaha Pendidikan adalah usaha panjang yang akan dilanjutkan terus oleh setiap manusia terhadap diri dan masyarakatnya selama dia masih hidup. Dengan sadar atau tidak sadar usaha ini akan dilanjutkannya untuk satu waktu tertegun menoleh kebelakang melihat djedjak yang sudah ditempuhnya dan memandang kemuka, melihat masa depannya. Pada saat itu dia akan mengetahui, bahwasanya tidak ada **masa berhenti** dalam perjuangan hidupnya, yang ada hanya **kemajuan** atau **kemunduran**.

Kemajuan yang dirasakannya akan mendorongnya untuk lebih bergiat dan kemunduran yang diketahuinya pasti akan menjadikan dia sadar dan mengadakan selfeducation untuk memperbaiki langkahnja.

Dengan filsafah inilah, Pendidikan Masyarakat merentjanakan segala usahanya. Dan dengan paham inilah, baru dapat dimengerti dengan sungguh-sungguh segala laporan maju mundur usaha Pendidikan Masyarakat di Indonesia serta dipahami segala tjara bekerdja. Didalam ini pulalah terletak djawaban yang tepat bagi persoalan disekitar civil-effect K.P.U., pembiajaan kursus P.B.H. dan usaha lainnya yang lebih banjak merupakan bimbingan belaka. Bila disedari pula, bahwa **Kemakmuran itu adalah hasil dari pada Kerdja dan Organisasi**, maka akan dapat dipahami mengapa Djawatan Pendidikan Masyarakat di Indonesia selalu mengemukakan pedomannya dengan kata-kata: **Auto-actief dan Kesatuan**.

Untuk mendapat gambaran seluruhnya dari usaha Pendidikan Masyarakat Propinsi Sumatera Tengah, Daerah II, perlu kiranya dibentangkan serta sedikit setjara garis besarnya Pendidikan Masyarakat di Sumatera Tengah semendjak Proklamasi 1945 hingga Penjerahan Kedaulatan pada akhir 1949.

Semendjak Proklamasi Kemerdekaan tgl. 17 Agustus '45 seluruh pulau Sumatera merupakan satu Propinsi Besar yang mempunyai autonomi keuangan dengan membuat wang sendiri.

Peraturan dan petundjuk² dari Pusat Pemerintahan, karena perjuangan dan perhubungan, banjak disampaikan dengan siaran-siaran belaka. Walaupun peraturan² itu telah diterima, seringkali lebih dahulu disaring dan disesuaikan dengan suasana dan taraf kemadjuan daerah.

Tidaklah mengherankan, djika perobahan² dan kemadjuan² di Djawa tidak serupa dengan yang di Sumatera. Di Sumatera, sebagaimana djuga ditempat-tempat lain, Proklamasi Kemerdekaan tidak sadja menghidupkan dan menjalankan semangat nasional untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dengan pengorbanan apa sekalipun, tetapi djuga melahirkan keinsjafan akan harga diri.

Keinsjafan itu melahirkan pula dorongan dan keinginan „mau madju”. Dengan kesadaran itu berlomba-lombalah partai-partai perkumpulan² mendirikan kursus-kursus P.B.H. dan kursus-kursus Kader, mula-mula hanya untuk anggotanya sadja, tetapi kemudian ternjata djuga untuk Umum. Disana sini bertumbuhlah kursus-kursus P.B.H. dan Pengetahuan Umum, tetapi kebanyakan dari padanja banjak pula yang patah ditengah dengan seribu satu matjam sebab. Pemerintah sendiripun belum dapat mengulurkan tangan dengan djalan memberikan biaja ataupun subsidi.

Demikianlah perdjalanan Pendidikan Masyarakat di Sumatera hingga datangnya pembagian Sumatera dalam 3 Propinsi, yang tidak lama kemudian diiringi oleh penjerahan Belanda ke II (1948).

Sesudah beberapa bulan penjerahan Kedaulatan dimulailah kembali menjusun bagian Pendidikan Masyarakat pada Djawatan P.P. dan K Sumatera. Tetapi berhubung karena kekurangan biaja dan gelora politik pada masa itu yang hangat menghadapi pendjelmaan Negara Kesatuan, Pendidikan Masyarakat tak sedikit mengalami kesulitan.

Perbantuan kepada kursus² P.B.H. ketika itu hanya berupa alat-alat tulis-menulis sadja seperti kapur tulis dan buku tulis. Pekerdjaan hanya bersifat memelihara beberapa kursus P.B.H. yang dibangunkan oleh Rakjat, sedang pembentukan yang baru setjara organisasi yang dikehendaki oleh Pemerintah belum dapat diselenggarakan berhubung dengan ketiadaan biaja tadi. Sungguhpun demikian penerangan kedusun-dusun didjalankan djuga, sehingga pada akhir 1950 Pendidikan Masyarakat sudah mulai dikenal oleh Masyarakat ramai.

BELADJAR MEMBATJA

BUKU P.B.H.

Disusun oleh
Komisi Bahasa Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta

tjerdas tjahaja
tjintjin tjitertera

a. ulangan.

b.

* hati jang sutji, muka jang

bersih!

sebutlah isi pantja sila!

2. dikte: a. kata?

b. kalimat.



dja-gun

**Buku pelajaran jang dipergunakan dalam kursus² P.B.H.
(bahasa Indonesia).**

USAHA PERMULAAN

Walaupun dalam tahun 1950 Djawatan Pendidikan Masyarakat baru berupa memperkenalkan diri di Sumatera Tengah telah dapat luluskan murid-murid P.B.H. sebanyak 2.559 orang.

Usaha dalam tahun 1951 (tahun pertama rentjana 10 tahun P.B.H.):

- a. Memperlengkapi organisasi Pendidikan Masyarakat ditiap-tiap Kabupaten.
- b. Mendirikan Panitia P.M. ditiap-tiap Ketjamatan.
- c. Panitia² P.M. memulai dengan membuka kursus-kursus P.B.H. dan K.P.U./A.
- d. Mengadakan Panitia² KPU/B. ditiap-tiap ibu Kabupaten.
- e. Mengandjurkan kepada Organisasi² Pemuda mendirikan Panti Pemuda ditiap-tiap Ibu Kota Kabupaten.
- f. Mendirikan Taman Pustaka Rakjat ditiap-tiap Ketjamatan.
- g. Mangandjurkan kepada Organisasi² Wanita mendirikan kursus² jang mengenai dunia wanita.
- h. Mengadakan perhubungan dengan organisasi² Kepanduan untuk dapat menjelmakan kursus² pemimpin kepanduan.
- i. Mengadakan perhubungan dengan organisasi² Olah-Raga.

HASIL USAHA SEMENDJAK TAHUN 1951 SAMPAI SEKARANG

Pemberantasan Buta Huruf (P.B.H.).

Tahun	Kursus	Guru	Murid	Lulus
1951	1.077	1.231	38.358	4.989
1952	1.746	1.873	56.747	18.990
1953	1.283	1.378	48.699	21.996
1954	1.643	1.548	51.964	22.159
Djumlah :				sampai Djuli 1954).
				68.134

Kesimpulan dan pandangan :

Walaupun djumlah lulusan PBH dari tahun ketahun meningkat, tetapi angka-angka diatas belum menggambarkan hasil jang memuaskan dibandingkan dengan djumlah jang masih buta huruf (1.485.336).

Beberapa sebab dan kesulitan jang dapat dikemukakan adalah :

1. Biaja jang masih terlalu sedikit.
2. Kurangnja alat perhubungan untuk memperhubungkan daerah-daerah jang sangat luas, baik didarat ataupun dilaut.

3. Tradisi jang kokoh dalam matriarchoaatstelsel jang mempengaruhi kehidupan masjarakat Sumatera Tengah.
4. Tjara hidup jang masih primitief-traditionil dari bahagian jang terbesar dari Masjarakat Sumatera Tengah.
5. Ekonomi jang sangat tergantung kepada pasaran diluar negeri, jang sewaktu-waktu mempengaruhi perhatian masjarakat kepada kursus P.B.H.
6. Gangguan binatang buas.
7. Kurangnya tenaga penilik kewedanan (dari 50 baru terisi 29).

Gerakan P.B.H. Massaal jang telah dimulai selama tahun 1954, belum mendjamin hasil-hasil sebagaimana diharapkan semula, berhubung karena biaya untuk penampungannya dalam kursus P.B.H. Lain dari pada itu, kursus P.B.H. Landjutan kurang mendapat perhatian, karena tidak terdapat ketentuan biayanya.

Nazorg P.B.H.

1. Kursus Kemasjarakatan Orang Dewasa

Tahun	Kursus	Guru	Pengikut
1951	—	—	—
1952	12	42	348
1953	45	182	1.643
1954	46	190	1.685 (½ tahun)

Tjorak K.K.O.D. jang tersebut diatas ialah pertanian, perikanan, peternakan ayam dan koperasi. Baru 1 a 2 K.K.O.D. jang telah diserahkan penjelenggaraannya kepada badan partikulir.

2. Taman Pustaka Pengantar

Tahun	Tempat	Buku	Pembatja
1951	11	—	—
1952	104	6.373	1.212
1953	261	29.190	2.696
1954	248	34.725	8.029 (½ tahun)

Buku-buku pada T.P.P., belum banjak djumlahnja dan hampir semua telah dibatja oleh rakjat. Penerbitan berupa bahasa daerah tidak ada.

PAMA dan PAMI belum mendapat perhatian.

3. Latihan Guru P.B.H. :

Tahun	1951	10	tempat.	Djumlah	pengikut	483	orang.
Tahun	1952	8	tempat.	Djumlah	pengikut	173	orang.
Tahun	1953	51	tempat.	Djumlah	pengikut	1002	orang.
Tahun	1954	28	tempat.	Djumlah	pengikut	649	orang.
							<hr/>
							2307 orang.

Kursus Pengetahuan Umum (K.P.U.).

1. K.P.U./A

Tahun	Kursus	Guru	Murid	Lulus
1951	47	251	2.183	—
1952	52	280	1.772	980
1953	84	487	2.585	1.180
1954	88	578	3.935	—
D j u m l a h :	271	1.596	10.475	2.160

2. K.P.U./B

Tahun	Kursus	Guru	Murid	Lulus
1951	6	26	263	—
1952	4	22	103	75
1953	7	39	277	164
1954	12	64	589	—
D j u m l a h :	29	131	1.232	239

Kesimpulan dan pandangan :

Kalau dalam tahun-tahun pertama terdapat pandangan yang kurang tepat terhadap maksud dan tudjuan K.P.U. ini, maka keadaan ini telah berangsur berubah karena adanya penerangan yang teratur. Hal ini berpangkal pada keadaan, dimana bagi masyarakat Indonesia yang terbesar sudah tertutup pintu untuk memasuki sekolah-sekolah umum.

Dengan jalan demikian telah tertutup pula kemungkinan bagi mereka ini untuk memiliki pengetahuan sederhana yang akan memperbolehkan mereka memasuki lapangan perburuhan untuk djaminan hidup sekedarnya. Lain dari pada itu, ekonomi yang pintjang dan adanya kenjataan yang Umum, bahwa idjazah sekolah umum mempunyai peranan yang penting dalam menilai seorang tjalon pekerdja, maka masyarakat yang terbesar memandang, bahwa K.P.U.-K.P.U. ini merupakan tempat yang membuka kemungkinan untuk memiliki kedudukan yang sederhana dalam lapangan perburuhan.

Adanya pandangan yang kurang tepat ini, menjebabkan belum dapat dirasakan sokongan yang besar dan bermanfaat dari masyarakat umum kepada K.P.U.-K.P.U. ini pada saat-saat permulaan. Berkat pendjelasan² dan penerangan yang teratur, maka pengertian tentang udjud dan djiwa dari K.P.U. telah dapat dirasakan oleh umum dan mulailah dipandang K.P.U. ini sebagai tempat pembentukan kader-kader guna pembangunan. Dukungan dari masyarakat mulai dirasakan. Walaupun demikian masih akan diperlukan waktu, dimana masyarakat Indonesia akan menjedari dengan sedalam-dalamnya akan kegunaan ruangan-ruangan pendidikan dan pengetahuan umum ini, yang rentjana peladjarannya disusun menurut kebutuhan dan keharusan yang terdapat dalam daerah tempatnya masing-masing itu.

Keolahragaan, Kepanduan dan Pemuda.

a. Keolahragaan :

Diantara tiga matjam pendidikan diluar dunia sekolah ini, keolahragaanlah jang tjepat mendapat tempat dalam hati masjarakat jang berolahraga. Walaupun demikian belumlah dapat diartikan, bahwa masjarakat Indonesia telah merupakan masjarakat jang berolahraga. Masih sadja ada golongan², jang karena satu dan lain sebab merasa segan untuk melakukan olahraga. Masih pula terdapat faham, bahwa ekonomi jang merosot, merupakan penghalang untuk melakukan olahraga. Belum semua orang dapat memandang, bahwa djustru dengan olahraga, masjarakat Indonesia akan menjadi ulet dan sanggup untuk mentjapai kemungkinan² baru dan menggembirakan dalam mentjapai kehidupan jang lajak, baik dia seorang dagang, buruh atau petani.

Sesuai dengan perinsip pendidikan jang dilantjarkan Pendidikan Masjarakat, maka selama tahun 1953, Inspeksi Pendidikan Masjarakat telah dapat menjumbangkan bantuannja kepada pembikinan lapangan-lapangan olahraga pada 23 desa dan 4 ibu tempat Ketjamatan dan 2 ibu tempat Kabupaten. Djuga dalam tahun 1954, bantuan ini telah diteruskan jang meliputi djumlah 19 desa dan 3 ibu tempat Ketjamatan dan 2 ibu tempat Kabupaten. Perbantuan ini adalah untuk usaha perbaikan dan pembikinan jang baru. Besamaan dengan itu untuk usaha mengembangkan dan meluaskan pengertian tentang tehnik pelaksanaan olahraga selama tahun 1953 telah dapat dilaksanakan latihan kader keolahragaan pada 18 tempat dengan djumlah kader jang lulus sebanyak 408 orang, terdiri terutama dari pemuda² desa. Dua diantaranya dengan djumlah kader sebanyak 60 orang dilaksanakan dikepulauan Mentawai, dalam rangka pembangunan masjarakat Kepulauan Mentawai. Dan sebelum achir tahun 1954 akan selesai pula penjelenggaraan latihan kader keolahragaan pada 10 tempat. Latihan² kader ini meliputi tjabang olahraga seperti atletik, senam, volley, sepakbola dan kasti dan pada beberapa tempat djuga renang. Selain dari apa jang disebutkan diatas, maka tidak kurang pula diberikan bantuan kepada usaha-usaha pemuda dan masjarakat untuk menjelenggarakan pertandingan² olahraga, baik dalam bentuk organisasi² ataupun dalam bentuk antar-desa dan antara Ketjamatan. Dalam lapangan achir ini sangat dirasakan kemadjuannja, dimana masjarakat mulai memandang bahwa olahraga dan Pendidikan Masjarakat merupakan dua hal jang tidak dapat dipisahkan. Lain dari pada itu, untuk pendirian sebuah Stadion di ibu tempat Propinsi Sumatera Tengah telah diserahkan pula bantuan sebanyak Rp. 100.000 dalam tahun 1954 kepada P.O.S.T. sebagai pemegang iniatief dalam hal ini.

b. Kepanduan :

Berat untuk menegaskan, bahwa kebangunan Kepanduan di Sumatera Tengah sedjak sesudah penjerahan kedaulatan adalah hasil



Gotong-rojong membuat lapangan olahraga disalah satu Desa di Kabupaten Sawahlunto-Sidjundjung.

usaha Pendidikan Masyarakat. Tetapi dapat dilihat kenyataannya, bahwa hampir setiap gerakan kepanduan di Sumatera Tengah telah mentjatatkan adanya sumbangan moreel dan materieel dari Inspeksi Pendidikan Masyarakat di Sumatera Tengah. Demikian sebaliknya, teknis dan financieel, organisasi² kepanduan di Sumatera Tengah telah merasakan, bahwa hubungan dengan Inspeksi Pendidikan Masyarakat mempunyai arti yang dalam.

Latihan Kepanduan yang diadakan Inspeksi Pendidikan Masyarakat Sumatera Tengah di Bukittinggi dalam bulan Djanuari 1953 bagi segenap organisasi yang ada di Sumatera Tengah telah merupakan tenaga pendorong yang sangat berharga dalam membangkitkan kembali semangat berpandu dikalangan masyarakat pemuda. Bantuan-bantuan yang diberikan berturut-turut sesudah itu kepada organisasi² setempat, moreel dan materieel dalam penyelenggaraan latihan dan penjemputan organisasinya, dimaksudkan untuk merupakan bimbingan untuk memelihara keutuhan organisasi² tersebut. Dalam hal ini dapat ditjatatkan, bantuan yang diberikan kepada 3 kali Jamboree dari Hizbulwathan, beberapa kali latihan Alhilaal dan Al Ansjar dan Pandu Rakjat.

Tjataan terachir menjatakan adanya jumlah organisasi Kepanduan pada 31 tempat dengan jumlah pandu putra 4646 dan pandu putri 862 orang.

c. Pemuda :

11 Panti Pemuda telah dapat berdiri sedjak tahun 1952. Kepada masing-masing Panti Pemuda ini telah diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.— sebagai stoot (tenaga pendorong) dan bantuan tetap sebanyak Rp. 350,— sebulan untuk perbantuan biaya administrasi dan sewa gedung. Sajang sekali, tjita-tjita sebagai diharapkan dari Panti-Panti Pemuda ini masih sukar terlaksana. Bantuan² lain yang bersifat ini, merupakan biaya activering pernah diberikan kepada 3 Panti Pemuda. Ternyata bahwa hanya beberapa diantara Panti Pemuda yang banjak itu sanggup untuk hidup terus dengan kekuatan sendiri sambil terus berinitiatief untuk usaha-usaha paedagogis, subjectief dan objectief. Selama tahun 1953, banjak diantara panti Pemuda itu yang tidak lagi menampakkan kegiatannja dalam lapangan yang sesuai dengan alam dan kemampuannya dan selama tahun 1954 telah tegas, bahwa yang dapat dan sanggup meneruskan usahanya sendiri dengan mengadakan initiatief sewaktu-waktu, hanya dua Panti Pemuda, jaitu Panti Pemuda Sawah Lunto dan Pariaman. Telah siap direntjanakan oleh Panti Pemuda Sawah Lunto untuk mengadakan activering yang luas dalam bulan Desember 1954 j.a.d. dengan rentjana gerakan dalam lapangan olahraga, pendidikan (P.B.H. Massaal), hiburan bagi Kanak-Kanak, dan Kerdja Bakti. Demikian djuga oleh Panti Pemuda di Pariaman telah selesai direntjanakan gerakan² activering, terutama dalam lapangan keolahragaan dan pendidikan. Patut dikemukakan disini, bahwa

atas usaha Panti Pemuda Sawah Lunto dengan bantuan dari Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Sawah Lunto Sidjundjung dan Walikota Sawahlunto serta pembesar setempat lainnja, dalam tahun 1954, telah dapat disiapkan dan dipergunakan sebuah Taman Kanak-Kanak, lengkap dengan segala kebutuhan didalamnya.

Perpustakaan Rakjat.

Pada bulan Mei 1951, sebagai langkah pertama, dioperlah Perpustakaan CBI di Padang, menjadi T.P.R. tingkat C., yang merupakan satu-satunya T.P.R. tingkat C di Sumatera Tengah. Tidak lama sesudah itu, menjusul pula pengoperan perpustakaan CBI di Djambi dan Tandjung Pinang, yang kemudian kedua-duanya dijadikan T.P.R. tingkat B.

Segera pula kemudian, diusahakan mendirikan T.P.R. 2/A dikedjamatan dan T.P.R./B. diibu Kabupaten²/Kota, yang pada akhir tahun 1951 dapatlah ditjatat hasil-hasilnja sebagai berikut :

T.P.R./A. berdjumlah 56 buah, T.P.R./B. sebanyak 6 buah, dengan buku-buku sedjumlah 2475 buah.

Sebagai usaha yang baru digerakkan, maka dalam tahun 1951 ini, tentu sadja usaha perpustakaan ini masih djauh dari sempurna, terutama dalam soal penjelenggaraan dan organisasinja, ketjuali T.P.R./C di Padang yang sedjak dari zaman CBI telah mempunyai susunan dan organisasi yang telah teratur djuga.

Ditahun 1952 usaha Perpustakaan mulai menampakkan perkembangan yang menggembirakan. Sedjalan dengan usaha penambahan buku-buku beserta bahan-bahan batjaan lainnja oleh Pusat, maka pendirian T.P.R./A. dan B dilandjutkan terus, sehingga diakhir tahun 1952, tertjatat : T.P.R./A 89 buah dengan djumlah buku 11.485 dan pengundjung yang dapat tertjatat pada 5 Kabupaten sebanyak : 3995.

T.P.R./B. tertjatat 14 buah, dengan buku-buku sedjumlah 14.775, dan pengundjung yang tertjatat pada 11 Kabupaten sebanyak : 6112.

Dalam tahun ini T.P.R./C. mentjatat angka-angka : 5959 untuk kekajaan buku-buku dan 422 anggota terdaftar.

Selanjutnja dalam tahun 1953 usaha ini terus menampakkan kemajuan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dapat diangkatnja pegawai² yang khusus untuk perpustakaan, tambahan buku-buku baru yang terus datang, serta mulainya umum kenal kepada T.P.R.-T.P.R. kita.

Tahun 1953 menunjukkan angka-angka sebagai berikut :

T.P.R./A. 115 buah, dengan buku-buku 24.329 dan pengundjung yang tertjatat disepuluh Kabupaten : 6670.

T.P.R./B. 16 buah dengan buku : 19069, pengundjung 5963.

T.P.R./C 1 buah dengan buku : 5972, pengundjung 2722.

Dalam triwulan pertama tahun 1954, kemajuan² terutama pada T.P.R./B. tetap kelihatan, tetapi mulai triwulan II mulailah kelihatan

Maka untuk mengatasi itu tidaklah ada djalan, hanj djalan tambahan buku-buku baru. Dan ini tentu sangat kepada anggaran belandja.

Mengenai Perpustakaan Induk, maka didaerah Suma sampai waktu ini belum dapat dibentuk. Ini disebabkan o kesukaran, terutama dalam soal tenaga-tenaga untuk mer Boleh dikatakan tenaga² Perpustakaan jang ada di Kabu hanjalah terdiri dari tenaga golongan II, jang mana de jang seperti itu, tentulah akan sukar diharapkan kelantjar an, lebih-lebih tenaga-tenaga tsb., tidak pula pernah dilat setjara latihan kilat sekalipun. Sebab itu sangatlah dihar didikan tenaga Perpustakaan ini akan mendjadi perhatian

Kewanitaan :

Kursus-kursus jang khusus diikuti oleh wanita :

P.B.H.

Tahun	Kursus	Murid
1952	411	13305
1953	201	5400
1954	246	8062

K.K.O.D.

Tahun	Kursus	Murid
1952	—	—
1953	10	422
1954	14	651

K.P.U.

Tahun	Kursus	Murid
1952	23	774
1953	19	611
1954	15	541

KADER WANITA

Tahun	Kursus	Murid
1952	6	247

1953	6	144	18
1954	5	154	37

KADER IBU :

Tahun	Kursus	Murid	Guru
1952	12	394	—
1953	17	572	29
1954	36	1290	113

Sesuai dengan tempat wanita dalam masyarakat matriarchaat di Sumatera Tengah; maka sudah sepantasnya usaha-usaha dalam lapangan pendidikan Kewanitaan mendapat perhatian yang khusus pula. Banjak kemadjuan yang telah dapat ditjapai dalam lapangan ini. Tetapi tidak pula sedikit rintangan² yang muntjul yang sukar diatasi disebabkan karena tradisi yang kokoh pada beberapa bahagian dari Sumatera Tengah. Petugas² Wanita untuk ikut memetjahkan persoalan ini masih djauh dari tjukup. Kedudukan kepegawaian dari para petugas yang sangat rendah ikut merupakan rintangan dalam memperoleh facilities untuk dapat bergerak dengan leluasa.

Lain dari pada yang didaftarkan diatas, banjak pula usaha tersendiri yang telah terlaksana. Pendirian S.K.P., Persatuan² Modiste, Taman Kanak², Balai Wanita termasuk hasil yang telah menjadi kenyataan. Sumbangan² morel dan materiel untuk kerdja bakti, usaha Sosial dan perbaikan Ekonomi dan kehidupan wanita dapat terselenggara menurut rentjana² tertentu. Hari-hari besar Nasional seperti Hari Kartini, Hari Ibu d.s.b. tidak lepas dari pada Kampanje² berentjana dari Inspeksi Pendidikan Masyarakat dengan djalan mengadakan sajembara bagi pengikut atau lulusan P.B.H.

KONPERENSI DINAS :

Untuk dapat mengadakan kesatuan paham dan tjara bekerdja sambil mempertanggung djawabkan usaha selama masa-masa tertentu Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kab./Kota telah mengadakan konperensinja setiap tahun, ketjuali dalam tahun 1954.

Demikian pula telah dilaksanakan konperensi se Sumatera Tengah :

1. Di Bukittinggi tanggal 11/8 — s.d. 14/8-1951.
2. Di Padang tanggal 8/8 s.d. 12/8-1952.
3. Di Pajakumbuh tanggal 27/12 s.d. 29/12-1952 (konp. kerdja).
4. Di Singkarak tanggal 1/8 s.d. 8/8-1953.

PENDIDIKAN DI MENTAWAI :

Usaha mengembangkan dan melantjarkan Pendidikan bagi penduduk asli Kepulauan Mentawai telah didjalankan sedjak tahun 1952.



Wanita Mentawai menanti bimbingan

Dalam tahun 1953 telah diterima autorisasi keuangan sebanjak Rp 96000.— khusus untuk objek pendidikan di Mentawai, usaha ini ternyata belum memberi hasil sebagaimana diharapkan semula.

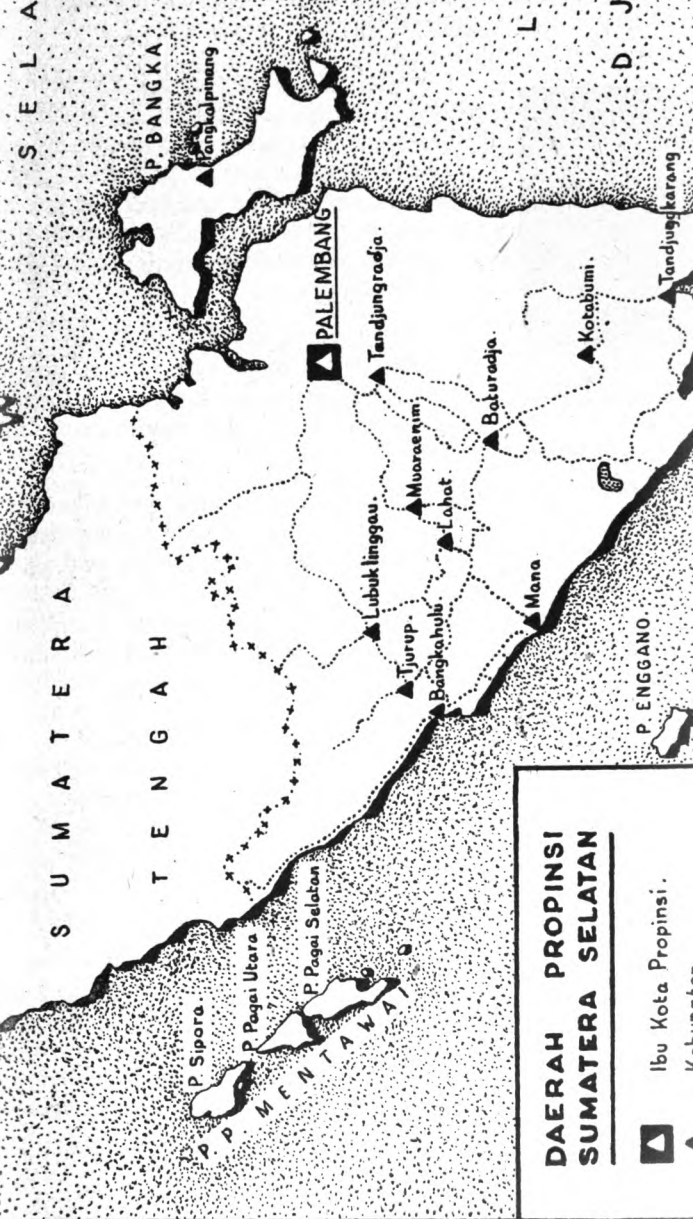
Sebab-sebabnja jang utama :

1. Kurang terselenggaranja perhubungan antara daratan pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai. Demikian pula perhubungan untuk wilayah² dalam Kepulauan t.s.b. Keadaan ini mengakibatkan :
 - a. Sukarnja terdapat kebutuhan hidup bagi tenaga-tenaga jang di datangkan dari tanah daratan untuk menetap di Mentawai.
 - b. Kurang lantjarnja djalan ekonomi jang dapat mempertjepat usaha pembangunan Kepulauan tsb.
 - c. Pandangan, bahwa penempatan tenaga (pegawai) di Kepulauan tersebut berarti hukuman jang berat.
2. Adanja tekanan (afpersing) dalam penukaran barang² oleh beberapa saudagar jang datang dengan penduduk asli.
3. Belum adanja kantor-kantor dari Djawatan² jang mempunjai kewadajiban dalam soal welvaart di Kepulauan Mentawai.
4. Belum adanja koordinasi dengan Djawatan² lain dalam usaha pembangunan ini.
5. Kekurangan biaja jang diperlukan.

Usaha jang telah didjalankan :

- a. **Latihan guru P.B.H.**
8 kali pengikut 168 orang (di Kepl. Mentawai).
- b. **Kader Wanita.**
2 kali pengikut 39 orang (di Pariaman).
- c. **Keolah ragaan.**
2 kali pengikut 58 orang (Kepl. Mentawai).
- d. **Kursus Ibu.**
1 kali pengikut 7 orang (Kepl. Mentawai).

Untuk menghidupkan tempat-tempat pertemuan jang menarik (bijeenkomscentra), maka wanita² jang telah menerima latihan di Pariaman, dibekali dengan berupa-rupe keperluan sehari-hari seperti periuk, badju, sepatu, alat djahitan dan djuga selain dari itu beberapa mesin djalit dengan segala kelengkapan bahan djahitannja jang harus ditempatkan dibawah pengawasan para Tjamat jang bersangkutan.



**DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN**

▴ Ibu Kota Propinsi.

SUMATERA SELATAN

„DEKAT TITIKTENGAH MENGHITUNG DUA DJARAK JANG SAMA DJAUH“



SORDANG SIREGAR
Kepala Inspeksi
Prop. Sumatera Selatan

Seteliti..teliti..perawatan kertas..berhar-
ga, setjermat..tjermat pentjataan..hitungan
— ia sumbing..tiada..lengkap oleh suasana..
suasana..peralihan pada suatu djangka-
waktu jang dilalui oleh sekelompok ma-
nusia..bertugas dibawah asuhan berbagai
tangan jang membarutkan iklim sedjuk-
sedjuk..panas.

Tangan jang sedjuk-sedjuk..panas mem-
bekas dalam djedjaknja sendiri jang me-
lukiskan perbuatan dan peristiwa dengan
gema dan irama jang madju-madju..mun-
dur.

„Peninggalan” jang dipusakakan peris-
tiwa madju-mundur dari asuhan berbagai
tangan sedjuk..panas melukis wajah jang
lebih muram sebagai bahagian/petjahan
sedjarah, sungguhpun himpunan peristiwa jang membentuk keseluruhan
sedjarah pada djangka waktu jang sama-pandjang dan..telah dilalui itu,
oleh sardjana dan para..achli ditjatat pada nilai/gema jang madju dan
progressief.

Siapa jang pada suatu detik-peristiwa mampu mendirikan bangun-
an pada setumpuk tanah jang tiada datar sekalipun, terdjauh dan
amat sulit dari bahan-ramuan dan dengan tenaga jang minimaal, pada
tempatnja jang wadjarlah ia disebut „Pembangun” jang berhasil —
malah orang boleh ragu-bimbang, bahwa Pembangun jang itu **djuga**
akan dapat menjelesaikan tugasnja membina-baru sebuah gubuk jang
di-porak-poranda-kan segontjangan gempa-pagihari.

Beriringan dengan tanggal-tertjatat 24 Nopember, tanda Djawa-
tan Pendidikan Masjarakat di Indonesia telah bernafas selama lima
tahun, Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah III-Sumatera Selatan
menghitung **empat-setengah-tahun** usia perbuatan masjarakat-sedaerah
melaksanakan tjita-tjita Djawatan ini.

Tanggal 10 April 1950, **tudjuh** orang petugas-pembangun Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah III-Sumatera Selatan memulai hari-pertamanya.

Sebanjak perbuatan dan peristiwa jang dapat dikenangkan dan dinjatakan-tertulis, jang akan tinggal sebagai arti jang mengandung isi, tak lebih hanjalah kesimpulan djua.

Siapa pula jang pada waktu menjimpulkan himpunan pengalaman dan peristiwanya sendiri dengan berani, tiada menjelimuti lantai-lantai-terdjungkil dan melindungi-sengadja bajangan?,-redup, dia telah tidak mendustai dirinya dan dengan serangkuh-dajung ia akan **mendjembar** rangkap isi-berarti dan arti-berisi.

Bahwa tak gading jang tak retak kuranglah **pahit** kiasannya, dari-pada seorang petugas jang tak berani mengakui kelemahan dan kekurangan-daerah dan kesanggupan-pribadinya.

Dengan **perasaan** mendendam kepada pikiran dan kemampuan-tenaga-berbuat pada tarafnya jang paling tinggi setiap tahun, bertepatan pada waktu Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah III-Sumatera Selatan berada dekat titik-tengah menghitung dua djarak jang sama djauh (peralihan tahun 1954-1955, memandang surut hingga 10 April 1950 dan mentjoba meneropong se-yodjana kedepan sampai batas-waktu kita berdjandji-bersama 31 Desember 1950), kami sebutlah tahun-tahun jang telah dilalui itu dengan namanya masing-masing :

- 1950 — tahunmula, tahun pendudukan daerah dan penjusunan tenaga,
- 1951 — tahun mulai-mengudji-diri, tahun jang suram,
- 1952 — tahun jang gagal,
- 1953 — tahun berhitung,
- 1954 — tahun udjian-kedua dan tahun tahu-tempat-diri,
- 1955 — tahun harapan dan tahunmula babakan-kedua dengan angka/djangka-rangka/rentjana jang dimasak oleh pengalaman jang pahit (suram) dan/atau hasil-hasil-rendah jang dinjatakan sendiri sebagai kegagalan.

Sekelumit tjatatan-diri (pemberantasan butahuruf orang-dewasa) kami bandingkan dibawah ini :

1. Hasil-lulusan tahun 1950	—	16.081 orang.
		1951	— 17.074 orang.
		1952	— 27.524 orang.
		1953	— 47.816 orang.
			108.495 orang.
Diduga hasil selama 1954	—	91.505 orang.
Perbuatan selama 5 tahun	—	200.000 orang.



Buku² populer mengenai tumbuh²an dan lain² perlu untuk menambah pengetahuan rakyat desa.

I. **Biaja :**

Tahun 1950 —)

1951 —) **tidak djelas/tidak mungkin dipastika**

1952 —)

1953 — Rp. 12,07. — (Indonesia pukul-r
13,05.—)

a) — **1954** — Rp. 4,53. — (sampai Sept. Rp.
dengan meluluskan
orang).

b) — **1954** — Menurut perhitungan kami anta
4,12.— hingga dengan Rp. 4,30.—

1955 — Rp. 3,— paling-tinggi Rp. 3,90.—

Peraturan Djawatan Pendidikan Masjarakat menghenda
Rp. 25,— setelah diadakan udjian dengan 15 orang lul
Rp. 25,— : 15) = Rp. 5,— (**lima rupiah**)

. **Hasil-lulusan selama empat-setengah-tahun :**

No.	Nama Kabupaten:	1950-1951-1952:	1953: s/d th.1954:	
1.	Kotabesar Palembang	996	728	612
2.	Musi-Iilir/Banjuasin	1.561	2.101	3.194
3.	Ogan/Komering-Iilir	11.112	6.787	6.350
4.	Ogan/Komering-Ulu	16.252	6.983	13.485
5.	Muara Enim	385	3.596	3.266
6.	L a h a t	—	5.969	3.977
7.	Musi-Ulu/Rawas	1.138	3.458	394
8.	Redjang/Lebong	1.261	2.056	1.946
9.	Bengkulu Utara	8.499	1.481	1.215
10.	Bengkulu Selatan	2.798	2.045	1.936
11.	Lampung Utara	—	405	3.056
12.	Lampung Tengah	2.870	5.110	11.974
13.	Lampung Selatan	8.549	4.349	10.306
14.	B a n g k a	3.492	1.479	1.532
15.	B e l i t u n g	1.766	1.269	1.095
D j u m l a h		60.679	47.816	64.338

*) (diduga berdasar murid jang ada).

54 91.505 orang.

g menunggu pada 1 Djanuari 1955 1.300.303 orang.

abundant in
Dachau

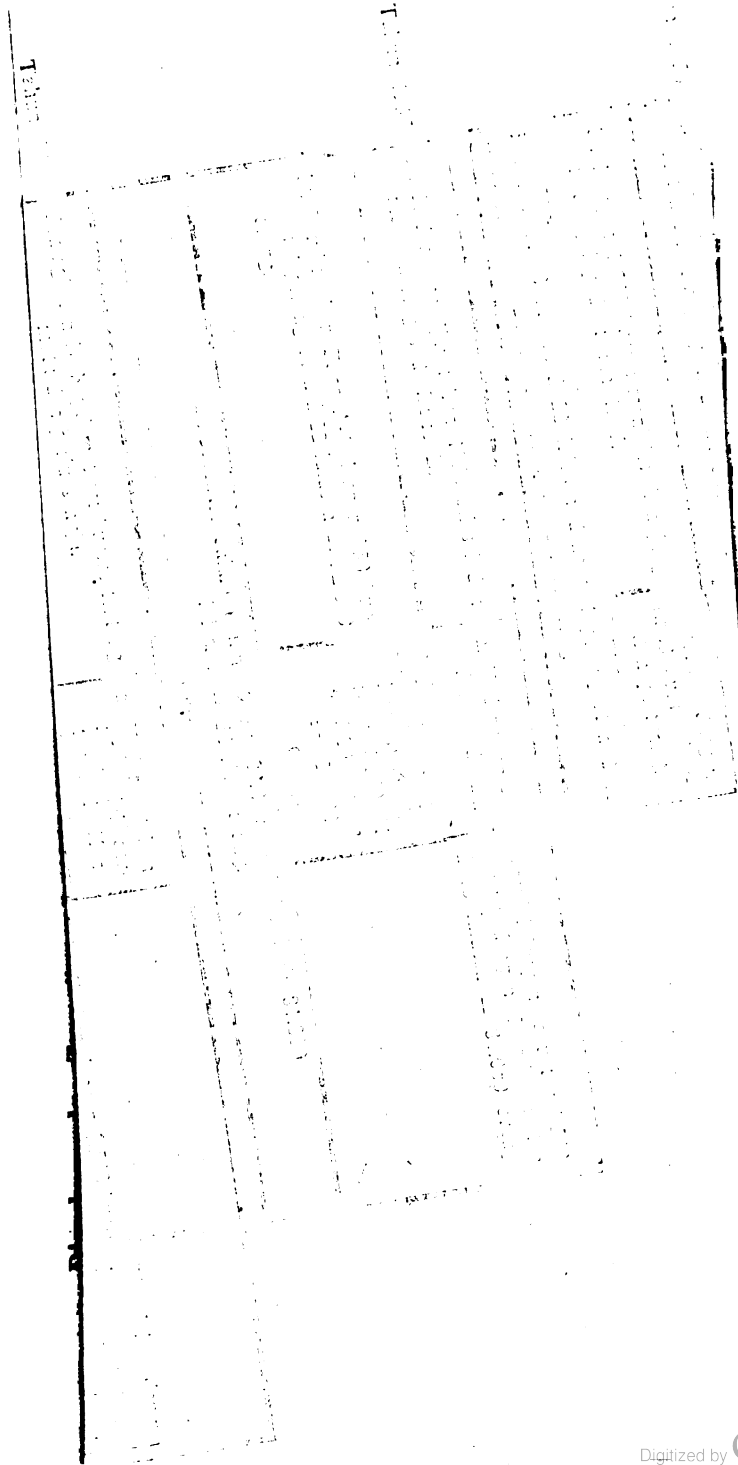
V).

308. 100.

8. 100.

5. 100.

100.



IV. Melunaskan planning 10 tahun Pemberantasan Butahuruf di Indonesia (dengan rentjana „Zone-sijsteem” untuk Daerah III-Sumatera Selatan) :

Djumlah butahuruf-dewasa pada tanggal 1 Djanuari 1954 1.391.808 orang.
 (Djumlah ini diperhitungkan tidak berobah, oleh unsur-unsur penambahan butahuruf dari 12 tahun ke 13 tahun + kira-kira 50.000 orang transmigranten butahuruf dalam tahun 1954 dibanding dengan penjusutan orang-orang dewasa jang meningkat dari usia 45 tahun mendjadi lebih dan oleh pengungsian-baru dari jang meninggalkan Daerah Sumatera Selatan, karena berdagang + dengan djumlah jang meninggal dunia) 1.391.808 orang
 Pemberantasan jang dapat dilakukan selama tahun 1954 91.505 orang.

Tugas jang menunggu pada 1 Djanuari 1955 1.300.303 orang.

—1,5% — 1,5% dan 1,% = 8%).

- Transmigranten-baru jang butahuruf dengan kontra-usaha sendiri dan telah dimulai tahun 1954 dengan kursus-kursus-demonstratief, naik selama 5 tahun 2%.
- Djumlah kenaikan $8\% + 2\% = 10\%$ $\times 1.300.303 \pm \dots\dots\dots 130.000$
Djumlah-besar butahuruf-dewasa 1.430.000
- Penjusutan butahuruf-dewasa, karena merantau dan meninggal-dunia, tiap tahun dikira, 0,5% (6 tahun = 3%).
- Dari jang berusia 45 tahun berpindah keusia' 46 tahun, dihitung $1/33$ atau 3% djumlah orang-dewasa jang butahuruf (selisih $45-12 = 33$) diperkirakan dengan procentage jang lebih ketjil 2,5%. Enam tahun 15%.
- Djumlah penjusutan selama 6 tahun (tahun 1955-1960 = $3\% + 15\% = 18\%$. Namun dihitung lebih ketjil lagi, ialah 15% atau $15\% \times 1.430.000$ orang ... 214.500
Tugas-definitief : 1.215.500
- Hasil „Zone-sijsteem” selama 6 tahun :

300.000 orang.
264.000 orang.
223.000 orang.
197.000 orang.
163.000 orang.
Tahun 1960 dipakai) 101.500 orang.
sebagai koreksi dan) <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>
hasil jang sekurangnja) 147.000 orang dihitung
hanja sebagai djumlah
1,5% dan 1% = 8%).

1.215.500

SEHAT
 PEI BAGA
 MASAKA
 SEDEPRHA



Pengetahuan kaum wanita desa harus mendapat perhatian kita pula.

a).

VII.

berpenduduk antara 500 s/d 4.000 orang dengan tingkat buta huruf dibawah rata-rata 40%.

- 3). Daerah-daerah yang dapat digolongkan sulit/berat daerah-daerah dalam Zone C-1 dan C-2. Dengan rentjana-rentjana Pemerintah tentang perbaikan jalan, Zone C-1 telah dimasuki dengan tahun 1957. Daerah-daerah sulit/berat lain daerah-daerah-pertanian di Bangka, yang penduduk hanya tinggal satu hari saja dalam sepekan mereka.
- 4). „Zone-sijsteem” adalah ilham yang dilahirkan oleh alamat: „routine-inspectie” selama 3 bulan, mencakup \pm 11.500 km. mendatangi seluruh daerah Selatan.

VII. Rentjana-pelengkap untuk tahun-tahun 1955 dan 1956

- 1). Timbulnya rentjana²-baru sebagai penjemputan perbaikan dari perbuatan² masyarakat yang melampaui tjita-tjita Pendidikan Masyarakat pada tahun-tahun dan sebelumnya.
- 2). Masyarakat telah lebih tjerdas.
- 3). Keadaan perhubungan lebih baik, pembangunan pendidikan mendapat tempat didepan bagi masyarakat.

Perintjian-rentjana (dalam garis-besar) untuk dilaksanakan Daerah III-Sumatera Selatan :

- 0). K.P.U. Melaksanakan dengan tegas syarat²-bagi sebuah K.P.U. disamping penjaringan yang tajam terhadap pe-
Hanya ditempatkan didaerah-daerah benar-benar membutuhkan dan ada bahwa K.P.U. itu tidak akan menjeta ekor-tikus” yang menjolok.
Memperbanyak jumlah kader-berb K.P.U. sebagai pendukung/pembuat dalam lapangan pendidikan-masyarakat

..... Jang telah ada sekarang dalam Daerah Sumatera Selatan berbanding dengan P.B.H. sebagai 1 dengan 6. Tahun²-selandjutnja akan ditingkatkan mendjadi perbandingan sekurangnja 1 : 5 dengan penambahan buku-buku (diusahakan) jang sungguh² memberikan manfaat-langsung bagi daerah jang bersangkutan disamping memikirkan bentuk daerah² itu sendiri.

..... Sematjam Latihan Kader Olahraga Masyarakat tidak lagi diadakan oleh Djawatan (pembiajaannya, penyelenggaraan-tempat dan pendaftaran-penjaringan pengikut diurus langsung) oleh sematjam Panitia-penjelenggara.

Inspeksi Pendidikan Masyarakat hanya memberikan djasa-djasa seperlunya (Pelatih dan alat-alat dalam diumlah jang sangat terbatas). Praktik jang demikian akan terdjadi dan dapat dilaksanakan, karena dasar pertimbangan tersebut timbulnja dari masyarakat sendiri.

Daerah III-Sum. — Selatan dalam tahun 1955 akan telah dapat memulai mengadakan Latihan-Pimpinan Olahraga-masyarakat Khusus untuk kalangan Wanita.

an Mengadakan Latihan berbagai tingkat Pemimpin Kepanduan dengan tjara-pelaksanaannya sama dengan djalan diatas (olahraga).


..... Mulai menggeserkan Panti-panti Pemuda jang tidak dapat lagi memenuhi tugasnja dalam sebuah ibukota Kabupaten, ke sebuah/dua desa/ibu-kota Ketjamatan (Kawedanaan). Praktik jang telah dilaksanakan dalam tahun 1954, ialah penempatan 2 buah Panti-panti Pemuda dalam dua buah ibukota Ketjamatan

dalam melaksanakan kursus-kursus
P.B.H. setjara demonstratief.

g). Kewanitaan Oleh perimbangan djumlah dan pert
sanggupan beladjar dan menerima
antara kaum wanita dan prija, kurs
wanita akan ditempatkan lebih banja
nja dari tahun-tahun jang lalu.



**DAERAH PROPINSI
DJAWA BARAT**

 Ibu Kota Propinsi.

DJAWA BARAT

KURSUS P. B. H.



D. SOEMAWIDJAJA
Kepala Inspeksi
Prop. Djawa-Barat

Bilamana kita meneropong hasil sebuah Kursus, maka disamping persoalan jang mengenai principe landasan dari pendirian Kursus tersebut menondjol ke-muka beberapa factor jang tidak dapat dikesampingkan, bilamana kita mengha-rapkan hasil jang sebaik-baiknya. Factor² tersebut adalah a.l. :

1. ketjakapan tenaga pengadjar
2. keadaan para peladjar
3. methode jang dipakai dan
4. biaja

Tentang principe landasan dari Kursus Pemberantasan Buta Huruf tidak usah di-persoalkan lagi, karena sudah tjukup dje-las dan oleh umum diakui kebaikan dan keharusannja.

Marilah kita sekarang melihat apa jang telah dihasilkan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat dalam lapangan P.B.H.

<i>Djumlah :</i>	<i>Achir th. 1951 :</i>	<i>Achir th. 1952 :</i>	<i>Achir th. 1953 :</i>
1. Kursus	46.511	83.083	71.260
2. Guru	57.414	77.777	67.563
3. Murid	1.788.707	2.694.031	2.440.434
4. Lulusan	680.517	1.434.861	1.492.299

Dihubungkan dengan rentjana 10 tahun, jang memaksakan kepada kita memproduksier hasil tahunan berupa lulusan semendjak th. 1951, sedjumlah 4½ djuta orang — menurut perkiraan —, maka angka² tersebut diatas tentu tidak akan memberikan rasa optimisme.

Bagaimanakah angka² ini untuk Propinsi Djawa-Barat ?

n „lega“ dalam menghadapi usaha P.B.H. Menurut keadaan bulan II/1954 yang masih buta huruf di Djawa-Barat ada 5.401.204 orang yang berarti, bahwa $37\frac{1}{2}\%$ yang masih harus diberantas.

Datpakah kita mempertjepat proses productie yang meluas? Dengan tegas djawabnja : *Dapat*.

Pada achir th. 1953 djumlah murid 892.202 dan yang lulus tahun ini 359.061 (40%). Kalau andai kata yang lulus tahun 1953 (892.202 orang) maka djumlah ini — setjara kasar — tidak selimpang dari djumlah productie lulusan tahun dari 1955 — 1960 yang harus dihasilkan supaya pada achir th. 1960 tidak ada lagi yang buta huruf. (Dalam bulan Djuni '54 yang buta huruf di Djawa-Barat 5.401.204 orang ; ini berarti tiap² tahun, dari mulai tahun 1955 harus dapat diluluskan $\frac{1}{6} \times 5.401.204 =$ k.l. **900.000** orang).

Bagaimana tjaranja untuk mempertinggi djumlah lulusan yang dapat mencapai kenjataan, bahwa murid² itu tidak dapat ikut udjian dengan alasan : tidak ada kesempatan, perasaan segan, malu dsb. tidak dapat disangkal djuga, bahwa kenaikan prosentase yang lulus ini sedikit banjaknja dapat ditjapai dengan *memperbanyak* para pengadjar jaitu guru² K.P.B.H. Kalau dulu sekolah dengan formasi :

1. Europ. Hoofdacte 1 Ind. Hoofdacte dan yang membantu L.A. dapat mendjamin hasil udjian masuk ke perguruan tinggi djutaan sebaik²nja, maka dengan seorang guru P.B.H. yang membantu yang tinggi dapat djuga diharapkan akan meluluskan prosentase yang tinggi pula.

Dengan bantuan dari fihak Pamong Pradja, wang dari pemerintah yang untuk keperluan ini disediakan Rp. 200.— per Kepala Sekolah telah diselenggarakan Latihan Guru² P.B.H. selama 3 bulan di masing-masing, sebuah desa pertjobaan di Kawedanan Balaradja Kawedanan Gegerang (mulai achir bulan Oktober 1954). Dari tiap² Kecamatan dikirimkan satu orang Guru K.P.B.H., ditambah dengan orang

berdekatan dengan tempat latihan itu, djumlahnja mendjadi 25 orang.

Dalam latihan ini harus ditekankan kepada methodiek dari P.B.H., supaja guru² P.B.H. itu betul² tjakap dalam technieknja mengadjar. Dari daftar peladjaran jang tertjantum dibawah ini dapat dilihat accentuatie jang dimaksudkan.

Daftar peladjaran Kursus Guru² P.B.H. Kaliasin.

Mata peladjaran :	Theorie	Praktijk	Keterangan :
1. Kemasjarakatan	2 X	—	per minggu
2. Ilmu Djiwa	3 X	—	
3. Pantja Sila	1 X	—	
4. Sedjarah	2 X	—	
5. Kewanitaan	2 X	—	
6. Administrasi	1 X	—	
7. P.B.H.	6 X	2 X	
8. Kepemudaan	1 X	—	
9. Pama-Pami	2 X	1 X	
10. K.K.O.D.	4 X	2 X	
11. T.P.P./T.P.R.	2 X	1 X	
12. Bersenam	—	7 X	
13. Susunan Pemerintahan	1 X	—	
14. Pemilihan Umum	1 X	—	
15. Kemakmuran Desa	1 X	—	
16. Gotong Rojong	1 X	—	
17. Kewarganegaraan	1 X	—	
18. Landelijke Hygiene	1 X	—	
19. Budi Pekerti	1 X	—	

Disamping pengetahuan² disekitar PBH diberikan mata² peladjaran lain, sehingga Kursus tsb. dapat djuga dianggap sebagai Kursus Kader Pembangunan Masyarakat (Desa).

Memang kalau mengingat daftar peladjaran tsb. — apalagi kalau dapat diperpanjang waktunya — akan dilahirkanlah bukan sadja guru² PBH jang „bevoegd” akan tetapi djuga Kader desa jang mempunyai pengetahuan jang veelzijdig. Diharapkan dengan guru² berkali-ber demikian djumlah lulusan KPBH akan lebih banyak.

Keadaan para peladjar, dilihat dari sudut kemampuan untuk menerima sesuatu, dapat dikatakan sama, hanja waktu jang terluang untuk beladjar sesuatu, adalah berbeda-beda. Waktu beladjar untuk mereka jang ada di Kawedanan Sindangbarang (Tjiandjur Selatan)

adalah berlainan dengan untuk mereka yang ada di Kotabesar Tjirebon. Pokoknya : waktu beladjar ini harus diselaraskan dengan kesempatan yang ada pada para peladjar dengan pimpinan dari pihak yang mengadjar. Dengan demikian Kursus PBH ini ada yang diselenggarakan pada sore hari (ini yang terbanjak di Djawa-Barat), ada yang malam hari setelah sembahjang isa (seperti di daerah Krawang), ada yang pagi² seperti kaum wanita diwilayah Tjibaliung (Banten Selatan).

Methode yang dipakai dalam pemberantasan buta huruf ini (methode massaai dengan mempergunakan bahasa daerah) dapat dikatakan cukup baik. Yang menjadi persoalan ialah-bilamana perkara pengangkutan suah tidak menjadi soal lagi — : para penyelenggara biasanya sudah merasa *segan* sebelum mereka mulai. Dengan persiapan² yang cukup (seperti di Kota Besar Bandung, Tjiandjur, Madjalengka, Sukabumi dll.) dapat diharapkan akan bertambahnya jumlah lulusan.

Dalam pada itu di Kota Besar Tjirebon (2-talig) buku² yang tertulis dalam bahasa Indonesia lebih menguntungkan dari pada buku² dalam bahasa daerah.

Soal biaya :

Sudah kira² menjadi „traditie” bahwa daerah Djawa-Barat hanya mendapat djatah 9000 (sembilan ribu) Kursus P.B.H. Mengingat jumlah penduduk yang banjaknya k.l. 14½ djuta itu, maka pembagian 9000 Kursus itu (djika dibandingkan dengan daerah² lain) adalah kurang. Djatah ini harus ditambah. Betul ada desa yang mempunyai hanya satu Kursus sadja, tetapi sebaliknya ada djuga desa, dimana terdapat sampai 11 (sebelas) Kursus.

Disamping itu kebidjaksanaan financiering Kursus² ini *harus stabil*. Kita telah mengalami soal yang pahit pada pertengahan th. 1954, ialah bahwa biaya yang Rp. 25.— per Kursus itu sedjak bulan Djuli 1954 dihentikan. Dengan dihentikannya post untuk guru² PBH ini, para pedjabat diwilayah kehilangan pedoman bekerdja.

Bagaimana halnya dengan pemeliharaan dan susulannya ? Ada baiknya, kalau dilihat dengan beberapa angka :

Angka² di Djawa-Barat :

	th. 1950	th. 1951	th. 1952	th. 1953
	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
1) P.B.H.	108.610	217.634	365.834	359.061
	Pembatja	Pembatja	Pembatja	Pembatja
2) T.P.P.	—	25.918	74.628	45.595

Kita bitjarakan sekarang angka² tahun 1953. Jang lulus dari KPBH 359.061 ; pembatja² di Taman Pustaka Pengantar berdjumlah 45.595 orang. Kita tidak dapat memegang kejakinan, bahwa jang membatja di T.P.P. itu adalah semuanja orang² jang baru sadja meleak huruf (mungkin sebagian besar djustru jang tidak keluaran Kursus PBH). Akan tetapi lepas dari pandangan itu, maka djumlah 45.595 dari 359.061 atau kalau diambil dari tahun jang sebelumnya (th. 1952) hanja merupakan 12½ %. Sebagian terbesar (87½ %) dari jang telah lulus itu tidak mendapat/mendjalankan pemeliharaan. Bagaimanakah ini akibatnja ? Angka² dibawah ini akan mentjeritakan akibat²-nja dengan djelas.

Lulusan bulan	Ketjakaan membatja		Ketjakaan menulis
	Bhs. Sunda	Bhs. Indonesia	
a Bln. December 1950	63 %	56 %	40 %
b „ December 1951	64 %	60 %	43 %
c „ April 1953	70 %	68 %	51 %

Untuk mengetahui gambaran jang agak njata, tentang „tahan lama atau tidaknja, bertambah terus atau tetap, atau menurun” ketjakaan membatja dan menulis para lulusan K.P.B.H., maka sebelum conferentie berkeliling di Djawa-Tengah th. 1953 (djustru untuk memba-wa angka² jang concreet ke konferentie tsb.), kepada Kepala Ipmk Madjalengka ditugaskan untuk mengadakan test dalam soal ini. Test ini dilakukan dibeberapa desa pada bln. Sept. 1953 terhadap 3 golo-ngan jaitu :

- mereka jang mendapat idjazah dalam bulan December th. '50 (sudah 2 th. 8 bl).
- mereka jang lulus dalam bulan Desember '51 (sudah 1 th. 8 bl.)
- idem bulan April th. 1953 (sudah 5 bulan).

Angka² diatas menggambarkan bahwa :

- ketjakaan membatja dalam bahasa daerah adalah lebih baik dari pada membatja dalam bahasa Indonesia, sedangkan ketjakaan menulis dengan mengedjutkan „akan menghilang”.
- setelah 2 tahun 8 bulan, 37% buta huruf kembali (bahasa da-erah) ; setelah 1 tahun 8 bulan 36% djatuh buta huruf lagi, dan setelah 5 bulan 30%.

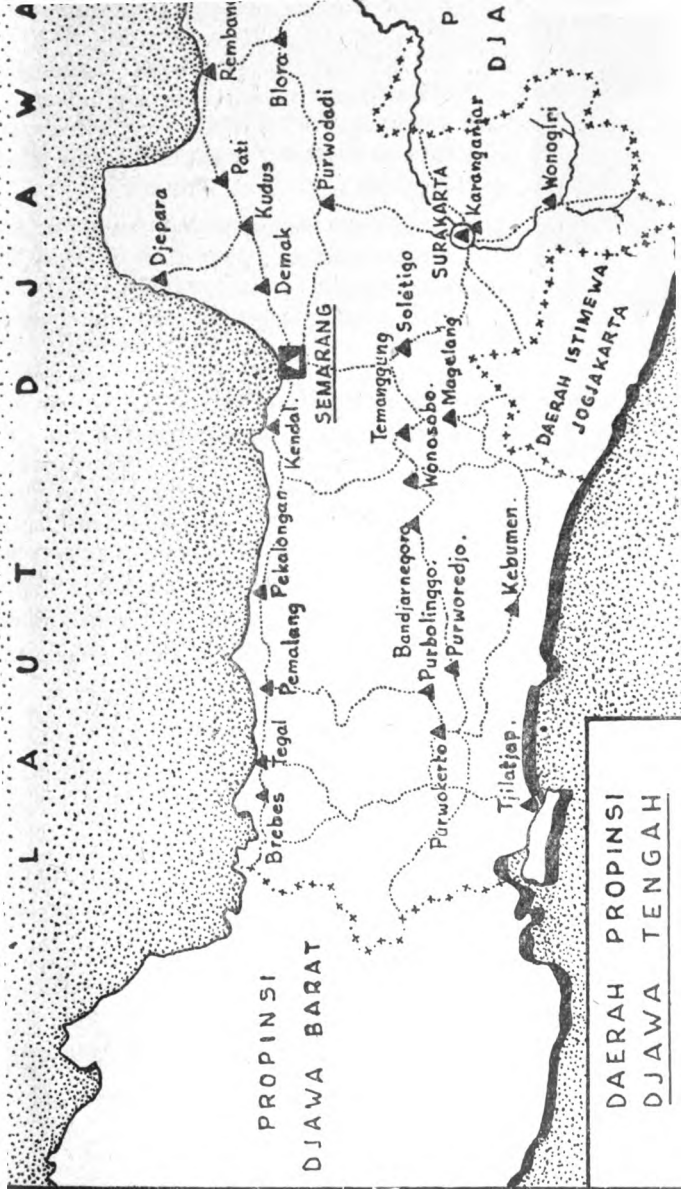


Untuk pelantjar membatia dibutuhkan buku² baik dan banjak antara lain tentang kesehatan.

Djumlah procentage jang buta huruf kembali dihubungkan dengan djumlahnja jang membatja di TPP jang sangat sedikit itu memaksakan kepada kita untuk melihat dan memetjahkan soal nazorg ini setjara bewust dan systematis. Di Djawa-Barat buku² dalam bahasa daerah jang pantas ada di T.P.P. djumlahnja hanja beberapa puluh sadja. Tidak dapat disangkal kebenarannja, bahwa memang kebutuhan untuk membatja (apalagi untuk menulis) dikalangan masjarakat Djawa-Barat masih tipis sekali, akan tetapi bilamana soal ini dikesampingkan, maka tetap djumlah 2 á tiga puluh buku di TPP terasa sangat kekurangan. Pada taraf penghidupan sekarang ini masih sukar dapat diharapkan akan timbulnja keinginan/kenjataan untuk menambah buku² itu atas kemauan mereka sendiri, jang baru sadja terberantas buta hurufnja. Dalam batas² jang tertentu beban ini harus tetap dipikul oleh pemerintah. Ini berarti bahwa tetap Djawatan Pendidikan Masjarakat harus mengeluarkan post jang tertentu, bahkan lebih banjak lagi dari pada jang sudah² untuk keperluan pemeliharaan dan dan pembinaan terhadap para lulusan K.P.B.H. Kiranja tidak mengherankan bilamana seorang „abiturient” K.P.B.H. tidak mau datang lagi ditempat T.P.P. oleh karena buku² seperti : Desa Sukamadju, Riwayat Kangdjeng Nabi Moehammad s.a.w. dsb. sudah beberapa kali dibatjanja, sedangkan tambahan buku² baru tidak ada.

Kesimpulan :

Hasil usaha kita disekitar pemberantasan buta huruf tidak menimbulkan perasaan optimisme, walaupun tidak usah kita dihinggapi perasaan pessimistis.



PROPINSI
JAWA BARAT

DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

DJAWA TENGAH

MENJAMBUUT ULANG TAHUN PENDIDIKAN MASJARAKAT.

Pendahuluan.

Untuk memenuhi surat Djawatan Pend. Masjarakat tgl. 26.8-1954 No. 6147/E/5/I-XII dibawah ini kami sumbangkan uraian kami mengenai pertumbuhan/perkembangan Inspeksi Pend.Masjarakat Daerah Djawa Tengah Semarang selama 5 tahun.



S. HADISUNARTO
Kepala Inspeksi
Prop. Djawa-Tengah

Sebagai Pendahuluan, kami uraikan setjara ringkas, bahwa : masjarakat Djawa Tengah pada umumnja menerima baik adanja Djawatan baru ini, jang didirikan sedjak tgl. 24 Nopember 1949, jalah Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Djawatan ini karena Djawatan jang baru, belum mempunjai tradisi dan timbul mulai Revolusi Kemerdekaan dengan tenaga-tenaga baru pula dalam artian pengalaman dalam Pend.Masjarakat, maka dalam segala menelorkan idee² jang berdasarkan kepada kebutuhan/keadaan dan kemampuan masjarakat serta kemampuan Pemerintah sendiri untuk memberikan bantuan sebagaimana mestinja, mula² masih dalam soal mentjari bentuk dan isi jang tepat dengan maksud Pend.-Masjarakat dalam artian jang sebenar-benarnja.

Titik berat dalam mentjari tenaga² Technisch untuk Pend.-Masjarakat, sudah barang tentu harus dititik-beratkan kepada ketjapkan dalam melajani masjarakat dan kemauan keras untuk berbakti kepada masjarakat dengan melalui djalan Pendidikan.

Dalam hal ini, tingginja didikan (diploma) tidak mendjadi titik-berat jang pertama. Hal jang demikian itu, bukan berarti kita tidak menghargai kepada tingginja pengetahuan, sekali-kali tidak.

Disamping kemauan bekerdja jang keras dan kepandaian bergaul, para Petugas/Tenaga Technisch perlu memiliki benar² djiwa-masjarakat jang hanja diperoleh dengan djalan suka bergaul/hidup dengan masjarakat.

Berusaha memberi pengertian Ekonomi praktis kepada disamping memberikan Pengetahuan Umum.

c dapat ditingkatkan: mendidik agar semua warga-negara *tjerdas-tangkas-susila* dan *beramal* serta *bertanggung* hingga masyarakat *sama-rata samabahagia* dapat berwujud a s/d c meliputi soal²: P.B.H., K.K.O.D., K.P.U. tingkat Kewanitaan, dengan Kursus-Wanita dan Kursus Kader Pemuda, Olah-raga dan Kepanduan.

Taman Pustaka Rakjat, Pengantar, Rendah, Menengah (T.P.R./P.T.P.R.,/T.P.R./B. dan T.P.R./C).

PERKEMBANGAN USAHA.

1. Pemberantasan Buta Huruf (P.B.H.).

selama lima tahun, jumlah lulusan P.B.H. I terdapat	1.504.5
P.B.H. II „	425.1
Djumlah	1.929.6

untuk djelasnja, kami persilahkan melihat Statistik dan Gra
 Kesulitan² yang menjejabkan kurang lantjarnja P.B.H.
 n karena tingkat ekonomi rakjat yang masih rendah seka
 ngat susah dikumpulkan dalam waktu² yang tertentu, terut
 ereka yang berkeluarga banyak, karena harus mentjari naf
 Kedua: keinsjafan rakjat tentang nafsu beladjar masi
 kali, karena kemadjuan kepandaiannja itu belum tampak
 asil bagi dirinja.

Hal ini dapat kita ketahui dalam waktu rakjat-des
 engerdjukan sawah atau panen dan bilamana banyak orang
 i-kerdja. (duwè-gawè Djw.), kekurangan alat² peladja
 seretan Honorarium guru² Oktober-Desember 1953, berak
 hadap kemadjuan kursus².

KAWEDALAKEN déning
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
PENGADILAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

i o u e a
o u e a é i
u e o i é a
é i o u e a

wulangan 2



pi-pa

a. ambaléni a é i o u e

b. p.

1. (a pa a)
(é pe é)

ap
ép
3



Matja rambutaning kawed, kawed, dasering
ambangé, ambangé ngléni Nagara

DISAPAK UGER. PENGERTI MATAHARA SAKA SAKAKATA. HAKATON

VI (Tutugé)

Bareng dijamin R
Pak Pawira durung
tanah Djawa. Band
metu Palang Merah
lajang embokné.
Bokné tanpa lajen
tja. Bandjur andjal
gané. Tanggané r
wong anjar. Duru
désa kono. Bok Pa
tulang dikon matj
mau. Kandané sing
né mung awèh ka
an. Ning satemen
jang, mènèhi wer

„Sinar matja” jang diutamakan bagi penduduk jang berbahasa Djawa

Dengan adanya P.B.H. massaal, diharapkan Rentjana 10 tahun dapat tertjapai dengan hasil yang memuaskan.

Sajang sekali bahwa ratusan ribu orang yang sudah terberantas Buta-Hurufnja itu, akan kembali Buta Huruf lagi, karena pemeliharaan kepandaian membuatja dan menulis itu belum mendapat perhatian yang tjukup tentang tjara mengatur dan pembiajaannja.

Adapun tjara meninggikan mutu Guru² P.B.H., jalah dengan adanya Kursus² tertentu yang diselenggarakan oleh Ipmk/Kb/Kk setempat.

2. Kursus Kemasjarakatan Orang Dewasa (K.K.O.D.).

K.K.O.D. yang mula² timbul di Daerah V (Temanggung) sebagai experiment pertama sedjak tahun 1951, kini ternjata sudah dapat di-tjobjakan di-mana², dan hasil pertjobaan itu di beberapa Daerah menunjukkan hasil yang memuaskan, artinja benar² dapat menambah pengetahuan sederhana bagi lulusan² P.B.H. dan pengertian Ekonomi praktis yang dapat meninggikan deradjat ekonomi setempat, berkat hasil dari peladjaran vak praktis yang diperolehnja didalam Kursus.

Ada yang mempunjai vak : Pertukangan, (Modjogedang Karang-anjar) Pertanian, (Wonoroto-Purworedjo), Perchewanan (Danasri-Tjilatjap), Perikanan (Surdja-Pekalongan) Peternakan, dan Kooperasi (Gn. Wetan Rembang).

Kepada Sdr.²/Djawatan² yang bersangkutan, yang telah ikut serta membimbing rakjat kearah menambah pengetahuan praktis tsb. yang njata² bermanfaat bagi hidupnja, kami njatakan banjak² terima kasih.

Hingga kini, K.K.O.D. di Ipmp^r V ada : 695 kursus, 17443 murid laki² dan 7.481 murid perempuan = 24.924 orang, guru 2075 orang. Untuk djelasnja kami persilahkan melihat Statistiek dan Grafiek.

3. Kursus Pengetahuan Umum (K.P.U.).

K.P.U./A, B dan C dapat tumbuh baik di Ipmp^r V, terutama di Karesidenan² Banjumas, Kedu dan Surakarta.

Beberapa bekas Siswa tidak sedikit yang membantu Usaha² Djawatan Pendidikan Masjarakat. Ada yang duduk sebagai anggauta Panitia Penmas setempat, sebagai Guru P.B.H., Guru K.K.O.D., dan tidak sedikit yang giat dalam beberapa organisasi massa setempat.

Dari beberapa Daerah tidak sedikit yang dipilih oleh Rakjat menjadi Kepala Desa atau Pamong-desa lainnja.

Ini membuktikan bahwa usaha kursus tsb. telah dapat menudju tjita²-nja.

Perhatian dalam vak-praktis serta pelaksanaannja/perkembangannja belum dapat kami anggap memuaskan. Pada satu-dua tempat tentu sadja ada jang berhasil baik (Modjogedang Ipmk. Karanganjara dengan vak praktis pertukangan sesuai dengan KKOD ditempat itu). Banjumas djuga dengan vak praktis Pertukangan. Tasikmadu dengan vak praktis Perikanannja. Magelang Kota dengan vak praktis membuat Permainan/Perhiasan dengan kaju triplex-nja dan K.P.U. Wanita Kota Magelang dengan selendang sutra-nja). Kebumen dengan vak praktis membuat batu tulis tiruan.

Sedang diberberapa tempat, vak praktis Keradjinan tangan Wanita dapat dibanggakan.

Pula penjuntikan ayam telah dapat dikerdjakan para siswa K.P.U. jang ber-vak praktis Peternakan.

Tentang pertumbuhan dan perkembangannja, kami harap melihat Statistiek dan Grafiek.

4. Kewanitaan.

Kewanitaan, dengan Kader Wanita dan Kursus Ibumja, dapat kami singkat bahwa : soal tsb. mendapat perhatian baik dari masjarakat.

5. Kepanduan, Pemuda dan Keolah-ragaan (K.P.K.).

Bagian Kepanduan, Pemuda dan Keolah-ragaan, sifatnja hanja menjadi Badan-Penghubung dan memberikan bantuan moreel-materieel.

Dalam hal ini, soal kemadjuan olah-raga dikalangan rakjat di Diawa-Tengah pada umumnja sangat memuaskan. Hampir di tiap² Ketjamatan bahkan diberberapa desa terdapat Lapangan Olah-raga.

Bantuan Pemerintah mengenai alat² olah-raga benar² dapat mendorong rakjat kearah kegemaran berolah-raga, terutama sepak-bola, volly ball dan Badminton.

6. Taman Pustaka Rakjat (T.P.R.)

T.P.R./P.	terdapat di	3732	tempat,	1634713	buku/madjuallah	134012	orang
T.P.R./A.	"	"	504	"	144126	"	63296
T.P.R./B.	"	"	35	"	66998	"	38075
T.P.R./C.	"	"	2	"	29333	"	606413

Perhatian dari masyarakat tentang buku² T.P.R. tjukup. Jang dirasa sangat perlu segera ditambah jalah buku² T.P.R./P jang semata² dipergunakan nazorg bekas lulusan P.B.H. Dalam hal ini, Ipmp. V telah menerbitkan „Pustaka Marta” (Madjallah bulanan untuk nazorg P.B.H.) dan beberapa kitab nazorg untuk T.P.P.

Gerak perkembangan kemadjuannya dapat kami ringkaskan sbb.: Djumlah buku² sangat dirasa kurang, lebih² untuk TPR/A buku² jang berbahasa Daerah dan terutama sesuai dengan masyarakat setempat. Bagi TPR/B maupun TPR/C buku² bahasa Indonesia bersifat roman bermutu dan pengetahuan populair masih belum dapat mengimbangi buku² bahasa asing.

Madjallah² jang diterima dari Pusat sangat disajikan kelambatangnja, hingga menyebabkan kurang perhatian masyarakat terhadapnja (TPR/A-B-C.) Asosiasi (kerdja sama) perpustakaan antara Djawatan² dapat berdjalan dengan baik dan beberapa perpustakaan sudah melangkahkan kaki mengadakan Perpustakaan beredar (leestrommel) serta perchususn (Perpustakaan kanak²).

7. L a i n . l a i n .

Perhatian Dunia-Luar terhadap usaha² Ipmp. Djawa Tengah ternjata besar sekali, terbukti dari penindjauan Dr. Kidwy dari Unesco 1950, tuan dan njonja J.C. James Yon, Pres. Pendidikan Masyarakat sedjagad jang berpusat di New York pada bulan Maret 1952. Kemudian pada bulan April 1952 (tgl. 1 s/d 4) Dr. Lehning pemimpin Perpustakaan dunia jang berkedudukan dan berpusat di New York menindjau perkembangan perpustakaan di daerah Ipmp. V, demikian pula tuan Dunningham (dari Unesco jang dibantukan di Kem. P.P. & K.) pada tgl. 15 Djuni 1953 selama beberapa hari menindjau perpustakaan djuga didaerah Ipmp. V.

Lain dari itu, penindjau² dari Ipmp. Daerah Propinsi lainpun ada djuga jang menindjau ke Ipmp. V, antaranja :

1. Dua orang penindjau Wanita (Sdr. L.B. Melletu Cossoy dan N. Enggawu Untutundu) dari Sulawesi menindjau Banjuinas pada bulan VI-1951.
2. Sdr. Tindas dan Ibu Sutardjo dari Ipmp. Sulawesi.
3. Sdr. Ruhupaty, Kepala Ipmp. Maluku, pada bulan April 1953.
4. Sdr. Mangkusoparto dan Siswobroto dari Djwt. P.P. dan K. D.I. Jogjakarta pada tgl. 24-IV-1953 menindjau Ipmp. Pati.
5. Pada bulan April 1953 itu djuga Sdr.²: Soeemawidjaja dan Karmasoetisna dari Ipmp. Djawa Barat menindjau objecten pada Ipmp/Kb. Magelang.

6. Ketjuali itu, dari Djawatan Penmas Pusat selain menindjau, Bag. Penerangannya pada tgl. 17 s/d 19 September 1952 mengadakan opname film object² usaha² Penmas (PBH massaal, KKOD d.l.s. di Wilajah Ipmk Pati).
7. Dalam tahun 1953, Ipmp. V menerima Konperensi keliling semua para Inspektur Pend. Masjarakat seluruh Indonesia, diikuti oleh wakil² dari Kementerian², Pers dan Orang² terkemuka, bertempat djuga di Ipmp. V (di Salatiga).

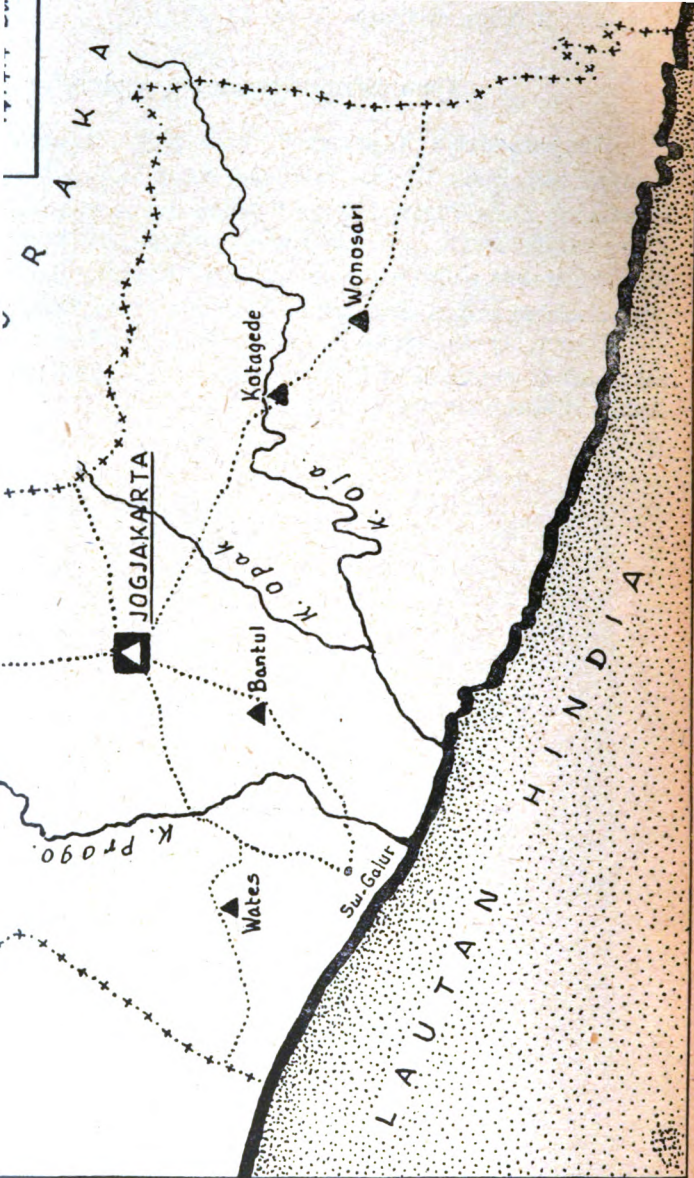
„Tjara mempertinggi mutu pegawai”.

Dengan adanya Konperensi², baik jang diadakan oleh Ipmp. maupun oleh Ipmk/Kb/Kk. setempat, selain kita usahakan agar dapat menambah mutu Pegawai dengan djalan discussie, soal-djawab d.s.b., pula dengan adanya Aplikasi Kursus para Kepala Ipmk/Kb/Kk jang diselenggarakan oleh Pusat dan Aplikasi Kursus para Penilik Penmas jang diselenggarakan oleh Ipmp V dalam bulan Oktober 1954.

Disamping itu, Ipmp V menerbitkan „BERITA USAHA” jang sekali-sekali memberikan Pedoman untuk melaksanakan tugasnja, baik Administratief maupun Technisch.

Semarang, 30 Oktober 1954.
Kepala Inspeksi Pend..Masjarakat
Propinsi Djawa Tengah

(R. Hadisoenarto)



DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

Urusan Panitia Pendidikan Masyarakat.



Mr. NITIDIPURO.
Kep. Insp. Pend. Masj.
Daerah Istimewa Jogjakarta

Status Panitia Penmas sudah mendekati kesempurnaan sesuai dengan yang ditjita-tjitakan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat.

Pada umumnya Pamong-Pradja (Bapak Panewu) duduk sebagai ketua, sedang anggota²nya terdiri dari wakil² instansi yang terdapat dalam wilayah itu. Didalam D.I.J. terdapat 68 Panitia Penmas.

Dengan diadakannya rapat² panitia, maka nampaklah kerja sama yang erat sehingga terwujudlah gerak interdjawatan, yang pada hakekatnya ingin mengadakan masyarakatnya melalui usaha² Pendidikan Masyarakat.

Urusan P.B.H.

Sebelum diadakan usaha penghematan, di tiap² desa rata² mempunyai 3 a 4 buah kursus P.B.H. Uang sokongan (bantuan) dari Djawatan Penmas untuk kursus² pada umumnya dipergunakan sekedar untuk pengganti djerih pajah gurunya, sehingga dengan demikian timbulah istilah „honorarium guru P.B.H.”. Maka setelah pada pertengahan tahun 1952 dimulai dengan dasar pembagian djatah dalam tiap² usaha, tampaklah suatu kemunduran dalam usaha P.B.H. Beberapa orang guru terpaksa meletakkan bebannya sehingga di tiap² desa tinggal sebuah kursus saja. Mengenai rentjana Djawatan didalam mempertajam usaha pemberantasan buta huruf dengan djalan mengadakan P.B.H. massaal, barulah dalam pertengahan tahun 1954 ini mendapat perhatian dari petugas² Penmas, di Kabupaten².

Urusan Kursus Kemasjarakatan Orang Dewasa (K.K.O.D.).

Seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta pada saat ini telah dapat menundukkan 10 buah K.K.O.D. yang betul² dapat merupakan sesuatu organisasi sesuai dengan harapan Djawatan Pendidikan Masyarakat.

Kita tahu bahwa tjita² dari Djawatan mengenai K.K.O.D. itu baik dan tepat sekali, tetapi sajanglah bahwa tjita² tsb. sukar dipraktekkan. Dalam udjudnja usaha ini tidak djauh berbeda dengan usaha K.P.U. Tetapi bila guru² K.P.U. tiap² bulannja menerima honorarium, mengapa guru² K.K.O.D. tidak mendapat apa². Keadaan inilah jang merupakan salah satu faktor kesulitan sehingga K.K.O.D. tidak mudah dilaksanakan. Persoalan ini kiranja patut mendapat perhatian dari Djawatan Penmas.

Latihan Guru P.B.H.

Latihan ini memang sangat dibutuhkan sekali oleh para guru² P.B.H.

Apabila kita mengikuti peraturan² dan rentjana² peladjaran dari latihan tsb. maka ternjata mempunyai maksud untuk menambah pengetahuan para guru² P.B.H., dan dengan lain perkataan latihan ini bersifat kursus applikasi. Tetapi sajang, karena dengan adanya peraturan penghematan keuangan, maka latihan jang sangat dibutuhkan inipun tidak luput dari peraturan tsb. Perhubung dengan beaja jang sangat terbatas itu, maka pada umumnja latihan diadakan selama 3 hari.

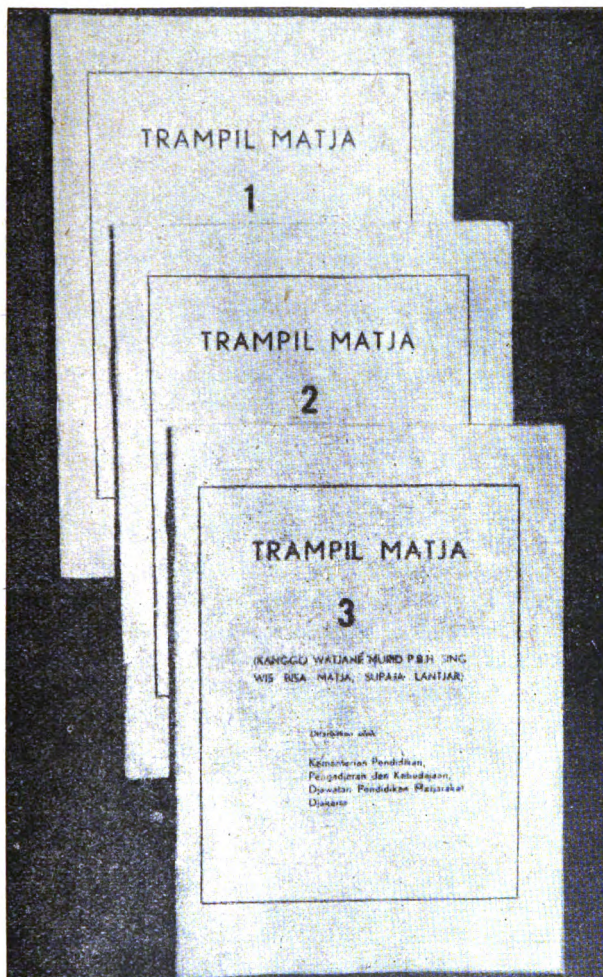
Memang kami akui bahwa terlaksananja latihan itu belum dapat sesuai dengan kehendak Djawatan, disebabkan beberapa hal diantaranya beaja jang terbatas sekali itu. Latihan dalam tahun 1954 ini terutama dititikberatkan pada pelaksanaan P.B.H. massaal. Untuk mengatasi kesukaran mengenai beaja, maka beberapa Kabupaten telah mengadakan beleid mengadakan latihan dengan gabungan dari 2 atau 3 kapanewon, malahan Kabupaten Gunung-Kidul selalu memusatkan latihan guru P.B.H. ini di Kabupaten, dengan dikundjungi oleh guru² P.B.H. dari 13 kapanewon.

Urusan taman pustaka pengantar.

T.P.P. merupakan salah satu usaha nazorg bagi mereka jang telah terbatas buta-hurufnja. Berhubung djatah T.P.P. untuk Daerah Istimewa Jogjakarta hanja 500 buah sadja, maka Taman Pustaka Pengantar ini belum dapat merata keseluruh pelosok². Pada umumnja pemeliharaan T.P.P. boleh dikatakan belum sempurna. Hal ini disebabkan antara lain :

1. tidak ada tenaga jang diwadjabkan mengurusnja.
2. tidak ada beaja, baik untuk pemeliharaannya maupun untuk mengangkutnja.
3. belum ada pengertian tentang tjara mengerdjakannya.
4. kurang bimbingan dari fihak atasan.
5. buku² kurang disukai oleh masjarakat setempat.

Perlu kami terangkan disini bahwa masjarakat desa itu pada umumnja masih menjukai buku-buku jang berbahasa daerah dan jang memuat tjeritera² wajang tembang dan sedjarah (babad). Pada saat ini pemeliharaan T.P.P. itu diserahkan kepada bagian sosial kelurahan².



**Buku ini djuga merupakan pelatih membatja
bagi lulusan kursus P.B.H. (Bahasa Djawa)**

Aksi tjegatan.

Achir² ini dilakukan oleh petugas² dari Djawatan Penmas Pusat dan Daerah bersama² pemeriksaan ketjakapan membuatja dan menulis dari orang² yang telah beridjazah P.B.H. Hatsil dari pemeriksaan itu ternjata sangat memuaskan. Hal ini memberi bukti, bahwa orang² itu mau dan dapat mempergunakan ketjakapannja yang telah mereka peroleh dari kursus P.B.H.

K.P.U. pandangan kedepan.

Usaha pembangunan pada dewasa ini mempunyai tudjuan men-tjiptakan masjarakat baru yang makmur dan sedjahtera. Pada suatu sa'at kita akan tjukup mempunyai kaders yang sedikit demi sedikit telah menundjukkan aktiviteitnja.

Berkat kerdja sama yang sebaik-baiknja antara kaders dan masja-rakat, insja Allah akan berwujudlah dengan segera perobahan² dida-lam masjarakat yang menundjukkan kemadjuan atau perbaikan.

Terutama, desa-lah yang akan mengalami revolusi pembangunan ini setjara besar²an.

Langkah kita dalam hal ini ialah dengan mengusahakan didesa² adanja lembaga², tjara² dan alat² hidup bermasjarakat sebagai dalam kota ketjil. Kita ingin menjaksikan pembangunan desa yang membawa perobahan².

I. Kemakmuran :

- a. luasnja mata pentjaharian, orang² tidak ada yang masih me-nganggur, mentjari-tjari pekerdjaan.
- b. bertambah baiknja segala produksi.
- c. afzet yang luas, pendjualan hasil bumi berdjalan dengan mu-dah dan seimbang dengan pembeajaannja.
- d. ramainja perdagangan, orang mudah akan mendapat barang² kebutuhan konsumsi.
- e. banjaknja toko².
- f. berdirinja tempat² pertukangan.
- g. tumbuhnja Koperasi rakjat yang subur dan kuat.
- h. hubungan dan lalu lintas teratur baik.

II. Kesedjahteraan :

- a. penduduknja sehat².
- b. rumah dan halamannja bersih.
- c. tidak ada orang yang masih buta huruf lagi.
- d. banjak orang pandai dan suka beladjar.
- e. tidak ada orang miskin (pengemis)
- f. orang dapat memperoleh pertolongan dari dokter bidan.

- adanya lampu².
- d. desa mempunyai organisasi gotong-rojong, yang dipraktekan dalam waktu peralatan atau kematian.
 - e. orang suka melatih dalam sesuatu kesenian sebagai alih buruannya.
 - f. dikelurahan sudah ada polikliniek, bibliotheek.
 - g. sering² diadakan perkumpulan² bagi kaum wanita (daring).
 - h. olah-raga maju dan menjadi kegemaran rakyat.

Keamanan Terjamin baik : tidak ada gangguan².

- a. terhadap barang² milik perseorangan.
- b. dalam menganut sesuatu politik atau agama.

Keadilan : Rakyat taat terhadap pemerintahannya sendiri ; hukum² demokrasi telah dijalankan sebaik-baiknya.

Apabila keadaan di desa sudah menjadi demikian, maka orang akan merasa senang (matuk) tinggal di desanya, sehingga kemauan² untuk meninggalkan desanya menjadi berkurang, kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali.

Masyarakat kota-pun akan banyak mengalami kemajuan, baik kerdja sama yang sebaik-baiknya diantara para pemimpin masyarakatnya yang mendapat bantuan dari para Kaders dari Kanan C.

Achirnya tertjapailah tjita² bangsa kita akan menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka dalam negara yang

Pantaslah kiranya negara yang kita idam-idamkan itu menjadi : „Negari pandjang-apundjung pasir wukir loh djinawi gah Kerta rahardja dsb”.

Masa itu akan datang dan untuk itu perlu kita bekerdja dan

Bahagian kewanita-an.

Pekerdjaan Bagian Kewanitaan dalam garis besarnya kita jadikan 2 object, jaitu :

- a. pekerdjaan administrasi (kantor)
- b. pekerdjaan keluar (penindjaunan).

Pekerdjaan administrasi (kantor disamping mengerdjakan surat² masuk dan keluar kita titik beratkan mempeladjar petundjuk² mengenai tugas kewadjaiban Bagian Kewanitaan Pend. Masjarakat.

Pekerdjaan keluar, kami lakukan bersama² atau setahu dengan Pend. Masj. Daerah Istimewa Jogjakarta, baik mengenai ketentuan penindjaunan maupun objectnja.

Adapun object jang dapat kita selenggarakan dalam tahun ini tidak seluas seperti tahun jang lalu, karena pada umumnja usaha kewanita² dalam tingkat sekarang masih bersandar kepada ada dan tidaknja, serta besar dan ketijlnja biaya.

Demikianlah, maka dalam th. 1954 ini berhubung dengan adanya penghematan keuangan, usaha Bagian Kewanitaan hanya dapat diusahakan 50% dari pada usaha tahun jang lampau.

Pertumbuhan T.P.R.

Nafsu membatja dikalangan rakjat telah kelihatan meningkat, hal ini sangat menggembirakan dan Pemerintah tidak sia² belaka untuk mengeluarkan beaja berdjuta-djuta rupiah guna membeli buku² batjaan.

T.P.R. seluruh daerah Istimewa Jogjakarta menundjukkan bertambah besar permintaan pindjaman kitab² untuk dibatja baik dirumah maupun di tempat batjaan.

Rata² T.P.R./B seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta tiap hari buka, dikundjungi oleh \pm 20 orang pemindjam kitab.

Dalam keadaan demikian ini kami dari pihak petugas-petugas Perpustakaan harus dapat mendjaga dan memupuk kepada para pemindjam kitab² T.P.R. agar mereka tetap mempunyai semangat membatja buku² guna meluaskan pengetahuan sesuai dengan Negara kita jang telah merdeka.

Hubungan T.P.R. dengan Perpustakaan setempat ada baik, sehingga kerdjasama dalam lapangan Perpustakaan dapat tergalang.

Tetapi kemadjuan T.P.R. sedikit banjak terhambat oleh :

- 1e. Penghematan th. 1953 Pengiriman madjalah² kepada T.P.R./A dikurangi banjak atau dihentikan sama sekali.
- 2e. Tidak adanya fondsen dikantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat Propinsi untuk membeli kitab², madjalah² dan warta Harian jang terbit ditempat.

Djumlah T.P.R.

Djumlah T.P.R. Seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta ada 45 T.P.R./A 5 T.P.R./B dan 1 T.P.R./C.

Bahan batjaan.

T.P.R. berisi kitab² jang baik² dan sesuai dengan tingkat pengetahuan pembatjanja. Tjeritera²nja pun menarik hati pembatja. Kebanyakan mereka memindjam kitab dalam golongan I (Kesusasteraan) dan golongan XII (tjeritera roman dll.) jang paling banjak lain golongan merata. Dengan demikian minat pembatja dikalangan rakjat timbul besar sekali.

Didaerah² jang berbahasa Djawa pada umumnja, dan di Daerah Istimewa Jogjakarta chususnja, masjarakat masih tetap gemar membatja kitab² karangan pudjangga Djawa, seperti Ronggo Warsito dll.

Pun kitab² tjeritera kehuaran Balai Pustaka jang isinja ta' bertenangan dengan tjita² Negara kita dibutuhkan juga oleh masjarakat.

Baik kiranja di Inspeksi Pend. Masj. Propinsi Daerah Istimewa selekas mungkin terbentuk usaha penerbitan kitab² untuk menambah bahan batjaan jang sesuai dengan djiwa masjarakat setempat.

P e g a w a i .

Perpustakaan Rakjat di Daerah Istimewa Jogjakarta lain dari pada jang lain dalam hal kepegawaian, karena seluruh Perpustakaan Induk Kabupaten Daerah Istimewa Jogjakarta sampai sekarang masih dikerdjakan oleh tenaga lepas. Tetapi meskipun demikian toh pekerjaan perpustakaan dapat berdjalan tjukup baik.

Bagian K.P.K.

Bagian K.P.K. dalam pendidikan masjarakat, pada hakekatnja merupakan dua faktor. I K.P.K. sebagai subject, dipergunakan sebagai saluran pendidikan ketiga (diluar bangku sekolah) dengan memakai dasar „titik-titik pertemuan” program dengan organisasi² Pemuda, Olah-raga — Kepanduan. II sebagai object, dalam hakekat kenjataan, baik Pemuda, kepanduan maupun keolahragaan berkisar kepada „manusia muda” sebagai object utamanja. Demikianlah hakekat kenjataan jang kita hadapi didalam praktek dalam wilayah Daerah Istimewa Jogjakarta.

Apa jang kita hadapi sekarang usaha K.P.K. dalam Pendidikan Masjarakat berkisar dari Pendidikan Masjarakat — (idee-nja) — digerakkan oleh pendidikan masjarakat — (penglaksanaannja), disodorkan atau diperuntukkan bagi „Pemuda” dalam tiga lapang (kepanduan — Pemuda — Keolahragaan). Djadi usaha K.P.K. belum dapat merupakan usaha pendidikan masjarakat jang tidak langsung dalam hal ini Pendidikan Masjarakat masih harus selalu merupakan promotor dan pendukung jang utama dan mutlak. Functie dari fihak Pendidikan Masjarakat jang seharusnya hanja mendorong memberi bantuan dimana mungkin, serta menghubungkan organisasi² kepanduan — Pemuda

dan keolah-ragaan dengan instansi² pemerintah yang lain untuk mendatangkan kerdja-sama, terpaksa masih harus diminta tenaganya se-tjara mutlak.

Maka dengan tindjauan tsb. diatas, menurut pendapat kami dalam melaksanakan ini Pendidikan Masjarakat hendaknya mempunyai petu-gas yang sedikit-dikitnja mendekati, disamping memiliki deradjat ting-kat pengetahuan yang minimum „middelbaar-opgeleid”, harus :

1. dipilihkan pendjabat yang mempunyai interesse dalam soal² kepanduan — Pemuda — keolah-ragaan sehingga dapat me-nimbulkan banjak initiatief dan activiteit.
2. dipilihkan pendjabat yang dapat mendekati gerakan kepan-duan — Pemuda — keolah-ragaan, karena bagi mereka yang sama sekali sudah djauh dengan pergerakan kepanduan — Pemuda — keolahragaan.

Demikianlah pendidikan masjarakat, dalam sedjarah pertumbuhan negara baru ini, akan berdjasa dalam sumbangsijnja kepada negara dan Rakjatnja.



KALIMANTAN.

Tindjauan sekitar pertumbuhan dan perkembangan usaha Pendidikan Masyarakat di Propinsi Kalimantan (Sedjak pertengahan 1951 hingga triw. II th. 1954).



WIDJAJADI
Kep. Insp. Pend. Masj.
Prop. Kalimantan.

Agar mendapat sekedar gambaran bagaimanakah bentuk, luas, isi dan kekayaan pulau Kalimantan, sebelum kita menindjau pertumbuhan dan perkembangan usaha Pendidikan Masyarakat, baiklah disini bagi para pembatja terutama yang kurang pengetahuannya tentang pulau ini, kami perkenalkan Kalimantan sepintas lalu yang pada akhir² ini sering disebut sebagai „Gedung beras Indonesia” dalam masa yang akan datang dengan project raksasa „poldernya”.

L u a s :

Sesudah pulau Irian, pulau Kalimantan (Borneo) adalah pulau yang terbesar di Asia. Luasnya 760.375 Km² yang mana $\frac{2}{7}$ -nya dikuasai oleh Inggris.

Daerah yang masuk dalam Pemerintah kita seluas ± 552.694 Km², lebih luas dari pada pulau Andalas (440.000 Km²) dan $4 \times$ sebesar Pulau Djawa 131.340 Km².

Penduduk :

Menurut statistik tahun 1930 djumlah penduduk ada 2.195.000 djiwa sedang menurut taksiran sekarang telah bertambah hingga 3.482.194 djiwa. Menilik luas dan djumlah penduduknya, njatalah pada kita betapa djarangnya penduduk di Kalimantan. Rata² tiap Km² 6 orang (Kalimantan Barat tiap² Km² 8 orang, Kalimantan Selatan tiap Km² 9 orang dan Kalimantan Timur tiap² Km² 2 orang).

Pantainya :

Pantainya adalah rata dan rendah. Dibeberapa tempat terdapat rawa², sedangkan teluk² yang dalam tidak terdapat sehingga hampir kota² besar sebagian terletak dimuara sungai². Dataran yang tinggi hanya terdapat disentral Kalimantan dengan Gunung Bukit Rajanja (2278 m.) dan gunung yang tinggi di seluruh Kalimantan ialah Gunung Kinibalu (4466 m.) yang terletak didaerah Inggris.

Selebihnja pulau Kalimantan terdiri dari tanah datar, jang dipe-
ngaruhi oleh sungai² jang besar, diantaranya : Sungai Kapuas di Kali-
mantan Barat (sungai jang terpanjang diseluruh Indonesia, 1145 km.
Pulau Djawa \pm 1000 Km.). Sungai Barito di Kalimantan Selatan,
panjang 113 Km. Lebar muaranya 5 km. dan 2/3 dari panjang-
nja dapat dilajari oleh kapal² api, dan sungai Mahakam di Kaliman-
tan Timur dimana dibahagian hilirnja terletak masing² Kota Pon-
tianak, Bandjarmasin, dan Samarinda sedang di hulunya terdapat
berpuluh-puluh riam² (stroomversnellingen).

I k l i m :

Karena letaknja Kalimantan dibawah chatulistiwa, maka iklim-
nja „tropisch” benar, banjak djatuh hudjan, sangat basah (vochtig)
tidak ada batas jang njata antara musim hudjan dan musim panas.
Kota Bandjarmasin misalnja mempunyai panas antara 26.70 a 27.70
diwaktu siang hari dan djatuhnja hudjan rata² 3398 mm dalam satu
tahunnja. Karena itu maka banjak terdapat hutan² jang luas walau-
pun tanahnja tidak begitu subur disebabkan tidak ada gunung² berapi.

Pertambangan :

Dunia hewan hampir menjerupai Pulau Sumatra, hanja hari-
mau jang tak terdapat di Kalimantan sedangkan bahan pertambangan
banjak diketemukan minjak tanah, batu bara, besi, intan, emas dan
platina. Sajangnja hingga sekarang ini masih banjak tambang² itu
jang belum digali, hingga masih tetap merupakan kekajaan jang ter-
pendam.

Masyarakat :

Penduduk aselinja terdiri dari bangsa Dajak jang dibagi
lagi dalam berpuluh-puluh suku dengan berlainan bahasa tetapi ham-
pir bersamaan adat istiadatnja. Dalam waktu jang lampau sedjarah
bangsa Dajak ini setapak demi setapak didesak kepedalaman oleh
penduduk golongan lain jang datang dari luar dan jang lebih tinggi
kebudajaannja, seperti orang Tionghoa dan Melaju di Kalimantan Ba-
rat, orang Malaja dan Hindu Djawa (jang kemudian mendjelma djadi
orang Bandjar) di Kalimantan Selatan, orang Bugis di Kalimantan
Tenggara dan orang Bugis dan Makassar di Kalimantan Timur dsb.-
nja. 2/3 djumlah penduduk adalah kaum pendatang.

Dalam djalannja sedjarah karena tingkatan kebudajaan mereka
lebih tinggi dari penduduk aselinja, maka mereka telah mendjadi pa-
ra penguasa dengan mendirikan keradjaan² jang hingga sekarang ma-
sih terdapat di Kalimantan Timur (Swapradja Kutai, Berau dan Bu-
longan) sedang di Barat keradjaan² tsb. de facto telah musnah sewaktu
diadakan pembunuhan setjara besar²an oleh fihak Djepang terhadap

radja² dan sultan² beserta ahli keluarga mereka, sedangkan Keradjaan Bandjar di Kalimantan Selatan telah lebih dulu dihapuskan oleh V.O.C. dengan membuang radja² dan pengikutnja ke Bogor.

Ketjuali itu berdekatan dengan dagangnja mereka dapat pula menguasai kedudukan ekonomi dengan mendirikan kampung² dan kota² di persimpangan sungai² yang strategis. Buat golongan Dajak yang masih belum maju, penghidupan mereka ialah berladang (dengan berpindah-pindah), mengusahakan hasil hutan seperti rotan, getah liar dll. berburu dan menangkap ikan untuk keperluan sendiri. Penduduk lainnja telah berhasil disamping bersawah menanam tanaman yang berguna bagi export seperti getah dan kopra di Kalimantan Barat dan getah dan lada di Kalimantan Selatan. Export lain yang mendatangkan devisa ialah minjak, kaju batu arang, gambir, pinang dan sagu.

Sebelum perang dapat dikatakan bahwa Kalimantan dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri akan tetapi dengan tambahnja penduduk harus lebih banyak memasukkan beras sedang untuk Kalimantan Timur dan Barat semendjak dulu selalu mengimpornja. Bila rentjana Pemerintah untuk mengeringkan tanah (impoldering) yang beribu-ribu ha. banjaknja didaerah Mentaren (Kuala Kapuas) dapat terlaksana, maka kemungkinan besar akan dapat merobah susunan ekonomi Indonesia dengan Kalimantan sebagai „Lumbung padinja”.

A g a m a :

Mengenai *agama* golongan „pendatang” dengan menjetjualikan (orang Tionghoa) adalah pemeluk agama Islam, sedangkan penduduk Dajak telah banjak pula yang memeluk agama Islam dan Kristen. (Katholik di Kalimantan Barat dan Timur, Protestant hampir seluruhnja di Kalimantan Selatan), sedang sisanja masih heiden” (Kaharingan).

Perhubungan :

Dengan adanya djalan raja yang tidak begitu panjang yang terdapat di Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan yang akan menghubungkan djuga ke Kalimantan Timur (Bandjarmasin-Balikpapan), maka sebagian besar perhubungan di Kalimantan dilakukan melalui sungai² baik yang besar maupun yang ketjil dengan kapal, motorboot dan prahu². Dengan keadaan hubungan yang sedemikian ini, hampir seluruh kota, kampung baik yang besar maupun yang ketjil selalu terletak ditepi sungai ; mengenai hubungan dilaut antara pantai kepantai dapat dikatakan djauh lebih dari sempurna karena kekurangan kapal baik dari fihak K.P.M. maupun partikelir sendiri, sedangkan gelombang dan angin Barat dan Selatan sering mendjadi penghalang bagi kapal² ketjil. Semendjak tgl. 1 September '54 j.b.l. perhubungan udara antara Bandjarmasin dan Pontianak telah dibuka yang mana sebelumnya itu harus melalui Surabaya dan Djakarta bila kita hendak ke Pontianak (Kalimantan Barat).



Suku Dajak jang sedang diberantas Buta Hurufnja.

Hubungan ekonomi antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan/Timur boleh dikatakan tak ada karena pedagang di Kalimantan Barat selalu hubungan langsung dengan Djakarta dan Singapura sedang Kalimantan Selatan/Timur dengan Surabaya.

Pembagian administratif.

Berdasarkan Undang² Darurat No. 2 maka Propinsi Kalimantan baru pada tgl. 1 Djanuari 1952 dengan resmi ditentukan sebagai Propinsi Administratif Kalimantan (otonom) dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan berkedudukan di Bandjarmasin, meliputi tiga daerah Keresidenan ialah Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Kalimantan Selatan dengan ibu kota Bandjarmasin dan Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda masing² dikepalai oleh Residen Koordinator jang achir² ini hanya disebut Residen.

Masing² Keresidenan dibagi dalam :

Keresidenan	Kabupaten	Kota-besar	Kawedanaan	Ketjamat	Kampung:
Kal. Barat	6	1	18	70	4011
Kal. Selatan	7	1	27	79	1499
Kal. Timur	3 (Daerah Ist.)	—	10	35	933
Djumlah :	16	2	55	184	6443

Djalannya pertumbuhan dan perkembangan usaha Pendidikan Masyarakat didaerah Kalimantan bila dibandingkan dengan lain daerah Propinsi, terutama jang ada di Djawa, agak terkebelakang. Djika di Djawa telah dimulai pada th. 1946 bagi daerah Kalimantan baru pada pertengahan tahun 1951 dimulai penjelenggaraannya oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat.

Sebelum itu hanya pemberantasan buta huruf-lah jang diselenggarakan oleh bagian Pengadjaran zaman pemerintahan prae-federal dan R.I.S. Tjara penjelenggaraannya ialah disalurkan dengan perantaraan Pamongpradja terutama para Tjamat dan Kepala-kepala Kampung. Untuk Kalimantan Timur dan Selatan dengan perantaraan tiap-tiap guru P.B.H. menerima honorarium Rp. 15,— tiap bulan, tiap-tiap murid diberikan alat² sebuah buku tulis, sebatang pensil dan sebuah buku batjaan (Terus dan Tjepat) dengan dipungut pembajaran Rp. 1,— sedang untuk daerah Kalimantan Barat para guru P.B.H. tidak diberi honorarium dan pada murid² hanya diberikan alat² buku tulis, pensil dan buku batjaan dengan tjuma². Pada para lulusan kursus diberikan sebuah idjazah dengan diharuskan membajar harga idjazahnya sebesar Rp. 0,50.

Dari sudut psychologisch dan politisch pada itu waktu be-ratus² kursus serentak dibuka, dan alat²nja selalu mengalir hingga ke-desa². Karena soal pentjataan dari djumlah serta pelaporan (kontrol) kurang diperhatikan, maka sedjak tahun 1947 hingga achir tahun 1951 (pertengahan tahun 1951 mulai diusahakan oleh Djawatan Pendidik-

an Masyarakat) yang dapat ditatat ialah 1108 kursus P.B.H. 116.821 murid dengan hasil 98.654 orang yang telah „melek” (tahu) huruf.

Sesudah penjerahan kedaulatan, barulah pada pertengahan tahun 1951 usaha² mengenai Pendidikan Masyarakat diurus oleh Pusat dengan ditugaskannya Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi Jawa Timur untuk memimpin Daerah Kalimantan Selatan dan Timur sedang untuk Kalimantan Barat langsung dipimpin oleh Pusat di Jakarta.

Dengan adanya dua pimpinan didalam satu Propinsi tersebut mengakibatkan pula berlainan pertumbuhan dan perkembangan Usaha Pendidikan Masyarakat di Kalimantan, lebih² sesudah masing² daerah (Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat) diberi seorang koordinator sebagai pimpinan yang mengkoordineer segenap usaha Pendidikan Masyarakat.

Sebagaimana diuraikan diatas berlainan pertumbuhan dan perkembangannya usaha² Pendidikan Masyarakat, disebabkan pula berlainan beleid dan geraknja. Bila di Kalimantan Selatan dan Timur pertama mendapat warisan dari pemerintah yang lampau berupa alat² yang ber-timbun² ditambah lagi pembelian² alat² baru baik yang mengenai alat² pengangkutan dan tulis sebagai penjemputan usaha, maka sebaliknya keadaan di Barat sangat kekurangan didalam segalanya, hingga usaha di Kalimantan Barat dapat dikatakan tidak tampak sama sekali.

Pada permulaan tahun 1952 struktur pimpinan telah dapat dirobah oleh Pusat dengan diresmikan pada tanggal 1 Februari 1952 kantor Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi Kalimantan yang berkedudukan di Ibu kota Propinsi Bandjarmasin dengan seorang Kepala dan para koordinator sebagai staf pimpinannya. Dengan terbentuknja pimpinan di Propinsi inilah semua usaha dapat dihimpun dan disatukan untuk seluruh Kalimantan hingga pada pertengahan tahun 1952 seluruh Inspeksi di Kabupaten²/Kotabesar dapat dibentuk. (Kota Besar Pontianak dan Kabupaten Barau baru pada tanggal 1 Januari 1954).

Bagi daerah Propinsi yang seluas seperti Kalimantan ini dengan banjak segi² yang masih terbelakang serta ketinggalan dan bila ada, tentu masih djauh dari sempurna, perlu kiranya mendapat perhatian yang khusus dari Pemerintah terutama dari Djawatan Pendidikan Masyarakat. Segala kesulitan² memang didalam teori mudah dipetjahkan dan ditjarikan djalan keluar untuk mengatasinja, tetapi seringkali juga teori itu sangat berlainan didalam prakteknja. Pengalaman telah membuktikan bahwa beberapa putusan² yang telah diambil didalam sesuatu konperensi, seringkali buntu dan terbentur pada hal-hal yang tidak dapat diselenggarakan dalam penjelenggaraannya (prakteknja). Lebih² bagi mereka yang sama sekali belum mempunyai gambar-

an/pandangan atau belum pernah menindjau itu akan dilihat hanja dari peta atau membatja dari buku² jang kenjataanja belum dapat dipastikan kebenarannja. Misalnja : dalam peta jarak Samarinda ke Long Nawang (ibu kota Ketjamatan) hanja beberapa cm., tetapi jarak itu akan memakan waktu lk. 3 bulan dan Djawatan Perdjalanan akan membayar puluhan ribu rupiah (+ Rp. 10.000,—) kepada seorang penilik jang hendak menindjau usahanja di ibu kota Ketjamatan tersebut, belum terhitung bahaja² jang akan menimpa pada djiwanja semasa melalui riam² (stromversnellingen) jang sangat deras arusnya itu.

Oleh Djawatan Perdjalanan pernah dipersoalkan mengapa seorang pegawai jang bepergian dari Bandjarmasin ke Sampit (ibu Kota waringin) mempergunakan kapal terbang dan tidak memakai bus sadja. Soal sedemikian akan menggelikan orang jang telah mengetahui keadaan daerah Kalimantan sebab mulai zaman purbakala hingga sekarang ini belum pernah ada djalan darat jang menghubungkan kedua tempat ini.

Djalan darat jang dapat dilalui mobil di Kalimantan Barat bila dibandingkan dengan jang ada Kalimantan Selatan masih djauh dari sempurna lebih dengan jang ada di Djawa. Suatu misal, jarak Pontianak — Sintang ada 400 Km. (djalan darat jang terdjauh di Kalimantan) harus ditempuh dengan mobil lebih dari 12 djam bila tidak berhenti dijalan. Perdjalan jang melalui sungai lebih² tidak dapat dihitung lagi dengan Km., tetapi dengan djam, hari atau bulan karena sering tergantung pada pasang atau surutnja air, banjakknja tanojung berliku², dangkal atau banjakknja batu² (padas) terutama di-hulu² jang tidak dapat lagi dilalui dengan motor boot/motor tempel tetapi hanja dengan sampan/perahu dajung jang memakan ongkos terlalu banyak. (Sewa sampan, sewa orang pendajung dan membawa bekal² untuk makan sendiri). Ada kalanja djuga jang terpaksa perdjalan itu dilakukan dengan djalan kaki dengan memakan waktu ber-hari².

Selain hubungan jang mendjadi salah satu penghalang untuk melantjarkan usaha Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Umumnja maka banjak masih segi² jang perlu mendjadikan perhatian kita untuk difikirkan serta diichtiarkan pemetjahannja guna mengatasi segala kesulitan²nja misalnja :

- I. Letak satu desa/kampung dengan jang lainnja sangat berdjauh-an hingga untuk mengundjungi beberapa desa memerlukan ber-djam², ber-hari² atau ber-minggu².
- II. Dengan djarangnja penduduk sering terdapat desa²/kampung² jang hanja berpenduduk 80 — 200 orang bahkan ada kampung jang terdiri hanja dari 5 a 6 buah rumah/gubuk.

- III. Desa/kampung yang sudah sulit dikundungi itu ditambah lagi kesulitan bila seluruh penduduknya sama sekali „buta huruf”, hingga untuk memberantasnya tentunya dibutuhkan tenaga² yang suka didetaseer untuk sementara waktu.
- IV. Bila ada tenaga yang dapat disertai untuk memberantas buta-huruf misalnja, timbul kesulitan baru, walaupun tidak semua, ialah mengenai soal tempat belajar. Kampung² yang seketil itu biasa rumahnja pun sangat berdjauhan satu dengan yang lainnja sedangkan perumahan yang ada sangat sempit/ketjil hingga tidak ada ruangan untuk memberikan pelajaran². Diluar rumah seperti sering terdjadi di Djawa, tentu tidak mungkin dengan banjarknja turun hudjan di Kalimantan umumnja.
- V. Kesulitan² perhubungan tersebut mempengaruhi pula soal² pengangkutan/pengiriman alat² atau surat² (Pos) perekonomian dll. Betapa kelantjaran hubungan pos di Kalimantan untuk Daerah yang agak terpencil dapat diuraikan bahwa sebuah ibu kota Kabupaten (Daerah-Istimewa Berau di Tandjung Redeh hanya sekali sebulan ada kapal dari K.P.M. sedangkan pengiriman dari Bandjarmasin ke Putusibau tidak kurang dari 20 a 30 hari baru sampai. Pengiriman dari ibukota Kabupaten ke Ketjamatan dan dari Ketjamatan hingga ke-desa² tidak dapat dihitung lagi dengan hari, barang² yang perlu dikirimkan, sedang risico akan hilang atau kurangnya barang yang diterima selalu tetap ada (karam di sungai/riam atau hilang didjalan). Sering kedjadian bahwa barang yang dikirim itu tidak seimbang lagi harganja dengan ongkos pengangkutannja. Ada pula pengiriman² itu hanya dititip pada para pedagang² yang djustru akan melalui tempat yang ditudju.

Tindjauan sebagai tersebut diatas barulah merupakan tindjauan dari sudut² yang urgent², yang erat hubungannja dengan segala usaha Pendidikan Masjarakat pula, sedikit atau banyak sangat mempengaruhi.

Menurut hemat kami djustru usaha Pendidikan Masjarakat ini akan banyak hasil dan baik tumbuhnja bila kita tudjukan yang terutama kepada daerah/desa/Kampung di-hulu² dan di-udik² karena disitulah terdapat object² yang sangat memerlukan perhatian kita serta potensi yang kuat dan djiwa yang masih sutji dan murni. Sebagian besar penduduk ini masih primitip didalam hidupnja dan djiwanja masih belum dipengaruhi soal² yang tidak kita ingini. Keinginan mereka sangat besar terutama sesudah mereka hidup didalam segala hal, baik rohani maupun djasmaninja. Dari sudut politik, ekonomi maupun sosialnja tidak kurang penting djuga kiranja.

Untuk di Kalimantan penduduk ini ialah sebagian besar dari suku² Dajak yang ber-puluh² ribu djumlahnja baik yang masih ber-pindah²

tempat (nomaden) maupun yang heiden dan yang sudah memeluk sesuatu agama.

Tindjauan dalam zaman kolonial bahwa „orang Dajak” itu adalah orang pemanggal kepala (koppensneller) dan orang yang makan orang sebagaimana propaganda mereka dalam buku² mengenai Borneo hingga meninggalkan kesan bahwa sekarang masih ada djuga yang mengira sedemikian itu, kami berani menjatakan, karena telah mengetahui dengan mata kepala sendiri di-hulu², bahwa itu tidak benar. Mungkin karena pada pendjadjahan itu mereka sangat bentji dengan Belanda (kompeni) yang selalu dianggap musuhnja bila mereka ketemu berichtiar untuk „memenggal kepalanja” berarti membunuh musuhnja (Belanda). Sebaliknya suku Dajak adalah tergolong suku yang tjerdas otaknja, kuat badannja dan dapat djuga menduduki tingkatan² yang tinggi dalam masyarakat seperti Kepala Daerah Kabupaten, Kewedanaan dan lain² Djawatan yang ada sekarang.

Tindjauan tersebut bukan berarti bahwa hanja daerah² desa/kampung yang ada di-udik² sadjalah yang mendjadi perhatian kita, tetapi desa/kampung yang dekat dan mudah perhubungannja tidak dapat kita abaikan pula.

Salah satu pokok selain apa yang telah diuraikan diatas guna menjelenggarakan usaha² Pendidikan Masyarakat di Kalimantan ialah „tenaga technisch”, tenaga yang akan memberi didikan, andjuran, bimbingan serta dorongan dengan singkat menggerakkan dan mengerahkan potensi² yang ada di-daerah² itu sangat dirasakan kekurangannja.

Ditilik dari sudut formasi tenaga technisch untuk Propinsi Kalimantan berdjumlah 106 orang, tetapi bezettingnja baharu ada 37 orang (lk. 35 %) kurang 69 orang. Angka tersebut menundjukkan berapa kurangnja tenaga yang diperlukan sebagai penggerak untuk daerah yang seluas dan sesulit seperti Kalimantan ini. Walaupun begitu sebagai Djawatan yang hendak membawa pendidikan kearah yang dimaksud oleh Negara, tentunja kita tidak akan bertongkat ruas dan berputus asa. Usaha² Pendidikan Masyarakat untuk Daerah VIII Propinsi Kalimantan dapat dibagi sebagai berikut: tahun 1952 fase pengertian — 1953 fase pertumbuhan — 1954 fase penjemputan.

Dengan tenaga yang ada dan segi² yang telah diuraikan diatas walaupun belum dapat dikatakan baik atau sempurna, maka dapatlah usaha Pendidikan Masyarakat diselenggarakan dengan hasil sebagai daftar yang tersebut disebelah ini :

1. Kursus P.B.H.	1108 *)	4524	8137	4071	
2. Jumlah murid	116821 *)	116344	226198	105255	
3. Jang lulus	98654 *)	23322	53581	29161	
4. K.K.O.D.	—	-9	9	6	
5. Murid K.K.O.D.		198 **)	262 **)	191	**
6. K.P.U./A.	6	41	827	1737	
7. Jumlah murid	331	1310	821	1745	
8. Jang lulus	—	152	375	— (***)	**
9. K.P.U./B.	—	1	2		
10. Muridnja	—	22	89	117	
11. Jang lulus	—	2	55	— (***)	
12. T.P.P.	256	368	339	246 (+)	
13. TPR/A	76	117	106	97	
14. TPR/B	8	15	15	19	
15. TPR/C	—		1	1	
16. Kepanduan (djenis)	9	9	15	13	
17. Jumlah pandu	1571	3849	14703	5703	
18. Panti Pemuda	13	13	12	12	
19. Jumlah pendukung (organisasi) djenis					
20. Panitia Pend. Masyarakat	2	15	113	246	
21. Bantuan Lapangan	63	139	165	173	
olahraga kepada :					
Kepada Ibu kota kab.	—	—	2	1	



SULAWESI



SUTARDJA HADISUTIRTA
Kep. Inspeksi Propinsi
Sulawesi.

Bilamana kita mengindjak hari 24 Nopember 1954, maka Djawatan Pendidikan Masjarakat dengan resmi sudah berusia lima tahun, meskipun oleh karena sesuatu sebab hingga kini belum djuga terdaftar didalam „P.G.P.”, dengan segala akibat-akibatnja, khusus jang mengenai tenaga-tenaga pendukungnja. Sesungguhnya Djapm telah sedjak 1947/'48 didalam kandungan Kem. P.P. dan K. jang pada waktu itu didalam pimpinan Sdr. Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Menteri. Saudara-saudara Sutedja Bradjanegara, Sadarjun Siswomartojo, Sumarmo, Tartib Prawiro-dihardjo, kami sendiri (Sutardja Hadisoe-tirta) beserta teman-teman sedjawatan lainnja telah diberi kehormatan oleh Peme-

rintah untuk membina djawatan baharu ini.

Sebagai perentjana apa jang disebut „peraturan hak dan batas-batas kewadajiban” dari djawatan baharu ini, maka merasa legalah dan lapang dada serta rentjana itu didjadikan Putusan Menteri P.P. dan K. pada 24 Nopember 1949 No. 423/A di Jogjakarta. Pada waktu itu Kem. P.P. dan K. dikemudikan oleh Sdr. Sarmidi Mangunsarkara. Semendjak itu maka pimpinan Djapm mempunyai pangkalan tertentu dan pegangan jang tegas untuk bergerak dan melengkapi alat-alat dan tenaga-tenaganja, jang dibutuhkan guna menguasai seluruh daerah Indonesia jang telah kita proklamasikan kemerdekaannja dan merupakan lapangan kerdja konsolidasi dan pembangunan jang termasuk dalam tugas Djapm.

Inspeksi Pendidikan Masjarakat Propinsi Sulawesi baharu dapat dibentuk dan diresmikan pada 1 Mei 1951, djadi ketinggalan dua tahun setengah. Oleh karena gerak usaha Djapm di Djawa sudah dimulai sedjak 1947, maka Sulawesi ketinggalan 4 tahun. Sebab sebelum 1951, jang dikerdjakan di Sulawesi hanya P.B.H. semata-mata dengan rentjana dan tjara bekerdja seperti digerakkan dimasa zaman pemerintahan Belanda dulu.

Dikala daerah-daerah yang sudah lebih dahulu terbentuk Inspeksi pada umumnya, dan di daerah-daerah Inspeksi Sulawesi pada khususnya itu menunduk tenaga-tenaga teknisnya, maka hanya dapat melengkapinya dengan pegawai-pegawai daerah dari lain jawatan, yang pada hakekatnya masih baru dan asing, sekalipun kebanyakan diantara mereka itu tenaga penilik sekolah atau guru. Kedatangan terbanjak diantara mereka sebagai tenaga-tenaga Djapm, ketjuali tertarik dan mendorong oleh tjita-tjita tugas, baik yang selaras dan seirama dengan tudjuan Djapm, maupun yang berhubungan dengan tjita-tjita pribadi, memberi kesan mempunyai anggapan ringan terhadap tugasnya. Tidak sedikit diantara mereka yang menganggap sudah tjukup pengertian, sebab mereka merasa seorang diantara masyarakatnya sendiri. Setelah terdjun didalamnya, tidak sedikit pula yang oleh karena kurangnya menerima petunduk dan pengalaman, mempunyai pengertian dangkal sehingga merasa kurang puas terhadap pekerjaan dan diri sendiri. Disamping sarat dan bekal teknis (keahlian ?) dituntut ketjaksanaan administratif tentang peraturan kepegawaian, keuangan, pembukuan dan pertanggungan djawab, dsbnja, maka gerak mereka diperberat pula oleh tiadanya alat bergerak, alat pengangkut dan penghubung, kurangnya routine dalam inspeksi dan perdjalanannya, ditambah lagi djauhnya djarak pusat propinsi dan kabupaten/ketjamatan didaerah yang luas dan berpenduduk ta' padat berdjauhan, lagi tergoda oleh faktor keamanan. Semuanya menjebakkan kurang mendalamnya pengertian, pengetahuan dan pengalaman. Kurang mengenalnya daerah dimana terdapat bahan-bahan dan unsur-unsur yang wadji dipeladjadi dalam-dalam mengurangi dapatnya dipertanggung-djawabkan gerak usahanya. Akibatnya ialah kekeliruan dan kelambatan gerak usahanya, yang sudah ketinggalan 4 tahun dari pada di Djawa dan Sumatra.

Pengangkatan tenaga dari djawatan lain atau partikelir memaksa meringankan sarat kwaliteit pada hal luasnya daerah membutuhkan kwantiteit lebih dari di Djawa.

Oleh karena keadaan geographisch maka Propinsi Sulawesi mempunyai suku-suku yang masing-masing memerlukan perhatian sendiri-sendiri. Pelajannya meminta kebidjaksanaan yang penuh kesabaran dan vitaliteit dari tenaga-tenaga yang sebesar-besarnya. Telah kiranya diutarakan oleh Sdr. E. Kandou pada salah satu konferensi kerdja Ipmp: „Sulawesi adalah suatu propinsi yang sangat heterogeen dalam pelbagai lapangan ; kebudayaan, tingkat pengetahuan dan ketjerdasan, kebiasaan, agama dan etikanya ; tiap daerah (kabupaten) ada keistimewaan sendiri, ada tjorak kemauannya sendiri dan tjara sendiri untuk melaksanakan sesuatu ; tiap daerah ini memerlukan pandangan atau kebidjaksanaan sendiri-sendiri”.

Disamping itu semuanya, perlu kami kemukakan kesukaran djarak-djauh baik didaratan maupun dilautan, yang dipersulit lagi dengan

tidak adanya alat pengangkutan yang dapat dipastikan. Untuk perbandingan jarak di Jawa-Sumatera dan Sulawesi :

Jarak lurus Makassar—Menado	1000 km.
Jarak laut Makassar—Menado lewat Toli-toli	1350 km.
Jarak lurus Selajar—Miangas	1750 km.
Jarak lurus 3 propinsi di Jawa 1100 km, satu propinsi ..	400 km.
Jarak lurus 3 propinsi Sumatera 1700 km, satu propinsi ..	600 km.

A. PERKEMBANGAN USAHA Djapm DI SULAWESI.

Dalam keadaan ketinggalan 4 tahun, dengan kekurangan tenaga tehnis dan administratif, keadaan kesukaran perhubungan darat dan Elaut, hampir ta' adanya alat-alat pengangkutan yang pasti, dan last but not least dengan adanya gangguan keamanan yang terus menerus, maka Ipmpri Sulawesi telah mentjaba sekuat tenaga mengetjilkan jarak ketinggalan itu. Tertjapai, belum ! Tetapi putera-putera Sulawesi mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya, dan membutuhkan tenaga-tenaga yang djudjur, mempunyai vitaliteit sebesar-besarnya. Bilamana didaerah Sulawesi-Utara (Minahasa) pada tahun 1951 hanya barang 5 á 6 % sadja yang buta huruf, terutama dikalangan nelayan-nelayan pendatang umpamanya di Airtembaga dan Bitung, maka didaerah Sulawesi Tengah, Selatan dan Tenggara masih ada 75 sampai 90 % yang buta huruf, dari kalangan rendah sampai tinggi !

Atas pertimbangan kenjataan itulah maka sedjak semula direntjanakan, bahwa bahan pendidikan masyarakat untuk daerah-daerah itu dititikberatkan pada kebutuhan dan urgentie dari daerah sederaah. Di daera Minahasa dan sekitarnya usaha Djapm dipusat kan pada KKOD, KPU-ABC, Pekerdjaan Kewanitaan, Perpustakaan dan Taman Pustaka. Didaerah-daerah lainnja usahanya dititikberatkan pada PBH, PBH-Wanita, Nazorg, Kursus Guru PBH disamping KKOD dan KPU dimana mungkin. Dalam tahun 1954 Sulawesi membuka 2 KPU-C dan Kursus Pembimbing angkatan kedua.

1. IPMPR dan DAERAHNYA. Ipmk/kb. Ipmkw. Ketjamatan. Desa. Penduduk					
Ressort : I meliputi :	4	14	56	817	795384
Ressort : II meliputi :	3	13	36	1315	753549
Ressort : III meliputi :	4	17	142	2273	2038599
Ressort : IV meliputi :	4	15	149	2159	2433217
<hr/>					
Ipmpri = 4 Res meliputi	15	59	383	6564	6020749
<hr/>					
2. USAHA-USAHA IPMPR: Th. 1951. Th. 1952. Th. 1953. Th. 1954 kw 2					
KURSUS PBH :	2670	4912	3315	1715	
Guru	2693	4468	3047	1707	
Murid	142554	183299	130144	78283	
Telah lulus	10062	49583	75440	15865	
Masih B.H.	—	—	2969213	—	
K.K.O.D. :	—	17	131	119	
Guru	—	35	369	312	
Murid	—	525	4287	3881	

K.P.U.-A :	16	46	63	84
Guru	43	312	374	493
Murid	325	1940	2782	2879
Telah lulus	—	236	692	—
K.P.U.-B :	—	—	2	2
Guru	—	—	10	58
Murid	—	—	77	364
Telah lulus	—	—	43	—
K.P.U.-C :	—	—	1	2
Guru	—	—	4	12
Murid	—	—	23	114
Telah lulus	—	—	18	—
PANTI PEMUDA :	—	14	15	15
KURSUS KEWANITAAN :	—	7	48	8
T.P. Pengantar :	—	104	104	253
T.P. Rendah :	—	33	54	64
T.P. Menengah :	—	18	16	16
T.P. Tinggi :	—	1	1	1

B. PERALATAN DAN GEDUNG-GEDUNG Djpm. Ipmpm.

Salah satu akibat yang amat menjulitkan penempatan tenaga oleh karena gangguan keamanan ialah hampir tidak adanya perumahan, baik untuk berkantor maupun untuk para pegawai. Kepala Ipmpm di Ibukota Propinsi Makassar sendiri hingga kini sedjak 1 Mei 1952 masih tetap tinggal di „mess”, sedangkan 10 bulan lamanya terpaksa tinggal di hotel. Berkah pelayanan istimewa dari Pusat Djpm, Kem. P.P.K., yang dibantu penuh oleh para-Kepala Daerah dan P.P. serta P.U., maka Djpm sudah mempunyai gedung-gedung sendiri:

Kantor Ipmpm di Makassar :	1
Kursus Pembimbing Pm Makassar :	1
Kantor-kantor Ipmk/kb :	6
Kantor-kantor Ipmk :	2 sedang dibangun.
Kantor Ipmkw :	1

Gedung-gedung milik Djpm : 11 buah.

C. PIKIRAN SETELAH 5 (7) TAHUN PENDIDIKAN MASJARA-KAT.

Setelah 7 tahun lamanya kami mengikuti dari dekat dan serta menggerakkan Djpm dengan usaha-usahanya, baik yang berupa rentjana-rentjana dimerdja Pusat maupun yang berlelah pajah menghadapi kenyataan yang sewadarnya didaerah, baik di Djawa maupun didaerah Sulawesi yang tersulit segala-galanya itu, baiklah kami pada detik memperingati usia Djpm ini merumuskan pendapat dengan kesimpulan sederhana, sekedar untuk memberikan sumbangan, yang mungkin berguna untuk merintis djalannya kesempurnaan dihari datang. Terutama selama 3 tahun yang terakhir ini, senantiasa terbentang dipandangan kami dua matjam gambar piramida, yang melukiskan gambaran Pusat



Kursus Pengetahuan Umum tingkat A di Manado jang khusus untuk kaum wanita.

dan Daerah. Bilamana kami mengenangkan TUGAS, maka piramida itu berdiri seperti biasa : di Pusat tiap Kepala Bahagian mempunyai tugas satu, yang disalurkan kedaerah sampai ke Ipmkw ; oleh karena di Pusat ada l.k. 10 Bahagian, maka 10 Kepala Bahagian itu menyalurkan tugasnya yang 10 warna itu ke satu pusat-ketjil, ialah Kepala Ipmkw atau Kepala Ipmk, yang masih ditambah dengan tanggung jawab berat : tentang keuangan dan administrasinya. Kalau yang kami kenangkan itu TENAGANJA, maka piramida itu menjadi terbalik. Sebab, pikiran 10 Kepala Bahagian dari Pusat itu semuanya ditjurahkan semuanya kepada 1 orang Kepala Ipmk/kw. Tidak heranlah apabila tenaga-tenaga daerah itu mendjerit-djerit, agar usaha-usahannya itu dapat disederhanakan. Achir-achir ini daerah-daerah itu harus memelihara tertibnya penggunaan 25 matjam mata anggaran ! yang otorisasinya tidak bersamaan datangnya, sedang seluruh usaha berdjalan serentak ! Disinilah harus kita lajangkan perbaikan tjara bekerdja yang lebih sederhana dan efficient.

Pendidikan Masarakat hendaknya djangan meninggalkan atau melupakan inti tugasnya yang pokok, ialah pendidikan dan memberi bimbingan dengan meletakkan dasar-dasar pertama yang elementair. Tidak mengorganisasi kooperasi, mengorganisasi pertanian, mengorganisasi ekonomi dsbnja, melainkan menabur minat kearah itu semuanya dengan tjara dan usaha yang elementair.

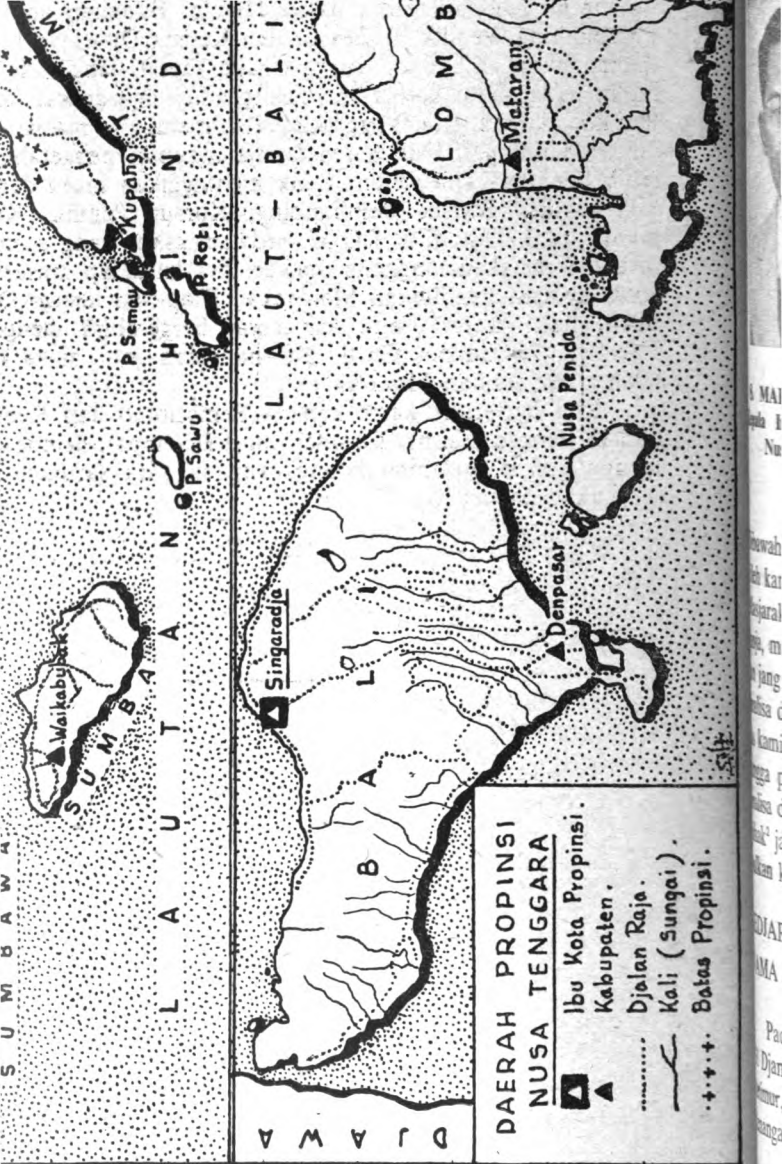
P.B.H. yang theoritisch sampai pada waktu terbatas akan selesai (10 tahun umpamanya), tidak mungkin dapat menyelesaikan tugasnya, bilamana segenap masarakat tidak turut langsung bertanggung djawab dan turut bergerak atas rasa susila. Khusus para Pandu, yang wadajib berbuat baik, para peladjar mulai dari S.R., S.M.P. sampai para Mahasiswa, para pemuda yang berorganisasi ; merekalah sebagai watak mudanya akan dapat mempertjepat „panggilan susila” ini. Seminggu sedjam dua jam memberantas P.B.H. kami kira tidak akan menggoda peladjarannya, dan tidak mengurangi waktunya berolahraga dsb-nja. Dengan modal NOL-sen para pemuda telah membuktikan sanggup memerdekakan Bangsa dan Tanah Airnya dari Raksasa-raksasa pendjajah yang bersendjatakan lengkap. Kini mereka hanya dimintai mengisi kemerdekaan itu dengan membanteras B.H. sadja. Masakan tidak mungkin ? Modal ada, ialah pandai membatja dan menulis.

Disamping tugas lama (kalau tak boleh dikatakan pokok pertama), timbullah tugas-tugas baru beraneka warnanya sebagai akibat dari pada kepentingan usahanya. Ada yang mula-mula timbul untuk daya penarik sadja yang kelak menjadi KKOD, Vak-praktisch, Kursus-Ibu, sampai ke Desa-pertjobaan. Ada pula yang timbul sebagai akibat kebutuhan pemeliharaan (nazorg). Djuga disamping KPU-ABC dibutuhkan pula usaha-usaha yang memperbanjak tugas-tugas baharu berhubungan pemeliharaan setelah tammat (adanya bermatjam Perpustakaan dan Taman Pustaka).

Kini tibalah waktunja untuk menjederhanakan (didalam arti : ordening) organisasinja dari pada usaha-usaha beraneka-warna itu, jang banjak berbuah baik, ada pula jang oppervlakkig, ada djuga jang hanja merupakan gerak parade sadja. Mungkin salah satunja djalan kearah itu ialah : pemusatan usaha dalam 3 biro, sebagai direntjanakan.

Soal „tenaga-technisch atau keahlian” untuk Pendidikan Masarakat sedjak semula sudah dirasakan pentingnja. Sedjak tahun 1949 di Jogjakarta sudah ditjita-tjitakan 3 matjam pendidikan tenaga technisch itu, untuk melajani gerak usaha Djapm. Bilamana mulai dari tenaga Pembimbing, Penilik, Inspektur dan Kepala Djawatan sekalipun dihari datang hanja ditundjuk tenaga-tenaga seperti jang sudah-sudah sadja, maka pada suatu ketika kita menghadapi masarakat jang tidak puas lagi kepada kita, jang hingga kini telah membawa masjarakat itu ketaraf jang lebih tinggi, baik keinsafannja maupun pengetahuannja. Lebih-lebih bilamana kita sendiri tidak meninggikan mutu dan pengetahuan kita sendiri. Kursus Pembimbing, Kursus Penilik, Kursus K.P.K., mengikuti kuliah di P.T.G.M., adalah usaha jang membuktikan keinsafan kita akan tanggung djawab kita terhadap masarakat jang kita bawa kealam Pendidikan Masarakat. Tiap-tiap tenaga Djapm, dengan kami, pasti merasa lega dan amat bergembira dengan terbukanja Faculteit Pendidikan Guru, dimana salah satu mata kuliah penting ialah : Pendidikan Masarakat !

Kita berterima kasih kepada Pemerintah dan Kementerian P.P. dan K. dengan lahirnja Faculteit itu di 3 tempat. Semoga Djapm dapat mengutjapkan „selamat datang” kepada para sardjana F.P.G. dihari jang akan datang nanti.



NUSA TENGGARA

PENDAHULUAN



S. MARDISWOJO
Kepala Inspeksi Propinsi
Nusatenggara

Apabila sampai pada tanggal 24 November 1954 pertumbuhan dan perkembangan usaha Djawatan Pendidikan Masyarakat telah mentjapai usia 5 tahun, maka didaerah Nusa Tenggara pertumbuhan dan perkembangannya baru berdjalan 3 tahun 6 bulan 24 hari, karena Insp. Pend. Masj. Prop Nusa Tenggara baru dapat dibentuk pada tgl. 1 April 1951 walaupun sebenarnya sebelum itu telah ada usaha P.B.H. yang diselenggarakan oleh N.I.T. yang sebetulnya dikendalikan oleh Belanda untuk menandingi gerakan R.I.

Sampai dimanakah djauh usaha dan perkembangan yang telah ditjapai oleh Insp. Pend. Masj. Prop. Nusa Tenggara?

Dibawah ini kami paparkan beberapa hal yang kami pandang penting. Oleh karena usaha dan perkembangan Djawatan/Inspeksi Pendidikan Masyarakat tak lepas dari pada usaha Badan/Djawatan Pemerintah lainnya, maka dalam kami menjadikan laporan beberapa buah Djawatan yang ada taliannya dengan Pendidikan Masyarakat kami sungguh, analisa dari beberapa hal kami adakan, hasil penjelidikan sekilas pantas kami sertakan, walaupun djauh dari pada lengkap, namun untuk tangga pekerdjaan pada masa depan ada djuga faedahnya. Dengan analisa dan gambaran yang sewadjarnya kami berpengharapan agar pihak² yang bersangkutan ada pengertian; dari pengertian akan menimbulkan ketjintaan dan dari ketjintaanlah korban akan diberikan.

SEDJARAH SINGKAT MENGENAI NAMA NUSA TENGGARA

Pada waktu Menteri P.P. dan K. Mr. Moh. Yamin tgl. 24 sampai 31 Djanuari 1954 berkundjung kegugusan yang membudjur dari barat ketimur, diantara selat Bali dan selat Ombai, meninggalkan kenang-kenangan yang bersedjarah berupa sonneta yang bunjinja :

NUSA TENGGARA

Hidjau tampaknja timbul tenggelam
Untaian kembang pulau jang enam
Bali - Lombok - Sumba - Sumbawa
Timor diselatan bunga Flora

Awan menjelubungi wilajah saddwipa
Pematang samudera segara nusantara
Dibasahi ombak dipesisir berdebur
Lukisan daerah kembang penghibur

Gunung gemunung bumi dewata
Aneka rupa merdu suara
Irama melenggang menari ria
Utjapan bibir berbahasa Indonesia

Nusa Tenggara saja harapkan
Sekiranja dewi pengadjaran meninggalkan kajangan.

Kepulauan jang hingga pada permulaan th. 1942 bernama „*Kleine Sunda Eilanden*”, sedjak pertengahan th. 1942 sampai pada permulaan th. 1954 berganti sebutan „*Sunda Ketjil*”. Nama Sunda Ketjil psychologisch-paedagogisch memang tak kena, teristimewa pula dalam alam Indonesia jang telah merdeka. Karenanja dalam achir pidato pada konperensi dinas Keluarga P.P. dan K. tertanggal 28 Djanuari 1954 di Kupang (Timor) dengan berbentuk soneta beliau memproklamasikan nama Nusa Tenggara jang kemudian di-sjahkan dengan Undang² Darurat No. 9 th. 1954. Nama itu lekas mendjadi tenar. Karenanja maka dalam tempo jang singkat nama itu telah resmi merata sebagai pengganti nama Sunda Ketjil atau *Kleine Sunda Eilanden*.

LETAK, IBU KOTA, LUAS DAN PENDUDUKNJA.

Propinsi Nusa Tenggara jang ibu kotanja Singaradja, hingga kini masih merupakan bagian jang bersifat administratif.

Letaknja diantara 8° — 11° budjur timur dan diantara 114° — 125° garis lintang utara. Daerah, ini terdiri dari pulau² besar ketjil jang setelah R.I.S. terbentuk dilakukan pendemokrasian pemerintahan berdasarkan Undang² N.I.T. tgl. 15 Djuni 1950 No. 44, disamping Undang² R.I. th. 1948 No. 22 jang berlaku di daerah Renville. Atas dasar Undang² tersebut maka Propinsi Nusa Tenggara lalu dibagi mendjadi 6 daerah/kabupaten.

Beruk siu mematja



DASAR MEMATJA

I. Gst. Kt. Gede 1955

Disusun oleh P. P. dan P. - Dipaketo
DIAKATAKAN PENGIDIPAN MASJIDABAT



Disusun oleh P. P. dan P. - Dipaketo
DIAKATAKAN PENGIDIPAN MASJIDABAT

Disusun oleh P. P. dan P. - Dipaketo
DIAKATAKAN PENGIDIPAN MASJIDABAT

Buku P.B.H. massaal dalam bahasa Bali

Nama daerah/kabupaten	Ibukotanja	Luasnja (km ²)	Berpenduduk (djiwa)
1. Bali dan pulau ² sekitarnja	Denpasar	5.561,4	1.725.687
2. Lombok dan pulau ² sekitarnja	Mataram	4.728,8	1.056.085
3. Sumbawa dan pulau ² sekitarnja	Sumbawa Besar	15.285,3	430.075
4. Flores dan pulau ² sekitarnja	Endeh	17.150,4	938.238
5. Sumba dan pulau ² sekitarnja	Waingapu	11.315,1	231.174
6. Timor dan pulau ² sekitarnja	Kupang	19.573,5	794.273
Seluruh Prop. Nusa Tenggara		73.614,5	5.175.532

Mengingat ketentuan² dalam U.U.D.S. R.I. th. 1950 pasal 132, 133 dan 142 maka dipropinsi Nusa Tenggara hingga kini masih berlangsung berdirinja Swapradja² berdasarkan Z.B.R. (Zelfbestuurs regelen) 1938 dan kontrak² pandjang seperti jang berlaku bagi Sumbawa Besar, Bima dan Dompu dipulau Sumbawa. Djumlah Swapradja diseluruh Nusa Tenggara lk. 56 buah diantaranya :

- a. Dalam lingkungan daerah Bali yakni : *Buleleng, Tabanan, Badung Klungkung, Bangli, Gianjar Karangasem dan Djembrana.*
- b. Dalam lingkungan daerah Sumba jaitu : *Kodi, Laura, Waidjewa, Waimangura, Lamboja, Wanokaka, Lauli, Memboro, Anakalang, OeR Nggai, Lewa, Kambara, Kanatang, Tabundung, Masukarena, Melolo, Rendi-Mangili, Waidjelu.*
- c. Dalam lingkungan daerah Sumbawa, yakni : *Sumbawa Besar Bima dan Dompu.*
- d. Dalam lingkungan daerah Flores, ialah : *Sikka, Ende, Lio Riung, Larantuka, Adonara, Ngada, Negekeo dan Manggarai.*
- e. Dalam lingkungan daerah Timor, yakni : *Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Roti, Sabu, Amanuban, Mollo, Amanatun Biboki, Miomaffo, Belu, Insana, Alor, Barnusa, Pantar Matahari Naik, Kui, Kolana, Batulolong, Puremau.*

SUKU BANGSA DAN BAHASA.

Karena geografisch Propinsi Nusa Tenggara demikian rupa bentuk dan letaknja, maka walaupun dalam artian Staatskundig penduduk di Nusa Tenggara itu satu bangsa namun in de tail, dilihat dari sudut ethnologisch dan ethnografisch sebenarnja terdiri dari bermacam-macam suku bangsa jang tergolong besar ialah: *Bali, Sasak, Sumbawa, Bima, Sumba, Kodi, Kambara, Sikka, Flores, Adonara, Timor Roti, Sabu dan Alor.*

Bahasa² jang dipergunakan dalam lingkungan kepulauan Nusa Tenggara, Bali dan pulau Lombok sebelah barat umumnja mempergunakan bahasa *Bali*. Lombok sebelah Timur kebanyakan mempergunakan bahasa *Sasak*. Sumbawa sebelah barat umumnja mempergunakan bahasa *Sumbawa*, sedang Sumbawa timur kebanyakan bahasa *Bima* dan Sumbawa sebelah timur laut dipergunakan orang bahasa *Donggo*.

Dipulau Sumba sebelah barat terdapat penduduk jang mempergunakan bahasa : *Kodi*, *Laura*, *Lamboja* dan *Waidjewa*, sedang disebelah timur kebanyakan bahasa *Kambera*.

Dipulau Flores sebelah barat terdapat penduduk jang mempergunakan bahasa *Manggarai* dan *Badjawa*, ditengah bahasa : *Bawai Ende* dan *Lio*, sedang disebelah timur dipergunakan bahasa : *Larantuka*, *Maumere*, *Solor*, *Alor*.

Dipulau Timor dipergunakan bahasa : *Semau*, *Sabu*, *Roti*, *Timor* dan *Belu*.

KEHIDUPAN MASJARAKAT.

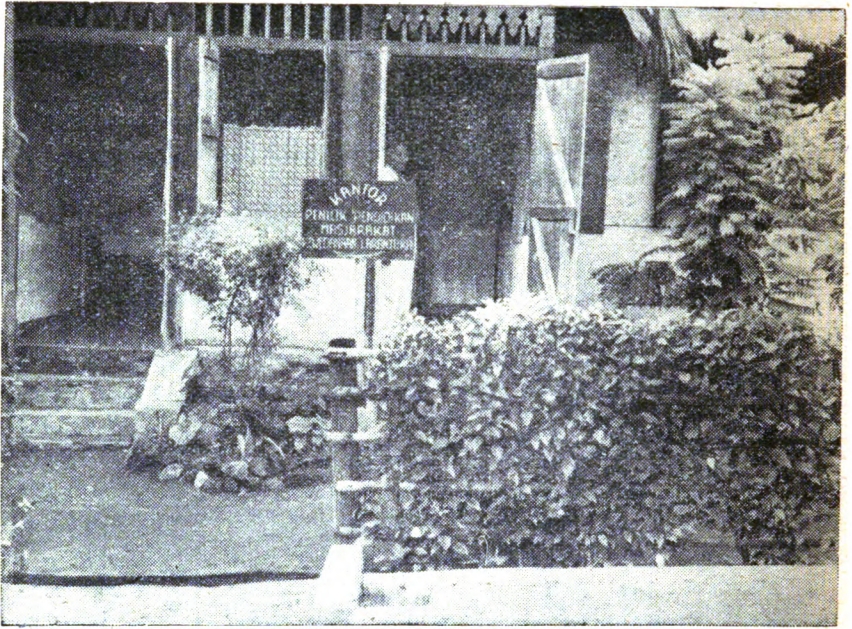
Dipandang dari sudut ethnologisch dan biologisch, setjara keseluruhanja masjarakat Nusa Tenggara sebagian besar bersifat : agraria — feodalis — religieus ; sebagian besar masih terbelakang.

Geografis, letaknja keadaan alamnja sangat berpengaruh terhadap jiwa penduduk jang mendiami pulau² jang terserak diseluruh Nusa Tenggara.

Demikian pula pengaruh adat dan agama serta pengaruh pendjadjahan berabad-abad jang sengadja memperlakukan sepi dan memandang kurang penting, sangat terasa dan berbekas bagi kehidupan masjarakat di Nusa Tenggara. Kita ingat dan bisa membuka lembaran sedjarah bahwa pada masa jang lampau seakan-akan sebagian besar pulau² didaerah Nusa Tenggara itu hanja patut untuk tempat pengasingan.

Flores untuk menjingkirkan *Bung Karno*, Timor guna mengasingkan *Pak Semaun*. Lombok untuk pembuangan orang² Bali. (Nama Selong di Lombok Timor bertalian dengan hal ini).

Demikian pula Sumba pada masa jang lampau digunakan oleh Pemerintah djadjahan untuk menjingkirkan orang² *Bima* jang tak dapat melajani kehendaknja. Itulah sebabnja maka kehidupan masjarakat di Nusa Tenggara ketjuali di Kota² dan sekelilingnja, sebagian besar masih terbelakang.



Inilah Kantor Peniliknja Pendidikan Masjarakat di Larantuka.

KEHIDUPAN MASJARAKAT BERTALIAN DENGAN KEPERTJAJAAN, AGAMA, ADAT ISTIADAT.

Setjara keseluruhannja dilihat dari sudut kerohanian masjarakat di Nusa Tenggara sebagian besar mempunyai „religio magisch” atau magisch religieus”. Magis, karena mereka mempunyai kepertjajaan terhadap kekuatan gaib jang dapat dikuasai oleh manusia dan religieus sebab mereka mengakui dan tunduk atas suatu kekuatan jang dipandang diatas segala kekuatan jang ada didunia ini. Bertalian dengan hal itu maka timbullah adat kebiasaan membuat sadjen, selamatan dan sebagainya.

Pandangan hidup demikian itu sebenarnja adalah djalinan dari „kepertjajaan pokok — agama dan adat istiadat”. Kepertjajaan pokok suku² bangsa di Nusa Tenggara pada hakikatnja tak berbeda dengan kepertjajaan pokok suku² bangsa lainnja jang mendiami kepulauan Indonesia lainnja.

Kepertjajaan pokok tersebut ialah : Animisme dan Dynamisme, Pengertian Animisme mengandung kepertjajaan bahwa pada semua benda ber-anima (ziel atau roch). Mereka memandang bahwa karena animalah maka kadang² sesuatu benda mereka anggap puaka (angker), mereka pandang arwah nenek mojang mereka bersemajam disana. Itulah sebabnja maka timbul adat dan kebiasaan memudja kepada arwah nenek mojang/datuk² mereka (ouder verering). Sedang dynamisme mengandung kepertjajaan bahwa pada semua benda berdynamo (berkekuatan gaib atau bermana). Karena kepertjajaan dynamismelah maka kadang² sesuatu benda mereka pandang pusaka (angker), sesuatu benda bermana, berkekuatan gaib atau berkesaktian. Dari kepertjajaan tersebut maka timbullah pemudjaan terhadap benda² jang mereka pandang bertuah (keris, tombak, tjintjin dsb.nja).

Hal ini sebenarnja tak mengherankan, karena sedangkan dalam masjarakat jang dikatakan modern kepertjajaan jang sematjam itu ada, istimewa pula bagi masjarakat jang masih terbelakang (ingat sadja mascotte dan talisman pada oto).

Mengenai Agama jang dianut oleh suku² bangsa di Nusa Tenggara pada pokoknja ada 3 djenis jang besar dan hampir sama djumlah pemeluknja yakni :

Agama Hindu-Bali $\pm 32\%$, kebanyakan terdapat dipulau Bali dan Lombok sebelah barat.

Agama Islam $\pm 29\%$, sebagian besar terdapat dipulau Lombok Timur dan Sumbawa.

Agama Kristen $\pm 31\%$, ($\pm 15\%$ Rooms Katholik dan $\pm 16\%$ Protestan) Pemeluk Agama Rooms Katolik jang terbanjak terdapat dipulau Flores. (disana ada 3 orang Uskup dan hampir tiap² 1000 orang terdapat 1 orang Pastoor). Pemeluk Agama Protestan jang banjak terdapat dipulau Sumba dan Timor :

Lainnja termasuk aliran jang dinamakan orang „halaik” misalnja di *Donggo* (Sumbawa), *Trunjam* (Bali) dan beberapa tempat dipedalaman Timor, Flores, Sumba dan pulau jang ketjil² jang terserak dalam lingkungan gugusan Nusa Tenggara.

Bagaimanakah hakikat *Agama Hindu* — Bali itu ?

Perpaduan dari aliran Animisme — Dynamisme — Hinduisme dan Buddhimelah jang sebenarnja disebut Agama Hindu-Bali. Agama Hindu-Bali jang berkembang dipulau Bali merupakan satu Agama jang dynamis, karena ia kini sedang berevolusi dengan perkembangan kesadaran dan kejakinan soal Ketuhanan dari tingkat demi tingkat, dari masa kemasa. Dasar penting mengenai konsepsi Ketuhanan senantiasa mengandung pengertian :

- a. roh mutlak (melebihi atau absoluut) jang mengatasi dan melampaui tiap² naskah, tiap² istilah atau tiap² definisi manusia. Roch jang meresap dimana² dan meliputi segala-galanja, ialah Tuhan jang disebut „Sang Hjang Tunggal atau Sang Trimurti atau Aum”. Kata Aum singkatan dari : Ang-Ung-Mang. „Ang” lambang dari Sang Bhatara Brahma sebagai utpati atau pentjipta (schepper).

„Ung” lambang dari Sang Bharata Wisjnu sebagai stiti atau pelindung (beschermer).

„Mang” lambang dari Sang Bharata Sjiwa sebagai pralina atau perusak (vernier).

Ketiga Dewa Besar itu adalah *manifestasi* Sang Hjang Tunggal atau Sang Hjang Widdhi Wasa atau Sang Trimurti.

- b. Agama Hindu-Bali berdasarkan penghormatan dan penghargaan terhadap tiap² pendirian dan kejakinan keagamaan. Djelasnja, dalam kalangan umat Hindu-Bali Agama itu dipergunakan kearah 2 djurusan :
 1. Agama sebagai ketentuan menudju kehadiran Tuhan nan Esa dengan djalan melakukan sembahjang lahir dan batin (wahya adhyatmika).
 2. Agama sebagai alat mutlak mentjiptakan kedamaian dan kebahagiaan umat manusia.

Agama Hindu-Bali mempunyai dasar, triwarga yakni :

- a. Dharma = kebenaran
- b. Artha = kemakmuran
- c. Kama = kesenangan

Sedang jang mendjadi tudjuan jalah : *moksha* atau *nirwana* Triwarga dan moksha merupakan *tjaturwarga* jang diberi lambang *Swastika*. Tempat melakukan ibadah umat Hindu-Bali disebut pura (batja purè). Di Bali terdapat beratus-ratus pura. Pura jang tertua jalah Besakih. (berasal dari kata : basuki = selamat). Para penghulu



Spanduk menjambut kedatangannya Menteri P.P. dan K. di Nusa Tenggara.

Agama Hindu — Bali jang biasa memimpin upatjara Agama disebut *Pedanda*. Pekerdjaan *Pedanda* dibantu oleh para *Pemangku*. Suatu tanda bagi umat Hindu-Bali ialah tempat sadjian dimuka rumahnja jang disebut „sangah”. Karena pengaruh Hindu masih sangat kuatnja, maka masjarakat/umat Hindu-Bali masih hidup bergolongan-golongan atau bertingkat-tingkat jang biasa disebut : „Kasta”. Didalam kasta terdapat golongan :

1. *Brahmana* : kebanyakan mempergunakan sebutan *Ida* (laki²) dan *Idaju* (wanita)
2. *Ksatria* : kebanyakan bergelar *Dewa* (laki²) dan *Dewaju* (wanita)
3. *Waisja* : kebanyakan mempergunakan sebutan *Gusti* (laki²) *Gusti Aju* (wanita).
4. *Sjudra* : golongan ini tak bergelar, biasanja tjukup dengan I dimuka namanja.

Dilain pulau kasta itu merupakan golongan jang hampir sama dengan golongan bangsawan di Djawa misalnja, golongan jang bergelar : umbu (Sumba), lalu (Lombok), rato (Sumbawa).

Mengenai Agama Islam dan Kristen tak perlu diberi pendjelasan; hanja mengenai Agama Islam jang dianut oleh suku Sasak di Lombok jang perlu ada pendjelasan, yakni disamping pemeluk Agama Islam lima waktu terdapat pemeluk Agama jang mengaku dirinja *Islam tiga waktu* (Islam waktu telu).

Karena waktu telu (tiga) mendjadi pokok, maka ibadah jang mereka lakukapun ada tiga, yakni: pada waktu ada *kematian*, *hari Djum'at* dan *hari raja*.

Sembahjang mereka jang hanja sepekan sekali mereka lakukan „tiga kali berdiri dan tiga kali duduk”.

Beribadah selengkapnja menurut Rukun Islam seperti : berpuasa, naik hadji dsb.nja diserahkan kepada Kjai/Guru mereka. Seperti jang kami terangkan diatas, agama dan kepertjajaan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan masjarakat. Karena Agama dan kepertjajaan, maka timbullah adat istiadat dan adat kebiasaan jang berupa : upatjara², pelbagai permainan dan hiburan.

Upatjara pada waktu ada : kelahiran, perkawinan dan kematian biasanja dilakukan selamatan. Dalam ikatan perkawinan adat, memberikan djudjur, jang di Bali disebut radja pinomah pada waktu melamar (mepadik) atau tukon di Djawa Tengah dan Djawa Timur masih berlaku dipulau² : Sumba, Sumbawa dan Flores. Disana djudjur disebut orang : „belas”. Adat mepadik dengan sjarat memberi belis kadang² mendjadi penghalang bagi langsungnja perkawinan, sebab kerap kali berlaku melebihi kekuatan/kemampuan pihak² jang bersangkutan.

Hal itu sering² terdjadi karena belis itu ditentukan atas hasil musjawarat anggauta² keluarga tjalon mempelai perempuan. Lain

dari pada itu permintaan belis itu kadang² gadjil dan uniek, karena benda jang dituntut/diminta sebagai sjarat, sering² tiada terdapat lagi didaerah Nusa Tenggara misalnja : gading, emas lantak dsb..nja. Oleh karenanja maka seringkali terdjadi dalam perkawinan adat *melarikan gadis* jang di Bali disebut *merangkat* dan *melegandang*. Merangkat dilakukan atas persetudjuan dari kedua belah pihak (sigadis dan si djedjaka dan orang tua mereka). Dikatakan melegandang bila terdjadi peristiwa sigadis dilarikan dengan paksa.

Adat melukis/mengetjat kulit pada bagian badan misalnja : pada lengan dan kaki sematjam *tatoeren* bagi suku Dajak di Kalimantan banyak dilakukan dipulau Sumba dan Flores. Tjaranja kulit ditjotjoki dengan duri merupakan lukisan/kemudian tjotjokan itu disaput dengan abu kulit kemiri jang ditjampur dengan minjaknja.

Mengenai adat memelihara djenazah, bermatjam-matjam tjara jang dilakukan orang, ada jang *ditanam*, ada jang hanja *diletakkan diatas batu sadja dan ada jang dibakar*. Bagi umat Islam dan Kristen pada galibnja ditanam/dimakamkan seperti jang berlaku dilain tempat. Bagi golongan jang dinamakan *halaik* bila ada kematian, djenazahnja/majatnja ada jang hanja diletakkan diatas batu sadja (Trunjam dekat Kintamani dan beberapa tempat dipedalaman Sumba — Flores — Sumbawa).

Pemeluk² Agama Hindu-Bali dalam penjempurnaan upatjara djenazah dilakukan pembakaran jang bahasa Balinja disebut „ngaben”. Upatjara ngaben biasanja dilakukan pada musim kemarau (Agustus-September-Oktober). Umat pemeluk Agama Hindu-Bali belum merasa puas dan tenteram batinnja kalau mereka belum melakukan pengaben leluhur atau ahli waris jang mendjadi tanggungannja, walaupun kadang² bagi jang berada/mampu sampai mengeluarkan biaja jang berpuluh-puluh ribu djumlahnja.

Kegemaran dan kebiasaan atau adat jang mungkin ada pertalianja dengan kepertjajaan atau Agama jakni : *perdjudian dan sabungan ajam* : jang banyak terdapat di Bali, *minum tuak atau brem* banyak terdapat di Bali — Lombok — Timor.

Dalam perkawinan, berpolygami masih banyak dilakukan orang di Bali, Lombok, Sumbawa dan Timor.

Oleh karena soal adat didaerah Nusa Tenggara dilahirkan atas hasil musjawarat (setjara demokratis), maka madjelis adat dan rapat memegang peranan penting dalam kehidupan masjarakat. Hal itu dinjatakan dalam kalimat jang bunjinja sebagai berikut :

batal putusan radja, tidak batal putusan adat

batal putusan adat, tidak batal putusan anang (madjelis)

batal putusan anang, tidak batal putusan rakjat.

Kehidupan masjarakat jang sematjam itu terdapat pula didaerah Sulawesi Selatan.

KEHIDUPAN MASJARAKAT DALAM LAPANGAN EKONOMI

Daerah Nusa Tenggara sebagian besar merupakan daerah agraris dan sebenarnya bukan daerah yang kering, bila usaha mendynamiseer dan memoderniseer telah dilakukan. Padang rumput dan hutan sangat luas. Isi tanahnya belum diselidiki, hutan²nja menghasilkan *minjak kaju putih dan kaju tjendana* (Timor), *lilin* (Sumbawa-Timor). Dalam lapangan ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa segi yang tergolong pokok, yakni: pertanian, pemeliharaan dan penangkapan ikan, pemeliharaan hewan, pegaraman dan perdagangan.

Usaha pertanian yang dapat dibanggakan ialah tempat² yang telah ada usaha untuk mengatur saluran air (irigasi). Di Bali dan Lombok Barat mempergunakan system subak yang hasilnya patut ditjontoh dan dibanggakan. Dasar subak ialah sifat gotong rojong (collectief) yang diperoleh atas permufakatan kehendak (wilsovereenkomst). Sebaliknya kadang² pada beberapa usaha pertanian itu masih dilakukan setjara primitief sekali. Di Sumba misalnja, orang² yang akan mengendjakan sawahnya tjukup hanya dengan melepaskan *berpuluh-puluh ekor kerbau* pada ladang yang akan dijadikan sawah. Tjaranja, ladang itu digenangi air lebih dahulu, kemudian berpuluh-puluh ekor kerbau itu dihalaukan kian kemari agar mengindjak-indjak tanah sehingga menjadi lumpur.

Daerah Nusa Tenggara sebelah Barat ketjuali pertaniannya sudah agak maju, hujdjapun tiada kurang. Karenanya maka Bali, Lombok dan Sumbawa tergolong daerah surplus. Sebaliknya, Sumba, Flores dan Timor terhitung daerah minus, yang kadangkala perlu pertolongan setjara injectief berupa beras supaja tak mengalami kelaparan. Pemeliharaan dan penangkapan ikan djuga masih primitief dilakukan orang. Penangkapan ikan dilakukan dengan *tangan, djala, sero, kail*. Bahkan *penangkapan ikan yang besar² dipulau Lomblempun* masih dilakukan dengan *panah* atau direnangi dikedjar dengan *tombak*. Banjak nelayan diseluruh Nusa Tenggara tak kurang dari 20.000 orang.

Pemeliharaan hewan.

Propinsi Nusa Tenggara mempunyai modal nasional yang berupa hewan/ternak yang djumlah tiada sedikit. Menurut perhitungan dalam tahun 1950 terdapat djumlah yang kalau angkanya dibulatkan sebagai berikut :

Kuda	± 165.000 ekor, banjak terdapat di Sumba, Sumbawa, Roti Timor.
------	--

Sapi/lembu	± 513.000 ekor, banjak terdapat di Sumba, Sumbawa, Bali, Lombok dan Timor.
Kerbau	± 278.000 ekor, banjak terdapat di Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok dan Bali.
Kerbau	± 278.000 ekor, banjak terdapat di Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok dan Bali.
Babi	± 538.000 ekor, banjak terdapat di Bali, Timor dan Sumba.

Menurut taksiran sekarang, maka harganja lk. Rp. 400.000.000

Karena banjaknja hewan maka binatang² itu dibiarkan begitu sadja dihutan atau dipadang rumput. Untuk memudahkan penentuan milik seseorang maka masing² jang berhak atasnja membuatkan tanda² pada badan hewan/ternak tersebut. Dengan demikian tak mu dah ada kekeliruan. Kalau di Djawa ternak² itu biasanja dimasukkan kedalam kandang, maka tiada demikian halnja dipulau Sumba, Sumbawa, Flores dan Timor. Disana, tanaman jang dibuatkan kandang (dipagari). Sebab kalau dibiarkan akan habis tandas dimakan binatang.

Pembuatan garam.

Pembuatan garam dipulau-pulau diseluruh Nusa Tenggara tidak dimonopoli Pemerintah. Pegaraman rakjat sangat luasnja, sehingga untuk kebutuhan rakjat di Propinsi Nusa Tenggara tak perlu agaknja mendatangkan garam dari Madura atau lain tempat.

Perdagangan.

Ketjuala di Bali sebagian besar peredaran ekonomi dan perdagangan masih dikuasai oleh bangsa Tionghoa dan bangsa asing lainnja.

Karena masjarakat/rakjat pada umumnja kurang mempunyai organisatie vermogen, maka kekajaan jang sebenarnya dapat dibanggakan (hasil bumi, ternak, ikan dsb.nja) keuntungannja dijatuh pada tangan bangsa asing/kaum modal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanja idjon/pandjar systeem bagi pendjualan hasil bumi, hewan² jang bertjap huruf asing, misalnja huruf Kandji.

KEBUDAJAAN DAN KESENIAN.

Sedjak zaman dahulu pengaruh „Djawa” sangat berarti bagi perkembangan masjarakat diseluruh Nusa Tenggara dalam segala la-

pangan. *EXPEDITIE* Madjapahit zaman Ajam Wuruk berbekas dipulauan Nusa Tenggara. Nama? *Gadjahmada* dan *Nala* dikenal dalam dongeng atau tjeritera daerah dipulau-pulau : Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Timor, Solor, Flores dan beberapa pulau ketjil jang terse-rak diseluruh propinsi Nusa Tenggara.

Dalam hal kebudayaan jang meliputi: ilmu pengetahuan jang sederhana, filsafat Agama dan kesenian jang diwarisi dari nenek mo-jang mereka dipelihara baik², terutama dipulau Bali. Hampir segala tjabang kesenian (seni tari, seni lukis, seni ukir dsb.nja) hidup subur dipulau Bali. Kita masih ingat betapa besar perhatian luar negeri ter-hadap tari : djanger — legong dari Pliatan (Bali). Demikian pula ter-hadap hasil seni ukir dan seni lukisnja.

Di Timor *tari pedang* dan *tari likurai* berkembang ditengah-tengah masyarakat, demikian djuga *tari kuda* dan *tari burung* dipulau Sumba. Hasil seni jang berupa tenun dan barang songket dari *Bali, Lombok, Sumba, Timor* dan *Flores* mendapat pasar jang baik diluar daerah Nusa Tenggara.

Demikian gambaran daerah Nusa Tenggara dan konstellasi ma-sjarakatnja.

USAHA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA

Bahwasanja manusia itu tidak hanja terdidik oleh alam/orang lain, ia mampu mendidik diri sendiri, artinja manusia itu mempunyai kesanggupan dan kemampuan mentjari sendiri apa jang dibutuhkan-nja. Faktor itulah jang memudahkan masuknja pelbagai pengaruh. Tiga factoren penting jang mempengaruhi perubahan masyarakat dilingkungan gugusan Nusa Tenggara :

- a. pengaruh alam dan faktor² positif jang merupakan bakat
- b. pengaruh revolusi nasional
- c. pengaruh organisasi massa dan usaha Pemerintah

Kekajaan alam jang berupa tanah, hawa, air dsb.nja membawa pengaruh besar bagi penghidupan manusia. Pulau Sumba dan Sum-bawa jang berhutan dan berpadang luas beserta hewan ternaknja jang berlebih-lebihan mempengaruhi kepada penduduknja kurang radjin bekerdja : ternak di Sumba bagus² karena disana terdapat rum put jang baik sekali untuk makanan ternak.

Bali dan Lombok jang subur tanahnja, tetapi karena penduduk-nja sangat padat maka mereka pada umumnja sangat radjin bekerdja. Daerah Flores dan Timor jang buminja kering tandus, penduduknja banjak jang merantau kelain pulau. Pada umumnja penduduk jang

bertempat dekat pantai mempunyai bakat mengarungi laut. Mereka banjak yang menjadi nelayan dan anak kapal. Dalam ketenteraan rakjat dari daerah Nusa Tenggara tiada sedikit mengambil bagian.

b. *Pengaruh revolusi nasional.*

Revolusi nasional membawa banjak perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dalam lingkungan Nusa Tenggara, terutama angkatan mudanja. Beratus-ratus dijumlahnja pemuda pemudi dari pulau Bali, Lombok, Sumbawa dan Timor menudju Djawa untuk menuntut ilmu. Revolusi nasional mulai memegang peranan benar² dalam lubuk-hati rakjat didaerah Nusa Tenggara, yakni pada waktu penjerbuan Djokja, clash kedua berkobar. Perlawanan mendiang I Gst. Ngurah Rai terhadap tentera Belanda berpengaruh djuga bagi perjuangan rakjat di Bali. Djiwa revolusioner yang sedang melondjak-londjak sesudah penjerahan kedaulatan Pemerintah Belanda Kepada Pemerintah Indonesia, dapat disalurkan sebaik-baiknya.

Jajasan Kebaktian Pedjuang (J.K.P.) didirikan untuk menampung para bekas pedjuang. Pengaruh yang sangat mengembirakan ialah dalam lapangan ekonomi. Usaha dalam perdagangan mulai menjadi saingan yang memusingkan saudagar asing. Disana-sini telah mulai nampak toko² bangsa Indonesia. Suatu hal yang terasa mengurangi lantjarnya roda perekonomian ialah karena perhubungan atau pengangkutan yang melajani kebutuhan rakjat didaerah Nusa Tenggara baik didarat maupun diair ataupun diudara sangat kurangnya. Karena-nja maka hasil bumi yang melimpah-limpah, kopra dari Flores misalnya, konon chabarnya ada yang diselundupkan keluar wilayah Republik Indonesia. Hal ini Djaksa Agung Mr. Suprpto pernah pada tahun 1952 mengadakan penjelidikan sendiri kesana.

c. *Pengaruh organisasi massa dan usaha Pemerintah.*

Pelbagai organisasi massa yang menjadi pendorong yang bersifat psychologisch sangat berarti bagi perkembangan djiwa masyarakat didaerah Nusa Tenggara. Usaha Pemerintah yang disalurkan melalui Badan/Djawatan dsb.nja yang ditentukan menurut tugasnja masing² memegang peranan penting bagi pembangunan masyarakat dan negara.

Sebelum kita menindjau sekitar pertumbuhan dan perkembangan usaha Pendidikan Masyarakat yang meliputi daerah Nusa Tenggara maka kiranya akan berfaedahlah bila kami mengemukakan beberapa usaha dari Djawatan lain yang ada hubungannya dengan Djawatan kita. Dilihat dari sudut technis, maka hampir semua tjabang Djawatan/Inspeksi yang ada didaerah Nusa Tenggara kini sedang terus menjusun atau menjempurnakan kader²nja.

Disamping itu hasil yang telah njata dan usaha yang sedang didjalkan/diselesaikan dapat kami njatakan yang terpenting sebagai berikut :

daerah, sebab didaerah² jang tergolong surplus sedang dibangun-
usaha pertanian, misalnja bendungan: Gadungan, Luwus (Bali),
Lombok, Kalimontong (Sumbawa) dan Lembah In Bay (Flores).

1.
Bantuan penjurangan untuk mentjegah penyakit hewan jang
disediakan tempat pembibitan pada tiap² daerah. Memperluas
tumbuh²an untuk makanan hewan. Mempergiat peter-
kampung-kampung

Beri pimpinan teknis dan bantuan sekadarnja kepada
perikanan dan para nelayan di daerah Bali, Lombok,
dan Daerah Timor.

Perluas kolam pemeliharaan. Dari djumlah 2 buah kolam
tahun 1952, mendjadi 17 buah kolam dalam tahun 1953 dan
kolam dalam tahun 1954.

Adakan reboisatie didaerah Flores, Sumba dan Timor.
Bali dan Lombok umumnja rakyat telah ada pengertian
bahwa hutan bagi usaha kemakmuran.

2.
Bantuan penjurangan setjara demonstratief dan mengusahakan
pelopor didaerah : Bali, Sumbawa Flores dan Timor.

telah berhasil mempergiat koperasi simpan/pindjam.
pasar ditempat-tempat jang dipandang penting, misalnja di
(Buleleng) di Ubud (Gianjar).

3.
Bantuan perdagangan, usaha nasional mendapat bantuan setjukup-
djuaan agak menggembirakan N.V., Firma, C.V. jang benar²
nasional nampak djuga kemadjuannja.

Matjam² perusahaan jang pada tahun :
 1951 belum ada 100 buah.
 1952 telah lebih dari pada 250 buah.
 1953 telah lebih dari pada 350 buah.
 1954 hampir 400 buah.

Kesehatan.

Disana-sini banjak terdjangkit penjakit bacillaire dysenterie dan typhus. Penjakit pest dan andjing gila (rabies) hampir belum pernah ada. Djumlah tenaga dokter termasuk dokter partikelir hanja 34 orang jang berarti tiap² 150 000 orang hanja tersedia seorang dokter.

Pengadjaran.

Di Bali, Lombok, Timor, sekolah² kekurangan ruang dan pengadjar. Dipulau lain²nja mulai ada kesadaran terhadap pendidikan dan pengadjaran.

A g a m a.

Tiap² agama jang hidup didaerah Nusa Tenggara berkembang sebaik-baiknya. Kerukunan dan saling hormat-menghormati selalu diichtiarkan mengingat dan usaha jang telah dilakukan oleh Djawatan Inspeksi² tersebut diatas maka terdapatlah titik persamaan dan pertemuan dengan dasar² jang dilakukan oleh Djawatan/Inspeksi Pendidikan Masjarakat, karena pada umumnja : Kesatuan autoactiviteit — selfhelp — solidariteit — gotong-rojong djuga dijadikan dasar untuk berusaha. Dengan demikian maka koordinasi mudah dilakukan, tolong menolong diantara Djawatan dengan Djawatan atau Inspeksi dengan Inspeksi seringkali terdjadi.

USAHA PENDIDIKAN MASJARAKAT.

Setelah Kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat Prop. Nusa Tenggara pada tgl. 1 April 1951 terbentuk, maka 3 — 4 bulan kemudian tersusunlah kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat di daerah/kabupaten² dan 4 — 5 sesudah pembentukan Kantor Inspeksi P.M. Prop. di Singaradja maka selesailah penjusunan sebagian besar Kantor² para Penilik Pendidikan Masjarakat diwilajah/kewedanaan². Sedjak Inspeksi Pendidikan Masjarakat Prop. Nusa Tenggara dibentuk maka langkah² jang telah dijalankan :

- a Melakukan penjelidikan seluas mungkin guna bahan mengatur rentjana pekerdjaan lebih landjut.
- b. Menjusun/mengatur tenaga² penggerak baik tehnik maupun administrasi.
- c. Menjiapkan alat² pelaksana baik jang bersifat moreel maupun materieel.

- d. Menjempurnakan/memperbaiki beberapa kekurangan yang terdapat.
- e. Memupuk dan memelihara pelik² pertumbuhan.
- f. Mengadakan hubungan dan kerdja-sama dengan pelbagai instansi/Djawatan dan organisasi masyarakat.

Beberapa usaha dan peristiwa yang bisa menambah spirit dan irama daerah diantaranya ialah :

1. Dibandjar (kampung/dukuh di Djawa) *Abasan* desa *Singpadu* dalam lingkungan swapradja *Gianjar* (Bali) atas putusan rapat bandjar mengadakan peraturan (paswara) yang seolah-olah melaksanakan undang² *kewadajiban beladiar* bagi anggota² bandjar disana. Maksud dari paswara itu lebih kurang sebagai berikut : Semua anggota bandjar laki² dan perempuan (wanita) yang berumur 13 sampai 40 tahun diwajibkan mengikuti kursus P.B.H. Yang tiada suka menaati peraturan itu akan didenda dan jika ternyata beberapa kali melanggar itu diberi peringatan akan dipetiat/dikeluarkan dari keanggotaan bandjarnya.

Bila peristiwa ini terdjadi berarti suatu pembekotan (hukuman moreel) yang pada umumnya dirasakan sangat berat bagi tiap-tiap anggota masyarakat disana.

2. Didesa pertjobaan *Blahkiuh swapradja Badung* (Bali) lain tjara yang dilakukan oleh pemimpin desa tersebut untuk memajukan masyarakatnja.

Disana ada paswara desa yang melarang pemuda²nja kawin sebelum mereka dapat membuat dan menulis. Bila terdjadi ada yang melanggar dikenakan hukuman denda Rp. 10,— Memang swapradja Badung dalam waktu yang akhir² ini sangat progressief terhadap usaha Pendidikan Masyarakat. Dalam tahun 1954 memberikan bantuan wang sebanyak Rp. 10.000,— untuk kemajuan usaha Pendidikan Masyarakat.

Dua buah K.P.U./A. yakni didesa *Gadji* distrik *Kuta* dan *Mengwi* biaja penjelenggaraannja dipikul oleh (Dewan Pemerintah) swapradja Badung.

Peladjar² K.P.U./A. disana disiapkan untuk mendjadi guru untuk gerakan P.B.H. massaal.

3. Didesa *Negarai Swapradja Gianjar* (Bali) setelah dilakukan gerakan P.B.H. dengan sungguh² dan 5 kali dilakukan ujian serentak maka kini disana tak terdapat lagi orang² dewasa yang berumur 14 — 40 th. yang masih *buta huruf*. Ini adalah desa yang pertama dalam daerah *Nusa Tenggara* yang berani memproklamasikan penduduknja untuk sewaktu-waktu ditek.

4. Dikedjenelian (ketjamatan) *Kempo swapradja Dompu* (Sumbawa) para nelajannja berusaha mengadakan persatuan (perkumpulan) yang diwajibkan kepada anggota²nja yang masih *buta huruf*, agar beladjar pada Kursus P.B.H. dan yang telah mengenal huruf

para Djeneb (Tjamat) supaya memberikan pend
kepada semua rakjat diwilajahnja masing² agar dalam
jang singkat semua rakjat tahu membatja dan menulis
Latin

- b. Dewan Pemerintah mengandjurkan agar sebanjak m
tempat² kursus P.B.H. dibuat oleh rakjat sendiri
gotong rojong.

Di Rodja dalam wilajah Panitia Pendidikan Masjarakat E
ada seorang penduduk jang menjerahkan/merelakan se
pekarangannja kepada Inspeksi P.M. agar ditempat te
dapat diangunkan rumah untuk kursus P.B.H. dan K.H
Kantor untuk Panti Pemuda dan Panitia Pendidikan Masj
Ketjamatan.

Rumah² baik untuk tempat kursus maupun jang digunakan
kantor, didirikan atas dasar gotong rojong. Gotong rojo
dilakukan berpuluh-puluh tjalon/murid² P.B.H. dan K.H
Di Lombok guna menjongsong adanja gerakan P.B.H. m
diantara Inspeksi P.M. dan Kepala Daerah di Lombok,
pada tanggal 17-8-1954 dilakukan *seruan bersama* jang b
sebagai berikut :

SERUAN BERSAMA

PEMERINTAH DAERAH LOMBOK
INSPEKSI PENDIDIKAN MASJARAKAT DAERAH
BOK.

Untuk persiapan kearah desa *OTONOMI*, perlu segera
ADER" jang mempunjai penuh kesadaran „*BERBANGSA*
ERNEGARA". Kader² harus ditempat dalam „*KURSUS*
us dapat menambah pengetahuan dirinja dengan „*PE*
4AN".

PEMERINTAH PUSAT melalui DJAWATAN PENDID
ASJARAKAT telah menjediakan „*KURSUS*²” dan „*TA*
RPUSTAKAAN RAKJAT” berbagai tingkat disetiap des
bagai tempat.

Agar rentjana 10 TAHUN (sedjak 1951) „*PEMBERANT*
TA HURUF” jang dianggap sebagai musuh „*NASIONAL*”
dapat diselesaikan pada waktunja.

... dan Guru² P.B.H. bekerdja-sama jang erat dengan
ONG PRADJA/DESA setempat, segera memulai setjara giat
efficient, usaha² P.B.H. MASSAAL dan PEMELIHARAAN.
(nazorg).

Mataram, 17 Agustus 1954.

Daerah Lombok

II Inspeksi Pendidikan Masjarakat

Daerah Lombok

t.t.d.

Wk. Kepala

t. t. d.

Q RIPAAH).

(LALU THOHIR).

...kianlah beberapa tjatatan jang kami pandang penting menge-
Inspeksi Pendidikan Masjarakat Propinsi Nusa Tenggara
diri hingga kini.



DAERAH PROPINSI MALUKU

- ▲ Ibu Kota Propinsi.
- ▲ Kabupaten.
- + + + Batas Propinsi.

MALUKU



RUHUPATI
Kepala Inspeksi Propinsi
Maluku.

Telah mendjadi kebiasaan, bahwa pada saat-saat bersedjarah sebagai hari-hari peringatan Hari Ulang Tahun dsb., orang berhenti sedjenak dalam pikiran, menoleh kebelakang melihat djalan jang telah ditempuhnja, sebelum melangkahakan kaki kemuka mendjedjak masa baru didepannja.

Demikianlah pada menghadapi Hari Ulang Tahun V. Djawatan Pendidikan Masjarakat pada tanggal 24 Nopember 1954 ini, Inspeksi Pendidikan Masjarakat di Maluku sebelum mengorak langkah mendjedjak phase baru dengan segala kebaruannya, berhenti sebentar dalam pikiran sambil menoleh menengok djalan jang telah dilintasinja.

Tertjatatlah bulan April 1951 sebagai tanggal permulaan Pendidikan Masjarakat berpidjak di Ibu Kota Propinsi Maluku. Dewasa itu Sdr. TJOKRO dan Sdr. NANULAITTA diserahi tugas untuk memulai usaha-usaha Pendidikan Masjarakat.

Daerah ini adalah satu daerah kepulauan jang dibagi atas 3 (tiga) daerah Inspeksi Kabupaten jaitu :

1. Inspeksi Pendidikan Masjarakat Kabupaten Maluku Utara di Ternate.
2. Inspeksi Pendidikan Masjarakat Kabupaten Maluku Tengah di Ambon.
3. Inspeksi Pendidikan Masjarakat Kabupaten Maluku Tenggara di Tual.

Ketiga Inspeksi Kabupaten ini dibagi lagi atas :

I. Inspeksi Pendidikan Masjarakat Kabupaten Maluku Utara :

1. Daerah Penilik Ternate di Ternate.
2. Daerah Penilik Tidore di Tidore.
3. Daerah Penilik Djailolo di Djailolo.
4. Daerah Penilik Tobelo di Tobelo.

5. Daerah Penilik Weda di Weda.
6. Daerah Penilik Batjan di Labuha.
7. Daerah Penilik Sula di Sanana.

II. Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah :

1. Daerah Penilik Ambon di Ambon.
2. Daerah Penilik Lease di Saparua.
3. Daerah Penilik Banda di Neira.
4. Daerah Penilik Seram Timur di Geser.
5. Daerah Penilik Seram Selatan di Amahai.
6. Daerah Penilik Seram Utara di Wahai.

III. Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara :

1. Daerah Penilik P.P. Kai di Elat.
2. Daerah Penilik P.P. Tanimbar di Saumlaki.
3. Daerah Penilik P.P. Selatan Daja di Wonreli.
4. Daerah Penilik P.P. Aru di Dobo.
5. Daerah Penilik P.P. Babar di Tepa.

Hanya 5 dari 20 daerah Penilik ini dipimpin oleh Penilik-penilik Pendidikan Masyarakat. Jang sisanja dikepalai oleh pegawai administrasi golongan II dan III. Berkat kerdja sama dengan Instansi Pemerintahan lainnja begitupun dengan masyarakat, maka Inspeksi Daerah XI jang mulai dibentuk pada pertengahan tahun 1951 sedikit demi sedikit mulai melebarkan sajanja hingga pada dewasa ini, ketjuali Daerah Penilik Tobelo, telah terbentuk semua Kantor-kantor Pendidikan Masyarakat. Dalam menjelenggarakan usaha-usahanja Penilik-penilik ini dibantu oleh 36 buah Panitia Pendidikan Masyarakat Ketjamatan. Dengan memperhitungkan kesulitan perhubungan dari ibu kota Ketjamatan ke desa-desa, maka sesuai dengan instruksi Pusat dibeberapa daerah Ketjamatan telah dibentuk Panitia Pendidikan Masyarakat Desa sebagai Panitia Pembantu dari Panitia Pendidikan Masyarakat Ketjamatan tadi. Kerdja Sama dalam Panitia ini adalah baik sekali, terutama dengan Djawatan² Setempat, karena semua telah insjaf, bahwa pembangunan dalam segala lapangan harus diselenggarakan setjara integraal.

Sebelumnja kami meninjau perkembangan usaha didaerah kami, adalah baiknja bila kami berikan sedikit gambaran pada Saudara-saudara pembatja mengenai soal perhubungan didaerah kami.

Tak dapat disangkal, bahwa daerah kepulauan Maluku ini terdiri dari beratus-ratus pulau ketjil-ketjil. Perhubungan dengan Djakarta boleh dikatakan baik, karena ketjuali setiap 14 hari sekali ada kapal jang datang dari Djakarta dan kembali dengan melalui Makassar,

PELANTJAR

6

PELANTJAR

5

PELANTJAR

4

BUKU BATJAN P.B.H.

Catatan

1. HINDIAH TON
2. SORANG
3. HINDIAH TON

Disusun oleh

Komisi Penyelidikan
Pengajaran dan Pendidikan
Dewan Pendidikan Melayu
Dewan

Buku batjaan dalam kursus P.B.H.

terdapat djuga 2 kali hubungan dengan Garuda Indonesian Airways, djuga melalui Makassar.

Tetapi marilah kami menindjau perhubungan antara pulau ke pulau dalam daerah Maluku sendiri.

Dalam perdjalanen ke Ternate dan ke Tual ini beberapa ibu kota Kawedanaan disinggahi hanja untuk beberapa djam, sehingga bila petugas kita ingin menindjau daerah-daerah itu mesti menunggu kesempatan berikut untuk terus ke Kawedanaan jang lain. Peri demikian maka untuk mengelilingi suatu daerah Kabupaten umpamanja harus memakan waktu hingga berbulan-bulan. Kadang-kadang lantaran ombak beberapa tempat-tempat tak dapat disinggahi oleh kapal.

Bagi seorang Penilik Kawedanaan bila hendak menindjau desa-desa dalam lingkungan Kawedanaannya, terpaksa mesti mempergunakan perahu-perahu jang dalam waktu ombak sangat berbahaya. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa kebanyakan Penilik belum sempat mengundjungi seluruh daerahnja. Ketjuali perhubungan dengan kapal-kapal K.P.M. terdapat beberapa buah kapal ketjil kepunjaan Propinsi jang hanja berdjalan bila ada keperluan dari Pemerintahan Propinsi. Kesempatan inipun senantiasa dipakai oleh petugas-petugas kita.

Marilah sekarang kita menindjau perhubungan didarat, seperti dipulau Seram, Buru dan Halmahera. Dipulau-pulau ini Penilik² kita mesti menempuh perdjalan² jang djaraknja \pm 40 km. melalui rimba raja dengan berdjalan kaki bila hendak menindjau usaha-usaha didesa-desa. Dengan menindjau persoalan perhubungan diatas dapatlah dimengerti, bahwa soal ini merupakan suatu halangan jang besar atas perkembangan usaha kita dikepulauan Maluku.

Walaupun dengan menghadapi berbagai-bagai kesulitan Petugas² kita dengan penuh rasa tanggung djawab tetap melakukan tugasnja sehari-hari sehingga hasilnja dapatlah dilihat seperti dibawah ini :

P.B.H.

Agar pembatja nanti mendapat suatu gambaran jang terang mengenai perkembangan dari tahun ke tahun, kami persilakan saudara-saudara melihat tjatatan-tjatatan dibawah ini :

Oleh karena Inspeksi Daerah XI ini baru dibentuk pada kira-kira pertengahan 1951 dengan tenaga-tenaganya jang baru, maka sampai pada achir tahun 1952 dapatlah ditjatat djumlah kursus 1.342 buah dengan 1.351 orang guru dan 49.583 orang muridnja, sedangkan jang diberantas hingga achir tahun 1952 berdjumlah 8.314 orang.

Pada achir tahun 1953 tertjatat 1.055 buah kursus dengan 1.046 orang guru dan 35.161 orang muridnja, sedangkan jang diberantas selama tahun ini berdjumlah 6.774 orang.

Statistiek tahun 1954 menundjukkan 1362 buah kursus, dengan 1.359 orang guru dan jang diberantas selama tahun 1954 berdjumlah 13.608 orang.

Dengan demikian, maka sedjak Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah XI mulai melangkahhkan kakinja hingga achir tahun 1954 ia telah memberantas sedjumlah 28.696 orang.

P.B.H. massaal baru dapat dilaksanakan sedjak tahun 1954, itupun tak dapat dilakukan bersamaan diseluruh daerah, berhubung terlambat tibanja alat-alat ini didaerah akibat kesulitan perhubungan sebagai digambarkan pada permulaan karangan ini.

Pada umumnja perhatian masyarakat akan kursus-kursus P.B.H. bertambah besar. Bila kami menindjau kursus-kursus itu kelihatan ada perempuan² tua jang dengan menggendong anaknja datang ke-kursus-kursus ini. Sesudahnja masyarakat melihat manfaatnja tahu membatja dan menulis, maka dengan setjara gotong rojong rakjat mendirikan ruangan kursus untuk mengatasi kesulitan accomodasi jang terasa sangat diseluruh kepulauan Maluku ini.

Dalam tahun 1954 dikota Ambon terdapat 4 buah kursus P.B.H. Partikulir dengan 2 orang guru dan 161 orang muridnja.

Guru-guru sebahagian besar terdiri dari lulusan S.R. Dibeberapa tempat terdapat guru-guru S.R. jang melakukan pekerdjaan jang mulia ini.

Untuk menambahkan semangat beladjar dari pengikut kursus, maka sewaktu-waktu Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi Sdr. : M. Ruhupatty sendiri mengundjungi kursus-kursus ini. Disamping penindjauan ini, djuga oleh beliau diberikan penerangan² bagaimana besar manfaatnja orang jang sudah dapat membatja dan menulis.

Banjak diantara para lulusan telah mengirimkan kartu-kartu pos P.B.H., jang disebarkan oleh Inspeksi, kepada kami dalam mana dinjatakan kepuasan dan rasa terima kasih mereka atas usaha Pendidikan Masyarakat jang telah mengeluarkan mereka dari satu alam gelap ke alam jang terang. Kartu-kartu pos ini telah dipertontonkan dalam eksposisi sosial/ekonomi di Ambon pada waktu perkundjungan P.J.M. Wk. Presiden ke Maluku baru-baru ini.

TAMAN PUSTAKA PENGANTAR.

Untuk menampung para lulusan ini, T.P.P. selalu mendapat perhatian Inspeksi. Terbukti dengan adanja 24 buah T.P.P. dengan 1.200 buku-buku sampai achir tahun 1952.

Achir tahun 1953 djumlah ini telah mendjadi 62 buah dengan 7.551 buah buku dan 1.517 pematja setiap bulan. — Berkat kegiatan petugas-petugas kita didaerah djumlah ini pada achir tahun 1954 telah meningkat mendjadi 78 buah dengan 8.511 buah bukunya. Melihat betapa pentingnja nazorg ini, maka Inspeksi akan berusaha supaya dimana telah ada sedjumlah lulusan P.B.H. dibuka segera sebuah T.P.P.



Buku-buku Taman Pustaka Pengantar.

Jang kini perlu mendapat perhatian lagi ialah P.B.H. dikalangan Transmigrasi di Kairatu (Seram Barat). Dengan bekerdja sama dengan Kepala Transmigrasi Propinsi Maluku, maka pada tanggal 1/3-'55 telah berkundjung kedaerah Transmigrasi di Kairatu.

Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah untuk menindjau kemungkinan² pembukaan Kursus P.B.H. disana. Dalam penindjauan selama 4 hari ternyata kurang lebih 505 dari transmigranten jang berdjumlah 411 orang perlu diberantas. Dengan persetujuan Panitia Pendidikan Masyarakat Kairatu segera akan diusahakan pembukaan Kursus-kursus P.B.H. bagi mereka jang akan dipimpin oleh dua orang guru S.R. disitu jang djuga telah mendjadi guru P.B.H. pada 2 buah Kursus di Kairatu jang diikuti oleh penduduk jang masih buta huruf. Mereka ini sebagian besar terdiri dari suku Buton.

K.K.O.D.

Marilah sekarang kita menindjau perkembangan K.K.O.D. di daerah ini. Sebagaimana diatas dikatakan bahwa Inspeksi Daerah XI mulai bergerak dengan pegawai-pegawai baru, maka dapatlah dimengerti, bahwa petugas-petugas ini sambil bekerdja mentjari pengalamanan. Dalam tahun 1953 usaha kearah ini baru dalam taraf persiapan. Baru dalam tahun 1954 usaha ini mendjadi suatu kenyataan dengan dibukanya 4 buah K.K.O.D. di Maluku Utara dengan 68 orang murid dan 4 orang gurunya. Keempat K.K.O.D. ini bertjorak pertanian, peternakan, seni ukir dan lukis dan pembuatan roti. Pada tanggal 26/10-1954 oleh Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten Maluku Utara di Ternate diadakan eksposisi K.K.O.D. seni ukir dan lukis dimana dipertontonkan hasil usaha K.K.O.D. ini, jang mendapat perhatian sepenuhnya dari masyarakat disitu. — Disamping ini terdapat pula di Maluku Tenggara 3 buah K.K.O.D. Partikulir dengan 4 orang guru dan 36 orang muridnja. K.K.O.D. ini bertjorak keradjinan tangan. Hasilnja telah dipertontonkan dalam eksposisi sosial ekonomi dikota Ambon pada waktu perkundjungan P.J.M. Wk. Presiden ke Maluku. Selesainja eksposisi barang-barang ini di djual dan hasilnja telah diserahkan pada Kursus-kursus jang bersangkutan.

Pada saat ini telah dimulai dengan 2 buah K.K.O.D. bertjorak pemasakan minjak kajuputih dan pertanian didalam wilayah Kawedanaan Buru di Namlea. Di Kawedanaan Bandapun telah dimulai dengan sebuah K.K.O.D. pembuatan manisan pala sedangkan dalam persiapan sebuah lagi jang bertjorak pembuatan perabot-perabot rumah dari kaju dengan bantuan kaju nanti dari perkebunan daerah disana jang telah disanggupi oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengah.

sedjumlah guru 29 orang dan 126 orang muridnja. Da
achir lulus 53 orang termasuk 6 orang wanita. Perkemban
dalam tahun 1954 meningkat dengan dibukanja 8 buah
dengan orang guru dan 238 orang muridnja. Dalam u
telah lulus 80 orang. Kedelapan Kursus ini bertempat mas
di Ternate, Tobelo, Sanana, Tidore, (Maluku Utara), Sapa
lea (Maluku Tenggara). — Disamping ini K.P.U./B. pun
jadi kenjataan dengan dibukanja sebuah dikota Ambon
orang guru dan 19 orang pengikutnja. Dalam udjian achir
jang diikuti hanja oleh 11 orang, telah keluar sebagai
orang. Jang tak dapat mengikuti udjian ialah pengikut-per
terdiri dari pegawai-pegawai jang pada waktu udjian disel
bertugas keluar. Dengan bertempat diruangan Kantor Ins
didikan Masjarakat Propinsi Maluku pada pertengahan bul
ber 1954 telah diadakan upatjara penjerahan idjazah kepa
dengan dihadiri oleh Wk. Gubernur Maluku bersama sem
Instansi Militer dan Sipil.

Dalam tahun ini akan diusahakan pembukaan 10 buah
A. diseluruh daerah dan 2 buah K.K.M./B. masing-masi
nate dan Ambon. — Pada waktu karangan ini dibuat te
sebuah K.K.M./A. di Piru dan sebuah lagi di Banda ; ke
termasuk lingkungan Inspeksi Pendidikan Masjarakat
Maluku Tengah. K.K.M./B. dikota Ambon telah mulai d
tanggal 1 Maret 1955 dengan diikuti oleh 25 orang sis
4 orang gurunja.

T.P.R.

Marilah sekarang kita arahkan pandangan kita keba
Pembatja sebelumnja dipersilakan melihat tjatatan dibawa

Tahun 1952 :

- T.P.R./A. ada 10 tempat dengan kitab 460 buah.
- T.P.R./B. ada 5 tempat dengan kitab 325 buah.
- T.P.R./C. ada 1 tempat dengan kitab 784 buah.

Tahun 1953 :

T.P.R./A. ada 20 tempat dengan kitab 1895 buah.
T.P.R./B. ada 8 tempat dengan kitab 1596 buah.
T.P.R./C. ada 1 tempat dengan kitab 1095 buah.

Tahun 1954 :

T.P.R./A. ada 20 tempat dengan kitab 1852 buah.
T.P.R./B. ada 3 tempat dengan kitab 1769 buah.
T.P.R./C. ada 1 tempat dengan kitab 1597 buah.

Disamping T.P.R./C. dikota Ambon, terdapat pula sebuah Perpustakaan Induk Propinsi dengan Taman Pembatjaannya berdampingan dengan ruangan Kantor Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi yang senantiasa mendapat kunjungan pembatja.

Ketjuali djam-djam kerdja, setiap hari-hari Selasa, Kamis dan Sabtu djam 15.00 — 17.00 T.P.R./C. dengan ruangan batjaannya dibuka untuk umum.

KEWANITAAN.

Bagian Kewanitaan kami pun selalu mentjari hubungan dengan organisasi² Wanita yang berada didaerah. Dalam tahun 1952 dapat dibuka sebagai langkah permulaan 2 buah Kursus P.B.H. khusus Wanita dengan 2 orang guru dan 34 orang pengikutnja. Usaha ini mulai berkembang dalam tahun 1953 dengan mentjatat 33 buah Kursus P.B.H. khusus Wanita dengan 33 orang guru dan 933 orang muridnja. Dalam usaha memberantas buta huruf Wanitapun tak mau ketinggalan. Berkat kegiatan petugas-petugas kita dengan dibantu oleh organisasi² Wanita maka pada achir tahun 1954 tertjatat 187 buah Kursus P.B.H. khusus Wanita dengan 139 orang guru dan 10.023 orang pengikutnja. Diantara 4 buah K.K.O.D. di Maluku Utara pada tahun 1954 itu terdapat sebuah K.K.O.D. Wanita, begitu pula terdapat 2 buah K.K.O.D. Wanita dari 3 buah yang diselenggarakan oleh Badan Partikulier di Maluku Tenggara.

Mendjelang perajaan Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dengan dipelopori oleh Bagian Kewanitaan kami, dibentuk Panitia Perajaan. Agar Hari Ibu itu dapat dirajakan sampai kepelosok-pelosok maka pada Kantor-kantor kita didaerah diandjurkan memberikan bantuan kepada Panitia-panitia yang dibentuk didaerah-daerah itu untuk maksud yang sama.

KEPEMUDAAN.

Sesudahnja kita membitjarakan Bagian Kewanitaan maka baiklah sekarang pandangan kita diarahkan kepada Bagian Pemuda. Hu-

bungan dengan organisasi-organisasi Pemuda tetap baik dan memuaskan. Sedjak tahun 1952 telah dibentuk dikota Ambon sebuah Panti Pemuda yang didukung oleh organisasi-organisasi Pemuda sebagai berikut :

1. Gerakan Pemuda Kristen Maluku.
2. Persatuan Pemuda Kristen Maluku.
3. Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia.
4. Pemuda Indonesia Maluku.
5. Front Pemuda Indonesia Nusa Ina.
6. Front Pemuda Indonesia Buru.
7. Front Pemuda Indonesia Maluku.

Melihat akan kesulitan perumahan dikota Ambon, maka Panti Pemuda ini hingga sekarang masih berada dalam suatu ruangan darurat bertempat didjalan Ridjali. Walaupun dalam keadaan yang sederhana, usahanya tetap berdjalan, seperti Olah-Raga dan Taman Batjaan. Mendjelang perajaan Hari Pahlawan 1953 Panti Pemuda inipun telah menjelenggarakan aktivering dengan mengerdjakan djalan Raya Urimesing dikota Ambon oleh Pemuda-pemuda dari segenap lapisan. Tahun 1954 membawa suatu kemajuan baru dengan dibentuk lagi sebuah Panti Pemuda di Ternate (Maluku Utara) yang didukung oleh :

1. Front Pemuda Nasional.
2. Pemuda Demokrat.
3. Gerakan Pemuda Islam Indonesia.
4. Peladjar Islam Indonesia.
5. Ikatan Pemuda Peladjar Indonesia.
6. Lembaga Kebudayaan Maluku Utara.
7. Ikatan Kepanduan Maluku Utara.
8. Persatuan Pemuda Kristen Maluku.
9. Ikatan Siswa K.P.U./A. —/1952/1953.

Usaha-usaha dari Panti Pemuda yang baru ini adalah Taman Batjaan, Olah-Raga, Diskusi dan Tjeramah. Dalam memperingati Hari Pahlawan Bagian Pemuda kami senantiasa aktif mengambil bagian dalam Panitia-panitia Perajaannya. Dalam tahun ini akan diusahakan agar Maluku Tenggaraupun mendapat sebuah Panti Pemuda.

KEOLAHRAGAAN.

Disamping bagian Pemuda maka bagian Ke-Olah-Ragaanpun tetap bergerak dalam lapangannya. Perkembangan Ke-Olah-Ragaan makin meningkat. Semangat berolah-raga mulai merata sampai kedesa-desa. Untuk mengatasi keluhan masyarakat bahwa tak ada Kaders

Olah-Raga untuk memimpin Ke-Olah-Ragaan dipelosok-pelosok, oleh bagian ini dalam tahun 1953 telah diadakan 4 kali latihan Kader Olah-Raga dengan 98 orang pengikutnja. Dalam tahun 1954 latihan sematjam ini 2 kali diadakan dengan 66 orang pengikutnja. Latihan Kader Ke-Olah-Ragaan ini diselenggarakan Kawedanaan demi Kawedanaan.

Melihat kebutuhan masjarakat akan Kaders ini, maka diizinkan oleh Pusat dalam tahun ini lebih banyak lagi latihan yang nanti diadakan.

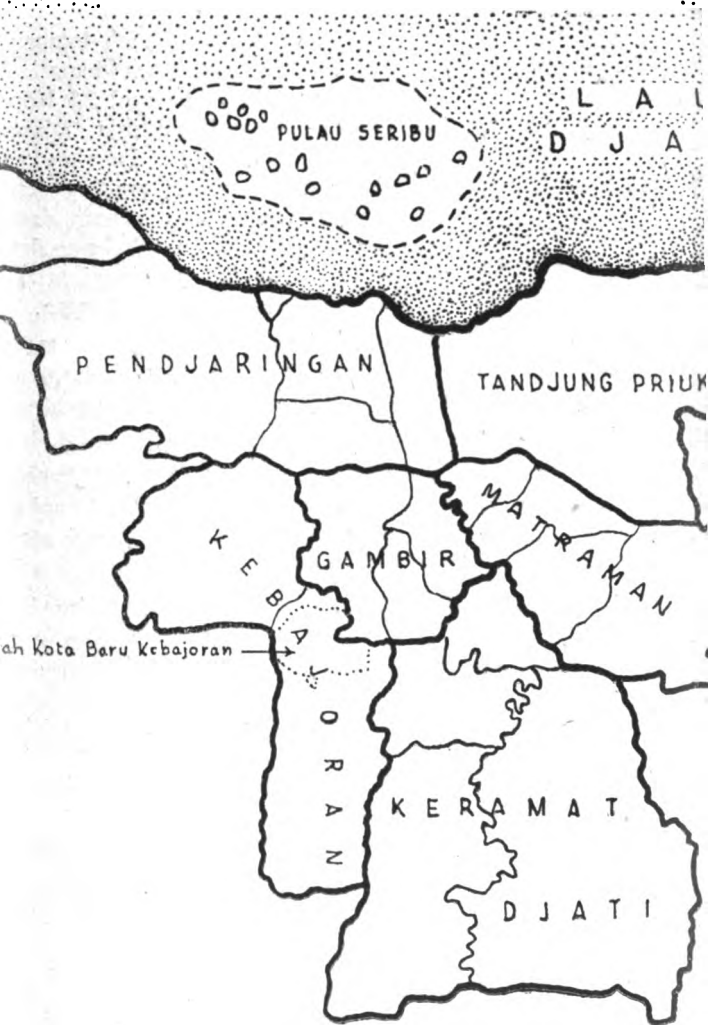
KEPANDUAN.

Marilah sekarang kita menindjau apa yang telah dikerdjakan oleh Bagian Kepanduan kita. Masjarakat mulai melihat, bahwa Kepanduan ini adalah salah satu lapangan pendidikan yang bebas. Dalam tahun 1954 dengan bertempat diruangan Kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat Propinsi Maluku telah terbentuk IPINDO yang terdiri dari : Pandu Rakjat Indonesia, Perserikatan Pandu-pandu, K.B.I., SIAP., PII, HIZBULWATHAN.

Dalam tahun 1953 oleh IPINDO dengan dibantu oleh Bagian Kepanduan kami telah diadakan latihan Pemimpin Pandu di Waetori (Ambon) yang diikuti oleh pemimpin-pemimpin Pandu didalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Pada permulaan tahun 1954 oleh bagian Kepanduan Djawatan Pendidikan Masjarakat dengan dibantu oleh IPINDO Kwartir Besar diadakan latihan pemimpin Pandu di Waeteri (Ambon) lagi dan diikuti oleh tjalon-tjalon dari seluruh Propinsi. Disamping pengikut-pengikut ini pun terdapat beberapa orang pegawai Pendidikan Masjarakat yang ingin menerdjunkan dirinja dilapangan Kepanduan. Datang dari Pusat pada waktu itu Bapa Soedibyo. Berkat kegiatan bekerdja dari pada Kader-kader yang telah dilatih ini, muntjullah perkumpulan² Pandu didaerah-daerah.

Hasil-hasil tersebut diatas djauh belum memadai. Semoga dimasa datang dapat ditjatkan perobahan dan kemadjuan.

DJAKARTA RAJA



DJAKARTA RAYA



GHOSE GAUTAMA
Kep. Inspeksi Pendidikan
Masjarakat Djakarta Raya.

Hari ini, hari Rabu tanggal 24 Nopember 1954, bagi lingkungan Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian P.P. dan K. adalah hari jang bersedjarah: „Hari Ulang Tahun ke V Djawatan Pendidikan Masjarakat”.

Peristiwa 5 tahun telah lampau sedjak dikeluarkannja s.p. Menteri P.P. dan K. No.: 423/A tanggal 24 Nopember 1949, tanggal lahirnja Djawatan Pendidikan Masjarakat. Dikeluarkannja s.p. ini adalah sangat penting sebagai pernyataan kesungguhan negara dan kesadaran masjarakat untuk berusaha sepenuhnya dalam mempertinggi taraf ketjerdasan dan kemampuan bangsa.

Waktu jang 5 tahun itu telah dipergunakan dengan sepenuh tenaga untuk apa jang dapat dihasilkan dan ditjapai oleh lingkungan Djawatan jang masih sangat muda itu, ditindjau dari sudut perhitungan sedjarah usia 5 tahun hanja merupakan sekedjap mata sadja.

Biarpun dengan sendirinja dari semua daerah (Daerah I-XII) tidak akan sama dalam kepesatannja melakukan tugasnja, tetapi pada umumnja usaha-usaha Pendidikan Masjarakat setapak demi setapak mendjadi lebih teratur.

Letaknja tidak samanja kepesatan, didaerah-daerah itu bukan sadja karena pengisian formasi pegawai (bezettings formatie) atau karena soal-soal persediaan keuangan, tetapi sangat pula tergantung kepada tjara hidup masjarakat (miliu) dimasing-masing daerah.

Mengingat bahwa usaha-usaha Pendidikan Masjarakat hendaknja lambat laun mendjadi usaha-usaha masjarakat sendiri, dimana segala tundjangan keuangan/materieel hanja bersifat sementara, maka bersifat „abadi” hanja pimpinan/bimbingan sadja, dengan sendirinja segala usaha pendidikan masjarakat kesedarannja sangat tergantung pula pada kesadaran, keadaan ekonomi dan rasa kesosialan masjarakat sendiri.

Didaerah XII Djakarta-Raya, sebagai kota besar bahkan boleh dikatakan kota internasional, mungkin kesadaran termaksud agak

tijkup adanja, tetapi karena masjarakat Djakarta raya umumnja ada dalam tekanan ekonomi jang sangat berat jang mau tidak mau rasa commersieel sedikit atau banjak mentipiskan rasa kesosialan dan kebaktian, pada umumnja usaha-usaha Pendidikan Masjarakat belum dapat subur tumbuhnja sebagaimana jang diharapkan.

Sedjak lahirnja I.P.M. Djakarta-Raya pada pertengahan tahun 1950, jang pada setengah tahun pertama itu terutama dititik beratkan pada penjelenggaraan persiapan dan penerangan, serta dengan demikian kenjataan umumnja usaha-usaha I.P.M. daerah XII mulai berdjalan tahun 1951, sampai pertengahan tahun 1954, dengan mengatasi segala kesukaran baharu dapat sekedar menghasilkan sbb. :

PERHUBUNGAN :

Kerdja sama dengan instansi-instansi dan organisasi masjarakat, terutama dengan Djawatan Pamong pradja dan Penerangan adalah baik. Meskipun demikian pada umumnja terhadap usaha-usaha Pendidikan Masjarakat kesedaran Masjarakat Djakarta Raya belum pula tijkup. Ternjata sampai sekarang masih sangat sukar untuk menjaharikan tenaga-tenaga untuk anggota Panitia Pendidikan Masjarakat Ketjamatan, sehingga sampai sekarang belum pernah tijkup banjaknja Panitia dibandingkan dengan banjaknja Ketjamatan. Pada hal mengingat banjaknja penduduk (\pm 2,5 djuta orang, rata-rata 20% Ketjamatan) Struktur 1 Ketjamatan 1 Panitia untuk Djakarta-Raya sudah terlalu berat bagi Panitia.

Pada umumnja Panitia-panitia jang telah ada, belum dapat/sanggup mendjalankan tugas-tugas/instruksi-instruksi sebagai jang ditentukan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Tenaga dari I.P.M. sangat kurang untuk selalu mendampingi Panitia-panitia di Wilajah wilajah.

Untuk sekedar meringankan hal ini, sedjak pertengahan tahun 1952, perhubungan dengan instansi-instansi, organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan Negeri/Partikulir tidak oleh Panitia-panitia tetapi langsung oleh I.P.M. Daerah XII, meskipun susunan pormasinja sampai sekarang belum pernah dapat dilengkapi pula.

Panitia :

Tahun	Ketjamatan	Panitia Ketjamatan
1950		
bagian ke III)	23	2
1951	23	16
1952	20	18
1953	21	18
1954	21	18
(bagian ke I)		

P.B.H.

Kesulitan-kesulitan jang dihadapi :

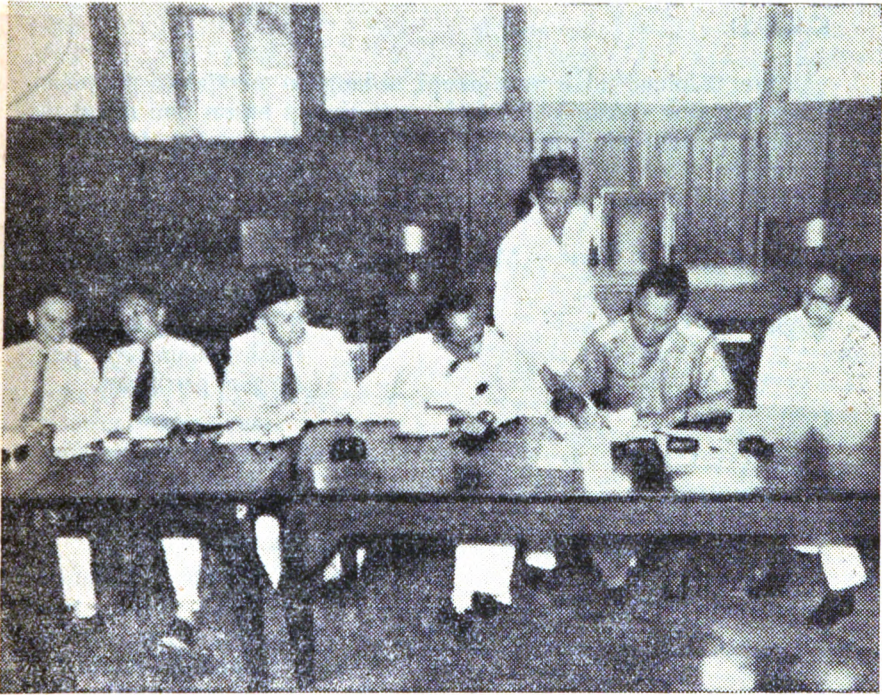
1. Masyarakat jang masih buta huruf Latin, umumnja masih belum dapat merasakan faedahnja dari pandai batja tulis.
2. Kesukaran tempat dan penerangan (lampu) untuk mengadakan kursus-kursus P.B.H. (kursus untuk 20 orang atau lebih).
3. Tekanan ekonomi jang memaksa pada umumnja banjak sekali waktu harus dipergunakan untuk mentjari nafkah sehari-hari.
4. Perasaan untuk melaksanakan pekerdjaan sosial (diantaranja P.B.H. dan lain-lain usaha-usaha Pendidikan Masyarakat) didalam kota sedikit atau banjak terdesak oleh perasaan komersil.
5. Pada umumnja usaha-usaha jang diadakan/diandjurkan oleh Pendidikan Masyarakat masih belum dapat disedari bahwa usaha-usaha itu semestinja adalah usaha-usaha Masyarakat sendiri.
6. Disebabkan rata-rata sangat tingginja absensi pada kursus-kursus P.B.H. pada umumnja buku-buku bahan peladjaran belum dapat diselesaikan dalam waktu jang ditentukan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat.
7. P.B.H. massaal karena kesukaran mentjahari jang suka mendjadi pemimpin rajon (guru P.B.H.), mungkin karena tidak tersedianja biaja, belum dapat berdjalan sebagaimana jang diharapkan.
8. P.B.H. landjutan, karena alasan termaksud dalam 7, pula belum dapat berdjalan.

Karena kesulitan-kesulitan tersebut diatas maka P.B.H. baharu mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tahun	Kursus	Guru	Murid	Lulus Djh	Lulus s/d
1950	84	161	3610	581	581
(Bagian ke II)					
1951	544	988	15207	3009	3590
1952	628	665	20772	3405	6995
1953	907	978	28218	3448	10443
1954	333	345	10696	2327	12770
(Bagian ke I)					

LATIHAN GURU P.B.H.

Jang terutama sifatnja didasarkan membentuk kader guru P.B.H. jang dilatih tjaranja mengadjar kursus P.B.H. pada umumnja hasilnja belum memuaskan :



Wali Kota Djakarta Raya sedang menanda-tangani penjerahan urusan Pendidikan Masjarakat.

Tahun	Latihan	Keterangan
1950	—	Belum dapat diadakan, karena usaha I.P.M. Djakarta-Raya, waktu itu masih dalam taraf penerangan/persiapan.
(Bagian ke II)		
1951	3 ×	Hasilnja tidak memuaskan.
1952	—	Ditunda, tidak diadakan, karena hasil tahun 1951 dalam prakteknja sangat tidak memuaskan.
1953	3 ×	Hasilnja agak mendingan dari tahun 1951.
1954	—	Belum dapat diadakan, petundjuk latihan guru P.B.H. untuk tahun 1954 dari Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat, sangat sukar untuk dapat dijalankan di Djakarta-Raya dimana pada umumnja keadaanja sangat komersil.

K.K.O.D.

Stootkapitaal tidak mentjukupi, sedangkan mentjahari pimpinan/pengadjar jang tjukup keahliannja serta tjukup hasrat dan minat menjediakan waktu untuk memimpin K.K.O.D. sangat sukar. Jang tjukup mempunyai keahlian jang dibutuhkan rata-rata terlalu sibuk dalam pekerdjaannja atau perusahaannja sendiri.

Tahun	Kursus	Guru	Murid	Lulus	Keterangan
1950	—	—	—	—	Belum diadakan usaha I. P. M. Djakarta-Raya masih dalam taraf penerangan/persiapan.
(bagian ke II)					
1951	—	—	—	—	idem
1952	1*)	4	60	*)	K.K.O.D. Wanita pada achir tahun 1952 tinggal : Gurunja 2 orang. Hanja 30 orang. *) Kursus Landjutan supaja achir tahun 1953 dan meluluskan 23 murid.
1953	5	9	95	—	K.K.O.D. lk. didirikan dalam tr. IV. '53. Keadaan achir tahun 1953 Guru 5 orang murid 75 kursus dilandjutkan terus dalam tahun 1954. Keadaan pada achir tr. II 1954. Guru 9 orang murid 94 orang.

mentjahari tempat dan tidak tersedianja biaja untuk penjelasan. Keadaan sampai :

Tahun	Tempat Kitab — Pambatja			Keterangan	
1950					
bg. ke II)	—	—	—	belum tersedia buku-	idem
1951	—	—	—		idem
1952	—	—	—	Bahan tersedia sedikit	
1953	11	1192	*)	*) Belum ada per-	
				jang njata. Mas-	
				taraf pertjobaan	
				dapat berdjalan l	
1954	24	1935	*)	*)	idem
(bg. ke I)					

K.P.U.

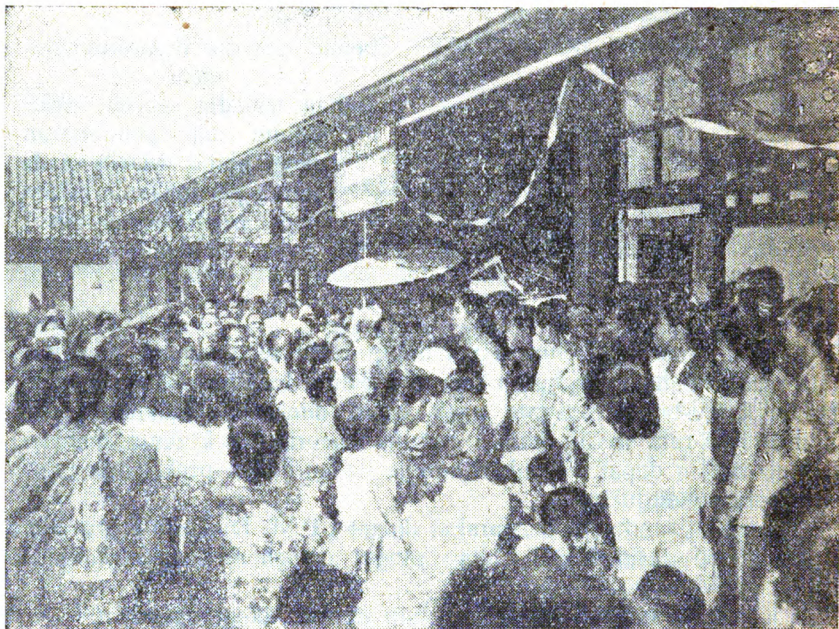
Pada umumnja belum dapat hidup subur sebagaimana Buku-buku bahan peladjaran rata-rata belum lengkap sedang bahan buku-buku rata-rata agak kasip diterima. Djalann djaran rata-rata masih terlalu bersifat theorie, praktijknja hampir belum dapat dilakukan karena bahan-bahan praktijk rata belum mentjukupi.

Tentang sambutan masjarakat dalam I.P.M. Djakarta-R tentu murid-murid K.P.U. tetap sangat menghendaki pen idjazah (civieleffect).

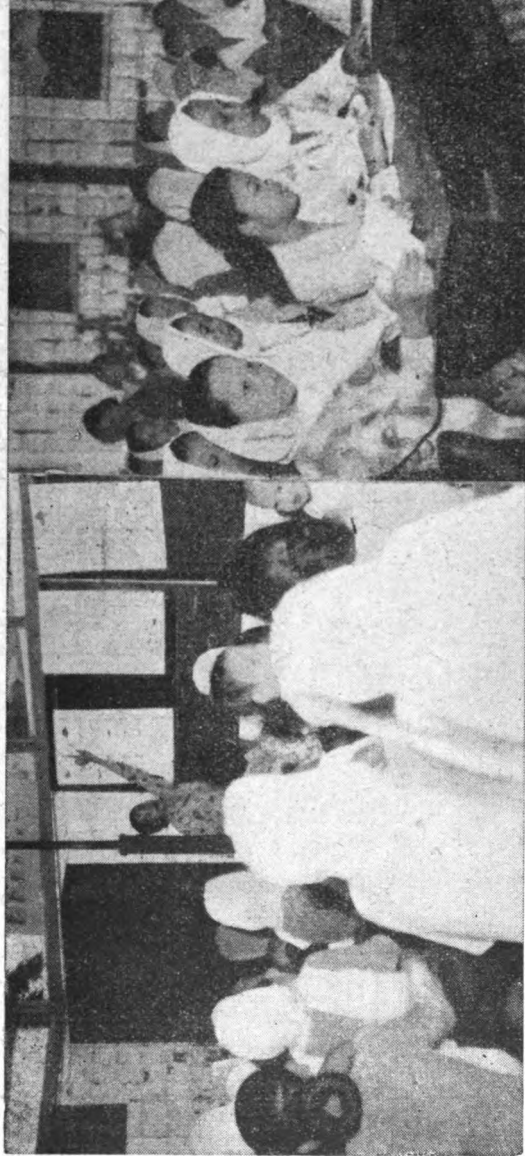
K.P.U.C. sampai sekarang belum pernah dapat diadak

Keadaan sampai saat udjian :

Tahun	Kursus		Guru		Murid		
	A	B	A	B	A	B	
1950							
(bg. ke II)	—	—	—	—	—	—	—
1951	7	1	35	5	116	7	9
1952	—	—	—	—	—	—	—
1953	8	1	46	4	141	15	10
1954 a	10	2	67	11	255	49	belum
(bg. ke II) b	1	—	5	—	30	—	diud
							a =
							b =



**NJ. FATMAWATI beramanat setelah menyaksikan gerakan
P.B.H. Masal.**



Gerakan P.B.H. massaal pada hari Kartini di Djakarta.

T.P.R.

Umumnja T.P.R. A tidak berdjalan sebagaimana mestinja. Karena itu untuk tahun 1954 T.P.M. Daerah XII bermaksud tidak akan menambah tetapi akan mengusahakan menjempurnakan dahulu jang telah ada.

Sampai achir tr. II/1954 T.P.M. Daerah XII belum mempunjai T.P.R. B dan C.

Keadaan sampai achir :

Tahun	Tempat Kitab - Pembatja (T.P.R.A.)			Keterangan
1950 (Bag. ke II)	—	—	—	Belum tersedia buku ² nja.
1951	15	2.760	— *)	*) Taraf permulaan, belum ada pendaftaran jang njata.
1952	25	4.206	2431	
1953	32	6.921	4869	
1953 (bg. ke I)	28	5.350	2032	

KEWANITAAN.

Perkembangan kewanitaan ada djuga, meskipun hasilnja belum sampai pada jang diharapkan. Terutama jang diberikan adalah kerajinan tangan wanita jang hasilnja sewaktu-waktu dipamerkan.

Tahun	Ks. P.B.H.	K.K.O.D.	K.P.U.A.	Kursus Kewanitaan			
1950 (bg. ke II)	dg. Kr. tangan			Kursus-Guru-Murid-Lulus			
1951	—	—	—	—	—	—	—
1952	25	1	—	1	6	26	23
1953	27	—	—	1	6	28	28
1954 (bg. ke II)	5 **)	2	3	—	—	—	—

*) Masih dalam taraf penerangan/persiapan. Mengadakan hubungan-hubungan sama organisasi-organisasi Wanita.

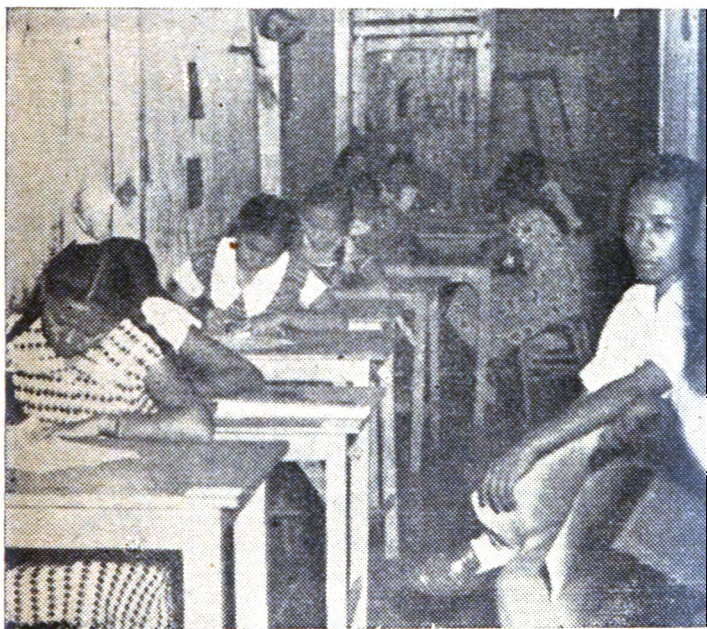
*) Baru dapat dimulai achir tr. II*1954. Biaja tundjangan diberikan dalam tr. III*1954.

K.P.K. KEPANDUAN :

Belum ada usaha-usaha apa-apa, sifatnja hanja hubungan² sama perkumpulan² kepanduan jang terpenting. Karena di I.P.M. Djakarta-Raya sampai sekarang belum ada tenaga ahli, maka usaha Kepanduannja langsung dihadapi oleh Djawatan Pusat.

dengan rentjana dalam tahun 1954 hendaknja dapat mendirikan Pusat Pemusatan Pemuda.

Sedjak tr. II/1954, urusan Pemuda dalam I.P.M. Djakarta disebabkan tidak adanya tenaga ahli, sementara ini dihadapkan kepada Djawatan Pusat.



Udjian K.K.M./A di Taman Sari Djakarta.

- b. Memberi bantuan alat-alat Olah-raga pada organisasi O.R.
- 2 a. seperti diatas.
b. idem .
c. Pertandingan antar-ketjamatan sepak bola.
- 3 a. seperti diatas.
b. idem (serta tundjangan² memperbaiki lapangan).
c. Pertandingan antar-ketjamatan sepak-bola + bulu tangkis.
Latihan Olah-Raga 2 ×.
- 54 (bg. ke I) :

a. seperti diatas.

Latihan Olah-Raga 2 ×

- c. Bantuan alat-alat Olah-Raga dan tundjangan memperbaiki lapangan.
d. Pertandingan antar-ketjamatan seperti tahun 1953 ditambah dengan, volly dan gerak djalan.

Mengenai c dan d, karena agak kasipnja diterima biaja, baharu dapat didjalankan pada tahun 1954 bagian ke II.

ianlah lapuran singkat tentang hasil apa jang telah ditjapai, tali dengan harus mengatasi segala kesukaran, oleh I.P.M. XII sampai pertengahan tahun 1954, dengan penuh pengha- engan diseraikkannja urusan penjelenggaraannja berikut T.P.R. C.B.I., pada tanggal 1-7-1954 kepada otonoom Kotapradja a-Raya, segala tugas Pendidikan Masjarakat mudah-mudahan atkan hasil jang diharapkan, mendjelang 5 tahun jang ke II, wadjah berseri-seri akan sampai hendaknja dipantai tudjuan Rentjana Sepuluh tahun Pendidikan Masjarakat”.

PERISTIWA BERGAMBAR

DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT

KEMENTERIAN P.P. DAN K.



Rapat Panitia Antar Kementerian untuk Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat adalah bertujuan untuk mencari dasar kerdjasama dalam menjelenggarakan setiap usaha pemerintah di Pusat dan sampai kedaerah. Ini adalah rapat ketiga yang dilangsungkan di Tjikini 75, pada 8 Nopember 1952.



Dalam perdjalan pulang dari Denmark sdr. A.H. Nasution berkesempatan djuga melihat perkembangan pendidikan di „Social Welfare Centre” di Mesir.



esco mengenai soal² kepemudaan jang dilangsungkan di
1953 dihadiri oleh Sdr. Sujono Atmo, Kepala Bahagian
Pemuda Djawatan Pendidikan Masjarakat.



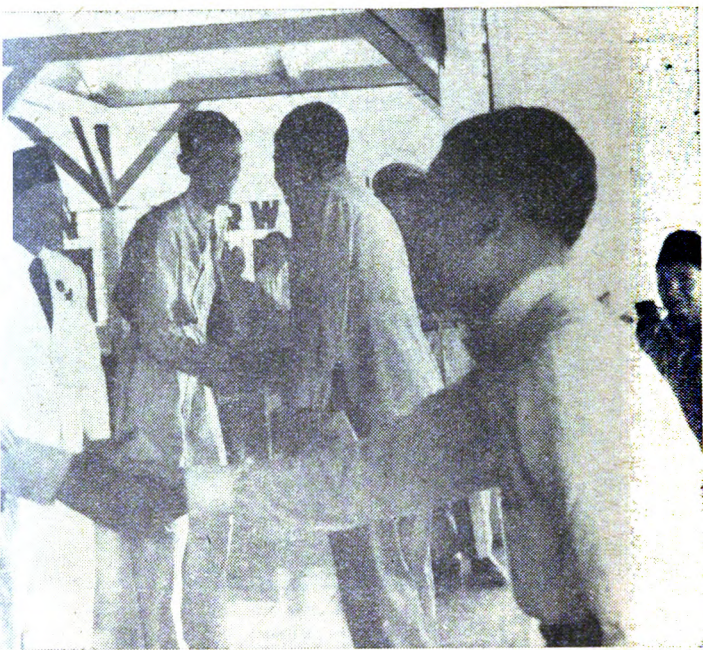
Bangsa Indonesia jang berdiam di Kaledonia Baru mengikuti pula kegiatan Pemberantasan Buta Huruf di Tanah Air. Oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat dikirimi bantuan berupa buku² pelajaran madjalah Duta Muda.



Pada tanggal 7 sampai tgl. 13 Oktober 1953 oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat diselenggarakan suatu „konperensi berkeliling” jang pembukaannja dilangsungkun diibukota Djawa Tengah, Semarang dan berachir di Salatiga.



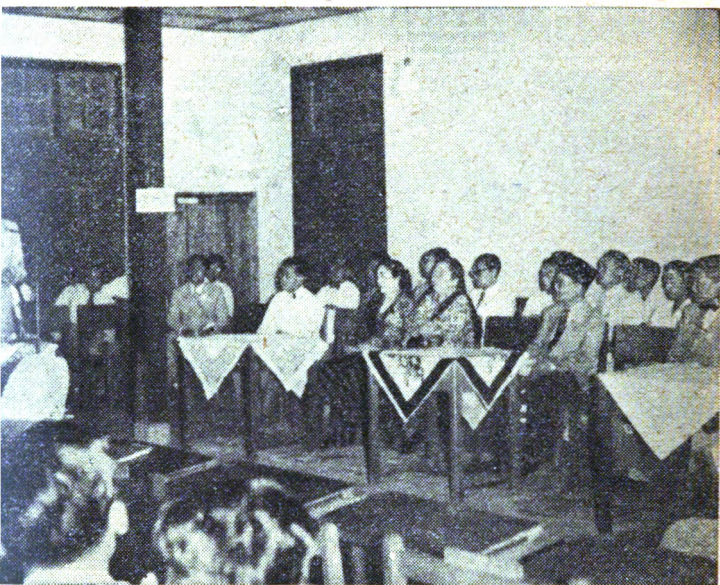
**Hadir dalam resepsi pembukaan „konperensi berkeliling” a
Gubernur Kepala Daerah R. Boediono, Komandan T.T.
Diponegoro Overste Bachroem, Kepala Polisi R.I. Propin
Tengah, Ketua Seksi E Parlemen Sementara Z.A. Achmad, M.
Perwakilan Unesco di Indonesia, Ketua dan para anggota D.
para undangan lainnja.**



marinja „konperensi berkeliling” dilandjutkan ke Purworedjo.
Kabupaten antara lain menjambut Bupati Kepala Daerah
Purworedjo.



**Untuk menambah meriahnja konperensi, diadakan pula p
radjinan tangan wanita. Ketua Seksi E Parlemen Kepala
sedang mentjari-tjari apa jang baik dibawa untuk „oleh-o**



**9 Oktober 1953 Mr. Masud dari perwakilan Unesco untuk
Indonesia mengundjungi K.P.U./C. Solo.**



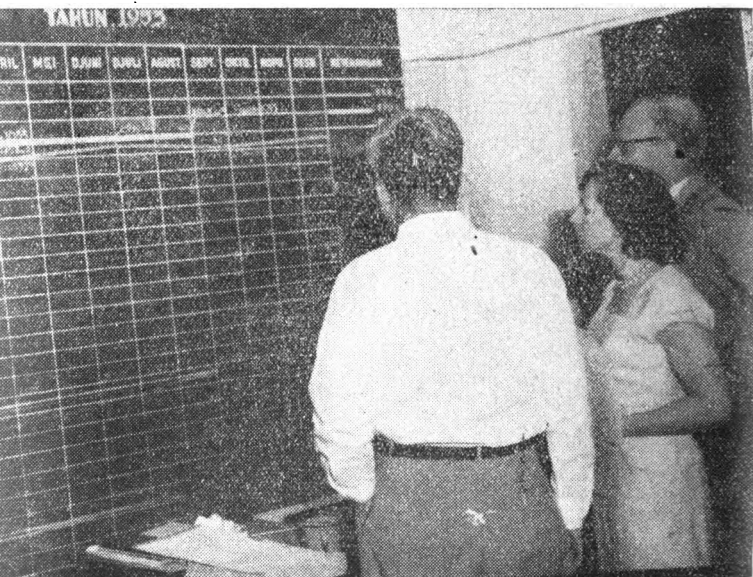
Disepandjang djalan, antara Semarang dan Purworedjo, Wates, Jogjakarta, Surakarta dan Salatiga terlihat spandoecken jang menjambut konperensi Pendidikan Masyarakat.



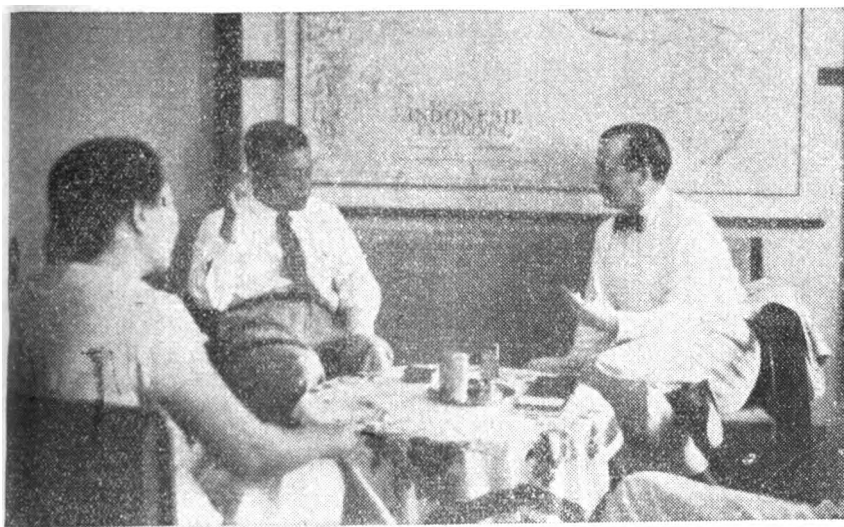
Untuk mempersiapkan pelaksanaan penjerahan penjelenggaraan usaha Pendidikan Masyarakat pada daerah otonom, pada tgl. 11 Nop. '53 diadakan pertemuan Kem. P.P. dan K. dengan wakil² D.P.D./ Gubernur Daerah



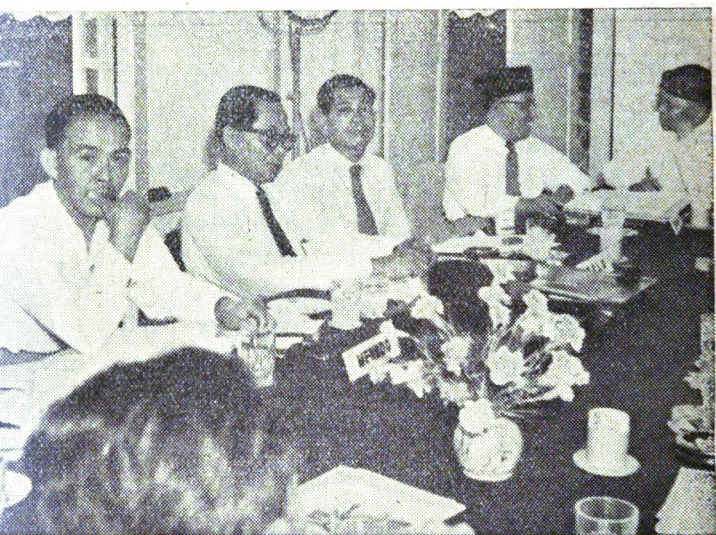
Mr. H.E. Mande dan Mrs. Phelan dari South Pacific Commission, Social Development Section (Australia) pada bulan Nopember 1953 berkundjung ke Djawatan Pendidikan Masjarakat untuk meminta keterangan² sekitar pendidikan masjarakat di Indonesia.



**ri Australia (Mr. H.E. MAUDE dan Mrs. PHELAN) dite-
pak SADARJOEN melihat-lihat grafiek usaha Djawatan**



**W.H. Welling, wakil Unesco Seksi U pada bulan Djanuari 1954
diterima Kepala Djawatan untuk menerima keterangan² mengenai
usaha Djawatan Pendidikan Masyarakat terutama dilapangan
kepemudaan.**



**n Dewan Guru KPU/C pada bulan Maret 1954 di Djakarta
ndiri oleh wakil² dari Jogjakarta, Surakarta, Semarang, dan
Makasar.**



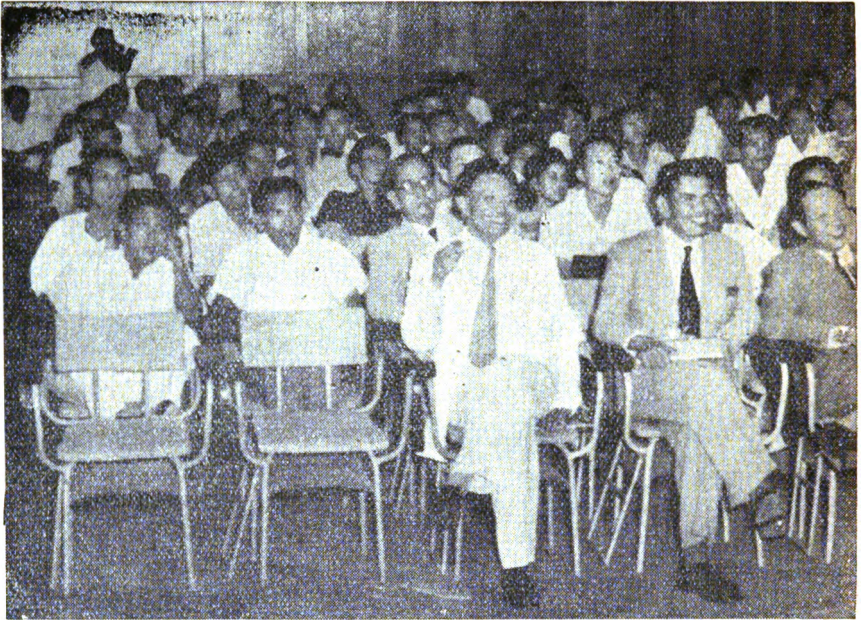
**Dengan dihadiri oleh wakil² Kementerian dan para ahli Perpu
pada tgl. 25 Maret 1954 telah dilangsungkan suatu Kongres
takaan jang diorganisasi oleh Kem. P.P. dan K.**



Sdr. Ali Rachman mendapat kesempatan me ngunjungi sekolah malam pemuda/pemudi pekerdjia jang diusahakan oleh Kotapradja Aarhus (Swedia) selama perkunjungannya kere-



Untuk mengikuti „latihan keachlian” tentang pendidikan dasar di Mysore pada tgl. 14 Sept. 1954 berangkatlah sdr. Karim Halim untuk waktu 9 bulan.

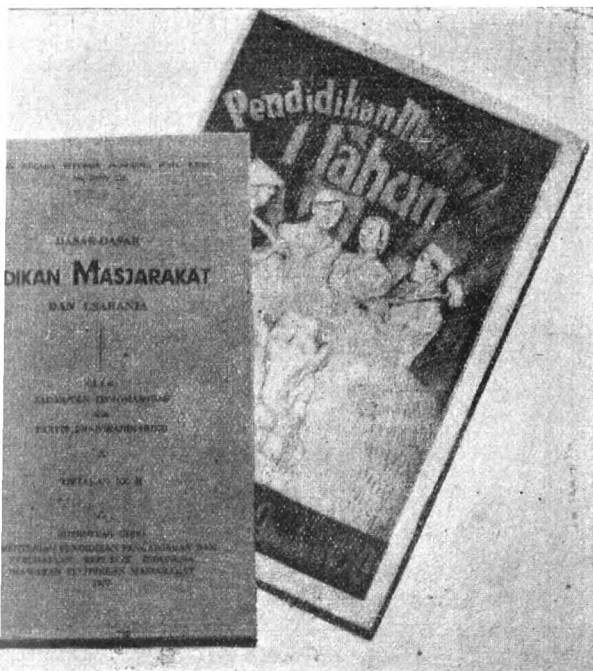


Pada tgl. 7 April 1954 telah dimulai „perkenalan pertama” antara Djaw. Pendidikan Masjarakat dengan Universitas Indonesia dengan suatu tjeramah mengenai Pendidikan dan Pembangunan Masjarakat jang disampaikan oleh pak Sadarjoen Siswomartojo, Kepala Djawatan. Hadir djuga Menteri dan Sekdjen P.P. dan K.

PENERBITAN-PENERBITAN JANG MERUMUSI

MENDJELASKAN USAHA PENDIDIKAN MA

DI INDONESIA.



ar-dasar **PENDIDIKAN-MASJARAKAT**” ada-
 rosur pertama jang diterbitkan pada th. 1950
 ai pegangan bagi petugas² Pendidikan Masja-
 dari Pusat sampai kedaerah, dalam menunai-
 kewadajibannya sehari-hari. Tjetakan pertama
 diterbitkan di Jogjakarta disusun oleh pelopor²
 dikan Masjarakat bapak²: S. Brodjonegoro
 artib Prawirodihardjo. Tjetakan kedua dan ke-
 lterbitkan di Djakarta dengan beberapa peror-
 a dan penjempurnaan oleh bapak²: Sadarjoen
 martoyo dan Tartib Prawirodihardjo.
 bitan jang disampingnja adalah seketika mem-
 eringati setahun usia Djawatan Pendidikan
 Masjarakat.

Pemuda

PENDIDIKAN MASJARAKAT

Kursus Pengetahuan Umum (K. P. U.)

PENDIDIKAN MASJARAKAT

RAKJAT INDONESIA

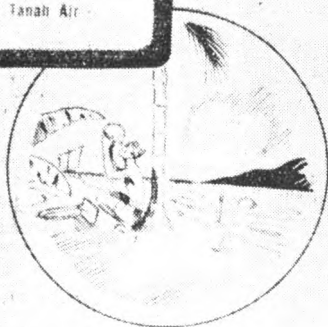
DAPAT MEMBATJA - MENULIS

SEMUA (P.B.M.)

PENDIDIKAN MASJARAKAT

Djawatan dan Kewadjibannja

Bertanggung djawab tentang
kesedjahteraan masjarakat
dan Tanah Air

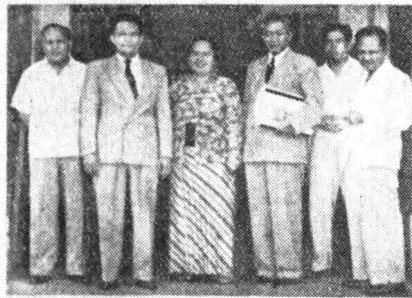


1

Guna me
gi pokok
jang did
watan P
sjarakat,
1951 di
satu ser
berdjuml
dan ditje
bahasa :



Untuk mengikuti perkembangan usaha Pendidikan Masyarakat di Indonesia, berturut-turut diterbitkan lagi pada tahun 1952 dan 1953 brosur dalam bahasa Indonesia dan Inggris, seperti: Djawatan Pendidikan Masyarakat dan Mass Education Dept.



Suara Pendidikan Masyarakat

Tahun III

Desember

1951

Pada bulan Maret tahun 1952 diterbitkan majalah bulanan „SUARA PENDIDIKAN MASJARAKAT” sebagai alat penghubung antara Pusat dan Daerah, antara Daerah dan Daerah alat pembimbing yang ditunjukkan pada Panitia² Pendidikan Masyarakat Ketjamatan (pada sa’at ini tertjatat l.k. 2500 Panitia P.M. Ketj.) dan Petugas² teknis Pendidikan Masjarakat dan achirnja sebagai alat-penerangan bagi umum tentang usaha² yang didjalankan Djawatan ini.

Pemuda



Madjalah „PEMUDA” adalah kelanjutan dari penerbitan madjalah „DJENTERA” (jang belakangan diterbitkan di Jogjakarta pada th. 1950) jang diterbitkan pada th. 1951 oleh Bahagian Pemuda Djawatan Pendidikan Masjarakat dan djuga merupakan alat-penghubung antara Djawatan dengan Organisasi/Gerakan Pemuda jang tersebar diseluruh Tanah Air dan penampung hasil tjipta para pemuda baik setjara perseorangan atau bersama.



„Konperensi berkeliling th. 1953” merupakan suatu tjara baik jang dipergunakan oleh Djawatan ini dalam menambah dan mentjari pengalaman² baru di lapangan usahanja. Bahan² tertulis untuk menghadapi konperensi ini disusun dan diterbitkan dalam bentuk brosur Menudju Pendidikan dan Pembangunan Masjarakat. Dan sebagai pentjatat pengalaman² dan kesimpulan jang diambil selama konperensi, diterbitkan brosur Laporan Konperensi Berkeliling.

ANTI ILLITERACY CAMPAIGN

IN

INDONESIA

1953

ANNUAL
REPORT

of the

MASS EDUCATION
DEPARTMENT

*

MINISTRY OF EDUCATION, INSTRUCTION & CULTURE
REPUBLIC OF INDONESIA

Dua buah brosur dalam bahasa Inggris yang diterbitkan Outline and Progress of Anti Illiteracy in Indonesia dan Annual Report 1953 adalah ditudjukan sebagai memberi bahan pada konperensi Unesco th. 1954 di Montevedio, chususnja dan kepada seluruh bangsa² didunia ini yang mempunjai perhatian terhadap usaha Pendidikan Masyarakat di Indonesia.

PERATURAN-PERATURAN JANG MENDASARI

MENGATUR USAHA DJAWATAN PENDIDIKAN

MASJARAKAT KEMENTERIAN P.P. dan K.

PUTUSAN : Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Jogjakarta, 24 Nopember 1949.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

Menimbang :

hendak mengatur tjara² dan sjarat² untuk mendapat sokongan uang (subsidi) dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, untuk kursus-kursus Pemberantasan Buta-Huruf dan Landjutannja jang diselenggarakan sebagai termaksud dalam fatsal 1 Peraturan Penjelenggaraan dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24-11-1949 No. 428/A.

Mengingat :

Putusan² Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tgl. 7 September 1949 No. 121/A tanggal 3 September 1949 No. 120/A.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan peraturan tentang pemberian subsidi kepada kursus² Pemberantasan Buta Huruf dan Landjutannja jang diselenggarakan oleh desa atau pihak lain sbb. :

„Peraturan tentang pemberian subsidi kepada kursus² Pemberantasan Buta-Huruf dan Landjutannja”.

Fatsal I.

Kepada suatu kursus PBH dan kursus Landjutan jang diselenggarakan oleh desa atau pihak lain dapat diberikan sokongan uang (subsidi) atas permintaan tertulis, diadjukan oleh Panitia Pendidikan Masjarakat di Ketjamatan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan (Djawatan Pendidikan Masjarakat).

Fatsal II.

Subsidi diberikan sebagai sokongan dalam beaja penjelenggaraan suatu kursus PBH atau Landjutan dan beaja penjelenggaraan udjian kursus PBH sbb. :

- a. Subsidi tiap² kursus PBH dan Landjutan seperti jang tersebut dalam Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tgl. 3 September 1949 No./120/A fatsal XI dan Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tgl. 24-11-1949 no. 428/A fatsal I besarnja : f. 35,— (tigapuluh lima rupiah) jaitu : f. 25,— untuk tundjangan guru f. 7,50 untuk pembelian alat² beladjar dan f. 2,50 untuk tata-usaha sebulannja.
- b. Guna biaja penjelenggaraan udjian penghabisan kursus PBH seluruh Ketjamatan, Panitia menerima uang tundjangan f. 25,—

Fatsal III.

Untuk mendapat subsidi maka suatu kursus PBH dan Landjutanja harus memenuhi sjarat² seperti berikut :

1. Kursus diselenggarakan seperti disebut dalam fatsal I dari peraturan ini.
2. Tentang adanja kursus telah diberitahukan kepada Djawatan Pendidikan Masjarakat, Kabupaten jang bersangkutan menurut fatsal VII dari Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan, Kebudajaan tgl. 3 September 1949, no. 120/A.
3. Guru² pada kursus PBH atau Landjutan memenuhi sjarat² jang ditetapkan dalam fatsal V dari Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tgl. 24-11-1949 no. 428/A.
- 4a. Djumlah penuntut kursus se-kurang²nja 40 orang.
- 4b. Umur penuntut kursus paling rendah 13 tahun.
- 4c. Djumlah jang masuk setiap hari kursus se-kurang²nja 25 orang.

Fatsal IV.

Subsidi ditjabut apabila ternjata kursus² itu tidak dapat memenuhi sjarat² tersebut dalam fatsal III dari Panitia ini atau sebab jang lain jang disjahkan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Fatsal V. -

Tiap² Ketjamatan hanja mempunjai hak se-banyak²nja 4 buah kursus subsidi, jaitu 3 buah kursus PBH dan 1 buah kursus Landjutan PBH.

Fatsal VI.

Surat permintaan subsidi termasuk dalam fatsal III dari peraturan ini harus disertai daftar pertanggung-djawab uang subsidi yang sudah lampau.

Fatsal VII.

Subsidi menurut peraturan ini diberikan tiap² kali untuk waktu paling lama 3 bulan.

Fatsal VIII.

Pengeluaran yang disebabkan karena peraturan ini diberatkan atas mata anggaran 6.3.3.1.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1949.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
A.n. Menteri
Sekretaris Jenderal.
ttd.
(Mr. HADI).

Salinan peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara.
2. Sekretariat Perdana Menteri.
3. Semua Kementerian.
4. Badan Pekeraja K.N.I. Pusat.
5. Semua Residen.
6. Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.
7. Kantor Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan di Jogjakarta.
8. Semua Kepala kantor Pendidikan Karesidenan.
9. Djawatan Sosial bag. Pendidikan D.I. Jogjakarta.
10. Semua Inspektur (Pusat dan Daerah).
11. Semua Bagian Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
12. Pengurus Besar P.G.R.I.
13. Kantor Berita „Antara”.
14. Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan.
16. Kementerian Keuangan Bagian Anggaran Negara.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBU

Hendak mengatur pendirian dan penjelenggaraan cursu
tahuan umum (CPU) termaksud dalam putusan Kement
didikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 15 Septer
No. 128/A.

Menimbang :

bahwa putusan Menteri P.P. dan K. No. 3287/C tan
1948 tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang.

Mengingat :

Peraturan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Ke
No. 56/C tanggal 8-9-1949.

M E M U T U S K A N :

1. Mentjabut putusan Menteri Pendidikan Pengadjaran d
dajaan tanggal 19-4-1948 No. 3287/C.
2. Menetapkan peraturan sebagai berikut :

**PERATURAN TENTANG PENJELENGGARAAN CU
PENGETAHUAN UMUM MATJAM : A, B, dan**

Fatsal I.

Pertama :

1. Cursus² Pengetahuan Umum (CPU) matjam A, B, d
maksud dalam fatsal 1, 2 dan 3 dari putusan Mente
dikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 15 S
1949 No. 128/A., didirikan dan diselenggarakan :

oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Kabupaten dan C oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat.

2. Suatu CPU matjam A dan B didirikan dan diselenggarakan terus, djika djumlah murid jang mendaftarkan diri untuk sungguh² mengikuti peladjaran pada CPU tersebut tjukup besar banjarknja dan djumlah itu selama CPU berdjalan tidak kurang daripada 20 orang murid.
3. Suatu CPU matjam C didirikan dan diselenggarakan terus, djika
 - a. Peladjaran dapat dilangsungkan dengan memberi colleges tentang paling sedikit 2 (dua) ilmu pengetahuan termaksud dalam fatsal 3 dari Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 15 September 1949 No. 128/A.
 - b. Djumlj^h murid jang telah mendaftarkan diri untuk sungguh² mengikuti colleges tentang suatu ilmu pengetahuan jang akan dipeladjarkan pada CPU matjam C itu tjukup besarnja dan djumlah ini selama CPU berdjalan tidak kurang dari 10 orang murid.
4. Dalam suatu CPU matjam A dan B atau untuk suatu pengetahuan dari CPU matjam C dapat diadakan suatu kelas paralel, djika djumlah murid pada CPU matjam A dan B atau djumlah murid jang mengikuti peladjaran suatu ilmu pengetahuan CPU matjam C itu lebih dari 40 orang.

Fatsal II.

1. Suatu CPU matjam A, B atau C dimulai pada tanggal 1 Djanuari dan diselesaikan pada achir bulan Desember tiap² tahun.
2. Tiap² mata peladjaran pada suatu CPU diberikan dua kali dalam seminggu dari 45 menit untuk tiap² djam peladjaran.

Fatsal III.

1. Guru² untuk suatu CPU matjam A, B dan C dalam fatsal 1, 2 dan 3 dari Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 15 September 1949 No. 128/A. diangkat dan diperhentikan berturut-turut oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Kabupaten dan Pusat.

2. Seorang guru untuk suatu CPU diangkat sampai akhir kursus itu (sesudah selesai ujian termaksud pada fatsal 6 Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 15 September 1949 no. 128/A). Djika ia hendak mengundurkan diri sebelum kursus, maka ia harus menjatakan hal itu kepada Djawatan Pendidikan Masyarakat yang bersangkutan melalui Pemimpin Kursus satu bulan sebelum berhenti.
3. Untuk tiap² CPU diangkat seorang Pemimpin yang dapat memimpin pelajaran pada dan menjelenggarakan suatu CPU oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat bagi CPU matjam C, oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Kabupaten bagi CPU. Matjam A dan B.

Fatsal IV.

1. Kepada seorang guru yang memberi pelajaran pada suatu CPU matjam A, B atau C diberikan honorarium berturut-turut tingkat ke IV, III dan II dari daftar pemberian honorarium yang tersebut dalam *Peraturan* Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tgl. 8-9-1949, No. 56/C.
2. Untuk pimpinan pelajaran dan penjelenggaraan pada suatu CPU diberikan tundjangan pimpinan sebesar satu bulan honorarium untuk 2 (dua) jam pelajaran dalam seminggu menurut tingkat yang sesuai dengan matjam CPU termaksud dalam patsal ini ayat 1.

Fatsal V.

Pada suatu CPU dapat ditempatkan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat yang bersangkutan seorang Djurutulis dan seorang pekerdja sebagai pelajan (pesuruh) dan kepada mereka diberikan tundjangan : F. 20,— kepada djurutulis F. 15,— kepada pekerdja, beaja mana diberatkan pada fatsal IX peraturan ini.

Fatsal VI.

1. Pengangkatan seorang guru, pemimpin atau djurutulis dan pekerdja pada suatu CPU dan pemberian honorarium (tundjangan) kepadanya berachir dengan sendirinja ;
 - a. pada akhir cursus yang bersangkutan.
 - b. djika cursus ditutup, karena dihapuskan (kekurangan murid, guru dan sebagainya).

2. Honorarium (tundjangan) kepada guru, pemimpin atau djurutulis dan pekerdja suatu CPU dibayar terus pada waktu :

- a. cursus karena hal lain ditutup untuk sementara.
- b. guru, pemimpin, djurutulis dan pekerdja yang bersangkutan tidak melakukan pekerdjaannya karena urusan sendiri atau karena sakit satu bulan berturut-turut (di-kuatkan oleh certifiakaat dokter); sesudah waktu satu bulan ini, honorarium (tundjangan) tidak diberikan lagi.

Fatsal VII.

Pembebasan uang cursus.

Seorang murid CPU (A, B atau C) djika ternjata ia (orang tua/wakilnja) tidak mampu, dapat dibebaskan dari pembayaran seluruh atau sebagian dari uang cursus yang telah ditetapkan pembebasan ini diberikan oleh Djawatan yang bersangkutan atas usul dari pemimpin cursus.

Fatsal VIII.

Pengawasan atas CPU A dan B termaksud dalam fatsal 3 Putusan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 15 September no. 128/A dilakukan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Propinsi dan untuk CPU matjam C oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat.

Fatsal IX.

Untuk alat² peladjaran (termasuk lectuur) dan tata-usaha dari tiap² matjam CPU diberikan tundjangan F. 150,— sebulan.

Fatsal X.

Semua pengeluaran yang diperlukan untuk membiajai pendirian dan penjelenggaraan CPU matjam A, B dan C, diberatkan atas mata anggaran 6.3.4.1. (belandja pegawai) dan 6.3.4.2. (belandja barang) dari anggaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Salinan surat putusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretariat Negara.*
- 2. Sekretariat Perdana Menteri.*
- 3. Semua Kementerian.*
- 4. Ketua Badan Pekeraja K.N.I.P.*
- 5. Semua Residen.*
- 6. Semua Kepala Kantor Pendidikan. Karesidenan.*
- 7. Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.*
- 8. Kantor Pendidikan Pengadjaran di Jogjakarta.*
- 9. Djawatan Sosial Bag. Pend. Daerah Istimewa Jogjakarta.*
- 10. Semua Inspektur (Pusat dan Daerah).*
- 11. Semua Bag. Kementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan.*
- 12. Pengurus Besar P.G.R.I.*
- 13. Kantor Berita „Antara“.*
- 14. Badan Pemeriksa Keuangan.*
- 15. Kantor Pusat Perbendaharaan.*
- 16. Kementerian Keuangan Bag. Anggaran Negara.*

**PUTUSAN : Menteri Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudayaan.**

Jogjakarta, 24 Nopember 1949.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

Menimbang :

Bahwa untuk kepentingan usaha Pemberantasan Buta Huruf dan usaha mempertinggi deradjat pengetahuan dan pendidikan masjarakat umumnja, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan pendidikan kearah berusaha sendiri (auto-aktiviteit) dan pertjaja atas kekuatan sendiri.

Mengingat :

Putusan² Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 3-9-1949 No. 120/A. dan tanggal 15-9-1949 No. 128/A.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan „Peraturan Pembentukan Panitia² Pemberantasan Buta Huruf dan Cursus Pengetahuan Umum.

Fatsal I.

- a. Ditiap² kota Ketjamatan (Kapanewon) didirikan suatu Panitia Pendidikan Masjarakat sebagai Panitia Pemberantasan Buta Huruf dan Cursus Pengetahuan Umum matjam A sebagai tersebut dalam Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 3 September 1949 No. 120/A Fatsal X.
- b. Ditiap² Kota dimana ada CPU matjam B didirikan suatu Panitia CPU matjam B.
- c. Ditiap² Kota dimana ada CPU matjam C didirikan suatu Panitia CPU matjam C.

Fatsal II.

- a. Panitia² sebagai termaksud dalam fatsal 1 ayat a, b dan c dimaksudkan sebagai pemusatan tenaga masjarakat ahli jang menerima suatu kewadajiban dari Djawatan agar dapat mendjadi tenaga jang dinamis bergerak menurut kemungkinan dan kesanggupan masjarakat.

- b. Tiap² Pegawai Pendidikan Masyarakat yang bersangkutan menjadi anggota dalam Panitia tersebut (ambtshalve).
- c. Panitia² sebagai Pembantu tidak mengurangi kewajiban dan tanggung-jawab Pendidikan Masyarakat.

Fatsal III.

Panitia Pendidikan Masyarakat di Ketjamatan (Kapanewon) dan Panitia CPU matjam B, ditetapkan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Kabupaten, sedang Panitia CPU matjam C, ditetapkan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat.

Fatsal IV.

- a. Untuk keperluan biaya administrasi dan lain² kepada Panitia Pendidikan Masyarakat di Ketjamatan (Kapanewon) diberikan tundjangan uang sebesar f. 25,— pengeluaran mana diberatkan atas anggaran 6.3.3.1.
- b. Kepada Panitia CPU matjam B, dan Panitia CPU matjam C diberikan tundjangan uang masing² sebesar f. 25,— dan f. 50 sebulannja, pengeluaran mana diberatkan atas mata anggaran 6.3.4.3.

Fatsal V.

Panitia² leluasa untuk menambah keuangannja dengan djalan yang sjah guna menjempurnakan usahanja.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1949.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudajaan.

a.n. Menteri

Secretaris Djenderal

ttd,

Mr. HADI.

Salinan surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretariat Negara.
2. Sekretariat Perdana Menteri.
3. Semua Kementerian.
4. Badan Pekerdja K.N.I.P.
5. Semua Residen.
6. Semua Kepala Kantor Pendidikan Karésidenan.
7. Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.
8. Djawatan Sosial Bag. Pendidikan Daerah Istimewa Jogjakarta.
9. Semua Inspektur (Pusat dan Daerah).
10. Semua Bag. Kem. Pendidikan, Pengajaran dan Kebudajaan.
11. Pengurus Besar P.G.R.I.
12. Kantor Berita „Antara”.
13. Badan Pemerintah Keuangan Negara.
14. Kantor Pusat Perbendaharaan.

PUTUSAN : Menteri Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudajaan.

Jogjakarta, 24 Nop. 1949.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

Menimbang :

Bahwa garis besar yang ditentukan dalam putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan yang mengenai isi dan organisasi usaha² Pendidikan Masyarakat umumnja dan Pemberantasan Buta Huruf (P.B.H.) khususnja, sebagai tersebut dalam putusan tanggal 3-9-1949 No. 120/A, perlu ditegaskan lebih djelas.

Mengingat :

Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 7-9-1949 No. 121/A.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan peraturan sebagai berikut ;

**„PERATURAN PENJELENGGARAAN PEMBERANTASAN
BUTA HURUF (P.B.H.) DAN KURSUS LANDJUTAN P.B.H.”**

Fatsal I.

- a. Sebagai tersebut dalam fatsal XI Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 3-9-1949 No. 120/A, maka Kursus P.B.H. yang didirikan dalam tiap² Ketjamatan (Kana-newon) paling banjak 3 buah Kursus dan sebuah kursus landjutan P.B.H. sebagai pendorong usaha desa.
- b. Desa diandjurkan mendirikan kursus P.B.H. sebanjak-banjaknja atas tanggungan sendiri.

Fatsal II.

- a. Kursus P.B.H. dan kursus Landjutan P.B.H. tersebut fatsal I masing² 3 bulan harus sudah selesai.
- b. Tiap² selesai 3 bulan diadakan udjian yang peraturannja akan diadakan sendiri. Habis udjian dimulai kursus baru lagi.
- c. Murid yang lulus udjiannja diberi surat idjazah.

Peladjaran pada kursus landjutan P.B.H., ketjuali mer-
nakan peladjaran membatja dan menulis huruf Latin, di-
ngadjarkan pengetahuan² sebagai dasar permulaan pel-
praktis guna menjempurnakan kehidupan masjarakat d

Fatsal IV.

Kitab pegangan guru untuk mengadjar P.B.H. ialah bua-
tara „Sinau Matja” atau buku jang lain jang sudah di-
oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan

Kitab untuk mengadjar kursus P.B.H. ialah :

1. Madjallah „Pustaka Marta”.
2. Kitab² batjaan Sek. Rakjat jang selaras dengan kea-
3. Kitab lain² jang dipandang perlu oleh guru dan Po-
Pendidikan Masjarakat Kabupaten.

Fatsal V.

Jang berhak mengadjar di Kursus P.B.H.

1. Guru Sek. Rakjat sebagai pekerdjaan sampiran atau
jang beridjazah sekolah guru.
2. Orang² jang tammat sek. rakjat jang telah mendapa-
guru P.B.H.
3. Orang² jang dianggap tjakap mengadjar oleh po-
P.B.H.

Jang berhak mengadjar di Kursus landjutan P.B.H. :

1. Guru sek. rakjat sebagai pekerdjaan sampiran atau
jang beridjazah sek. guru.
2. Orang² jang dianggap tjakap mengadjar oleh po-
P.B.H. Kabupaten.

Fatsal VI.

Tempat mengadjar sedapat mungkin di Sek. Rakjat.

1. Ditempat lain jang dianggap mentjukupi kepentingan.

Fatsal VII.

Mengingat putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 3-9-1949 No. 120/A, fatsal VI, maka :

- a. Panitia Pendidikan Masjraakat seperti tersebut fatsal X tentang hak dan kewadajibannja telah terselenggara dalam putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24-11-1949 No. 427/A. ;
- b. Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten sebagai tersebut dalam Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24-11-1949 No. 427/A, fatsal II sub. b dan c. hendaklah dapat menempatkan dirinja sebagai anggauta Panitia dan sebagai pegawai Djawatan Pendidikan Masjarakat jang bertanggung-djawab.

Fatsal VIII.

Kewadajiban Panitia Pendidikan Masjarakat :

1. melaksanakan peraturan² kursus P.B.H. dan kursus Landjutan P.B.H. didalam daerahnja atas petundjuk dari Djawatan Pendidikan Masjarakat Kabupaten.
2. turut memelihara agar kursus² itu dapat berdjalan dengan baik.
3. Panitia diperkenankan mengusulkan memilih kursus mana jang mendapat subsidi, seperti tersebut dalam fatsal XII Putusan Menteri P.P.&K. tanggal 3 September 1949 No. 120/A.
4. Panitia diperkenankan mengusulkan memindahkan hak subsidi dari sesuatu kursus ke kursus lain.
5. Dalam waktu udjian kursus P.B.H. Panitia dengan pimpinan Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten turut menjenggarakannja.

Fatsal IX.

Biaja Panitia untuk menjelenggarakan fatsal I peraturan ini, sebagai jang telah ditetapkan dalam peraturan Subsidi tanggal 24-11-1949 No. 425/A, diterimakan oleh Pemimpin Pendidikan Masjarakat Kabupaten, melalui Panitia.

Fatsal X.

Segala hal mengenai kursus P.B.H. dan kursus landjutan P.B.H. jang tidak atau belum termasuk dalam peraturan ini, diputuskan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat Pusat.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1949.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

a.n. Menteri,
Sekretaris Djenderal,
ttd.

Mr. HADI.

8. *Djawatan Sosial Bag. Pendidikan Daerah Istimewa Jogjakarta.*
9. *Semua Kantor Pendidikan Karesidenan.*
10. *Semua Inspektur Pusat dan Daerah.*
11. *Semua Bag. Kem. P.P.& K.*
12. *Pengurus Besar P.G.R.I.*
13. *Kantor Berita „Antara”.*
14. *Kantor Pusat Perbendaharaan.*
15. *Badan Pemeriksa Keuangan Negara.*
16. *Kementerian Keuangan Bag. Anggaran Negara.*

KUTIPAN : dari pada Daftar Putusan² Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

Jogjakarta, 12 Djanuari 1950

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN.

Menimbang : bahwa perlu menetapkan tjara² dan sjarat² untuk mendapat sokongan uang (subsidi) dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan bagi kursus² pengetahuan umum, jang diselenggarakan oleh Partikulir, sebagaimana termaksud dalam fatsal 7 Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tgl. 15 September 1949 No. 128/A, sesudah diubah dgn. putusan Menteri tersebut tgl. 12 Djanuari 1950 No. 210/A.

M E M U T U S K A N :

Pertama : mentjabut putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 27 April 1948 No. 3556/C.

Kedua : menetapkan peraturan sebagai berikut :
PERATURAN TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI GUNA CURSUS PENGETAHUAN UMUM (Disingkat CPU) jang diselenggarakan oleh partikulir.

Fatsal I.

1. Kepada penjelenggara C.P.U. dapat diberikan sokongan uang (subsidi) atas *permintaan tertulis* jang dimajukan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
2. Djika penjelenggara jang dimaksud dalam ajat 1 fatsal ini suatu badan hukum, maka subsidi dapat langsung diberikan kepada badan hukum itu.
3. Apabila penjelenggara bukan badan hukum, maka permintaan termaksud dalam ajat 1 fatsal ini harus dimajukan oleh seorang dari pengurus tersebut, jang sanggup bertanggung djawab sepenuhnya atas cursus itu dan subsidi diberikan atas nama orang itu.

Fatsal III.

Untuk mendapat subsidi maka suatu CPU, harus m
sjarat² sbb. :

- a) Cursus diselenggarakan menurut fatsal I peraturan ini c
berdjalan sedikit-dikitnja 2 bulan.
- b) Guru, murid dan peladjaran se-kurang²nja memenuhi
jang ditetapkan dalam fatsal 1 sampai dengan fatsal 5
tusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
15 September 1949 No. 128/A, ketjuali jang mengenai p
pembayaran uang cursus.
- c) Djumlah penuntut cursus itu se-kurang²nja 25 (duap
orang.

Fatsal IV.

Tiap² CPU Partikulier jang menerima subsidi menurut
ini diwadjibkan :

- a) Memberi kesempatan dan pertolongan seperlunja kep
pegawai negeri jang mempunjai tugas dalam hal in
- b) Setiap bulan memberi pelaporan tertulis jang dis
kepada Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat k
jang mengenai guru, murid, dan peladjaran, apabila c
termasuk matjam A dan B, sedang CPU matjam C m
kan pelaporan tersebut kepada Kepala Djawatan P
Masjarakat Pusat (Propinsi).

Fatsal V.

1. Subsidi menurut peraturan ini diberikan tiap² kali unt
lamanja peladjaran C.P.U.
2. Subsidi tidak diberikan lagi, djika :
 - a) Cursus partikulier jang bersangkutan menjalahi
ini ;

- b) Ternyata bahwa djumlah penuntut cursus jang rata² masuk dalam satu bulan kurang dari 70%.

Fatsal VI.

Pengeluaran² jang disebabkan karena peraturan ini diberatkan atas mata anggaran 6.3.4.3.

Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1949.

Salinan dari surat putusan ini disampaikan kepada :

1. *Sekretariat Negara;*
2. *Sekretariat Perdana Menteri;*
3. *Semua Kementerian;*
4. *Badan Pekerdja K.N.I. Pusat (Bagian Masjarakat di Jogjakarta).*
5. *Kantor Pembersan Keuangan Negara di Jogjakarta.*
6. *Semua Gubernur.*
7. *Semua Residen.*
8. *Semua Kepala Djawatan Pengadjaran Karesidenan.*
9. *Pengurus Besar P.G.R.I. di Surakarta.*
10. *A n t a r a.*

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

a.n. Menteri

Sekretaris Djenderal

ttd.

Mr. HADI.

Jogjakarta, 14 Ag

**MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN
KEBUDAJAAN R.I. ;**

Telah membatja : rentjana peraturan tentang Perpustakaan, yang diusulkan oleh Kepala Djawatan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan

Menimbang : bahwa ;

1. untuk meninggikan pengetahuan umum dan memajukan budi pekerti dan ketjerdasan Warga Indonesia perlu diadakan Perpustakaan Rakjat bagi disusun paedagogis-didactis;
2. untuk Perpustakaan Rakjat tsb. perlu diadakan sendiri;

Mengingat : surat Putusan Menteri P.P. dan K. No. tanggal 24 Nopember 1949.

M E M U T U S K A N :

- Pertama* : Membentuk Perpustakaan yang bertingkat-tingkat Rakjat.
- Kedua* : Menetapkan peraturan untuk penjelenggaraan Perpustakaan Rakjat tersebut seperti berikut :

PERATURAN TENTANG PERPUSTAKAAN RAKJAT

Fatsal I.

Arti Taman Pustaka Rakjat.

Jang disebut Taman Pustaka Rakjat dalam Peraturan ini, adalah tempat, dimana disediakan kitab² dan batjaan lain-lain yang dapat dipinjamkan oleh umum dan berada didalam lingkungan Djawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Fatsal II.
Matjam Taman Pustaka.

- a. Taman Pustaka Rakjat berisi batjaan jang terbagi atas :
 1. Batjaan tingkat A : diperuntukan bagi mereka jang berpendidikan S.R. VI atau sederadjat.
 2. Batjaan tingkat B : diperuntukan bagi mereka jang berpendidikan SMP atau sederadjat.
 3. Batjaan tingkat C : diperuntukan bagi mereka jang berpendidikan SMA atau sederadjat.
- b. Bila dipandang perlu oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat diadakan Taman Pustaka Pengantar sebagai tjabang Taman Pustaka Rakjat di Ketjamatan, terutama bagi mereka jang tammat Kursus Landjutan P.B.H. dan untuk mereka jang penge-tahuannja belum tjukup untuk Taman Pustaka tingkat A.

Fatsal III.
Penjelenggaraan T.P.R.

1. a. Diibu Kota Ketjamatan didirikan Taman Pustaka Rakjat jang berisi batjaan tingkat A.
b. Diibu Kota Kabupaten/Kotapradja didirikan Taman Pustaka Rakjat jang berisi batjaan tingkat A dan B.
c. Dikota-kota Besar didirikan Taman Pustaka Rakjat jang berisi batjaan tingkat A.B. dan C.
d. Taman Pustaka Pengantar diadakan di-desa²/kampung², bila dipandang perlu oleh Djawatan Pendidikan Masjakerat.
2. Taman Pustaka Pengantar dan Taman Pustaka Rakjat Ketjamatatan diawasi oleh Kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat Kabupaten/Kotapradja, Taman Pustaka Rakjat Kota dan Kota Besar oleh Kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah Propinsi, semuanya atas nama Djawatan Pendidikan Masjarakat.
3. Untuk penyelenggaraan Taman Pustaka Rakjat dapat diadakan Panitia atau seorang Pengurus (Djuru Taman Pustaka) oleh Kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat jang bersangkutan.
4. Pengawasan atas Taman² Pustaka Rakjat dilakukan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Fatsal IV.
Perlengkapan dan Pemilihan Kitab.

1. Penimbangan ,apakah sebuah kitab atau naskah lajak untuk salah suatu tingkat Taman Pustaka diserahkan pada salah satu Panitia jang dibentuk oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masja-

rakat didalam lingkungan Djawatan tersebut. Dimana perlu ditambah dengan tenaga ahli dari luar.

2. Untuk menambah kitab² jang lajak, oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat dapat diadakan sajembara pengarangan dan usaha-usaha lainnja.
3. Taman Pustaka Rakjat dapat menerima kita-kitab atau batjaan batjaan lainnja dari fihak lain.

Fatsal V.

Beaja Perpustakaan Rakjat.

Guna keperluan Perpustakaan Rakjat Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan menjediakan biaja untuk :

- a. pembelian dan pemeliharaan kitab² batjaan, perkakas kantor dan keperluan lain.
- b. pemeliharaan alat² kantor ;
- c. tundjangan guna keperluan mengadakan sajembara² (termasuk Panityanja) tundjangan pengurus Taman Pustaka dls.

Segala sesuatu tsb. atas dasar usul Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Fatsal VI.

Usaha Masjarakat.

Kepada Masjarakat sendiri diandjurkan mengadakan usaha tudjuan Perpustakaan Rakjat, untuk meluaskan usaha Pemerintah.

Fatsal VII.

Peraturan lebih landjut.

Peraturan lebih landjut tentang Perpustakaan Rakjat diadakan oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudayaan.

A.n. Menteri

Sekretaris Djenderal,

A.n. beliau

Kepala Bagian Umum/A:

ttd; O. SISWOSOEBROTO.

nua Gubernur R.I.

nua Bupati dan Walikota.

nua Kantor Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi dan Kabupaten.

nua Kantor Inspeksi Pengadjaran Propinsi dan Kabupaten.

nua Panitia Pendidikan Masyarakat Ketjamatan.

nenterian P.P.K. R.I.S. Djakarta.

3. P. G. R. I.

nurut surat putusan ini telah ditandatangani oleh Sekretaris Djenderal

nenterian P.P. dan K. Mr. Hadi.

Jogjakarta, 7 Djanuari 1950.

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT.

Mengingat : Putusan Menteri P.P.K. No. 423/A tg. 24 Nop. 1949 dan
No. 424/A tg. 24 Nop. 1949

Jang diantara lain menentukan bahwa :

„Urusan Pemuda pada Djawatan Pendidikan Masjarakat bertugas terutama menghubungkan dan membantu gerak usaha Djawatan Pendidikan Masjarakat dengan Masjarakat, chusus jang mengenai Gerakan Pemuda pada umumnja dengan dasar dan sifat paedagogisch-psychologisch dan sociaal-constructief.”

Menimbang :

Bahwa tugas tersebut perlu diperintji selengkapnja.;

MEMUTUSKAN :

KEWADJIBAN URUSAN PEMUDA

sebagai berikut :

I. Terhadap Pemuda umumnja :

1. Memberikan bimbingan tertulis dengan djalan menerbitkan madjallah, tulisan² dalam surat kabar dan brosur² Pemuda pada umumnja.
2. Mengadakan contact dengan organisasi Pemuda, baik jang bersifat sosial, politik atau ke-olahragaan dan menjampaikan pelaporan kepada Pemerintah, supaja dapat diikuti gerak Pemuda dalam lapangan masing-masing.

II. Terhadap Pemuda jang berorganisasi :

Memberikan bantuan moreel (petundjuk²) dan materieel dalam usaha² mereka, asal usaha² itu dapat dimasukkan dalam batas² kewadjiban Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Mengadjak Pemuda² mendjalankan pekerdjaan membantu para petani dan memberi tjontoh dalam tiap² usaha membangun masjarakat desa.

Mengorganiseer bantuan Pemuda jang akan disumbangkan untuk pekerdjaan Pendidikan Masjarakat.

Kepala

**Djawatan Pendidikan Masjarakat
ttd :**

(S. Brodjonegoro).

san dikirimkan kepada :

ian Urusan Pemuda.

. Menteri Pendidikan.

Mengingat :

1. Isi preamble U.U.D.R.I. jang merupakan ideologie n (tjasila) jang menghendaki terwujudnja suatu masj luargaan berdasarkan kebudajaan Indonesia, sebaga dalam U.U.D.R.I. pasal 33 dan 32.
2. Supaja masjarakat dalam pertumbuhannja dilajan *tuan gerak dan langkah* dari semua alat² Pemerint sama Rakjatnja, jang dewasa ini sangat mengha kesatuan dalam peraturan² Pemerintah.
3. Bahwa kurang adanja kader pembangunan didesa daerah jang sederadjat dengan desa dan kader² ahli bagai tingkatan daerah, amat menjukarkan penerim Pemerintah oleh masjarakat didaerah-daerah terseb
4. Keluarnja U.U. No. 22 tahun 1948 jang sudah tem kan persiapan djiwa masjarakat disemua tingkatan d

Menimbang :

1. Bahwa perlu adanja Kursus Pengetahuan Umum de an mendidik kader untuk desa² atau daerah jang dengan desa dan kader² ahli dalam pelbagai tingka jang memiliki djiwa "*berautonomie*" (*penus berta wab*) atas baikpun tindakan sendiri maupun langkal dengan mempunjai penuh kepertjajaan atas keku (Autoactiviteit).
2. Bahwa kursus ini diselenggarakan dengan ragam *K ha Pemerintah dan masjarakat*.
3. Bahwa keputusan² Menteri P.P. dan K.R.I. tgl. 15. September 1949 128/A ; tgl. 24. Nopember 1949 426/A ; tgl. 12 Januari 1950 No. 210/A ; keadaan sekarang.

M E M U T U S K A N.

1. mentjabut Putusan Menteri P.P. dan K.R.I.
tgl. 15 September 1949 No. 128/A ;
24 Nopember 1949 No. 426/A ; dan
tgl. 12 Januari 1950 No. 210/A;
2. Peraturan Kursus Untuk mempertinggi pengetahuan dan pendidikan Masyarakat.

P a s a l I.

Ditiap-tiap Kota Ketjamatan serta ditempat lain jang sederadjat pentingnja sedapat mungkin didirikan suatu Kursus Pengetahuan Umum (K.P.U.) matjam A, jang memberi peladjaran² seperti dibawah ini :

- a). Sedjarah negara kita.
- b). Susunan pemerintahan negara dan administrasi desa.
- c). Ekonomi desa (pertanian, perikanan, perindustrian).
- d). Ilmu Bumi Ekonomi, Berhitung dan Ilmu Ukur jang praktis.
- e). Ilmu kesehatan (termasuk keolah-ragaan).
- f). Budi-pekerti.

P a s a l II.

Ditiap-tiap kota Kabupaten dan dikota lain jang sederadjat pentingnja, sedapat mungkin didirikan selain K.P.U. matjam A, suatu Kursus Pengetahuan Umum (K.P.U.) matjam B, jang memberi peladjaran-peladjaran seperti dibawah ini :

- a). Sedjarah negara Kita.
- b). Tata Negara.
- c). Ekonomi.
- d). Ilmu Kesehatan P.P.P.K.
- e). Budi-pekerti (Ethica dan Burgerschapskunde).

P a s a l III.

Ditiap-tiap kota keresidenan dan dikota lain jang sederadjat pentingnja, sedapat mungkin didirikan Kursus Pengetahuan Umum matjam A, matjam B dan matjam C.

K.P.U. matjam C. itu bersifat Perguruan Tinggi Ra'jat, jaitu pemberian colleges tentang suatu ilmu pengetahuan dengan maksud supaya peladjar dapat kesimpulan memperdalam pengetahuannja tentang suatu vak dan memiliki buah kebudayaan manusia.

I. Untuk K.P.U. matjam A.

1. **Guru:** a). Serendah-rendahnja beridjazah orang² jang setingkat dengan mer
b). Mereka jang dapat dipandang pengetahuan ahli sesuai dengan m
ran K.P.U./A jang diadjarkannja
2. **Murid:** a). Orang² jang beridjazah S.R. atau
radjat, jang telah aktif bergera
tengah masjarakat.
b). Wang kursus bebas.

II. Untuk K.P.U. matjam B.

1. **Guru:** a). Serendah-rendahnja beridjazah H.
atau jang sederadjat dengan mere
b). Mereka jang dapat dianggap
pengetahuan ahli sesuai dengan m
ran K.P.U./B jang diadjarkannja
2. **Murid:** a). Orang² jang beridjazah S.M.U.P.
sederadjat dengan itu.
b). Beridjazah S.R. jang telah berum
dan dapat mengikuti.
c). Wang kursus f. 2,— sebulan.
d). Pengikut paling sedikit mengiku
mata peladjaran dan peladjaran I

III. Untuk K.P.U. matjam C.

1. **Guru :** para ahli tentang suatu vak atau ilmu
umum.
2. **Murid:** a) Orang² jang sungguh mempunja
hadap suatu ilmu pengetahuan d
rendahnja beridjazah S.M.U.P.,
sederadjat dengan itu.

peladjaran ditambah Ethica.

Pasal V.

ap mata peladjaran K.P.U. matjam A. diberikan dalam wak-
80 djam peladjaran á 45 menit.
ap mata peladjaran K.P.U. matjam B dan C diberikan dalam
buah causerie, masing² 45 menit dan 60 menit.

Pasal VI.

ak K.P.U. matjam A, B, dan C diadakan udjian penghabisan.
a mereka jang lulus, diberikan surat keterangan berisi
mata peladjaran jang diudjikan serta nilainja.

Pasal VII.

aja² untuk menjelenggarakan kursus² termaksud dalam
sal I, II dan III dari peraturan ini diberatkan atas Pos 10. 19
ri anggaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan
ebudajaan tahun 1951.

Kepada seorang guru jang memberi peladjaran pada suatu
K.P.U. matjam A., B., dan C diberikan honorarium bertu-
rut-turut menurut tingkatan ke IV, III dan II dari daftar
pemberian honorarium jang tersebut dalam peraturan
Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tg. 30
Nopember 1950 No.: 24778/C.

Untuk pimpinan peladjaran dan penjelenggaraan pada
suatu K.P.U. diberikan tundjangan pimpinan sebesar satu
bulan honorarium untuk 2 (dua) djam peladjaran dalam
seminggu, menurut tingkat jang sesuai dengan matjam
K.P.U. termaksud dalam pasal ini ajat 2 sub a.

Pasal VIII.

an-badan partikulir boleh mendirikan K.P.U. matjam A., B.
Kepada penjelenggara kursus-kursus itu dapat diberi soko-
leh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
sjarat-sjaratnja telah dipenuhi menurut Peraturan Kemen-
Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Djika ada alasan tjukup, Kepala Djawatan Pendidikan dapat menjimpang dari peraturan ini, sesudah mendapat setudjuan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

P a s a l X I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,

ttd;

Dr. BAHDER DJOHAN.

SALINAN : dari putusan ini dikirimkan kepada :

1. *Sekretariat Negara.*
 2. *Sekretariat Perdana Menteri.*
 3. *Semua Kementerian.*
 4. *Ketua Parlemen.*
 5. *Parlemen Seksi Pendidikan.*
 6. *Kantor Pembersihan Keuangan Negara.*
 7. *Semua Gubernur.*
 8. *Semua Inspeksi-inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi.*
 9. *Semua Residen.*
 10. *Pengurus Besar P.G.R.I.*
 11. *Djawatan Sosial bagian P.P.& K. Daerah Istimewa Jogjakarta.*
 12. *Semua Inspektur dalam lingkungan Kem. P.P.K. Kantor Pusat.*
 13. *Semua bagian Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.*
 14. *A n t a r a .*
 15. *Badan Pemeriksa Keuangan.*
 16. *Kantor Pusat Perbendaharaan.*
 17. *Kementerian Keuangan bagian Anggaran Negara.*
 18. *Kementerian Penerangan bagian Publiciteit.*
-

**Peraturan Kepala Djawatan Pendidikan
Masjarakat Kementerian P.P. dan K.R.I.**

Djakarta, 30 Desember 1950.

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT

Mengingat :

Surat putusan Menteri P.P. dan K. R.I. tg. 30 Desember 1950 No. 26000/Kab. pasal 9 tentang penjelenggaraan Kursus Pengetahuan Umum matjam A., B., dan C.

Menimbang :

Perlu menentukan suatu tjara penjelenggaraan Kursus Pengetahuan Umum.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan *Peraturan Penjelenggaraan Kursus Pengetahuan Umum* matjam A, B dan C sebagai berikut :

P a s a l I.

1. Kursus Pengetahuan Umum (K.P.U.) matjam A, B dan C termasuk dalam pasal 1,2, dan 3 dari putusan Menteri P.P. dan K. tg. 30 Desember 1950 no. 26000/Kab. didirikan dan diselenggarakan :
 - a) K.P.U. matjam A atas usul Panitia Pendidikan Masjarakat Ketjamatan dan ditetapkan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat Kabupaten.
 - b) K.P.U. matjam B atas usul Panitia Penjelenggara K.P.U.-B melalui Djawatan Pendidikan Masjarakat Kabupaten/Kota

kepada Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi
Pelajaran dilakukan oleh Inspeksi Pendidikan
Propinsi yang dapat diwakilkan kepada Inspek-
turan/Kotapradja.

2. Suatu K.P.U. matjam A dapat diselenggarakan
jumlah pengikutnja cukup besar banjaknja, dan
selama K.P.U. berdjalan tidak kurang daripada 25 o
3. Suatu K.P.U. matjam B dan C dapat diselenggarakan
 - a) Peladjaran dapat dilangsungkan terus dengan
colleges tentang paling sedikit 2 (dua) ilmu pen-
tambah peladjaran Budi-pekerti untuk B, dan E
C, sebagai mana termaktub dalam putusan Mente
tg. 30 Desember 1950 No. 26000/Kab. pasal 2, 3
ajat II dan III.
 - b) Jumlah murid yang sungguh² mengikuti tjuku
njaknja dan jumlah ini selama kursus berdjala
rang dari pada 20 orang murid.

P a s a l I I .

1. Semua K.P.U. matjam A, B dan C dimulai pada tgl.
dan diselesaikan pada achir bulan Desember tiap² ta
2. Tiap² mata peladjaran diberikan :
 - a) Pada K.P.U. matjam A, 2 (dua) kali dalam ser
45 menit untuk tiap² djam peladjaran.
 - b) Pada K.P.U. matjam B dan C 12 (duabelas) K
menit bagi B dan 60 menit bagi C untuk tiap²
djaran.

P a s a l I I I .

1. Guru² untuk suatu K.P.U. matjam A, B dan C dalam
dan 3 dari putusan Menteri P.P. dan K tg. 30 Des
No. 26000/Kab. diangkat dan diperhentikan berturu-
watan Pendidikan Masyarakat Pusat.

2. a) Guru² untuk suatu K.P.U. diangkat hingga Kursus berakhir (sesudah selesai udjian termaksud dalam pasal 6 putusan Menteri P.P. dan K tg. 30 Desember 1950 No. 26000/Kab.)
- b) Djika ia hendak mengundurkan diri sebelum kursus selesai, maka satu bulan sebelumnja ia diharuskan mengajukan permintaan berhenti kepada Djawatan-djawatan dan Inspeksi Pendidikan Masjarakat jang bersangkutan melalui Pemimpin kursus.
3. Untuk tiap² K.P.U. diangkat seorang pemimpin jang dapat memimpin dan menjelenggarakan suatu K.P.U. oleh :
 - a. Djawatan Pendidikan Masjarakat Kabupaten bagi K.P.U. matjam A.
 - b. Inspeksi Pendidikan Masjarakat Propinsi bagi K.P.U. matjam B, dan
 - c. Djawatan Pendidikan Masjarakat Pusat — bagi K.P.U. matjam C.

P a s a l I V.

1. Kepada seorang guru jang memberi peladjaran pada suatu K.P.U. matjam A,B, dan C diberikan honorarium berturut-turut menurut tingkat ke IV, III dan II dari daftar pemberian honorarium jang tersebut dalam Peraturan Menteri P.P. dan K. tg. 30 Desember 1950 No. 24778/C.
2. Untuk pimpinan peladjaran dan penjelenggaraan pada suatu K.P.U. diberikan tundjangan pimpinan sebesar satu bulan honorarium untuk 2 (dua) djam peladjaran dalam seminggu, menurut tingkat jang sesuai dengan matjam K.P.U. termaksud dalam fatsal ini ajat 1.

P a s a l V.

Pada suatu K.P.U. dapat ditempatkan oleh Djawatan/Inspeksi Pend. Masj. jang bersangkutan seorang djurutulis dan seorang pekerdja sebagai pelajan (pesuruh) dan kepada mereka diberikan tundjangan tiap-tiap bulannja :

- a. Bagi K.P.U.—C Djurutulis f. 50,— Pekerdja f. 30,—
- b. Bagi K.P.U.—B Djurutulis f. 50,— Pekerdja f. 30,—
- c. Bagi K.P.U.—A termasuk dalam Panitia Pendidikan Masjarakat. Beaja ini diberatkan atas mata anggaran (M.A) 10. 19. 1. 4 dari Kementterian P.P. dan K thn. 1951.

2. Honorarium/tundjangan kepada guru, pemimpin kur-
rutulis dan pekerdja suatu K.P.U. dibayar terus pad
a. kursus karena hal² lain untuk sementara ditut
b. guru, pemimpin kursus, djurutulis dan pekerdja
sangkutan tidak melakukan pekerdjaannya kare
sendiri atau sakit satu bulan berturut-turut (diku
surat keterangan dokter); dan sesudah waktu s
ini, honorarium (tundjangan) tidak diberikan lagi.

P a s a l VII.

Pembebasan uang kursus B dan C.

Seorang murid K.P.U. (B dan C) djika ternjata ia (orang
nja)tidak mampu, dapat dibebaskan dari pembayaran s
atau sebagian dari uang kursus jang telah ditetapkan. Pe
ini diberikan oleh Djawatan/Inspeksi Pendidikan Masja
bersangkutan atas usul dari pimpinan kursus.

P a s a l VIII.

Pengawasan atas K.P.U.—A dan B termaktub dalam fa
tusan Menteri P.P. dan K tgl. 30 Desember 1950 No. 2
dilakukan oleh Inspeksi Pend. Masj. Propinsi dan unt
matjam C Djawatan Pendidikan Masyarakat Pusat.

P a s a l IX.

Semua pengeluaran jang diperlukan untuk membeajai
dan penjelenggaraan K.P.U. Matjam A, B dan C diber
fatsal 7 Putusan Menteri P.P. dan K. tg. 30 Deser
No. 26000/Kab.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari

Kementerian P.P. dan K. Djaw. Pend. Masyarakat.

Kepala :

tttd : (*M. Sadarjoen Siswomartojo*).

Salinan dikirim dengan hormat kepada :-

1. Sekretariat Negara.
2. Sekretariat Perdana Menteri.
3. Semua Kementerian.
4. Ketua Parlemen.
5. Parlemen Seksi Pendidikan.
6. Kantor Pembersan Keuangan Negara.
7. Semua Semua Gubernur.
8. Semua Inspekti Pendidikan Masj. Prop.
9. Semua Residen.
10. Pengurus Besar P.G.R.I.
11. Djaw. Sosial Bag. PP&K D.I. Jogja.
12. Semua Inspektur Dalam Lingkungan Kem. P.P.K. Pusat dan Daerah.
17. Semua Bag. Kem. Pend., Peng., dan Kebudayaan.
14. A n t a r a.
15. Badan Pemeriksa Keuangan.
16. Kantor Pusat Perbendaharaan.
17. Kem. Keuangan Bag. Angg. Negara.
18. Kem. Pen. Bag. Publiciteit.
19. Semua Bupati.

MENTERI PENDIDIKAN PENGADJARAN DAN KEBUDHARUKAN

Menimbang :

Bahwa untuk kepentingan usaha Pendidikan Masyarakat dibentuk suatu badan yang ikut aktif dalam usaha² masyarakat ;

Mengingat :

Putusan Menteri P.P.K. No. 427/A Tgl. 24 Nop. 1949 mengikat pembentukan dan gerak daripada Panitia Masyarakat, perlu disempurnakan, berhubungan dengan usaha² Djawatan Pendidikan Masyarakat.

• M E M U T U S K A N :

1. Mentjabut Putusan Menteri P.P.K. No. 427/A tgl. 24 Nop. 1949
2. Menetapkan peraturan „Pembentukan Panitia Masyarakat“, baru sebagai berikut :

Fatsal I.

- a. Di-tiap² Ketjamatan (Kapanewon/Wilajah) dibentuk Panitia Pendidikan Masyarakat.
- b. Disamping K.P.U.-B dan K.P.U.-C dibentuk Panitia Pendidikan Masyarakat dan Panitia K.P.U.-C.
- c. Dalam Kota Ketjil dibentuk satu Panitia untuk K.P.U. dan untuk Kota-Besar paling banjak satu Panitia untuk 4 K.P.U. yang sedjenis.

Fatsal II.

Panitia menerima beaja administrasi dan uang peni- besarnja ditentukan oleh Kepala Djawatan Pendidikan dan diambilkan dari-mata anggaran 10.17.1.14. dan 1 tahun 1951.

as dan tjara bekerdja Panitia ditentukan dalam pedoman
s oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Fatsal V.

n-lain hal : berkenaan dengan Panitia jang belum tersebut
peraturan ini diatur oleh Kepala Djawatan Pendidikan
rakat.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudayaan.

itd ;

(Dr. Bahder Djohan).

SALINAN.

No. 10307/Sek/19/52.

**PUTUSAN Kepala Djawatan
Pendidikan Masyarakat Ke-
menterian P. P. dan K.
Republik Indonesia.**

DJAKARTA, 13 Desember 1952. —

**KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

- Mengingat :** pertumbuhan dan perkembangan semangat dan kegemaran berolahraga dikalangan rakyat ;
- Menimbang :** a. perlu diadakan latihan² olahraga dan diandjurkan pembuatan lapangan² olahraga, didaerah (daerah², ketjamatan² dan kabupaten²) untuk melajani pertumbuhan dan perkembangan tsb. ;
- b. dengan telah adanya tenaga² tehnik (Adjun Penilik Pendidikan Masyarakat Bag. Kepanduan, pembuatan lapangan² didaerah dapat diserahkan kepada pimpinan tenaga² tehnik tsb. ;
- Mengingat pula :** surat putusan Menteri P.P. dan K. No. 4223/Kab. tg. 15 Februari 1951 fatsal 7 ayat f dan fatsal 17 ayat f tentang tugas Bagian Olahraga Djawatan Pendidikan Marjarakat.

MEMUTUSKAN :

1. Mengadakan : a. latihan² kader keolahraagaan ;
b. membantu pembuatan lapangan² olahraga ;
c. menjelenggarakan pertandingan² olahraga sebagai dorongan dalam memelihara semangat dan kegemaran berolahraga ;
2. Menjerahkan penjelenggaraan tersebut sub l a, b, c, kepada Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi.
3. Memberi bantuan kepada Panitia² Pendidikan Masyarakat dan Organisasi keolahraagaan berupa : a. hadiah
b. alat-alat
c. uang.

aturan ini mulai berlaku pada 1 Djanuari 1953.

**Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat
Kementerian P.P. dan K.
ttd.**

(M. Sadarjoen Siswomartojo).

AN disampaikan kepada :

esaurie Negara Kementerian Keuangan di Djakarta.

wan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.

nua Kantor Pusat Perbendaharaan.

menterian P.P.K. (Sekretariat, Perbendaharaan 2 helai, Arsip).

nua Kepala Inspeksi Pend. Masj. Propinsi.

f s i p .

DJAKARTA, 16 Desem

**KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT KEM
PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJA**

Mengingat : 1. Surat putusan Menreri Pendidikan, Pengadjaran No. 4223/Kab. tanggal 15 Pebruari 1951 tentang tugas Bagian Pemuda Djawatan Pendidikan
2. Keputusan Konperensi Pemuda Antar Indonesia pada Programnja didalam Garis Besar — Program (b) tanggal 17 Agustus 1949, mengenai usaha pemuda diseluruh Indonesia.
3. Pertumbuhan dan perkembangan gerakan' pemuda

Membatja : Laporan Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat/Kotapradja tentang perkembangan gerakan' pemuda

Menimbang : 1. Perlu adanja saluran² yang dapat dipergunakan untuk membantu perkembangan gerakan' pemuda
2. Pentingnja penjelenggaraan saluran' yang ada di masjarakat untuk melaksanakan usaha² kemasjarakatan sedjahteraan bagi pemuda.

MEMUTUSKAN :

P a s a l I.

1. Membantu penjenggaraan berdirinja Panti Pemuda.
2. Mendjadikan Panti Pemuda sebagai :
 - a. tempat atau alat bagi pemuda dan gerakan 'pemuda untuk persaudaraan dikalangan pemuda dengan tudjuan kearah persatuan seluruh warga negara Indonesia.
 - b. suatu lembaga pendidikan untuk dan dari pemuda yang mungkin dan kesempatan kepada pemuda dan gerakan pemuda berbagai aliran didaerah untuk bersama-sama mengadakan

masjarakatan dan kesedjahteraanja yang bermanfaat bagi dunia pemuda dan masjarakat umumnja.

3. Menjerahkan penjelenggaraan tersebut diatas kepada Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat Kabupaten/Kotapradja.
4. Penetapan pemberian subsidi kepada Panti Pemuda dilakukan oleh Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Masjarakat Propinsi.

Pasal II.

Mengadakan latihan-latihan/kursus-kursus kader pemuda untuk pegawai Pendidikan Masjarakat Propinsi/Kabupaten/Kawedanaan dan peminat dari organisasi Pemuda guna memperbanjak tenaga² penjelenggara pekerjaan dalam lapangan ke-pemudaan.

Pasal III.

Memberikan bantuan kepada usaha-usaha kesedjahteraan pemuda dalam batas-batas tertentu.

Pasal IV.

Pedoman-pedoman dan sjarat-sjarat pemberian subsidi kepada Panti Pemuda dan usaha-usaha kemasjarakatan dari pemuda/gerakan pemuda diatur dalam ketentuan-ketentuan/keputusan-keputusan tersendiri.

Pasal V.

Biaja yang diperlukan untuk usaha-usaha tersebut dibebankan atas m. a. 10. 20. 1. 15. 31 dan 33. Anggaran Belandja Kementerian P.P. dan K. tahun 1953.

Pasal VI.

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Djanuari 1953.

Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat
Kementerian P.P. dan K.,

td.

(M. Sadarjoen Siswomartojo).

No. 7870/Kab.

**MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN
KEBUDAJAAN REPUBLIK
INDONESIA.**

Telah membuat : surat nota Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat 12-1952 No. 10696/Sek/24/52 yang mengusulkan peraturan tentang Perpustakaan Rakjat ;

Menimbang : bahwa mengingat perkembangan usaha¹ Djawatan Masyarakat dalam lapangan Perpustakaan Rakjat ;
mengadakan perubahan dalam peraturan tentang Perpustakaan Rakjat ;

Mengingat : 1. putusan Menteri P.P.K. - R.I. Jogjakarta tanggal 1950 nr. 8525/A ;
2. putusan Menteri P.P.K. tgl. 7-3-1951 nr. 5 ;
3. keputusan² dan kesimpulan³ konperensi Pendidikan Masyarakat seluruh Indonesia pada tanggal 9-1952 di Tugu (Bogor) ;

M E M U T U S K A N :

I. Mentjabut putusan Menteri P.P.K. R.I. Jogjakarta dahulu dengan nr. 8525/A

II. Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG PERPUSTAKAAN RAKJAT

Bah. I. Tentang nama.

Pasal 1.

Jang disebut Perpustakaan Rakjat dalam peraturan ini ialah untuk batjaan masyarakat umum, jang diurus oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat.

bertinggi dan memperluas achlak rakjat.

Bab III. Tentang djenis batjaan.

Pasal 3.

Perpustakaan Rakjat menjediakan batjaan' jang terbagi atas :
an tingkat A, jaitu guna mereka jang berpendidikan Sekolah Rakjat
dan sederadjat.

„ B, jaitu guna mereka jang berpendidikan Sekolah Menengah
Umum tingkat Atas (S.M.A.) dan sederadjat, serta sele-

an tingkat C, jaitu guna mereka jang berpendidikan Sekolah Menengah
Umum tingkat Atas (S.M.A.) dan sederadjat, serta sele-
bihnja.

Bab IV. Tentang penjelenggaraan.

Pasal 4.

Perpustakaan Rakjat diadakan di-ibu kota Propinsi/Kabupaten/Ketjamatan
kota²/tempat² lain, dimana dipandang perlu oleh Kepala Djawatan
an Masjarakat menurut petunjuk² jang diadakan olehnja.

Pasal 5.

Djenis batjaan pada sesuatu Perpustakaan Rakjat ditetapkan oleh Kepala
a Pendidikan Masjarakat sesuai dengan taraf pengetahuan pembatja-
setempat dengan menggunakan sebagai pedoman, bahwa pada umum-

di-kota Propinsi atau di-kota² besar diadakan Perpustakaan Rakjat jang
tjaan tingkat C, B dan A ;

di-kota Kabupaten dan kota' jang sederadjat, Perpustakaan Rakjat jang
tjaan tingkat B dan A ;

di-kota Ketjamatan, Perpustakaan Rakjat jang tingkat A.

Suatu perpustakaan dapat diisi dengan batjaan lebih dari satu tingkat.

Pasal 6.

Penjelenggaraan perpustakaan' Rakjat diatur lebih landjut oleh Ke-
watan Pendidikan Masjarakat dengan pedoman, bahwa urusan pemin-
itab dan batjaan² lainnja untuk batjaan tingkat A dan B pada umumnja
dikukukan oleh pegawai tersendiri, melainkan oleh pegawai jang merang-

Pasal 7.

(1). Perlengkapan batjaan untuk Perpustakaan Rakjat diperoleh dengan :

- a. membeli,
- b. menerbitkan sendiri,
- c. menerima dari pihak lain.

(2) Perlengkapan batjaan maupun perlengkapan kantor untuk Perpustakaan Rakjat diatur oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat, menurut peraturan yang berlaku.

Bab V. Tentang keuangan.

Pasal 8.

- (1). Pada azasnja Perpustakaan Rakjat memungut pembayaran dari pada pembatja menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat.
- (2). Penerimaan uang batjaan yang dimaksud diatas disetor di Kas Negeri menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat.
- (3). Segala pengeluaran untuk biaya Perpustakaan Rakjat dibebankan pada anggaran belandja Kementerian P.P. dan K. pada mata anggaran yang ditetapkan untuk itu.

Bab VI. Tentang hal bantuan.

Pasal 9.

Kepada Perpustakaan Rakjat usaha masyarakat sendiri, yang sesuai dengan yang diselenggarakan oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat dapat diberikan bantuan menurut sjarat yang ditetapkan untuk itu.

Bab VII. Tentang penetapan isi dan pengawasan Perpustakaan Rakjat.

Pasal 10.

- (1) Pemeriksaan, pemilihan dan penetapan tingkat kitab dan batjaan² lainnja untuk Perpustakaan Rakjat djurus dan diatur oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Untuk masing² djenis tingkat batjaan oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat ditetapkan daftar kitab² dan batjaan² lainnja sebagai ichtisar pokok.

Pasal 11.

- (1) Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten/Kota mengawasi Perpustakaan-perpustakaan Rakjat dalam daerahnja masing² yang berbatjaan tingkat A serta Perpustakaan² Partikelir yang mendapat bantuan Djawatan Pendidikan Masyarakat.
- (2) Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi/Daerah Istimewa Jogjakarta/Kota Pradja Djakarta-Raya mengawasi Perpustakaan² Rakjat didalam daerahnja masing², termasuk Perpustakaan Rakjat partikelir yang mendapat bantuan dari Djawatan Pendidikan Masyarakat.

Penutup.
Pasal 12.

Dalam hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini Menteri P.P. dan K. dapat mengambil ketentuan.

**Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan,
A.n. Beliau :
Sekretaris Jenderal,
ttd. Mr. HADI.**

SALINAN untuk :

- 1. Direktur Kabinet Presiden.**
- 2. Sekretariat Wakil Presiden.**
- 3. Perdana Menteri.**
- 4. Dewan Menteri.**
- 5. Menteri Dalam Negeri.**
- 6. Thesauri Negara.**
- 7. Dewan Pengawas Keuangan Negara.**
- 8. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.**
- 9. Semua Gubernur.**
- 10. Wali Kota Djakarta Raya.**
- 11. Semua Bupati/Wali Kota.**
- 12. Semua Kantor Perbendaharaan Negara.**
- 13. Semua Djawatan, Organisasi dan Bagian Pusat Kem. P.P. & K.**
- 14. Semua Inspeksi Pend. Masyarakat.**
- 15. Kementerian Dalam Negeri Bg. Otonomi dan Desentralisasi.**

SALINAN

No. : 17907/Kab.

PUTUSAN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Djakarta, 29 April 1954.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

MINGINGAT : 1. U.U. No. 22 tahun 1948, jang pelaksanaannja memerlukan persiapan kader pembangunan masjarakat jang mengenal penghidupan kemasjarakatan, perekonomian dan ketatanegaraan ;

2. Bahwa kurang adanja kader pembangun masjarakat didesa-desa dan kader ahli dalam pelbagai tingkatan daerah, sangat menjukarkan penerimaan maksud Pemerintah oleh masjarakat ;

MENIMBANG : 1. Tetap perlu adanja Kursus Pengetahuan Umum dengan tudjuan mendidik kader pembangun masjarakat dalam ketiga tingkat daerah otonomi, jang memiliki diwa berotonomi dan jang usahanja ditudjukan kearah pembentukan masjarakat jang sanggup hidup berotonomi ;

2. Perlu menjesuaikan isi dan bentuk Kursus Pengetahuan Umum dengan pertumbuhan masjarakat ;

3. Bahwa isi putusan Menteri P.P. dan K.

a. No. 7364/A, tanggal 14 Agustus 1950,

b. No. 26000/Kah tanggal 30 Desember 1950, termasuk perubahannja dengan putusan No. 10919/Kab. tanggal 26 Maret 1952, tidak selaras lagi dengan taraf perkembangan masjarakat.

MEMUTUSKAN :

1. Mentjabut putusan Menteri P.P. dan K. :

a. No. 7364/A, tanggal 14 Agustus 1950,

b. N. 26000/Kab. tanggal 30 Desember 1950, termasuk perubahannja dengan putusan No. 10919/Kab. tanggal 26 Maret 1952,

2. Menetapkan peraturan sebagai berikut :

- a. Ditiap-tiap Ibu Kota Ketjamatan dan ditempat jang sederadjat pentingnja didirikan suatu Kursus Pengetahuan Umum matjam A (K. P.U./A) ;
- b. Ditiap-tiap Ibu Kota Kabupaten dan dikota lain jang sederadjat pentingnja dapat didirikan selain K.P.U./A suatu K.P.U. matjam B (K.P.U./B) ;
- c. Ditiap-tiap Ibu Kota Propinsi dan dikota lain jang sederadjat pentingnja dapat didirikan selain K.P.U./A dan K.P.U./B suatu K. P.U. matjam C (K.P.U./C) ;
- d. Untuk mendjamain adanja bimbingan dan pengawasan terhadap K.P.U./C diseluruh Indonesia diadakan suatu Dewan Kurator Pusat, jang ditetapkan oleh Menteri P.P. dan K. atas usul Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat.
Peraturan khusus mengenai Dewan Kurator ini ditetapkan tersendiri.

Ketentuan tentang peladjaran.

Susunan mata-mata peladjaran adalah seperti berikut :

I. a. Untuk K.P.U./A antara lain :

- (1)
 1. Budi Pekerti.
 2. Susunan Pemerintahap.
 3. Sedjarah Kebangsaan.
 4. Perekonomian.
 5. Kesehatan.
 6. Bahasa Indonesia Praktis.
 7. Pendidikan praktis, antara lain :
Pertanian, perikanan, peternakan, kerdjatangan, pertukangan, urusan rumah-tangga, memegang buku, hiltung dagang.
- (2) Mata-mata peladjaran No. 1 sampai dengan No. 6 tsb. diatas diberikan masing² sekali seminggu satu djam pelajaran á 45 menit (\pm 40 djam peladjaran setahun).
Pendidikan praktis No. 7 tsb. diatas diberikan dalam 3 djam peladjaran á 45 menit tiap² minggu (\pm 120 djam peladjaran setahun).
- (3) Dalam menjelenggarakan mata-mata peladjaran tsb. diatas diadakan kerdja sama dengan Djawatan² Kementirian² jang lain.

Tiap-tiap mata pelajaran diberikan dalam waktu pelajaran á 45 menit (\pm 80 djam pelajaran).
Tiap-tiap pelajaran harus mengikuti pelajaran yang tercantum dalam No. 4.
Mata pelajaran No. 5 sampai dengan No. 7 tetap.

c. Untuk K.P.U./C antar lain :

1. Ethica.
2. Ilmu Hukum.
3. Ekonomi.
4. Sociologie.

Susunan mata pelajaran K.P.U./C selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan setempat dengan memperhatikan Dewan Kurator.

Tiap-tiap-mata pelajaran diberikan dalam waktu pelajaran á 45 menit setiap minggu .

Lama kursus 12 bulan termasuk liburan* S.M.

Tiap-tiap pelajaran diharuskan mengambil Esensial mata pelajaran yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Masyarakat sesudah mendengar Dewan Kurator.

II. Khusus untuk K.P.U. wanita, pelajaran² tsb. disesuaikan dengan keperluan wanita.

III. Perubahan² dalam susunan mata-mata pelajaran diserahkan kepada Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

IV. Waktu pembukaan dan penutupan untuk tiap-tiap pelajaran oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan.

Pasal 4. Syarat penerimaan.

a. Bagi K.P.U./A

telah berumur 18 tahun, dan tamat S.R. atau dianggap sebagai Guru dapat mengikuti pelajaran, karena kedua-duanya dari masyarakat.

b. Bagi K.P.U./B :

1. Beridjazah S.M.P. atau yang sederajat dengan S.M.P.
2. Beridjazah S.R. dan telah berumur 25 tahun dan telah mendapat kedudukan dan telah aktif dalam masyarakat.

- a. Bagi K.P.U./A dipungut uang kursus Rp. 1,— sebulan tiap² murid.
- b. Bagi K.P.U./B dipungut Rp. 5,— sebulan tiap² murid.
- c. Bagi K.P.U./C dipungut Rp. 7,50 sebulan tiap² murid.

Tenaga pengadjar.

- a. Tenaga pengadjar adalah mereka jang mempunyai pengetahuan atau keahlian, sesuai dengan mata pelajaran jang diberikan.
- b. Para pengadjar diangkat dan diberikan oleh :
 1. bagi K.P.U./A oleh Kepala Inspeksi Pendidikan Masjarakat Kabupaten/Kotapradja ;
 2. bagi K.P.U./B oleh Kepala Inspeksi Pendidikan Mjasjarakat Propinsi/Kotapradja Djakarta Raya;
 3. bagi K.P.U./C oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Honorarium pengadjar.

- a. Kepala Ketua Dewan Guru dan Guru pada K.P.U. matjam A, B, dan C. diberikan honorarium berturut-turut menurut tingkatan IV, III dan II dari daftar pemberian honorarium jang tersebut No. 20126/C.
- b. Untuk pimpinan pelajaran dan penjelenggaraan pada suatu K.P. U. (Ketua Dewan Guru) diberikan tundjungan pimpinan menurut tingkatan termaksud dalam pasal ini sub a, tiap² bulan bagi K.P. U./A, B dan C sebesar satu bulan honorarium untuk 2 djam pelajaran dalam seminggu.

Biaya penjelenggaraan :

Biaya penjelenggaraan untuk Kursus Pengetahuan Umum diberatkan atas pos 10.19. dari anggaran Kementerian P.P. dan K. tahun 1953 dan untuk selandjutnja atas anggaran jang bersangkutan, sampai penjelenggaraan tsb. diserahkan kepada Daerah Otonoom.

Uang sekongan :

Badan² partikelir boleh mendirikan K.P.U. matjam A, B dan C. Kepada penjelenggara Kursus² itu dapat diberi sokongan oleh Kementerian P.P. dan K., djika sjarat telah dipenuhi menurut peraturan Kementerian P.P. dan K. ; pemberian sokongan ini dilakukan oleh Kementerian P.P. dan K.

Pengawasan dan penjelenggaraan :

- a. Dengan mengingat ketentuan dalam ajat b pasal ini, pengawasan dan penjelenggaraan seluruh usaha kursus² jang dimaksud dalam peraturan ini ada ditangan Kementerian P.P. dan K. dan didjalankan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat.

- b. Bilamana penjelenggaraan Kursus² Pengetahuan Umum telah diserahkan kepada Daerah Otonoom, maka peraturan ini dilakukan mutatis mutandiso sesuai dengan peraturan tentang penjerahan itu.

Pasal 11. Ujian dan Idjazah :

- a. Untuk K.P.U./A, B dan C diadakan ujian penghabisan.
- b. Kepada mereka yang lulus diberikan idjazah dengan lampiran berisi mata pelajaran yang diudjikan serta nilainya..
- c. Bentuk dan bunji idjazah K.P.U. ditetapkan oleh Kementerian P. dan K.

Pasal 12. Penempuh ujian :

Tiap² pengikut K.P.U., bai kjang diselengrakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh Badan Partikelir, yang rentjananja selaras dengan rentjana pelajaran pada K.P.U. Negeri, diberi kesempatan untuk menempuh ujian penghabisan K.P.U., yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 13. Panitia ujian :

- a. Ujian penghabisan K.P.U. diselenggarakan oleh sebuah panitia Ujian Penghabisan K.P.U.
- b. Panitia Ujian diangkat oleh :
 - 1. Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kabupaten/Kotapradja untuk K.P.U./A.
 - 2. Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Propinsi/Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kotapradja Djakarta Raya untuk K. P.U./B dan C.
- c. Kepada Panitia Ujian penghabisan K.P.U. diberikan tundingan ujian yang besarnya ditentukan oleh Kementerian P. dan K., menurut peraturan yang berlaku :
 - 1. Untuk ujian penghabisan Sekolah Landjutan tingkat Pertama, bagi K.P.U./A ;
 - 2. Untuk ujian penghabisan Sekolah Landjutan tingkat atas, bagi K.P.U./B ;
 - 3. Untuk ujian mentjapai Idjazah A Guru Sekolah Landjutan tingkat pertama bagi K.P.U./C.
- d. Biaya Ujian Penghabisan K.P.U. diberatkan atas Pos 10.19. dari Anggaran Belandja Kementerian P.P. dan K. tahun 1953 dan selanjutnja atas mata anggaran yang bersangkutan, sampai kepada saat penjelenggaraan ini diserahkan kepada Daerah Otonoom.

Pasal 14. Penjelenggaraan teknis :

Ketentuan¹ tentang penjelenggaraan teknis, termasuk ujian penghabisan K.P.U., yang belum termuat dalam peraturan ini, dibuat oleh Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 15. Penjimpangan :

Dalam hal² yang perlu Kepala Djawatan Pendidikan Masyarakat dapat mendjalankan tindakan² yang sesua dengan pertumbuhan¹ dalam masyarakat.

Pasal 16. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1954.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

A.n. Menteri

Sekretaris Djenderal,

ttd. M. HUTASOIT.

SALINAN dari putusan ini dikirimkan kepada :

- 1. Direktur Kab. Presiden.**
- 2. Sekretariat Wakil Presiden.**
- 3. „ Perdana Menteri.**
- 4. „ Dewan Menteri.**
- 5. Semua Kementerian.**
- 6. Thesaurie Negara.**
- 7. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.**
- 8. Sekretariat dan Seksi E D.P.R. Pusat.**
- 9. Semua Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta Raya.**
- 10. Semua Bupati dan Wali Kota.**
- 11. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.**
- 12. Kantor Djawatan Perdjalan Pusat dan semua Tjabang-tjabangnja.**
- 13. Semua Djawatan Organisasi dan Bag. Pusat Kementerian P.P. & K.**
- 14. Semua Inspeksi Pengajaran Pusat dan Daerah (Prop., Kab., Kotabesar).**
- 15. Semua Inspeksi Pendidikan Masyarakat Daerah (Prop., Kab., Kotabesar).**
- 16. Semua Kursus² Dinas Pendidikan Masyarakat (K.P.P.M. Jogja, K.P.P.M./K.P.K. Bandung Kursus Pemb. P.M. Makasar dan Medan).**
- 17. Pengurus Besar P.G.R.I.**
- 18. Djawatan P.P.K. Daerah Istimewa Jogjakarta.**
- 19. Kementerian Keuangan Bag. Anggaran Negara.**
- 20. Kementerian Penerangan Bag. Publisitet.**
- 21. Antara.**
- 22. Semua Bg. dan Seksi Djawatan Pendidikan Masyarakat.**

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Masyarakat umumnja, ter-
rantasan Buta-Huruf, baik dalam organisasi
dalam isinja harus membimbing masyarakat ke
sendiri (auto-activiteit) dan pertjaja atas kekua
- b. bahwa kewadajiban Pemerintah adalah memb-
dorongan dan tjontoh-tjontoh.

Mengingat :

bahwa putusan Menteri Pendidikan, Pengadja-
dajaan tgl. 27 Nopember 1947 No. 6755/C per-
dengan maksud diatas :

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut putusan tanggal 27 Nopember 1
tsb. diatas dan peraturan² lain jang bersangkutan
menetapkan peraturan sbb. :

Peraturan tentang Pemberantasan Buta-H

F a t s a l I.

Pemberantasan Buta Huruf bermaksud membe-
mambatja dan menulis huruf latin kepada orang-
Indonesia jang buta huruf, tidak bersekolah dan b
13 tahun, sebagai alat untuk mempertinggi deradja
dan memudahkan djalannja pendidikan masjaraka

F a t s a l II.

Usaha Pemberantasan Buta Huruf ini adalah kew-
rakat sendiri dengan pimpinan dari Kementeria
Pengadjaran dan Kebudayaan dalam melaksanakan

P.P. dan K. bekerdja bersama-sama dengan Kementerian² lain, terutama jang berusaha dalam lapangan pembangunan masjarakat.

Fatsal III.

Mengingat kewadjiban tenaga² masjarakat dalam lapangan pekerdjaannja, maka pemberantasan buta huruf berturut-turut diselenggarakan menurut tingkatan berikut. :

- a. memberantas buta-huruf dikalangan pamong desa.
- a 2. " " " " pekerdja² dalam perusahaan².
- a 3. " " " " pekerdja² dalam djawatan².
- b. " " " " pemuda umur 13 thn. sampai 18 thn.
- c. " " " " Rakjat umumnja jang berumur 18 thn. keatas.

Fatsal IV.

Kewadjiban Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dilakukan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Fatsal V.

Dipropinsi diadakan suatu Inspeksi Pendidikan Masjarakat Daerah jang menempatkan tenaga²-nja dikota-kota lain sesudah mendapat persetudjuan dari Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Fatsal VI.

Terlaksananja P.B.H. diserahkan kepada Djawatan Pendidikan Masjarakat Kabupaten, jang bekerdja rapat dengan Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Kabupaten.

Fatsal VII.

Dengan pegawai² Pendidikan Masjarakat Pusat dan daerah Djawatan Pendidikan Masjarakat Kabupaten berkewadjiban :

- 1. membangkitkan kehendak masjarakat untuk aktif berusaha dalam lapangan P.B.H.

8. mengadakan perhubungan dengan semua instansi

F a t s a l V I I I .

untuk melantjarkan usaha P.B.H.

Pegawai Kabupaten sebagian ditempatkan diibu kota atau di kota lain untuk memimpin usaha P.B.H. dalam atau sekitar kota itu.

F a t s a l I X .

Dengan adanja bekerdja bersama-sama dengan pe diusahakan supaja sekolah² rakjat di Ketjamatan dapat mendjadi Pusat Pendidikan pada umumnya dengan Kepala Sekolah dibantu oleh para guru.

F a t s a l X .

Guru² dengan diketuai oleh Kepala Sekolah, ditar tenaga lain dalam Ketjamatan (Kapanewon), diangl Panitia Pendidikan Masjarakat untuk daerahnja ma

F a t s a l X I .

Dalam tiap² Ketjamatan (Kapanewon) didirikan be kursus PBH dan sebuah kursus landjutan, sebaga usaha desa.

F a t s a l X I I .

Untuk kursus² tersebut dalam fatsal XI desa, jang be mengusahakan diberinja Subsidi oleh Pemerintah, j ditentukan dalam peraturan lain.

Fatsal XIII.

Semua kursus P.B.H. dan kursus Landjutan, termasuk jang tersebut dalam fatsal XI atau jang diusahakan oleh badan² atau perseorangan diawasi dan dipimpin oleh pegawai Pendidikan Masjarakat dan Panitya tersebut dalam fatsal X.

Fatsal XIV.

Kursus-kursus P.B.H. dalam perusahaan, Djawatan² dan rumah Pendjara langsung dibawah pengawasan pegawai Pendidikan Masjarakat.

Fatsal XV.

Segala usaha Pendidikan Masjarakat dilingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, diawasi dan dipimpin oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat dengan bekerdja rapat dengan Djawatan Inspeksi jang bersangkutan.

Fatsal XVI.

Fatsal² dimana ditulis P.B.H. berlaku pula untuk kursus-kursus Landjutan PBH jang ada dan sebagai pedoman djuga untuk usaha Pendidikan Masjarakat lainnja, ketjuali C.P.U., jang mempunjai peraturan sendiri.

Fatsal XVII.

Segala hal mengenai Pendidikan Masjarakat dilingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang tidak atau belum termasuk peraturan ini, diputuskan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
A.n. beliau,
Secretaris Djenderal

ttd.

(Mr. HADI).

**PUTUSAN : Menteri Pendidikan, Peng-
adjaran dan Kebudayaan.**

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN

Memperhatikan :

1. Putusan Pemerintah Republik Indonesia tentang pembu-
baran Kementerian Pembangunan dan Pemuda tgl. 19 Djuli
1949 No. 2;
2. Putusan Kementerian Pembangunan dan Pemuda pada
waktu bubarnya tertanggal 15-7-1949 No. 122/P/49 dengan
daftar lampirannya.

Menimbang :

1. bahwa kewadajiban urusan Pemuda tersebut seterusnya akan
lebih berfaedah untuk negara dalam lingkungan Kemen-
terian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan
dasar paedagogisch-psychologisch.
2. bahwa urusan pemuda tersebut mempunyai kewadajiban jang
concordant dengan tugas kewadajiban Djawatan Pendidikan
Masjarakat dari Kementerian Pendidikan, Pengadjaran
dan Kebudayaan.

Mengingat :

bahwa seksi² daripada Urusan Pemuda tugasnja lebih banyak
mendekati tugas kewadajiban Djawatan/atau Bahagian Kemen-
terian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Pusat jang
lain daripada Djawatan Pendidikan Masjarakat.

MEMUTUSKAN :

a) Pertama :

Urusan Pemuda dibangun sebagai bahagian daripada Djawatan
Pendidikan Masjarakat, jang tugasnja terutama menghubung-
kan dan membantu gerak usaha Djawatan Pendidikan
Masjarakat dengan masjarakat khusus jang mengenai Dunia
Gerakan Pemuda pada umumnja dengan dasar dan sifat
paedagogisch-psychologisch dan sociaal — constructief.

b) *Kedua :*

- a. Seksi Luar Negeri digabungkan dengan bagian Hubungan Luar Negeri pada Biro Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
- b. Seksi Publiciteit digabungkan dengan seksi Penerangan Bagian Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
- c. PORI/KORI dimasukkan dalam Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani Djawatan Inspeksi Sekolah².
- d. Seksi Masyarakat disesuaikan dengan penjelenggaraan pekerjaan Djawatan Pendidikan Masyarakat.

c) *Ketiga :*

Putusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Nopember 1949.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan

ttd.

S. MANGUNSARKORO.

Salinan ini dikirim kepada :

1. Secretariat Negara.
2. Secretariat Perdana Menteri.
3. Semua Kementerian.
4. Badan Pekeraja K.N.I. Pusat.
6. Semua Kantor Pendidikan Karesidenan.
7. Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.
8. Djawatan Sosial Bhg. Pendidikan Daerah Istimewa Jogjakarta.
9. Semua Inspektur, Pusat dan Daerah.
10. Semua bagian Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
11. Pengurus Besar P. G. R. I.
12. Kantor Berita „Antara”.
13. Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia.
14. Sekretariat Pemuda.
15. Keuangan Bagian Anggaran Negara.

„Salinan”.

**PUTUSAN KEPALA DJAWATAN
PENDIDIKAN MASJARAKAT.**

Jogjakarta, 7 Djanuari 1950

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN MASJARAKAT.

Mengingat :

Putusan Menteri P.P.K. No. 423/A tg. 24 Nop. 1949 dan
No. 424/A tg. 24 Nop. 1949

Jang diantara lain menentukan bahwa :

„Urusan Pemuda pada Djawatan Pendidikan Masjarakat
bertugas terutama menghubungkan dan membantu gerak
usaha Djawatan Pendidikan Masjarakat dengan Masjarakat,
chusus jang mengenai Gerakan Pemuda pada umumnja
dengan dasar dan sifat paedagogisch-psychologisch dan
social-constructief.”

Menimbang :

Bahwa tugas tersebut perlu diperintji selengkapnja ;

**MEMUTUSKAN :
KEWADJIBAN URUSAN PEMUDA**

sebagai berikut :

I. Terhadap Pemuda umumnja :

1. Memberikan bimbingan tertulis dengan djalan menerbitkan madjallah, tulisan² dalam surat kabar dan brosur² sebagai tuntunan berorganisasi dan mengenai masaalah Pemuda pada umumnja.
2. Mengadakan contact dengan organisasi Pemuda, baik jang bersifat sosial, politik atau ke-olahragaan dan menjampai-kan pelaporan kepada Pemerintah, supaya dapat diikuti gerak Pemuda dalam lapangan masing-masing.

II. Terhadap Pemuda jang berorganisasi :

Memberikan bantuan moreel (petundjuk²) dan materieel dalam usaha² mereka, asal usaha² itu dapat dimasukkan dalam batas² kewadjiban Djawatan Pendidikan Masjarakat.

- pelopor pendidikan masjarakat dalam tiap² desa (tani).
4. Mengadjak Pemuda² mendjalankan pekerdjaan membantu para petani dan memberi tjontoh dalam tiap² usaha membangun masjarakat desa.
5. Mengorganiseer bantuan Pemuda jang akan disumbangkan untuk pekerdjaan Pendidikan Masjarakat.

Kepala
Djawatan Pendidikan Masjarakat
(S. Brodjonegoro).

usan dikirim kepada :
gian Urusan Pemuda.
I. Menteri Pendidikan.

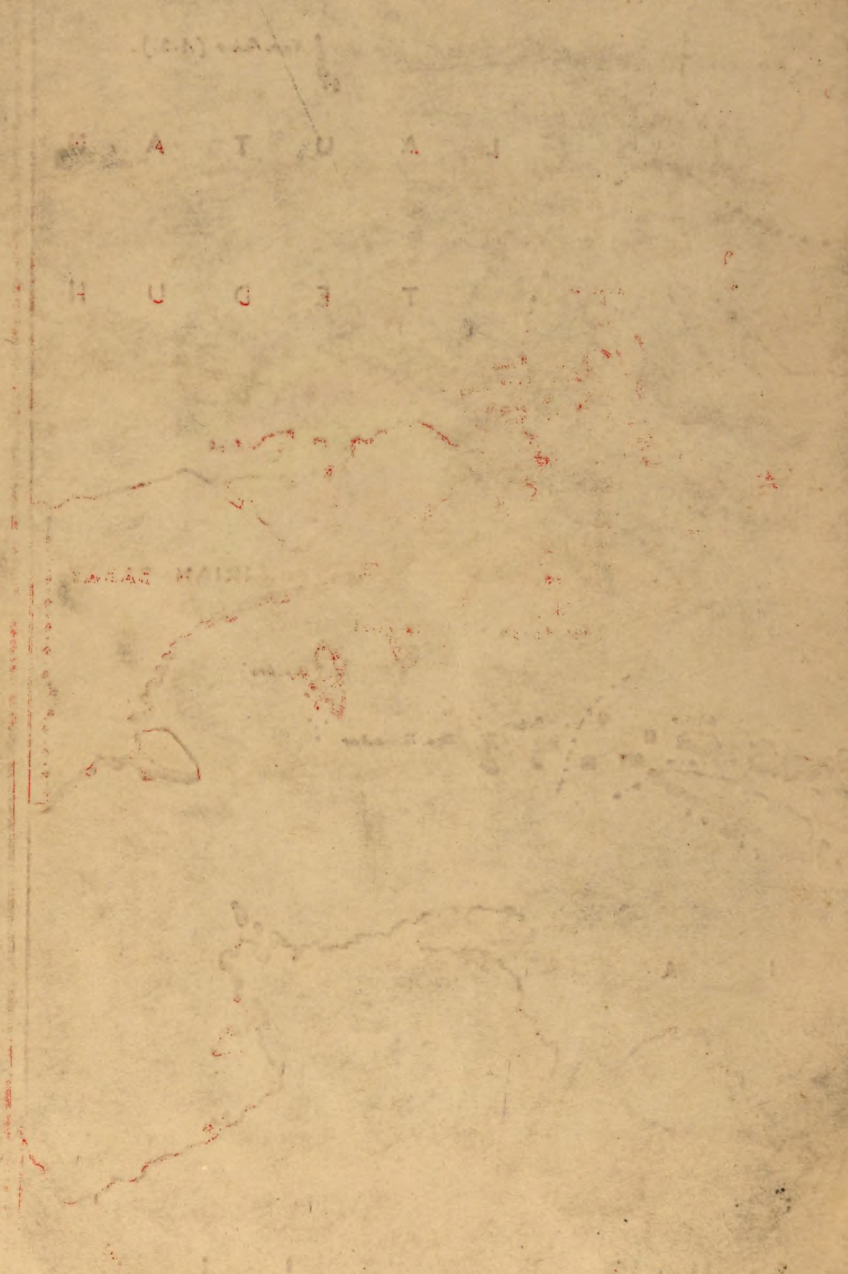
on the date to which renewed.
Renewed books are subject to immediate recall.

Renewals: Tel. No. 642-3095

LD 21-40m-2,'69
(J6057s10)476—A-32

University of California
General Library
Berkeley





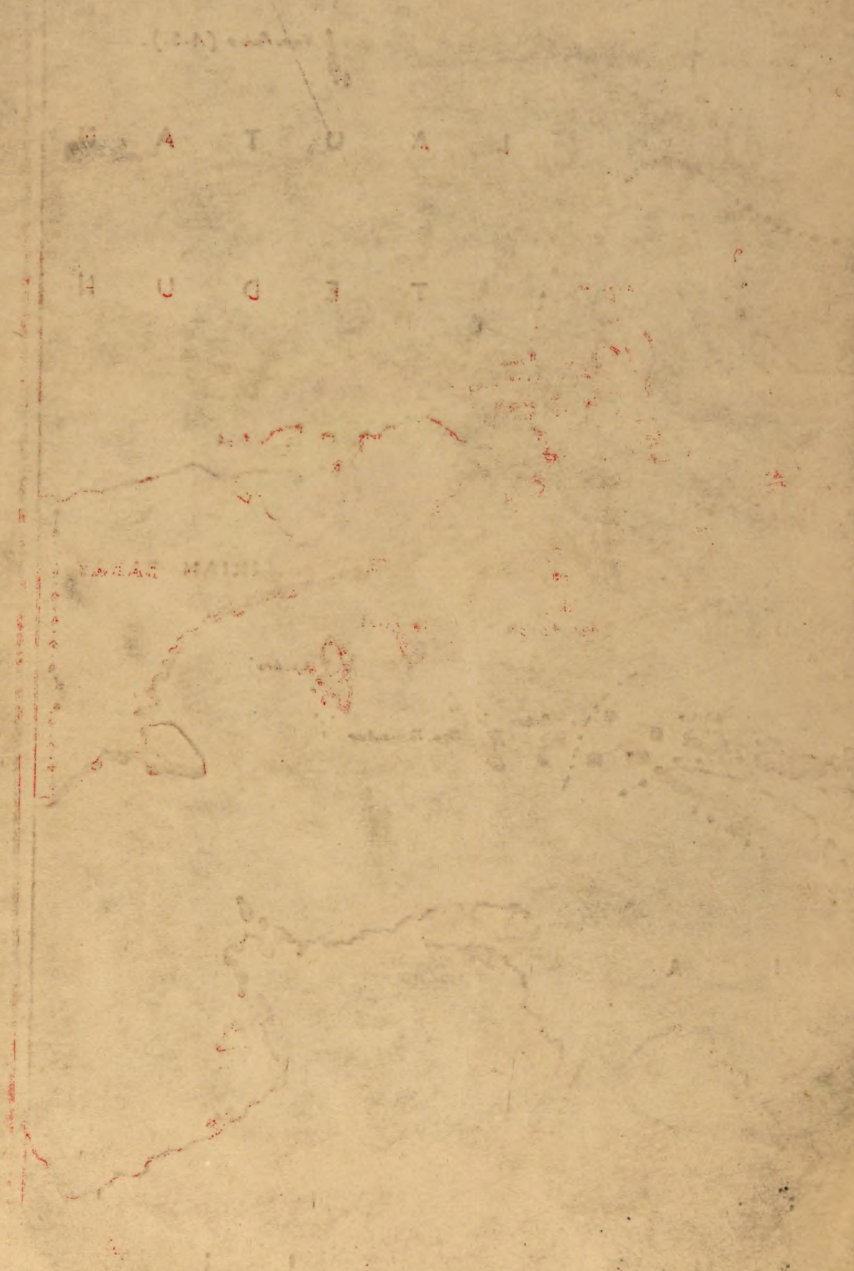
ENDANG DJAKARTA



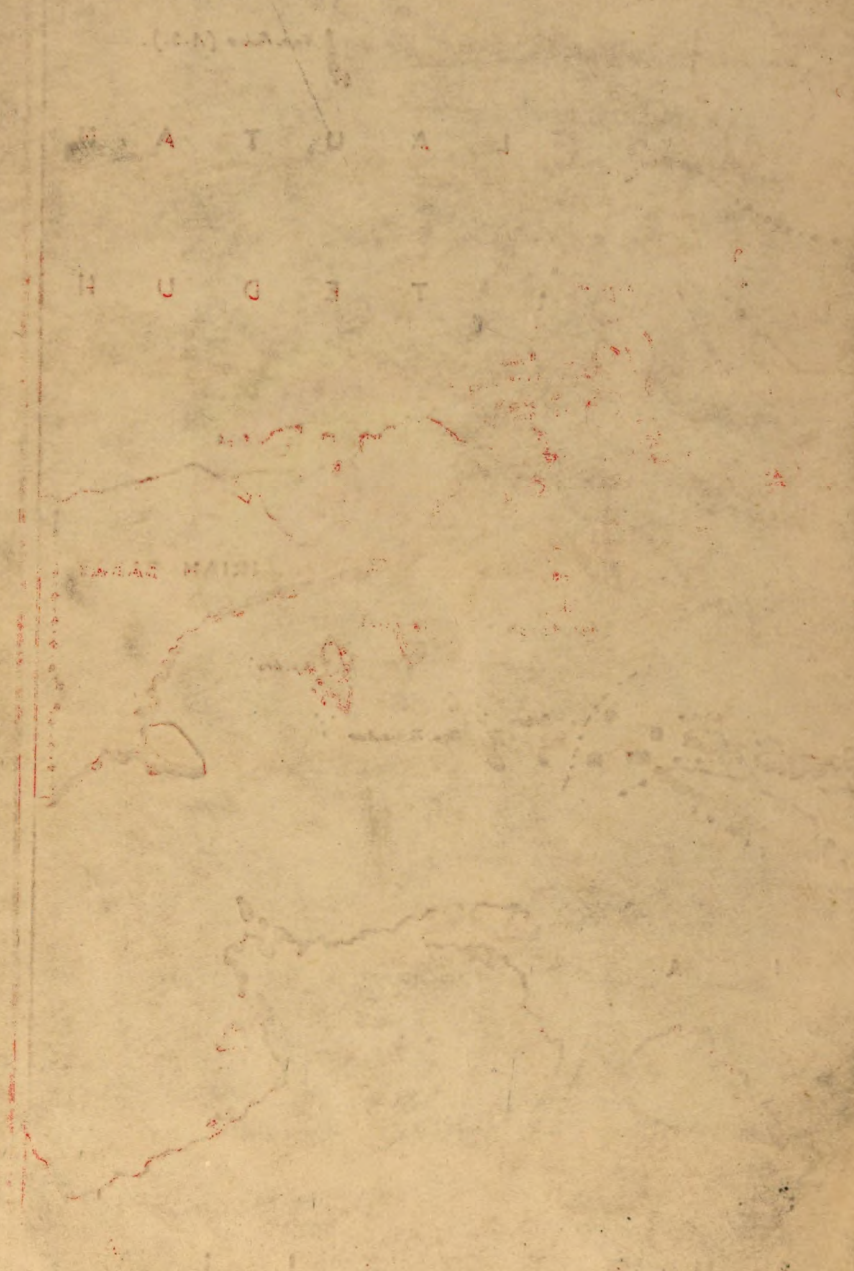
ENDANG DJAKARTA



ENDANG DJAKARTA



ENDANG DJAKARTA



ENDANG DJAKARTA



ENDANG DJAKARTA